QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

3 Undang-Undang . . .

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan pembangunan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
10. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) terhitung Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disusun setiap tahun sebagai implementasi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.
15. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi Renstra SKPK.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Aceh Barat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
RPJM KABUPATEN

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sesuai masa jabatan Bupati/Wakil Bupati terpilih yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2017.

(2) RPJM Kabupaten menjadi pedoman dan landasan pembangunan selama 5 (lima) tahun bagi pemerintah kabupaten.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Barat;
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan serta Kerangka Pendanaan;
BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat;
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
Bab X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; dan
Bab XI : Penutup.

Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

a. pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2012-2017; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
(2) Bupati/Wakil Bupati dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah ditetapkan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENYUSUNAN RENSTRA SKPK

Pasal 8

(1) SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda dalam hal penyusunan Renstra SKPK.
(2) Kepala Bappeda dapat melakukan pemantauan terhadap capaian sasaran RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra SKPK sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum

Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2013 M
8 Ramadhan 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Juli 2013 M
13 Ramadhan 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD, KUA-PPAS yang bermuara penyusunan RAPBD Kabupaten Aceh Barat.

Demikian, diharapkan semoga RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 ini dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh stakeholders sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Meulaboh, Juli 2013

BUPATI ACEH BARAT

H. T. ALAIDINSYAH

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4. Sistematika Penulisan I-7
1.5. Maksud dan Tujuan..... I-8
1.5.1. Maksud..... I-8
1.5.2. Tujuan..... I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi..... II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis II-2
2.1.1.3 Topografi II-2
2.1.1.4 Geologi..... II-3
` 2.1.1.5 Hidrologi II-4
2.1.1.6 Klimatologi II-5
2.1.1.7 Penggunaan Lahan..... II-6
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-7
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-8
2.1.4. Demografi..... II-9

2.1.4.1 Jumlah Penduduk…….. II-9
2.1.4.2 Komposisi Penduduk……... II-9
2.1.4.3 Struktur Usia..... II-10
2.1.4.4 Jenis Pekerjaan..... II-11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-12
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-12
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB..... II-12
2.2.1.2 Laju Inflasi..... II-18
2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita..... II-19
2.2.1.4 Indeks Gini (Ketimpang Pendapatan) II-20
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ……..... II-22
2.2.2.1 Pendidikan……... II-22
a. Angka Melek Huruf……. II-22
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah …… II-22
c. Angka Partisipasi Kasar (APK)…… II-23
d. Angka Partisipasi Murni (APM)…… II-24
e. Angka Putus Sekolah..……. .. II-25
2.2.2.2 Kesehatan …… II-26
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi..……. .. II-26
b. Angka Kematian Ibu Melahirkan..…… II-27
c. Angka Usia Harapan Hidup…… II-28
d. Persentase Balita Gizi Buruk…… II-28
2.2.2.3. Kemiskinan..... II-29
a. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan..... II-29
2.2.2.4. Kesempatan Kerja II-32
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). II-32
b. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)..... II-33
2.2.3. Fokus Dinul Islam, Seni Budaya dan Olahraga..... II-33
2.2.3.1. Dinul Islam..... II-33
a. Jumlah Mesjid dan Meunasah II-33
b. Jumlah Pondok Pasantren, Santri dan

Teungku II-34
c. Jumlah TKQ/TPQ dan Santri II-35
2.2.3.2. Seni Budaya II-35
2.2.3.3. Olahraga..... II-36
2.3. Aspek Pelayanan Umum …… II-37
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib …… II-37
2.3.1.1. Pendidikan..... II-37
a. Angka Partisipasi Sekolah…… II-37
b. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah…… II-38
c. Ketersediaan Sarana Pendidikan Tinggi … II-39
d. Rasio Guru terhadap Murid …… II-40
2.3.1.2. Kesehatan II-41
a. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu II-41
b. Rasio Dokter per Satuan Penduduk…… II-41
2.3.1.3. Lingkungan Hidup..... II-43
a. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk II-43
b. Persentase penduduk berakses air minum II-43
c. Persentase luas permukiman yang tertata.. II-43
2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum..... II-43
a. Infrastruktur jalan dan jembatan …… II-43
b. Perhubungan Darat II-47
c. Perhubungan Laut II-48
d. Perhubungan Udara II-48
e. Prasarana Listrik dan Telekomunikasi II-48
f. Prasarana Irigasi II-50
g. Prasarana Air Bersih …..... II-52
h. Tempat Pemakaman Umum II-53
i. Perumahan II-53
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan …… II-54
2.3.2.1. Penanaman Modal..... II-54
a. Jumlah Investor Berskala Nasional …… II-54
b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional .. II-54

2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II-55
a. Persentase koperasi aktif..... II-55
b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM II-56
c. Jumlah BPR/LKM II-57
2.4. Aspek Daya Saing Daerah …… II-57
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …… II-57
2.4.1.1. Potensi Ekonomi Daerah …… II-57
2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita II-73
2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerkapitaII-73
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur …… II-74
2.4.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) …… II-74
2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif …… II-74
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi…… II-74
2.4.2.1. Angka Kriminalitas …… II-74
2.4.2.2. Jumlah Demontrasi …… II-76
2.4.2.3. Kemudahan Perizinan II-76
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia …… II-76
2.4.4.1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah ..…… II-76

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2007-2011…….. III-1
3.1.1. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah …… III-5
3.1.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Anggaran…….. III-5
3.1.1.2. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur…… III-5
3.1.1.3. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama…… III-7

3.1.2. Analisis Pembiayaan Daerah ……. III-8
3.1.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil……. III-8
3.1.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran III-12
3.1.2.3. Analisa Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ……. III-12
3.1.2.4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah…… III-12
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007-2012…… III-13
3.3. Kerangka Pendanaan ……. III-14

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahaan Pembangunan ……. IV-1
4.2. Isu Strategis ……. IV-23

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi …….. V-1
5.2. Misi……. V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran ……. V-3

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Perumusan Strategi ……. VI-1
6.1.1. Kekuatan-Peluang (Strategi S-O) VI-1
6.1.2. Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T) VI-2
6.1.3. Kelemahan-Peluang (Strategi W-O)..... VI-2
6.1.4. Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T)..... VI-3
6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 ……. VI-3
6.3. Arah Kebijakan ……. VI-8
6.3.1. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017..... VI-8
6.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013). VI-8
6.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) VI-9
6.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) VI-9
6.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016). VI-10

6.3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017).... VI-10

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Indikasi Program Prioritas VIII-1

8.2. Kebutuhan Pendanaan VIII-2

8.3. Distribusi Kebutuhan Pendanaan berdasarkan 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat VIII-48

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH..... IX-I

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Masa Transisi..... X-1

10.2 Prinsip-prinsip Kaidah Pelaksanaan..... X-1

BAB XI PENUTUP ..... XI-I

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 ..... II-2
Tabel 2.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat II-6
Tabel 2.3. Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat II-7
Tabel 2.4. Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat II-7
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2011..... II-9
Tabel 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2011..... II-9
Tabel 2.7. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011…….. II-10
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-10
Tabel 2.9. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut bidang Usaha Tahun 2011..... II-11
Tabel 2.10. Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2010 II-11
Tabel 2.11. Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 II-12
Tabel 2.12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2007-2011 (juta rupiah)..... II-14
Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (juta rupiah) II-15
Tabel 2.14. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2007-2011..... II-16
Tabel 2.15. Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun

2007-2011 ..... II-17
Tabel 2.16. Perbandingan Laju Inflasi kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2007-2011..... II-18
Tabel 2.17 Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007 – 2010 ..... II-19
Tabel 2.18. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 - 2011 (persen) …….. II-22
Tabel 2.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2006-2010 …… II-23
Tabel 2.20. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …… II-24
Tabel 2.21. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 – 2011 …….. II-25
Tabel 2.22. Jumlah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …….. II-26
Tabel 2.23. Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2011 …… II-27
Tabel 2.24. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2011 …… II-27
Tabel 2.25. Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional……II-28
Tabel 2.26. Jumlah Balita yang Menderita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …… II-29
Tabel 2.27. Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Raskin menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011.. II-31
Tabel 2.28. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Dengan Provinsi Aceh dan Nasional ……... II-32
Tabel 2.29. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 – 2011 …… II-33
Tabel 2.30 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 – 2011..... II-33
Tabel 2.31 Jumlah Mesjid dan Meunasah menurut Kecamatan di Kabupaten

Aceh Barat II-34
Tabel 2.32. Jumlah Pondok Pasantren, Santri, dan Teungku di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-34
Tabel 2.33. Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-35
Tabel 2.34. Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 – 2011 ……..... II-35
Tabel 2.35. Perkembangan Seni dan Budaya menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 ……..... II-36
Tabel 2.36. Perkembangan Olahraga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 ... II-36
Tabel 2.37. Perkembangan Olahraga menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-36
Tabel 2.38. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2011…… II-37
Tabel 2.39. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …… II-38
Tabel 2.40. Jumlah Mahasiswa dan Dosen menurut Perguruan Tinggi di Kabupaten Aceh barat Tahun 2010/2011 …… II-39
Tabel 2.41. Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 ..... II-40
Tabel 2.42. Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 II-41
Tabel 2.43. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Unit Kerja di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-42
Tabel 2.44 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Pada Puskesmas Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …… II-42
Tabel 2.45 Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011……..... II-44
Tabel 2.46. Panjang Jembatan berdasarkan Jenis Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 …… II-46
Tabel 2.47. Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011…… II-46
Tabel 2.48. Kondisi Pelayanan Energi Listrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 …… II-49
Tabel 2.49. Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat …… II-50
Tabel 2.50 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat Tahun

2008-2011..... ..... II-54
Tabel 2.51. Jumlah Investasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 – 2011…... II-55
Tabel 2.52. Jumlah Koperasi menurut jenisnya per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-56
Tabel 2.53. Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Utama Tahun 2011 …… II-58
Tabel 2.54. Hasil Perhitungan Nilai *Location Quotient* dalam Penentuan Basis Perekonomian Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011… II-59
Tabel 2.55. Subsektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 …… II-60
Tabel 2.56. Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Aceh Barat..... II-62
Tabel 2.57. Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Jagung di Kabupaten Aceh Barat..... II-63
Tabel 2.58. Rekapitulasi Peternakan Kerbau, Sapi, Kambing dan Domba Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011..... II-64
Tabel 2.59. Produksi Perikanan Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2011…….....II-65
Tabel 2.60. Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2011…….....II-66
Tabel 2.61. Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis Alat dan Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-66
Tabel 2.62. Jumlah Populasi Ternak Unggas menurut Jenis Ternak dan Dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-67
Tabel 2.63. Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-69
Tabel 2.64. Potensi Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011……..... II-70
Tabel 2.65. Lokasi dan Jenis Bahan Tambang di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011……..... II-71
Tabel 2.66. Objek Wisata Beserta Lokasinya di WPE I (Kota Meulaboh) Tahun 2011……..... II-72
Tabel 2.67. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2010..... II-73

Tabel 2.68. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2010 ……. II-74
Tabel 2.69. Luas Wilayah Produktif Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 ……..... II-74
Tabel 2.70. Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 …. II-75
Tabel 2.71. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2010 ..... II-75
Tabel 2.72. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011……..... II-77
Tabel 2.73. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Barat terhadap Capaian..... II-78
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 ……. III-3
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat ……. III-5
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Barat ……. III-6
Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Barat ……. III-7
Tabel 3.5. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Aceh Barat ……. III-8
Tabel 3.6. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat……. III-9
Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat III-10
Tabel 3.8. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat ……. III-11
Tabel 3.9. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Aceh Barat ……. III-2
Tabel 3.10. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran……... III-13
Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah ……. III-15
Tabel 3.12. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah……. III-16
Tabel 3.13. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah III-18
Tabel 4.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat ……... IV-12
Tabel 5.1. Perumusan Penjelasan Misi……. V-1
Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Barat ……. V-3
Tabel 6.1. Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Aceh Barat ……. VI-12
Tabel 7.1 Indikasi Program Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat..... VII-2
Tabel 8.1 Proyeksi dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan untuk Mendukung Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2017 ..... VIII-1
Tabel 8.2. Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Urusan Pemerintah VIII-2
Tabel 8.2.a.Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Sumber Dana: Otonomi Khusus (Otsus).....VIII-43
Tabel 8.3. Distribusi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2017.....VIII-48
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ……. IX-2

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004..... I-6

Gambar 1.2. Kedudukan RPJM Kabupaten Aceh Barat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional I-7

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh Barat II-1

Gambar 2.2. Peta Kelerengan II-3

Gambar 2.3. Peta Geologi II-4

Gambar 2.4. Peta Hidrologi II-5

Gambar 2.5. Peta Curah Hujan II-5

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan II-6

Gambar 2.7. Peta Bahaya Gempa..... II-8

Gambar 2.8. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007-2011 ..... II-13

Gambar 2.9. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007-2011 ..... II-13

Gambar 2.10. Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011 ..... II-18

Gambar 2.11. Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan kabupaten Tetangga Tahun 2007-2010 (juta/tahun) II-20

Gambar 2.12. Sebaran Indek Gini Aceh 2009..... II-21

Gambar 2.13. Perkembangan Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Aceh Barat

Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2006 – 2010 ..... II-23
Gambar 2.14. Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2010 ..... II-30
Gambar 2.15. Presentase Penyebaran KK Miskin Menurut Realisasi Penerimaan Beras Bulog II-31
Gambar 2.16. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Dengan Propinsi Aceh dan Nasional II-32
Gambar 2.17. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 II-63
Gambar 2.18. Persentase Populasi Ternak Unggas menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-68
Gambar 2.19. Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011..... II-68
Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 – 2011 ..... III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 memuat jabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat dalam satu periode masa jabatan**.** RPJM Kabupaten Aceh Barat disusun dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang dengan tetap memperhatikan RPJMN, RPJMA serta RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pelaksanaanan pembangunan dalam kurun waktu 2007-2012 telah memberikan hasil yang menggembirakan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 90,22 %. Hal ini menandakan bahwa kinerja pembangunan di Kabupaten Aceh Barat telah menunjukkan eskalasi yang signifikan walaupun masih banyak tantangan dan hambatan pembangunan yang perlu diselesaikan. Tantangan dan kendala dari berbagai aspek diantaranya tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta masih adanya daerah tertinggal.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasinya dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sehat dan berwawasan melalui operasional (i) pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, (ii) meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, (iii) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, (iv) terciptanya lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih, (v) meningkatnya kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, (vi) meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan melaksanakan Dinul Islam secara kaffah serta peningkatan peran ulama, *dan* (vii) meningkatnya peran pemuda, perempuan dan kelembagaan adat dalam pembangunan daerah.

Sebagai tahap ke-2 pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025, peran dan fungsi RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan masyarakat pada umumnya karena memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan yang terintegrasi dengan baik disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, akurat, terpadu dan transparan

dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan sesuai kewenangannya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan RPJMD
   Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok tim pengarah, tim pelaksana, kelompok kerja dan sekretariat. Kelompok kerja terdiri atas Pokja Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Pokja Bidang Sarana dan Prasarana serta Pokja Bidang Sosbud, Keistimewaan Aceh dan Sospol.
2) Penyusunan rancangan awal RPJMD
   Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
3) Penyusunan rancangan RPJMD
   Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
4) Pelaksanaan musrenbang RPJMD
   Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kabupaten Aceh Barat. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Aceh Barat menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Aceh Barat.
5) Perumusan rancangan akhir RPJMD
   Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Aceh Barat diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh.
6) Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yaitu Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2017 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi qanun tentang RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo. UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat harus mengacu dengan RPJM Provinsi Aceh dan RPJP Kabupaten Aceh Barat serta RTRW Kabupaten Aceh Barat.

RPJM Kabupaten Aceh Barat 2012-2017 menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, terhadap hubugan antar dokumen perencanaan diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

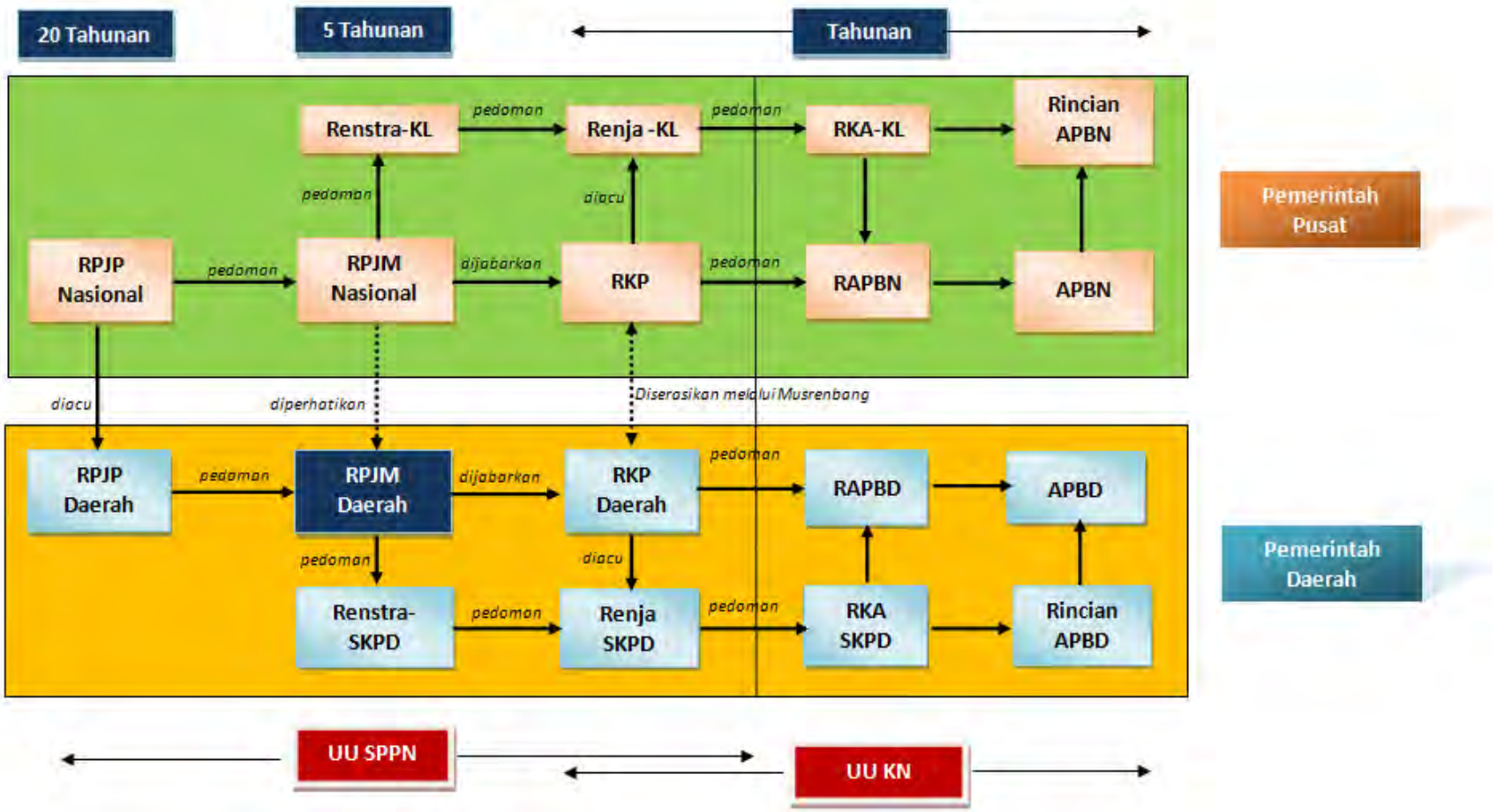

Gambar 1.2.
Kedudukan RPJM Kabupaten Aceh Barat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

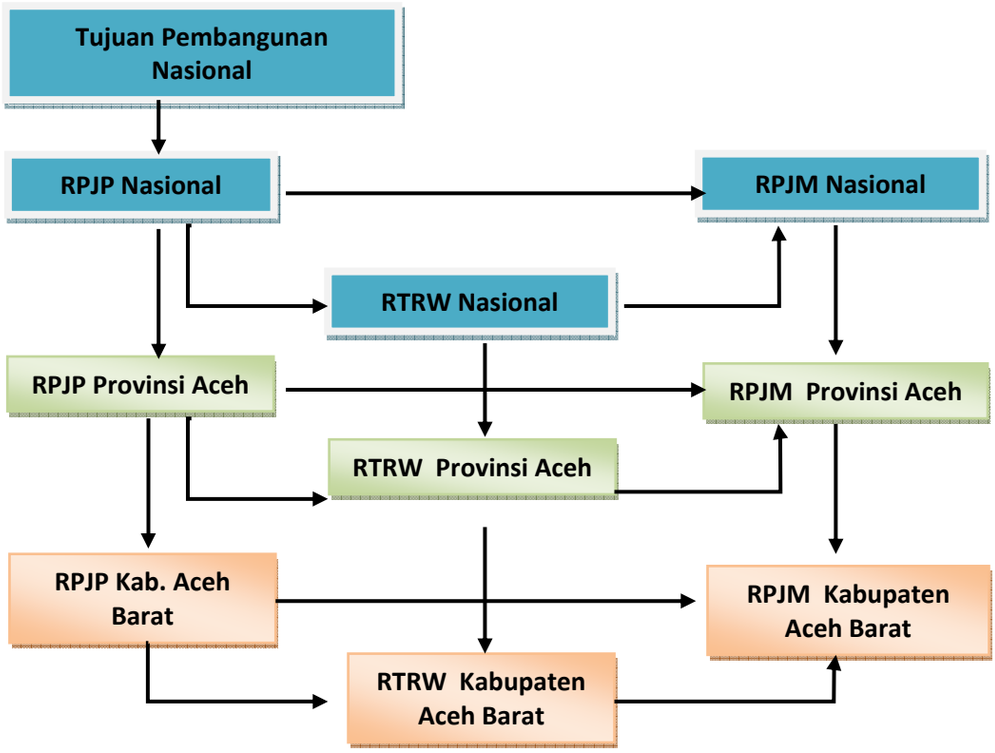

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Aceh Tahun 2012–2017 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya substansi dari masing-masing bab sebagai berikut.

BAB I Latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

BAB III Kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan.

BAB IV Permasalahan dan tantangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dan isu strategis.

BAB V Visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB VI Strategi pembangunan Aceh Barat, rumusan strategi pembangunan Aceh dan arah kebijakan pembangunan Aceh Barat.

BAB VII Mengandung kebijakan umum, kebijakan khusus dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat.

BAB VIII Menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX Merupakan penetapan indikator kinerja daerah.

BAB X Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB XI Penutup.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman jangka menengah bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

1.5.2. Tujuan

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Aceh, analisis isu-isu strategis, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat makmur, sehat dan berwawasan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi umum Aceh Barat digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah;
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya;
Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Jaya.

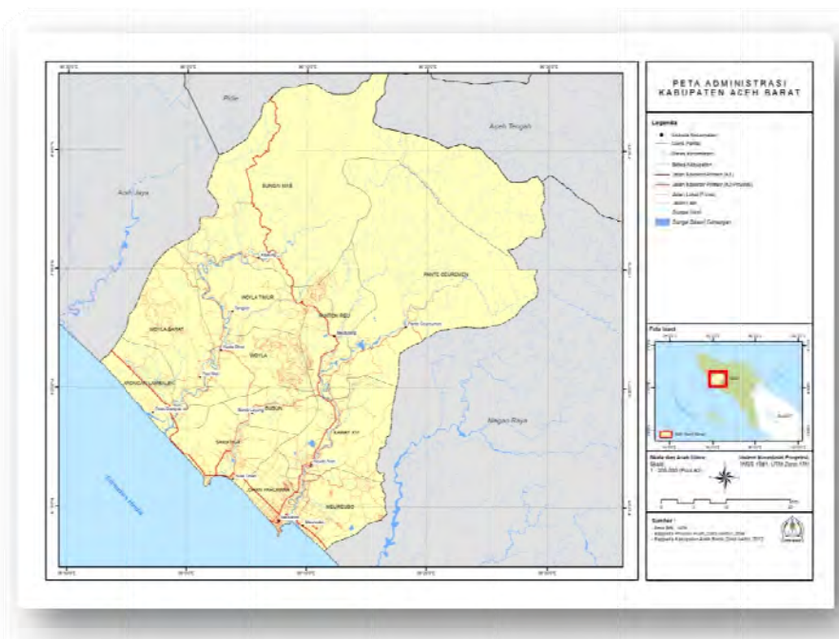

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Aceh Barat

Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km^2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km^2 dan garis pantai sepanjang 54,84 km yang secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 33 kemukiman, dan 322 gampong. Untuk lebih jelas tentang luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 (enam) mukim. Sedangkan jumlah gampong terbanyak adalah Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan masing-masing jumlah gampong adalah 43 gampong.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Persentase Dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	2,00	0	21
2	Samatiga	Suak Timah	140,69	5,00	6	32
3	B u b o n	Layueng	129,58	4,00	3	17
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,00	2	27
5	Woyla	Kuala Bhee	249,04	9,00	3	43
6	Woyla Barat	Pasie Mali	123,00	4,00	2	24
7	Woyla Timur	Tangkeh	132,06	5,00	2	26
8	Kaway XVI	Peureumeue	510,18	17,00	4	44
9	Meureubo	Meureubo	112,87	4,00	2	27
10	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	17,00	4	25
11	Panton Reu	Meutulang	83,04	3,00	2	19
12	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,00	2	18
Total Luas			**2.927,95**	**100,00**	**32**	**322**

Sumber : Aceh Barat Dalam Angka 2012

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan dibagian utara, sedangkan bagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun secara geografis, wilayahnya terletak pada koordinat $04^o06'$ - $04^o47'$ Lintang Utara dan $95^o52'$ – $96^o30'$ Bujur Timur.

2.1.1.3. Topografi

Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi dibagian utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng dengan mengggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Jika ditinjau dari kontur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian diatas 1500 m dpl, sedangkan sekitar 20 persen

dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 m dpl yang mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo.

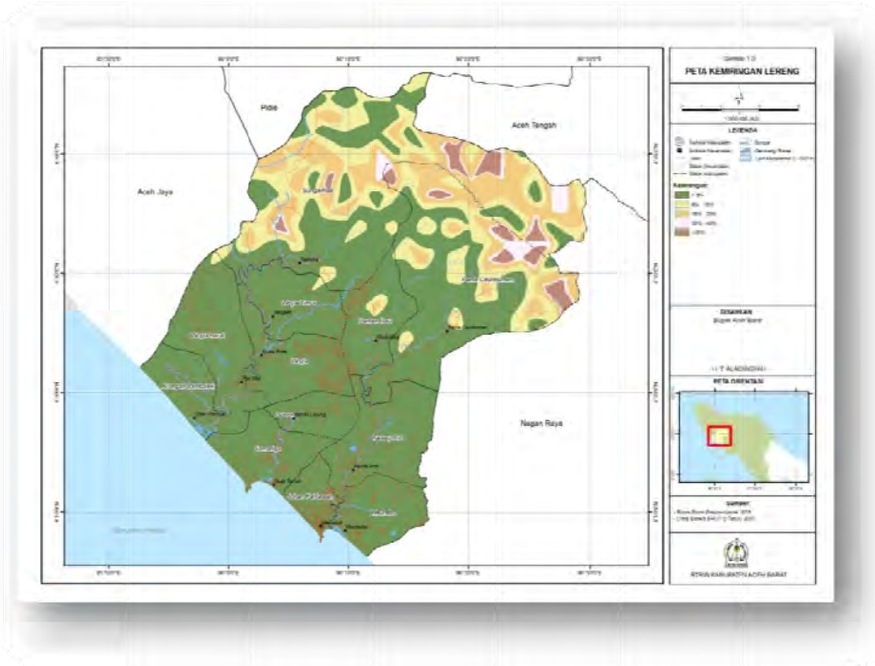

Gambar 2.2. Peta Kelerangan

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Aceh Barat berada diantara dua patahan (sebelah Timur - Utara dan sebelah Barat - Selatan Kota) dan berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia yang berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terhadap tsunami. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi bahan galian/tambang, antara lain batu bara (di Desa Bukit Jaya Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI), emas di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan daerah Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen banyak terdapat batu kapur/gamping, batu koral, kerikil, dan pasir. Keadaan geologi tanah berupa endapan yang mencapai 58,05 persen atau 586.525 Ha. Sebagian besar lahan terdiri dari tanah jenis podsolik merah kuning dengan kedalaman tanah yang relatif dalam, yaitu diatas 60 cm yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Sungai Mas, sedangkan kedalaman diatas 90 cm terdapat hampir merata di seluruh Kecamatan. Pada umumnya jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol, litisol, regosol, orgonosol, renzina dan alluvial.

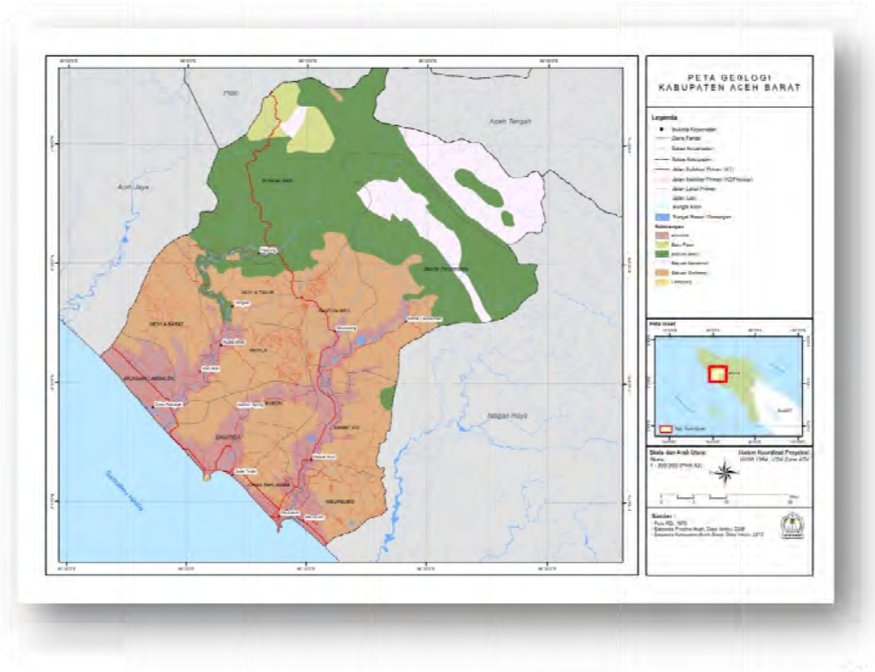

Gambar 2.3. Peta Geologi

2.1.1.5. Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki sangat besar karena dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 liter/detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa adanya banjir periodik pada musim penghujan. Banjir periodik tersebut terjadi sebagai limpasan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai di bagian tengah dan timur wilayah. Limpasan sungai tersebut bermuara ke Samudera Indonesia. Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai : Krueng Woyla dan anak-anak sungainya yaitu sejak dari wilayah Kecamatan Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Arongan Lambalek dan Samatiga; Krueng Meurebo dan anak-anak sungainya, sejak dari Kecamatan Pante Ceuremen, Kaway XVI, Meureubo dan Johan Pahlawan; di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto ini adalah di Kecamatan Lhok Bubon; Krueng Bubon, yaitu sejak dari Kecamatan Bubon dan Samatiga. Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo dimana pada area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Selain kawasan perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), wilayah Kecamatan Meurebo dan Kecamatan Kaway XVI. Sementara Krueng Woyla cakupan banjir yang sering melanda wilayah hilir sungai yaitu Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, selain langkah-langkah pembangunan tanggul, pelurusan atau penyodetan aliran, pelebaran dan pendalaman sungai, patut dipertimbangkan langkah pembangunan waduk atau kolam retensi pada aliran Krueng Meurebo tersebut, di bagian lebih hulu dari wilayah Kecamatan Pante Ceuremen.

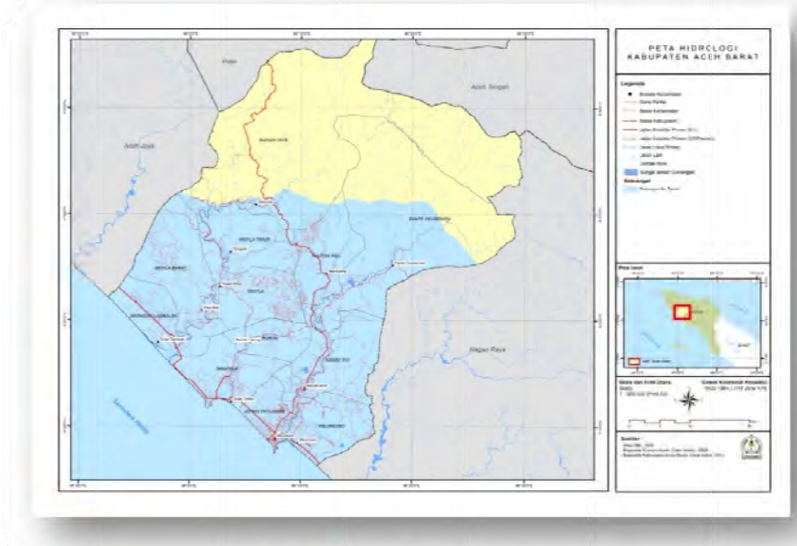

Gambar 2.4. Peta *Hidrologi*

2.1.1.6. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan yang disertai gejolak gelombang laut biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm, rata – rata curah hujan di kabupaten Aceh Barat 255,1 mm. Sedangkan Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 0C pada siang hari dan 23 - 25 0C pada malam hari. Sedangkan rata - rata lamanya penyinaran matahari minimum terjadi bulan Agustus yaitu 20 persen, dan penyinaran maksimum 58 persen pada Bulan Februari. Sedangkan tekanan serta kelembaban udara rata-rata setiap bulannya mencapai 1.010,1 atm dan 86 persen.

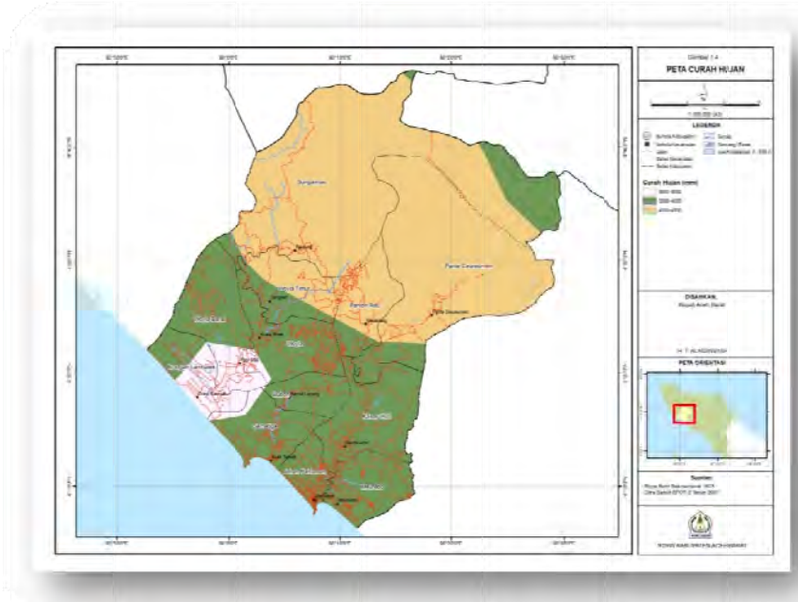

Gambar 2.5. Peta Curah Hujan

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235.90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen. Sedangkan seluas 166.250,10 Ha atau 43,22 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan kebutuhan penggunaaan lahan oleh masyarakat setempat.

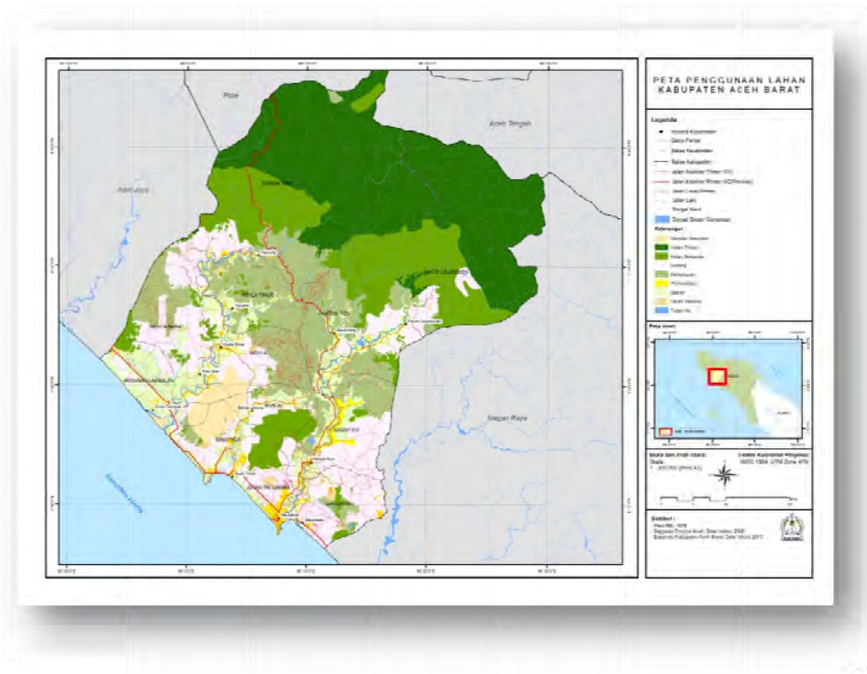

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan

Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat

Keterangan	Luas (Ha)	Persentase Luas Terhadap Wilayah Kabupaten
Kawasan Lindung		
Kawasan Hutan Lindung	107.729,39	36,793
Kawasan Bergambut	580,66	0,198
Kawasan Sempadan Sungai (termasuk sungai)	4.724,48	1,614
Kawasan Sempadan Danau (termasuk danau)	69,28	0,024
Kawasan Makam Teuku Umar*	502,00	0,171
Kawasan Rawan Bencana**		
Sub jumlah	**113.605,81**	**38,800**

Kawasan Budidaya		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	14.162,51	4,837
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	28.958,01	9,890
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	66.423,77	22,686
Kawasan Peruntukan Perkebunan	62.064,71	21,197
Kawasan Peruntukan Perikanan	113,64	0,039
Kawasan Peruntukan Pertambangan***		
Kawasan Peruntukan Industri	180,00	0,061
Kawasan Peruntukan Pariwisata	12,56	0,004
Kawasan Peruntukan Pendidikan	100,44	0,034
Kawasan Peruntukan Militer	26,54	0,009
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	3.937,39	1,345
Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	3.209,62	1,096
Sub Jumlah	**179.189,19**	**61,200**
Jumlah Total	**292.795,00**	**100,000**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2013.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Seunagan	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2013.

Tabel 2.4.
Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan StrategisNasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/ Revitalisasi Kawsan

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2013.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat.

Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi:

- Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

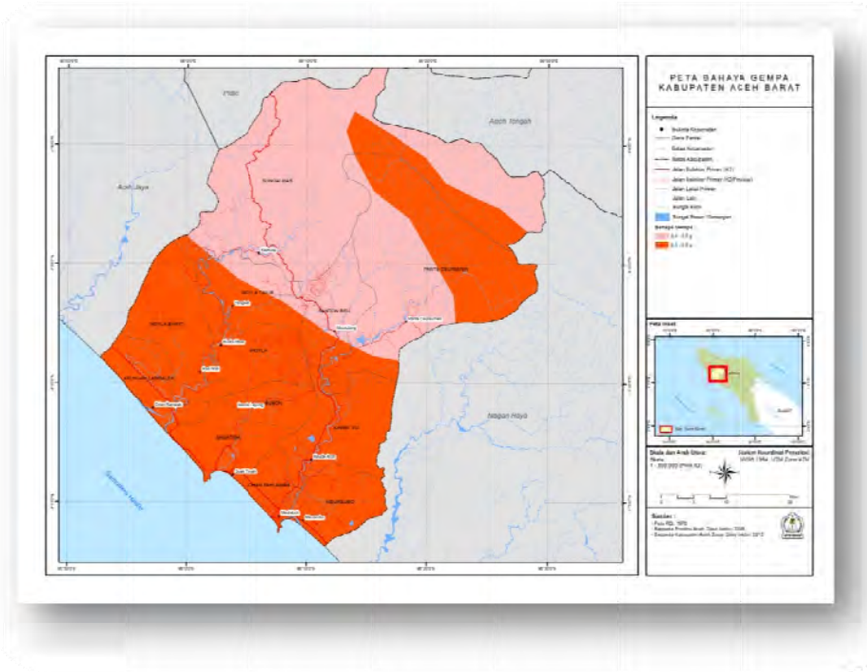

Gambar 2.7. Peta Bahaya Gempa

- Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada perkotaan Meulaboh.
- Potensi bencana longsor; Daerah yang diprediksi masih akan mengalami ancaman bencana longsor adalah Kecamatan Pantai Ceuremen dan Kecamatan Sungai Mas.
- Potensi putting beliung; daerah yang diprediksikan memiliki potensi putting beliung adalah Kecamatan Pantai Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas dan sebagian Kecamatan Panton Rheu.
- Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar perkotaan Meulaboh dan banjir bandang di wilayah DAS Krueng Meureubo..
- Potensi abrasi dan erosi di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan.
- Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfir, laut, dan daratan. Potensi kekeringan ini

berada di Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Samatiga dan sebagian Arongan Lambalek.

- Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon.

2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 sebesar 177.532 jiwa, terdiri dari 90.107 jiwa laki-laki dan 87.425 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk Aceh Barat 32,30 persen masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 57.334 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 27.116 dan 19.182 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki - laLki	Perempuan	
1	Johan Pahlawan	29.109	28.225	57.334
2	Samatiga	6.891	6.736	13.627
3	B u b o n	3.364	3.331	6.695
4	Arongan Lambalek	5.584	5.268	10.852
5	W o y l a	6.167	6.182	12.349
6	Woyla Barat	3.557	3.458	7.015
7	Woyla Timur	2.139	2.094	4.233
8	Kaway XVI	9.801	9.381	19.182
9	Meureubo	13.919	13.197	27.116
10	Pante Ceureumen	4.899	4.957	9.856
11	Panton Reu	2.927	2.874	5.801
12	Sungai Mas	1.750	1.722	3.472
Jumlah		**90.107**	**87.425**	**177.532**

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2012.

Tabel 2.6.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2011

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2006	77.472	74.122	151.594
2007	78.191	75.103	153.294
2008	83.422	80.938	164.360
2009	85.832	83.279	169.111
2010	88.090	85.468	173.558
2011	90.107	87.425	177.532

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2012

2.1.4.2. Komposisi Penduduk

Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 adalah 44.068 kepala keluarga dengan perbandingan jumlah laki-laki dengan

perempuan (sex ratio) sebesar 103,07 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.7.
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Johan pahlawan	13.813	29.109	28.225	57.334	103,13
2	Samatiga	3.705	6.891	6.736	13.627	102,30
3	B u b o n	1.590	3.364	3.331	6.695	100,99
4	Arongan Lambalek	2.839	5.584	5.268	10.852	106,00
5	Woyla	3.215	6.167	6.182	12.349	99,76
6	Woyla Barat	1.840	3.557	3.458	7.015	102,86
7	Woyla Timur	1.114	2.139	2.094	4.233	102,15
8	Kaway XVI	4.533	9.801	9.381	19.182	104,48
9	Meureubo	6.449	13.919	13.197	27.116	105,47
10	Pante Ceureumen	2.569	4.899	4.957	9.856	98,83
11	Panton Reu	1.469	2.927	2.874	5.801	101,84
12	Sungai Mas	932	1.750	1.722	3.472	101,63
Jumlah		**44.068**	**90.107**	**87.425**	**177.532**	**103,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Barat, 2012

2.1.4.3. Struktur Usia

Komposisi penduduk pada Tahun 2011 berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh kelompok umur usia produktif, yaitu sejumlah 119.225 jiwa atau 67,16 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berusia 15 – 64 tahun. Untuk lebih jelas terhadap jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	9.313	8.979	18.292
5 – 9	9.389	8.123	16.512
10 – 14	8.775	8.330	17.105
15 – 19	8.360	8.182	16.542
20 – 24	8.247	8.868	17.115
25 – 29	8.831	8.632	17.463
30 – 34	7.879	7.959	15.838
35 – 39	7.619	7.098	14.717
40 – 44	6.162	5.727	11.889
45 – 49	5.128	4.563	9.691
50 – 54	3.922	3.402	7.324
55 – 59	2.645	2.239	4.884
60 – 64	1.817	1.945	3.762
65 – 69	1.315	1.351	2.666
70 – 74	865	1.083	1.948
75 +	840	944	1.784
Jumlah	**90.107**	**87.425**	**177.532**

Sumber : Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2011.

Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengantisipasi gejolak yang akan timbul di dalam masyarakat. Kebijakan berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pembukaan lapangan kerja baru kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya sangat diperlukan.

2.1.4.4 Jenis Pekerjaan

Sejumlah 40,95 persen mata pencaharian penduduk di Kabupaten Aceh Barat bergerak di sektor pertanian, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31,60 persen, dan jasa kemasyarakatan sebesar 19,51 persen. Lapangan usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan dan kontruksi yakni 0,47 persen seperti yang terlihat dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Bidang Usaha Tahun 2011

No	Lapangan Usaha	Jml Penduduk	Persentase
1	Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	72.669	40,95
2	Pertambangan dan Penggalian	4.864	2,74
3	Industri Pengolahan	-	-
4	Listrik, Gas dan Air	4.279	2,41
5	Bangunan dan Kontruksi	834	0,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	56.100	31,60
7	Angkutan dan Komunikasi	941	0,53
8	Lembaga Keuangan	3.178	1,79
9	Jasa-jasa lainnya	34.636	19,51
	J u m l a h	**177.532**	**100,00**

Sumber : Aceh Barat Dalam Angka, 2012.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Barat menurut Kelompok Umur sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan lapangan kerja yang tersedia pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur Tahun 2010

No	Kelompok Umur (Tahun)	Pencari Kerja		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 - 19	1.253	408	1.661
2	20 - 29	3.195	1.680	4.875
3	30 - 44	708	55	762
4	45 - 54	77	165	242
Jumlah		**5.233**	**2.307**	**7.540**

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2011.

Sedangkan jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2010 masih didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA (64,52 persen) dan Diploma (23,46 persen), untuk lebih jelas jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD dan tidak Tamat SD	4	-	4
2	SLTP	334	222	556
3	SLTA	3.550	1.315	4.865
4	DIPLOMA	1.124	645	1.769
5	Sarjana/Pasca Sarjana	221	125	346
Jumlah		**5.233**	**2.307**	**7.540**

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2011.

Dari Tabel 2.10 dan 2.11 di atas terlihat bahwa pencari kerja yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 masih didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, dari sisi pekerjaan belum tercapai adanya kesetaraan gender.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian Nasional mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,3% dan diperkirakan akan meningkat di 2013-2014. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat. Meskipun pertumbuhan 2012 sedikit di bawah target APBN 2012 sebesar 6,5 persen, capaian pertumbuhan pada kisaran 6,3 persen merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi karena dicapai pada saat perekonomian global mengalami perlambatan. Sementara itu, Inflasi 2012 mencapai 4,30% (yoy) dan ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali.

Dalam skala Aceh, pada triwulan II 2012, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,59 %. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,83% (yoy) dan ini sesuai dengan target RPJM Aceh tahun 2012 yang mematok pertumbuhan ekonomi 5,02 % dan pada tahun 2013 capaian pertumbuhan antara 6,1-6,6% akan tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat tiga tahun terakhir ini bernilai positif dan semakin cepat. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sebesar 5 persen dengan PDRB 1,2 T. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebeser 5,09 dan 5,24 persen. Nilai PDRB harga konstan pada kedua tahun tersebut adalah 1,26 dan 1,32 T Rupiah.

Sebagai perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh Barat dari pertumbuhan 12 persen pada tahun 2007 turun menjadi 5,2 pada tahun 2011dan pertumbuhan ini dibawah dari pada pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini

Gambar 2.8.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2007-2011

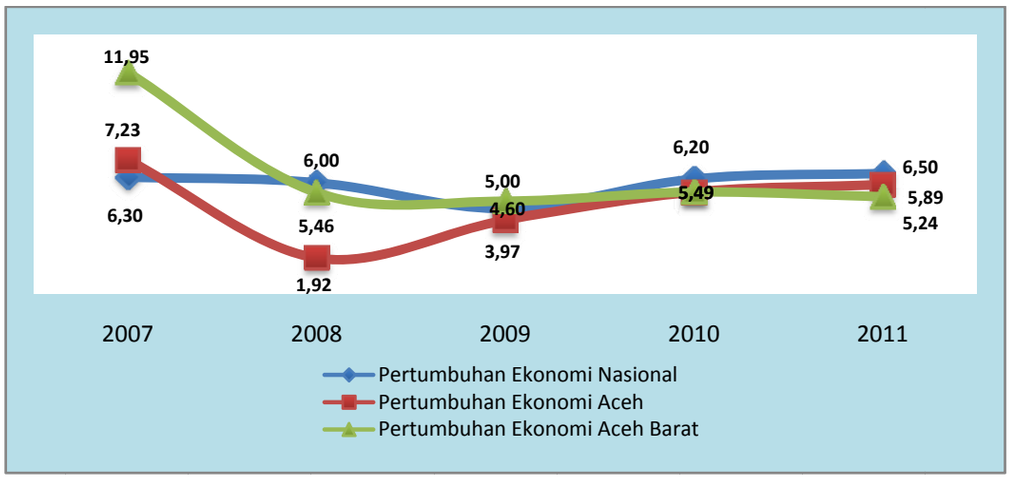

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 11,95 persen. Tahun ini pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama yaitu bangunan/konstruksi yang tumbuh sebesar 24,72 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,22 persen; listrik dan air minum sebesar 17,27 persen dan jasa-jasa sebesar 16 persen. Besarnya kontribusi keempat sektor tersebut sebagai implikasi dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011 cenderung konstan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,46 persen menjadi 5,24 persen di tahun 2011 atau terjadi perlambatan aktivitas ekonomi sebesar 2,2 persen selama 4 tahun.

Gambar 2.9.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007-2011

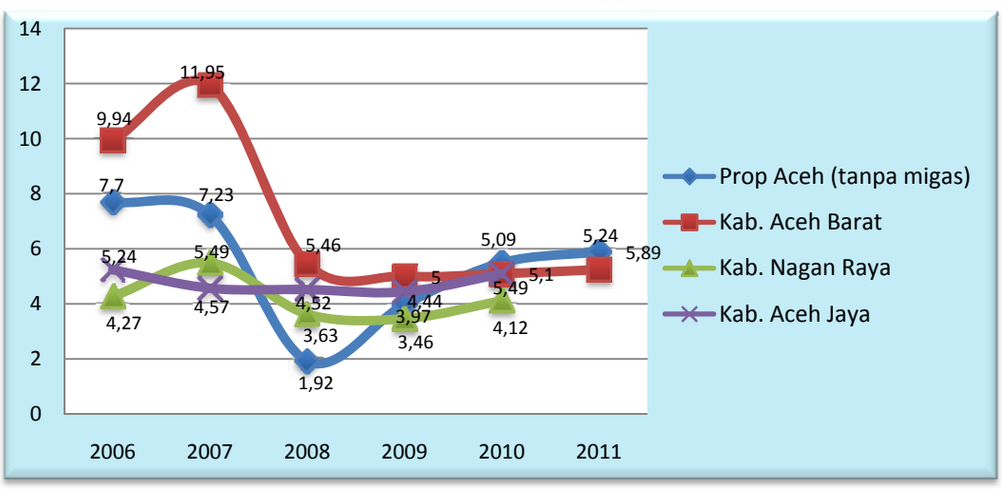

Sumber : Diolah dari PDRB Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya 2012.

Tahun 2006-2009 pertumbuhan ekonomi Aceh Barat berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Namun di tahun 2010 dan 2011, laju pertumbuhan Aceh Barat berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh.

Tabel 2.12.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

No.	Sektor	2007		2008		2009r		2010*		2011**	
		(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)
1.	Pertanian	267.869,62	24,76	270.946,33	23,75	301.195,83	25,14	330.663,87	26,27	358.855,54	27,09
2.	Pertambangan & Penggalian	5.371,43	0,50	5.465,41	0,48	5.453,03	0,46	5.669,60	0,45	5.889,22	0,44
3.	Industri Pengolahan	16.808,50	1,55	17.651,57	1,55	195.85,83	1,64	21.504,97	1,71	23.593,52	1,78
4.	Listrik & Air Minum	2.712,92	0,25	3.159,22	0,28	3.798,41	0,32	4.154,92	0,33	4.651,26	0,35
5.	Bangunan/Konstruksi	126.815,2	11,72	136.980,48	12,01	135.918,62	11,35	138.998,62	11,04	143.908,36	10,86
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	306.492,86	28,33	329.701,65	28,90	334.739,15	27,94	341.867,04	27,16	352.061,94	26,57
7.	Pengangkutan & Komunikasi	79.165,69	7,32	81.969,17	7,19	84.423,15	7,05	88.221,82	7,01	90.208,01	6,81
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	18.261,47	1,69	18.917,33	1,66	19.786,14	1,65	20.799,33	1,65	22.357,79	1,69
9.	Jasa-jasa	258.224,94	23,87	276.026,20	24,20	293.004,87	24,46	307.056,58	24,39	323.368,90	24,41
	PDRB Aceh Barat	**1.081.722,63**	**100,00**	**1.140.817,36**	**100,00**	**1.197.904,53**	**100,00**	**1.258.936,75**	**100,00**	**1.324.894,54**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Catatan:
r angka revisi
* angka sementara
** angka sangat sementara

Tabel 2.13.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

No.	Sektor	2007		2008		2009r		2010*		2011**	
		(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)	(Rp)	(persen)
1.	Pertanian	664.714,75	32,27	716.372,68	29,66	882.593,49	32,69	107.8420,57	35,87	1.220.305,64	37,32
2.	Pertambangan & Penggalian	12.382,43	0,60	15.179,57	0,63	16.525,92	0,61	17.224,80	0,57	18.023,62	0,55
3.	Industri Pengolahan	23.967,76	1,16	27.293,03	1,13	33.234,24	1,23	39.990,71	1,33	48.058,88	1,47
4.	Listrik & Air Minum	6.788,75	0,33	8.506,15	0,35	11.965,58	0,44	13.355,65	0,44	14.990,60	0,46
5.	Bangunan/Konstruksi	276.101,14	13,40	377.155,73	15,61	378.039,06	14,00	389.716,37	12,96	409.213,57	12,52
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	486.873,50	23,63	569.047,06	23,56	579.654,44	21,47	603.249,10	20,07	624.268,65	19,09
7.	Pengangkutan & Komunikasi	182.869,90	8,88	241.206,27	9,99	262.751,80	9,73	278.811,60	9,27	288.182,16	8,81
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	34.808,96	1,69	39.769,64	1,65	45.537,38	1,69	51.384,48	1,71	59.770,29	1,83
9.	Jasa-jasa	371.517,70	18,03	420.874,88	17,42	489.932,77	18,14	534037,12	17,76	586.971,25	1795
	PDRB Aceh Barat	**2.060.024,89**	**100,00**	**2.415.404,51**	**100,00**	**2.700.234,68**	**100,00**	**3.006.210,41**	**100,00**	**3.269.784,66**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Catatan:
r angka revisi
* angka sementara
** angka sangat sementara

Tabel 2.14.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2007-2011

No	Sektor	2007		2008		2009r		2010*		2011**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		persen	persen	persen	persen	persen	Persen	Persen	persen	Persen	persen
1.	Pertanian	32,27	24,76	29,66	23,75	32,69	25,14	35,87	26,27	37,32	27,09
2.	Pertambangan & Penggalian	0,60	0,50	0,63	0,48	0,61	0,46	0,57	0,45	0,55	0,44
3.	Industri Pengolahan	1,16	1,55	1,13	1,55	1,23	1,64	1,33	1,71	1,47	1,78
4.	Listrik & Air Minum	0,33	0,25	0,35	0,28	0,44	0,32	0,44	0,33	0,46	0,35
5.	Bangunan/Konstruksi	13,40	11,72	15,61	12,01	14,00	11,35	12,96	11,04	12,52	10,86
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	23,63	28,33	23,56	28,90	21,47	27,94	20,07	27,16	19,09	26,57
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,88	7,32	9,99	7,19	9,73	7,05	9,27	7,01	8,81	6,81
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,69	1,69	1,65	1,66	1,69	1,65	1,71	1,65	1,83	1,69
9.	Jasa-jasa	18,03	23,87	17,42	24,20	18,14	24,46	17,76	24,39	1795	24,41
	PDRB Aceh Barat	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Catatan:
r angka revisi
* angka sementara
** angka sangat sementara

Tabel 2.15.
Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2007-2011

No.	Sektor	2007		2008		2009r		2010*		2011**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1.	Pertanian	13,72	1,04	7,77	1,15	23,2	11,16	22,19	9,78	13,16	8,53
2.	Pertambangan & Penggalian	14,20	4,14	22,59	1,75	8,87	-0,23	4,35	3,97	4,52	3,87
3.	Industri Pengolahan	14,14	4,94	13,87	5,02	21,77	10,96	20,33	9,80	20,18	9,71
4.	Listrik & Air Minum	32,23	17,27	25,3	16,45	40,67	20,23	11,62	9,39	12,24	11,95
5.	Bangunan/Konstruksi	33,97	24,72	36,60	8,02	0,23	-0,78	3,09	2,27	5,00	3,53
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	21,66	18,22	16,88	7,57	1,86	1,53	4,07	2,13	3,48	2,98
7.	Pengangkutan & Komunikasi	28,04	3,51	31,90	3,54	8,93	2,97	6,11	4,52	3,36	2,25
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	12,28	3,56	14,25	3,59	14,5	4,59	12,84	5,12	16,32	7,49
9.	Jasa-jasa	20,31	16,00	13,29	6,89	16,41	6,15	9,00	4.80	9,91	5,31
	PDRB Aceh Barat	**20,44**	**11,95**	**17,25**	**5,46**	**11,79**	**5,00**	**11,33**	**5,09**	**8,77**	**5,24**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Catatan:
r angka revisi
* angka sementara
** angka sangat sementara

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Untuk dapat melihat perbandingan inflasi Kabupaten Aceh Barat yang dibandingkan dengan Provinsi Aceh dapat dilihat Tabel 2.16. dan Gambar 2.10.

Tabel 2.16.
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2007-2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata pertumbuhan
Aceh Barat	8,49	11,79	10,72	9,70	8,18	1,15
Aceh	9,41	11,92	3,72	5,86	3,43	-0,58
Nasional	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	-0,70

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Provinsi Aceh

Gambar 2.10.
Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011

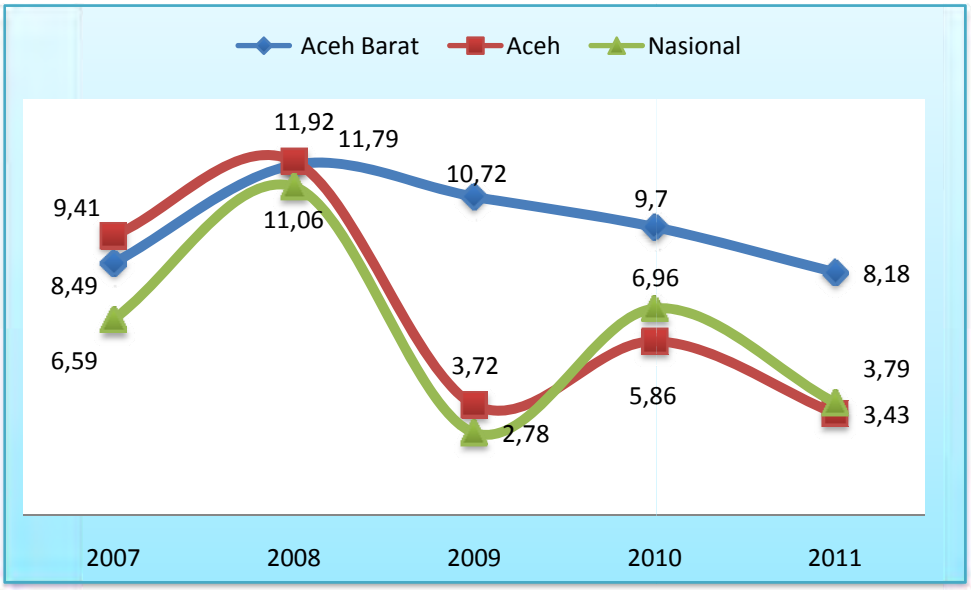

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Provinsi Aceh, 2012.

Dari data di atas terlihat bahwa di tahun 2007-2008, inflasi Aceh Barat berada di bawah inflasi Provinsi Aceh. Nilai inflasi tertinggi berada di tahun 2008 yakni sebesar 11,79 persen yang diakibatkan oleh dampak krisis ekonomi global dimana pada tahun ini inflasi Provinsi Aceh mencapai 11,92 persen. Mulai tahun

2009 terjadi penurunan nilai inflasi di Kabupaten Aceh Barat namun masih berada di atas inflasi Provinsi Aceh. Tahun 2011 inflasi Aceh Barat mencapai 8,18 persen. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir nilai inflasi Kabupaten Aceh Barat telah dapat diturunkan sebesar 3,61 persen yang merupakan suatu keberhasilan pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Inflasi Aceh pada tahun 2010 mencapai 5,86 jauh lebih rendah dibanding tahun yang sama terhadap inflasi nasional yang mencapai 6,96 dan pada tahun 2011 inflasi Aceh semakin membaik yaitu 3,43 dan nasional 3,79. Di sisi lain secara keseluruhan, inflasi IHK sampai dengan Juli 2012 berada pada kisaran 1,38 masih rendah dibanding dengan Nasional yang mencapai 2,50. Secara keseluruhan, inflasi IHK sampai dengan akhir tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 4,7% hingga 5,3% (yoy) atau masih sejalan dengan sasaran inflasi nasional (4,5% ± 1%).

2.2.1.3. Pendapatan Regional Perkapita

Pada tahun 2010 pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Aceh Barat ADHK mencapai 7,253,695 rupiah atau Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,94 persen dari tahun 2009 yang nilainya sebesar 7,112,306 rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh indikator US$ 1,00 perkapita per hari menjadi sekitar US$ 2,00 perkapita per hari.

Tabel 2.17.
Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007-2010

Wilayah	2007	2008	2009r	2010*
Provinsi Aceh	6,160,802	6,177,070	6,276,940	6,461,880
Aceh Jaya	4,795,680	4,939,102	5,087,635	5,285,911
Nagan Raya	6,984,230	7,226,017	7,042,292	6,929,972
Aceh Barat	7,056,523	6,940,123	7,112,306	7,253,695

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh, 2012.

Jika dibandingkan dengan pendapatan regional perkapita Provinsi Aceh diluar migas, pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Barat masih lebih tinggi. Demikian juga halnya jika dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga terdekat, pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Barat ini masih di atas pendapatan regional perkapita Nagan Raya dan Aceh Jaya.

Gambar 2.11.
Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten Tetangga Tahun 2007-2010 (juta/tahun)

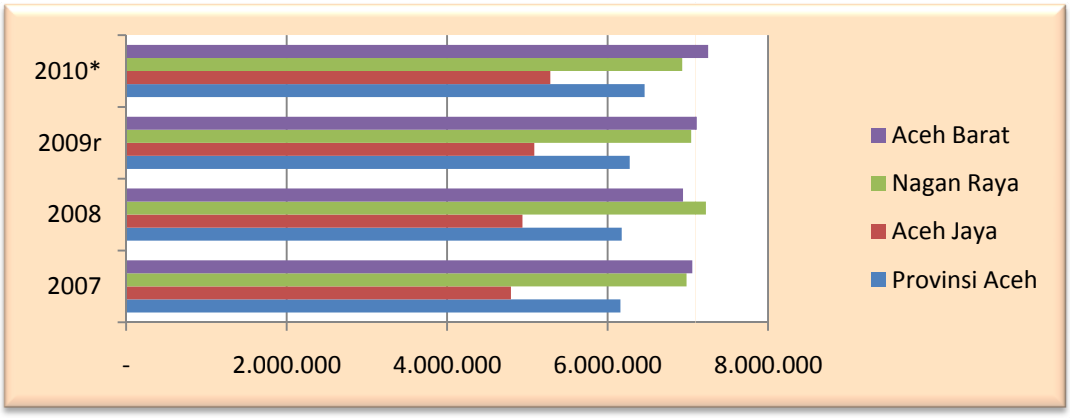

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh

2.2.1.4. Indek Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Rasio Gini yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Rasio gini Provinsi Aceh pada tahun 2007-2008 sebesar 0,27, dan tahun 2009 sebesar 0,29 masih tergolong dalam kelompok ketimpangan rendah. Indeks gini yang rendah ini tidak bermakna positif karena rendahnya indeks gini tersebut dipengaruhi oleh dominasi kolompok masyarakat miskin. Hal ini tergambar dari pendapatan perkapita penduduk Aceh (non migas) pada tahun 2011 berdasarkan harga konstan hanya sebesar Rp.6.718.952/tahun (Rp.559.913/bulan) atau berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 15.943.742/tahun (1.328.645/bulan).

Perubahan indeks gini yang terjadi hampir di semua kabupaten/kota Provinsi Aceh menunjukkan bahwa adanya pergeseran distribusi pendapatan antar penduduk. Apabila nilai Indeks Gini semakin tinggi akan menyebabkan masalah sosial dan masalah ekonomi lainnya. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang efektif dan tepat untuk memperkecil kesejangan antar penduduk dengan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan Indeks Gini di Provinsi Aceh juga disebabkan oleh mulai berakhirnya masa rekonstruski dan rehabilitasi sehingga pendapatan masyarakat menurun. Untuk sebaran indek gini dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12.
Sebaran Indek Gini Aceh 2009

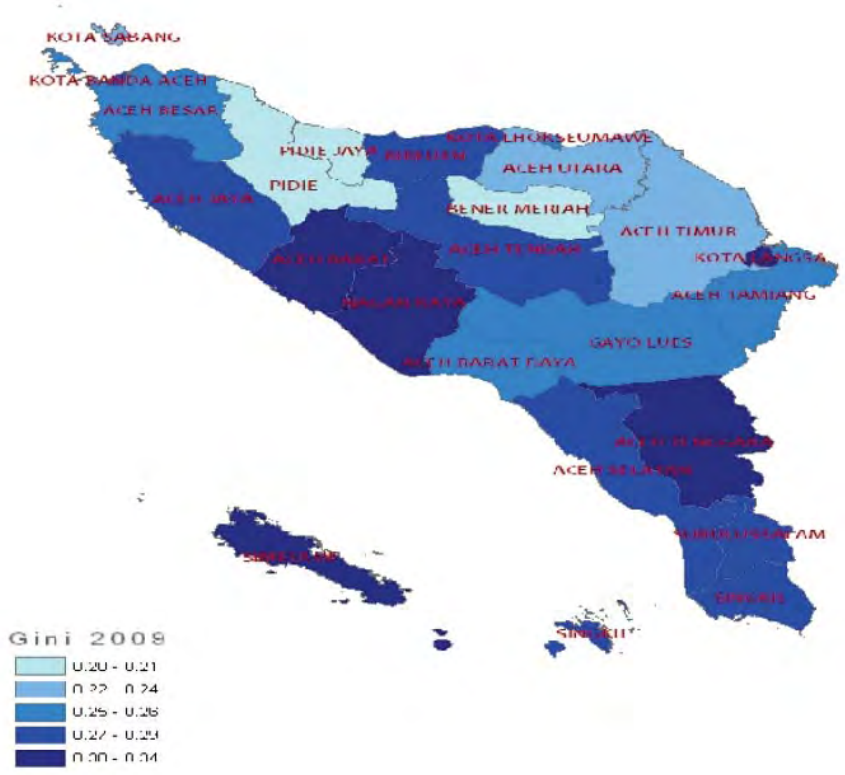

Untuk Aceh Barat tercatat bahwa indek gini Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2005 berkisar 0,35-0,39 dan pada tahun 2009 menurun menjadi antara 0.30 – 0,34. Hal ini tergambar dari pendapatan perkapita penduduk Aceh Barat dimana Pada tahun 2011 pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 17,30 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah dari tahun 2010 yang nilainya mencapai 16,28 juta rupiah. Angka 17,30 juta rupiah ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu dan dua orang anak), diperkirakan pendapatan rumah tangga sebesar 69 juta rupiah pertahun atau 5 juta rupiah per bulan. Pada kenyataannya masih terdapat rumah tangga di daerah ini yang mempunyai pendapatan dibawah itu.

Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata dari total pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk, yang belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih terdapat penduduk yang berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut masih belum merata.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2007 adalah 94,07. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 95,67 persen sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	106.979	109.575	112.849	116.466	119.845
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	113.724	116.304	119.666	122.821	125.270
3	Angka Melek Huruf persen)	**94,07**	**94,21**	**94,30**	**94,85**	**95,67**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011.

Dengan semakin meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Aceh Barat yang mencapai 95,67 persen di tahun 2011, maka angka buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 semakin berkurang dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan angka melek huruf sebesar 95,67 persen berarti penduduk Kabupaten Aceh Barat yang masih buta huruf pada tahun 2011 adalah sebesar 4,33 persen. Jika dibandingkan dengan angka melek huruf Provinsi Aceh tahun 2011 sebesar 96,95 persen, maka Angka melek huruf Kabupaten Aceh Barat ini masih tergolong rendah.'

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 adalah 8,23 tahun. Angka rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi sebesar 8,48 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikaan dasar 9 tahun di Kabupaten Aceh Barat belum tuntas.

Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah kabupaten tetangga, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nagan Raya dan lebih rendah dari Kabupaten Aceh Jaya yang mencapai 8,72 persen di tahun 2010, sedangkan dibandingkan dengan Provinsi Aceh, rata-rata lama sekolah di Aceh Barat masih tergolong rendah.

Tabel 2.19.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2006-2010

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah			
	Kab. Aceh Barat	Kab. Nagan Raya	Kab. Aceh Jaya	Provinsi Aceh
2006	8,20	6,70	8,70	8,50
2007	8,20	7,32	8,70	8,50
2008	8,20	7,32	8,70	8,50
2009	8,23	7,34	8,71	8,63
2010	8,48	7,57	8,72	8,81

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2011 dan Bappeda Aceh, 2012

Gambar 2.13.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat Dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Aceh Tahun 2006-2010

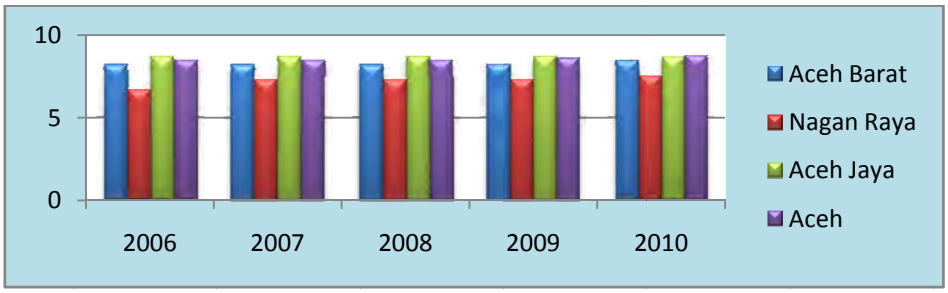

Sumber : BPS Aceh

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan SLTP/MTs tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010. Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2011 sebesar 112,07 persen atau turun sebesar 5,93 persen dari tahun 2010 yakni 118 persen. Jika dibandingkan dengan APK nasional untuk tingkat SD/MI termasuk paket A tahun 2008/2009 sebesar 116,77, APK tingkat SD/MI di kabupaten Aceh Barat ini masih tergolong lebih rendah.

Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP/MTs, Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2011 sebesar 103,17 persen atau turun sebesar 4,83 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 108 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar di tingkat jenjang pendidkan SLTA/MA tahun 2011 sebesar 97,74 persen atau meningkat sebesar 2,74 persen dari tahun 2010 yaitu sebesar 95 persen.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	APK SD dan MI	APK SMP dan MTs	APK SMA,SMK & MA
1	Johan Pahlawan	116,68	116,63	141,53
2	Samatiga	118,86	106,19	109,62
3	Woyla	106,20	97,75	107,79
4	Kaway XVI	114,02	102,42	69,36
5	Sungaimas	146,56	72,57	79,31
6	Bubon	95,76	105,68	76,02
7	Arongan Lambalek	108,03	105,37	91,99
8	Meureubo	98,56	93,70	61,02
9	Pante Ceureumen	112,67	92,49	51,61
10	Woyla Barat	115,59	76,12	58,33
11	Woyla Timur	127,17	80,22	37,74
12	Panton Reu	117,78	103,71	42,52
Rata - rata Kabupaten		**112,07**	**103,17**	**97,74**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011.

Penyebab utama turunnya Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 terutama dijenjang pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs terjadi akibat peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan sesuai kelompok umur usia sekolah. Sedangkan peningkatan APK ditingkat SLTA/MA terjadi akibat kemampuan ekonomi dan keterbatasan pendapatan dari orang tua murid sehingga harus menunda pendidikan anaknya setelah lulus SMP.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010. Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2011 sebesar 93,31 persen atau turun sebesar 2,59 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 95,90 persen. APM tingkat SD/MI Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 dan 2010 masih berada dibawah APM Aceh, sedangkan tahun 2011 sebesar 93,31 persen ini masih rendah jika dibandingkan dengan APM nasional tingkat SD/MI tahun 2008/2009 sebesar 95,23 persen.

Tabel 2.21.
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 - 2011

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	2009		2010		2011
	Aceh Barat	Aceh	Aceh Barat	Aceh	
APM SD/MI					
Laki-Laki	93,87		96,78		93,75
Perempuan	93,80		96,88		92,91
Jumlah	**93,83**	**96,95**	**95,90**	**97,32**	**93,31**
APM SMP/MTs					
Laki-Laki	77,22		78,70		68,59
Perempuan	82,39		70,46		77,56
Jumlah	**79,36**	**77,40**	**74,70**	**78,56**	**73,52**
APM SMA/MA					
Laki-Laki	66,55		62,94		71,32
Perempuan	64,41		75,25		69,04
Jumlah	**65,52**	**62,10**	**69,77**	**62,42**	**70,39**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2012

Angka Partisipasi Murni tingkat SLTP/MTs tahun 2011 sebesar 73,52 persen atau turun sebesar 1,18 persen dari tahun 2010 yang sebesar 74,70 persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA/MA tahun 2011 sebesar 70,39 persen atau meningkat sebesar 0,62 persen dari tahun 2010 yaitu sebesar 69,77 persen. Peningkatan Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan terjadi akibat mulai meningkatnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak–anaknya.

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan dapat terlihat dari perbandingan antara APM laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Dari Tabel 2.21 terlihat bahwa perbandingan APM SD/MI tahun 2011 antara siswa laki-laki dan perempuan yakni 93,75 dan 92,91. Demikian juga halnya dengan APM SMP/MTs yakni 68,59 dan 77,56 serta APM SMA/MA yakni 71,32 dan 69,04. Dengan demikian, partisipasi dalam hal pendidikan, secara efektif telah menuju pencapaian kesetaraan gender.

Jika dibandingkan dengan APM provinsi Aceh tahun 2009-2010, terlihat bahwa APM Kabupaten Aceh Barat tingkat SD/MI, SLTP/MTs masih dibawah Provinsi Aceh. Namun untuk tingkat SMA/MA, APM Kabupaten Aceh Barat masih lebih tinggi dari APM Provinsi Aceh.

e. Angka Putus Sekolah

Jumlah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010. Angka Putus Sekolah ditingkat jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,09 persen yaitu terjadi peningkatan sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 0,05 pesen.

Tabel 2.22.
Jumlah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Angka Putus Sekolah		
		SD dan MI	SMP dan MTs	SMA,SMK & MA
1	Johan Pahlawan	0,00	0,21	0,64
2	Samatiga	0,00	0,00	0,45
3	Woyla	0,00	0,00	0,30
4	Kaway XVI	0,00	0,52	0,00
5	Sungaimas	0,00	0,00	12,70
6	Bubon	0,00	0,00	0,00
7	Arongan Lambalek	0,00	0,00	0,19
8	Meureubo	0,30	0,00	0,14
9	Pante Ceureumen	0,00	0,00	0,49
10	Woyla Barat	0,57	0,00	0,00
11	Woyla Timur	0,43	0,00	0,00
12	Panton Reu	0,00	1,22	0,00
Rata - rata Kabupaten		**0,09**	**0,17**	**0,59**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Ditingkat SLTP/MTs Angka Putus Sekolah tahun 2011 sebesar 0,17 persen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 0,22 persen sedangkan angka putus sekolah untuk SLTA/MA meningkat sebesar 0,37 persen menjadi 0,59 persen di tahun 2011.

2.2.2.2 Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Jumlah kematian bayi dan balita pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 37 jiwa atau meningkat sebanyak 11 jiwa dibandingkan dengan jumlah kematian bayi dan balita pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang berjumlah sebanyak 26 jiwa dengan angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 adalah 99,3 persen. Meningkatnya jumlah kematian bayi dan balita pada tahun 2011 disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan yang seharusnya 4 kali selama kehamilan tapi hanya dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali menjelang kelahiran sehingga keracunan dan komplikasi terhadap janin tidak dapat terdeteksi secara dini.

Angka kematian bayi di kabupaten Aceh Barat tahun 2012 sebanyak 14 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan angka kematian bayi secara nasional tahun 2007 sebanyak 34 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat termasuk rendah sehingga target nasional tahun 2015 sebesar 23 jiwa per 1.000 kelahiran hidup diperkirakan dapat tercapai.

Tabel 2.23.
Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kab. Aceh Barat Tahun 2009 – 2011

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi dan Balita		
		2009	2010	2011
1	Johan Pahlawan	7	8	9
2	Samatiga	5	3	3
3	B ub o n	-	1	4
4	Arongan lambalek	3	2	2
5	W o y l a	4	2	2
6	Woyla Barat	1	1	3
7	Woyla Timur	-	-	2
8	Kaway XVI	5	2	6
9	Meureubo	2	1	4
10	Pante Ceureumen	2	3	2
11	Sungai Mas	1	-	-
12	Panton Rheu	4	3	-
	J u m l a h	**34**	**26**	**37**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2011.

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI meliputi kematian yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Perhitungan AKI di setiap kecamatan sulit dilakukan karena jumlah LH tidak mencapai 100.000 LH dan masih ada kemungkinan *under reported*. Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 5 jiwa. Jumlah ini sama dengan jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2010 yang berjumlah sebanyak 5 jiwa, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kab. Aceh Barat Tahun 2009 – 2011

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan		
		2009	2010	2011
1	Johan Pahlawan	1	2	3
2	Samatiga	-	-	-
3	B ub o n	-	-	-
4	Arongan lambalek	-	-	1
5	W o y l a	-	1	-
6	Woyla Barat	2	-	-
7	Woyla Timur	-	1	-
8	Kaway XVI	1	1	-
9	Meureubo	-	-	-
10	Pante Ceureumen	2	-	-
11	Sungai Mas	-	-	-
12	Panton Rheu	-	-	1
	J u m l a h	**6**	**5**	**5**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Berdasarkan SDKI tahun 2007 jumlah AKI nasional adalah 228/100.000 LH. AKI Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 sebesar 158/100.000 LH. Bila ditelusuri perkecamatan maka Kecamatan Johan pahlawan yang memberikan kontribusi kematian ibu paling banyak yakni 3 ibu. AKI Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 146/100.000 LH. Dengan demikian, target pencapaian MDG's pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup diperkirakan dapat tercapai.

Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 adalah 69,87. Angka harapan hidup ini mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 69,97. Meningkatnya angka harapan hidup ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Aceh Barat telah mengalami kemajuan yang terlihat dari panjangnya rata-rata umur penduduk yaitu selama 69,97 tahun. Membaiknya angka harapan hidup di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari peran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan.

Tabel 2.25.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat
dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional

Tahun	Angka Harapan Hidup		
	Aceh Barat	Provinsi Aceh	Nasional
2007	69,69	68,40	68,70
2008	69,78	68,50	69,00
2009	69,87	68,60	69,21
2010	69,97	68,70	69,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

d. Persentase Balita gizi buruk

Tingkat persentase prevalensi balita kekurangan gizi yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 29 balita atau 0,44 persen dari jumlah balita yang ditimbang yang berjumlah sebanyak 6.529 balita.

Jumlah balita dengan gizi buruk ini mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 13 balita atau 0,20 persen dari jumlah balita yang ditimbang yang berjumlah 6.608 balita. Bertambahnya jumlah balita kurang gizi di Kabupaten Aceh Barat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga tidak dapat memberikan asupan gizi yang cukup terhadap bayi dan balita. Selain itu kesadaran masyarakat dalam hal perhatian terhadap nutrisi anak juga masih sangat rendah.

Tabel 2.26.
Jumlah Balita yang Menderita Gizi Buruk di Kab. Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Balita Yang ditimbang	Jumlah Balita Gizi Buruk	Persentase
1	Johan Pahlawan	1.050	-	-
2	Samatiga	288	5	1,74
3	B ub o n	508	10	1,97
4	Arongan lambalek	325	4	1,23
5	W o y l a	586	-	-
6	Woyla Barat	458	-	-
7	Woyla Timur	64	2	3,13
8	Kaway XVI	499	2	0,40
9	Meureubo	1.549	-	-
10	Pante Ceureumen	689	1	0,15
11	Sungai Mas	142	5	1,35
12	Panton Rheu	371	-	-
	Jumlah 2011	**6.529**	**29**	0,44
	Jumlah 2010	6.608	13	0,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2012

2.2.2.3. Kemiskinan

a. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Untuk melihat ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan dasar minimumnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tingkat pengeluaran masyarakat. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2010 adalah Rp. 371.762,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini meningkat dari tahun 2009 yakni Rp. 341.606,00 per kapita per bulan yang sebelumnya adalah Rp. 335.955,00 per kapita per bulan di tahun 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2010 sebesar Rp. 278.389,00 per kapita perbulan, maka

garis kemiskinan Kabupaten Aceh Barat berada di atas garis kemiskinan Provinsi Aceh.

Gambar 2.14.
Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2010

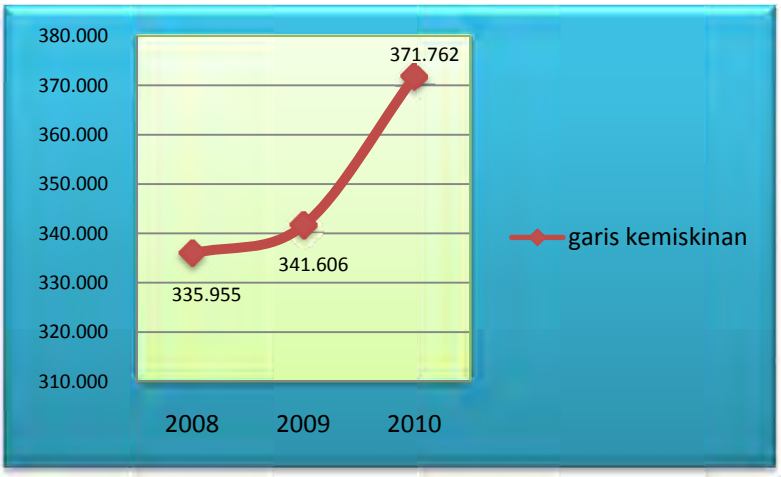

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2011.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 adalah 49.242 orang atau sebesar 29,96 persen dari total jumlah penduduk berjumlah 164.360 orang. Angka ini mengalami penurunan menjadi 45.812 orang di tahun 2009 yakni 27,09 persen dari total penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 169.111 orang. Sedangkan di tahun 2010, sejumlah 42.400 orang atau sebesar 24,43 persen dari 173.558 jiwa total penduduk Kabupaten Aceh Barat merupakan penduduk miskin. Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 sebesar 23,81 persen ini masih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Aceh dan nasional masing-masing sebesar 19,57 persen dan 12,49 persen menuju target MDG's sebesar 8-10 persen pada tahun 2014.

Dari data pengeluaran beras bulog untuk program raskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbesar berada pada Kecamatan Kaway XVI dengan jumlah 34.775 KK dengan jumlah beras yang diterima sebesar 521.625 kg, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kecamatan Singai Mas dengan jumlah 10.244 KK dengan jumlah beras yang diterima sebesar 153.660 kg, sebagaimana yang terpapar dalam tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Raskin menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Rencana		Realisasi	
		KK miskin	Beras (Kg)	KK miskin	Beras (Kg)
1.	Johan Pahlawan	21.600	324.000	23.400	351.000
2.	Samatiga	11.712	175.680	12.688	190.320
3.	Bubon	10.248	153.720	11.102	166.530
4.	Arongan Lambalek	21.336	320.040	23.114	346.710
5.	Woyla	28.212	423.180	30.563	458.445
6.	Woyla Barat	18.180	272.700	19.695	295.425
7.	Woyla Timur	12.480	187.200	13.520	202.800
8.	Kaway XVI	32.100	481.500	34.775	521.625
9.	Meureubo	21.684	325.260	23.491	352.365
10.	Pante Ceureumen	18.624	279.360	20.176	302.640
11.	Panton Reu	15.612	234.180	16.913	253.695
12.	Sungai Mas	9.456	141.840	10.244	153.660
	Jumlah	221.244	3.318.660	239.681	3.595.215

Sumber: Perum BULOG Kantor Sub Drive Wilayah III Meulaboh, 2012.

Untuk melihat sebaran penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat dalam Gambar 2.15.

Gambar 2.15.
Persentase Penyebaran KK Miskin menurut Realisasi Penerimaan Beras Bulog

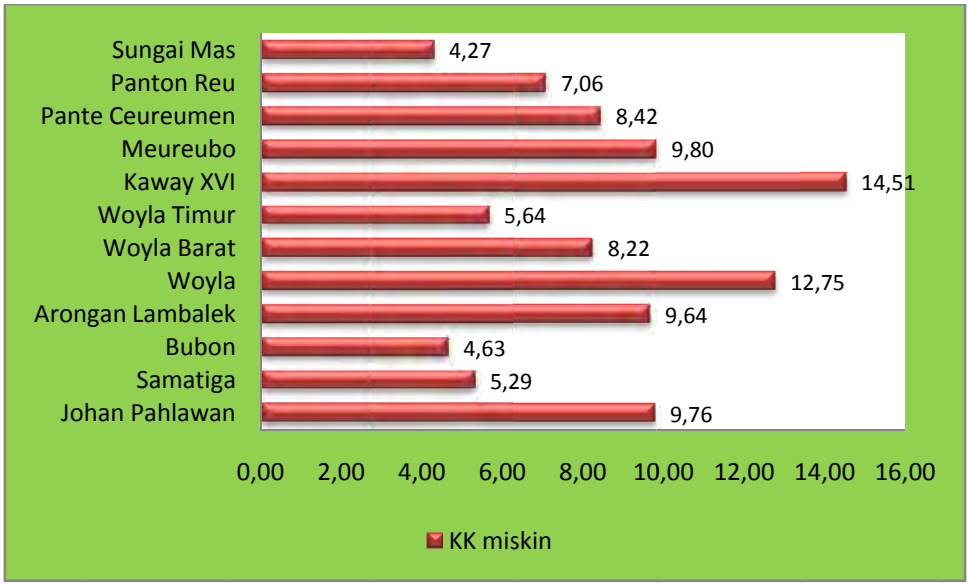

Tabel 2.28.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional

No	Wilayah	Tingkat Kemiskinan (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Aceh Barat		29,96	27,09	24,43	23,81
2	Aceh	26,65	23,53	21,80	20,98	19,57
3	Nasional	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS, 2012

Gambar 2.16.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional

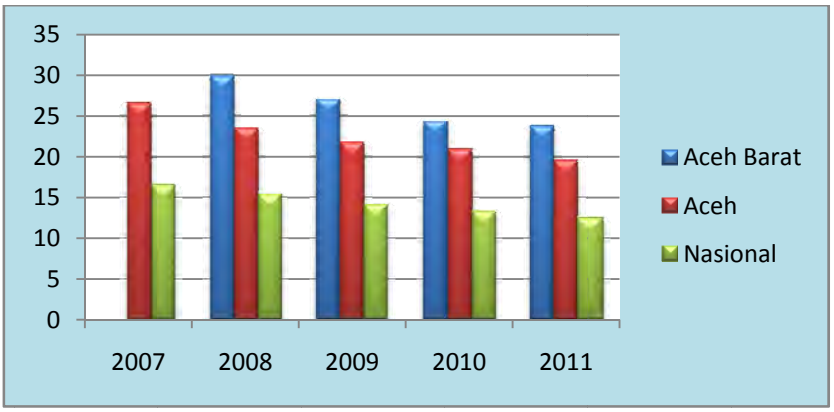

2.2.2.4. Kesempatan Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 hingga 2011 mengalami fluktuasi. TPT tahun 2009 sebesar 4,63 persen dengan jumlah pengangguran 3.216 orang dan turun di tahun 2010 menjadi 3,52 persen dengan jumlah pengangguran 2.564 orang kemudian meningkat di tahun 2011 menjadi 6,39 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.177 orang. Bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 disebabkan oleh perluasan kesempatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan atau Bursa Tenaga Kerja On Line (BKOL) dan terbatasnya Pegawai Teknis Ketenagakerjaan seperti, Instruktur Pelatihan ketrampilan, Pegawai Pengantar Kerja, Pegawai Mediator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 adalah 65,45 persen dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 75.845 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 menjadi 58,98 persen dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 70.259 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
Jumlah penduduk Usia 15 tahun ke atas	119.958	123.471	123.800
1. Angkatan Kerja	69.396	72.823	81.022
a. Bekerja	66.180	70.259	75.845
b. Pengangguran	3.216	2.564	5.177
2. Bukan Angkatan Kerja	50.562	50.648	42.778
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	57,85	58,98	65,45
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	**4,63**	**3,32**	**6,39**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2012

b. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Angka rasio ketergantungan ini menggambarkan tingkat tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Aceh Barat dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 0,4450 hingga 0,4891 dimana rata-rata jumlah usia produktif dua kali lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak produktif sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	41.729	48.056	49445	50.743	51.909
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5.480	5.922	6.089	6.257	6.398
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	47.209	53.978	55.534	57.000	58.307
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	106.085	110.382	113.577	116.558	119.225
5.	**Rasio ketergantungan**	**0,4450**	**0,4890**	**0,4889**	**0,4890**	**0,4891**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2012.

2.2.3. Fokus Dinul Islam, Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Dinul Islam

a. Jumlah Mesjid dan Meunasah

Jumlah mesjid dan meunasah yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 berjumlah 618 unityang terdiri atas 286 unit mesjid dan 332 unit meunasah.

Untuk melihat sebaran mesjid dan meunasah menurut kecamatan, dapat dilihat tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Jumlah Mesjid dan Meunasah menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Mesjid	Meunasah	Jumlah
1	Johan Pahlawan	27	30	57
2	Samatiga	32	34	66
3	B ub o n	14	17	31
4	Arongan lambalek	28	27	55
5	W o y l a	29	43	72
6	Woyla Barat	18	24	42
7	Woyla Timur	17	26	43
8	Kaway XVI	41	43	84
9	Meureubo	25	26	51
10	Pante Ceureumen	26	25	51
11	Panton Rheu	19	19	38
12	Sungai Mas	10	18	28
	Jumlah	**286**	**332**	**618**

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan dayah Kabupaten Aceh Barat

b. Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku

Pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 berjumlah 82 unit dengan total jumlah santri sebanyak 8.230 orang dibawah bimbingan 725 orang teungku. Untuk dapat melihat rincian jumlah pondok pesantren, santri dan teungku menurut kecamatan, dapat dilihat dalam tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32.
Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Pesantren	Santri	Teungku
1	Johan Pahlawan	8	1.208	100
2	Samatiga	7	747	82
3	B ub o n	7	685	51
4	Arongan lambalek	10	1.010	81
5	W o y l a	11	1.132	71
6	Woyla Barat	4	255	26
7	Woyla Timur	4	234	17
8	Kaway XVI	14	1.446	146
9	Meureubo	9	944	100
10	Pante Ceureumen	2	135	16
11	Panton Rheu	1	190	12
12	Sungai Mas	5	244	23
	Jumlah	**82**	**8.230**	**725**

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan dayah Kabupaten Aceh Barat

c. Jumlah TKQ/TPQ dan Santri

Jumlah TKQ/TPQ yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 berjumlah 321 unit yang tersebar dalam 12 kecamatan dengan jumlah santri sebesar 12.045 orang sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	TKQ/TPQ	Santri
1	Johan Pahlawan	52	2.403
2	Samatiga	32	1.071
3	B ub o n	20	785
4	Arongan lambalek	24	945
5	W o y l a	35	1.220
6	Woyla Barat	23	940
7	Woyla Timur	8	250
8	Kaway XVI	31	1.234
9	Meureubo	41	1.702
10	Pante Ceureumen	24	746
11	Panton Rheu	13	345
12	Sungai Mas	18	404
	Jumlah	**321**	**12.045**

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan dayah Kabupaten Aceh Barat

2.2.3.2. Seni Budaya

Jumlah grup kesenian yang ada di kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, kegiatan seni budaya yang ada saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini belum tersedia sebuah gedung kesenian sebagai tempat atraksi budaya atau tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.34.
Perkembangan Seni dan Budaya Kab. Aceh Barat
Tahun 2007-2011

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah grup kesenian	17	17	18	19	31
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Tabel 2.35.
Perkembangan Seni dan Budaya
Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Johan Pahlawan	16	-
2	Samatiga	-	-
3	B ub o n	2	-
4	Arongan lambalek	-	-
5	W o y l a	-	-
6	Woyla Barat	-	-
7	Woyla Timur	-	-
8	Kaway XVI	4	-
9	Meureubo	7	-
10	Pante Ceureumen	-	-
11	Sungai Mas	-	-
12	Panton Rheu	2	-
	Jumlah	31	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

2.2.3.3. Olahraga

Untuk kegiatan olahraga, disamping tersedia lapangan Teuku Umar untuk menampung kegiatan olahraga di luar ruangan, juga terdapat 6 gedung olahraga sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2.36. dan Tabel 2.38.

Tabel 2.36.
Perkembangan Olahraga Kab. Aceh Barat
Tahun 2011

No	Capaian Pembangunan	2011
1	Jumlah klub olahraga	15
2	Jumlah gedung olahraga	6

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Tabel 2.37.
Perkembangan Olahraga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga
1	Johan Pahlawan	4	3
2	Samatiga	1	1
3	B ub o n	1	-
4	Arongan lambalek	1	-
5	W o y l a	1	-
6	Woyla Barat	1	-
7	Woyla Timur	1	-

No	Kecamatan	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga
8	Kaway XVI	1	1
9	Meureubo	1	1
10	Pante Ceureumen	1	-
11	Sungai Mas	1	-
12	Panton Rheu	1	-
	Jumlah	15	6

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu. Ditinjau perkembangan data statistik daerah tahun 2009 - 2011 terlihat bahwa APS semua kelompok usia terjadi penurunan pada tahun 2011. APS kelompok usia 7-12 tahun turun sebesar 1,23 persen, APS kelompok umur 13-15 tahun turun sebesar 4,44 persen dan APS kelompok umur 16-18 tahun turun sebesar 1,04 persen. Berikut ini merupakan gambaran angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia sekolah di Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2009 sampai 2011 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 - 2011

No.	Kelompok Umur	Kabupaten Aceh Barat			Provinsi Aceh		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	7-12 tahun	98,68	98,57	97,34	99,07	99,19	99,03
2	13-15 tahun	95,70	96,90	92,46	94,31	94,99	94,07
3	16-18 tahun	80,33	82,89	81,85	72,72	73,53	72,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, angka partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Aceh Barat berada dibawah angka partisipasi sekolah Provinsi Aceh. Namun untuk kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Barat telah melebihi angka rata-rata partisipasi sekolah Provinsi Aceh.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Aceh Barat adalah 71,06 per 10.000 penduduk. Artinya terdapat 71 unit sekolah dalam 10.000 penduduk usia sekolah atau 1 unit sekolah melayani 141 orang penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI adalah 92,96. Hal ini berarti 93 unit SD/MI tersedia untuk melayani 10.000 orang penduduk usia 7-12 tahun atau 1 unit SD/MI melayani 108 orang penduduk usia 7-12 tahun. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs adalah 59,12 artinya 1 unit SMP/MTs melayani 169 orang penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan rasio ketersediaan SMA/MA adalah 38,62 yang berarti 1 unit SLTA/MA melayani 259 orang penduduk usia 16-18 tahun sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.31.

Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270 (disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar), terlihat bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat masih mampu menampung peningkatan jumlah anak usia sekolah sampai 5 tahun mendatang. Semakin dekat nilai capaian indikator ini pada standar nasional, akan mengindikasikan semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar untuk mendukung kebijakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 2.39.
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 thn	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 thn	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 thn	Rasio
1	Johan Pahlawan	35	6.151	56,90	13	3.308	39,30	13	31.470	37,59
2	Samatiga	20	1.198	166,94	6	646	92,88	3	6.899	43,73
3	B u b o n	7	802	87,28	3	387	77,52	1	3.352	27,25
4	Arongan Lambalek	17	1.295	131,27	3	615	48,78	2	5.580	36,43
5	Woyla	14	1.484	94,34	5	754	66,31	4	6.438	57,72
6	Woyla Barat	12	802	149,63	4	423	94,56	1	3.697	25,25
7	Woyla Timur	10	530	188,68	3	268	111,94	1	2.207	47,17
8	Kaway XVI	20	2.168	92,25	7	1.073	65,24	4	9.603	37,59
9	Meureubo	22	3.270	67,28	9	1.524	59,06	5	14.411	35,44
10	Pante Ceureumen	13	1.231	105,61	4	626	63,90	2	4.941	35,84
11	Panton Rheu	9	765	117,65	2	350	57,14	1	2.950	33,22
12	Sungai Mas	8	421	190,02	1	175	57,14	1	1.492	68,97
	JUMLAH	**187**	**20.117**	**92,96**	**60**	**10.149**	**59,12**	**38**	**9.840**	**38,62**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012.

c. Ketersediaan Sarana Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mendukung Kabupaten Aceh Barat sebagai pusat pengembangan kawasan (PKW) pesisir barat selatan Aceh, selain sarana pendidikan dasar dan menengah, di Kabupaten Aceh Barat saat ini juga terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Teuku Umar (UTU), Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk.Dirunding (STAI), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI), dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes).

Keempat perguruan tinggi tersebut telah dapat menampung ribuan mahasiswa(i) untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu sesuai minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa(i) yang menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut tidak saja berasal dari Kabupaten Aceh Barat, tetapi juga dari Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, Abdya, Aceh Selatan dan Simeulue. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah mahasiswa dan tenaga pengajar (dosen) pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Jumlah Mahasiswa dan Dosen menurut Perguruan Tinggi
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010/2011

No	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen
1	UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)	1	Kesehatan Masyarakat	882	66
		2	Teknik Mesin	102	25
		3	Teknik Sipil	297	30
		4	Teknik Industri	106	20
		5	Agribisnis	352	25
		6	Agroteknologi	600	37
		7	Perikanan	331	40
		8	Ekonomi Pembangunan	524	48
		9	Ilmu Administrasi Negara	400	31
		10	Sosiologi	162	24
		11	Ilmu Komunikasi	106	29
		12	Agribisnis Pertanian	4	6
		13	Budidaya Pertanian	16	10
			Jumlah	**3.882**	**391**
2	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)	1	PAI (S1)	868	33
		2	MU (S1)	181	12
		3	KPI (S1)	145	11
			Jumlah	**1.194**	**56**
3	SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI)	1	S1 Ekonomi Manajemen (EKM)	1.828	35
		2	D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan/ Management of Financial and Banking	165	9
			Jumlah	**1.993**	**44**

No	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen
4	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)	1	PGSD		
		2	Biologi		
		3	Bahasa dan Sastra Indonesia	11	7
		4	PPKN		
			Jumlah	11	7
5	POLITEKNIK KESEHATAN DEPKES	1	D3 KEPERAWATAN	328	20
		2	D3 KEBIDANAN	200	6
			Jumlah	528	26
6	AKADEMI KEBIDANAN YAYASAN PHMN	1	Kebidanan	230	39
			Jumlah	230	39
7	STIKES YPNAD	1	D3 Kebidanan	333	14
		2	S1 Keperawatan	156	4
			Jumlah	**489**	**18**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2011.

d. Rasio Guru terhadap Murid

Rata-rata rasio murid terhadap guru pada semua jenjang di Kabupaten Aceh Barat adalah 8,93 artinya 1 orang guru mengajar 9 orang murid. Dengan demikian ketersediaan guru di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat memadai bahkan sudah berlebih. Permasalahan kekurangan guru di Kabupaten Aceh Barat disebabkan karena penyebaran guru yang tidak merata. Sebagian besar guru terkonsentrasi di Kota Meulaboh yang berdampak pada minimnya jumlah guru pada daerah-daerah terisolir. Di samping hal tersebut di atas, masalah yang timbul adalah terbatasnya jumlah guru pada spesifikasi ilmu tertentu/guru bidang studi. Mengenai rasio murid terhadap guru menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Rasio Murid Terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1	Johan Pahlawan	7	17	11	15	10	10	11	13	10
2	Samatiga	5	12	4	4	4	10	6	11	9
3	B u b o n	8	5	9	5	8	4	10	0	-
4	Arongan Lambalek	7	8	7	6	11	8	13	6	-
5	Woyla	7	10	9	5	8	8	16	3	9
6	Woyla Barat	5	-	6	7	6	4	14	-	-
7	Woyla Timur	9	-	8	6	3	-	8	-	-
8	Kaway XVI	3	-	7	7	6	16	11	4	6
9	Meureubo	5	13	8	11	7	9	13	4	5
10	Pante Ceureumen	5	-	9	7	9	7	10	-	4
11	Panton Rheu	5	-	7	10	10	8	9	-	-
12	Sungai Mas	6	-	7	-	7	-	6	-	-
	Rata-Rata	6	14	8	8	7	9	11	8	8

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2012

2.3.1.2. Kesehatan

a. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu

Jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 3 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, Rumah Sakit Montela (swasta) dan Rumah Sakit TNI-AD yang ketiganya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 sangat kecil yakni 1,69 dimana 1 unit rumah sakit melayani 59.177 jiwa penduduk.

Rasio untuk puskesmas adalah 7,32 per 100.000 penduduk atau 1 unit Puskesmas melayani 13.656 jiwa penduduk, puskesmas pembantu memiliki rasio sebesar 24,78 per 100.000 penduduk atau 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 4.035 jiwa penduduk, dan rasio Poskesdes adalah 27,04 per 100.000 penduduk 3.699 jiwa penduduk. Jumlah sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes
1	Johan Pahlawan	3	2	4	2
2	Samatiga	-	1	6	3
3	B ub o n	-	1	2	2
4	Arongan lambalek	-	1	3	5
5	W o y l a	-	1	3	3
6	Woyla Barat	-	1	3	8
7	Woyla Timur	-	1	2	2
8	Kaway XVI	-	1	8	5
9	Meureubo	-	1	6	5
10	Pante Ceureumen	-	1	3	5
11	Sungai Mas	-	1	2	4
12	Panton Rheu	-	1	2	4
	J u m l a h	**3**	**13**	**44**	**48**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2012

b. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat masih sangat kecil. Rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 adalah 27,04 per 100.000 penduduk dimana 1 orang dokter melayani 3.551 jiwa penduduk. Untuk tenaga para medis yang paling besar rasionya adalah perawat dan bidan yaitu sebesar 336,84 per 100.000 penduduk atau 1 orang perawat/bidan melayani 244 jiwa penduduk. Sedangkan tenaga para medis lainnya mempunyai rasio antara 13,52 sampai dengan 56,33 per 100.000 penduduk. Untuk mengetahui tentang jumlah tenaga kesehatan dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.43.
Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Unit Kerja Kab. Aceh Barat Tahun 2011

No	Unit Kerja	Tenaga Kesehatan						
		Medis (Dokter)	Perawat dan Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesmas
1	Puskesmas	20	430	22	14	49	16	12
2	RSUD CND	30	283	23	7	48	2	5
3	Dinas Kesehatan	-	14	13	5	3	6	20
J u m l a h		**50**	**727**	**58**	**26**	**100**	**24**	**37**
Rasio per 100.000 Penduduk		27,04	336,84	32,67	14,65	56,33	13,52	20,84

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2012

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat dan bidan dengan jumlah 727 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah sanitasi yang hanya berjumlah 24 orang. Dengan demikian akses pada pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 belum dapat terlaksana secara maksimal akibat terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan yang dimiliki dan belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama didaerah pedesaan dan daerah terpencil.

Adapun penyebaran sarana kesehatan berdasarkan kecamatan dan penempatan tenaga medis (dokter) berdasarkan UPTD Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.44.
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Pada Puskesmas Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan			Jumlah Tenaga Medis		
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes /Polindes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jml
1	Johan Pahlawan	2	4	2	5	2	7
2	Samatiga	1	6	3	1	-	1
3	B ub o n	1	2	2	-	-	-
4	Arongan lambalek	1	3	5	1	-	1
5	W o y l a	1	3	3	1	-	1
6	Woyla Barat	1	3	8	1	-	1
7	Woyla Timur	1	2	2	-	-	-
8	Kaway XVI	1	8	5	2	-	2
9	Meureubo	1	6	5	1	-	1
10	Pante Ceureumen	1	3	5	1	-	1
11	Sungai Mas	1	2	4	2	-	2
12	Panton Rheu	1	2	4	1	1	2
	J u m l a h	**13**	**44**	**48**	**16**	**3**	**19**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2012

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

a. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2012 adalah 0,211 yang berarti dalam 1000 orang jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 (prediksi penduduk berjumlah 182.364 orang), hanya 38 orang yang baru bisa mendapatkan pelayanan persampahan. Diharapkan pada akhir periode RPJM di tahun 2017, rasio ini dapat meningkat menjadi 0,660 yang berarti dalam 1000 orang jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2017 (prediksi penduduk berjumlah 208.098 orang), 137 orang diantaranya telah bisa mendapatkan pelayanan persampahan.

b. Persentase penduduk berakses air minum

Tahun 2012, sejumlah 84,49 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat atau sejumlah 154.079 orang telah mendapatkan akses air bersih (air minum). Diharapkan dalam 5 tahun mendatang dapat terjadi peningkatan sebesar 2,25 persen menjadi 86,74 persen atau sebesar 180.504 orang penduduk di akhir tahun 2017 telah mendapatkan akses air minum.

Jika ditinjau dari Rumah tangga pengguna air bersih pipa, pada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Barat sejumlah 10.782 rumah tangga (23,87 persen) dari 45.170 rumah tangga yang ada di kabupaten Aceh Barat telah menggunakan air bersih pipa.

c. Persentase luas permukiman yang tertata

Dari total luas permukiman yang ada di Kabupaten Aceh Barat, sebesar 84,70 persen diantaranya sudah tertata dengan baik. Pada tahun 2017, diharapkan terjadi peningkatan sebesar 7,30 persen sehingga di akhir periode bupati terpilih sebesar 92,00 persen dari permukiman yang ada, dapat tertata dengan baik.

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

a. Infrastruktur jalan dan jembatan

Ketersedian sarana transportasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun suatu wilayah. Transportasi yang utama di Kabupaten Aceh Barat untuk menjangkau wilayah-wilayah diseluruh kecamatan berupa perhubungan darat yang didukung oleh infrastruktur jalan dan jembatan. Kondisi infrastruktur saat ini sebahagiannya masih mengalami kerusakan akibat musibah gempa dan tsunami. Walaupun demikian, perkembangan prassarana transportasi darat dalam Kabupaten Aceh Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam upaya peningkatan prasarana transportasi darat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan donatur dari berbagai negara terus berupaya membangun dan memperbaiki kondisi jalan dan jembatan yang ada.

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 adalah 884,49 km. Panjang jalan serta kondisi jalan dalam Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

Kondisi jalan	Panjang Jalan (km)	Persentase (%)
Mantap	175,58	19,85
Sedang	109,43	12,37
Rusak	213,50	24,13
Rusak Berat	328,36	37,13
Jumlah	**884,49**	**100**

Sumber: Dinas Bina Marga, 2011

Dengan keberadaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang secara normatif dan umumnya akan merupakan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer yang akan melintasi pusat-pusat pelayanan wilayah, dan keberadaan Jalan Kabupaten sedemikian rupa, maka pada perkembangan awalnya dapat dikemukakan bahwa konfigurasi jaringan jalan di Kabupaten Aceh Barat cenderung berpola dendritic (dengan memusat ke arah pusat-pusat di Jalan Nasional).

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin bertambahnya ruas-ruas jalan kabupaten, pola jaringan jalan tersebut semakin berpola intermeshed (membentuk jejaring). Pola demikian ini akan sangat berperan bagi upaya memberikan pelayanan pergerakan bagi masyarakat, dan pengembangan pemanfaatan ruang di bagian-bagian wilayah yang relatif jauh dari jaringan jalan utama, baik ke arah pesisir maupun ke arah pedalaman. Secara aktual jaringan jalan ini ikut berperan juga dalam memberikan akses ke permukiman di pedalaman bagian selatan. Guna pengembangan sistem dan fungsi jaringan jalan di wilayah Kabupaten Aceh Barat, perlu diselaraskan dengan sistem pusat pelayanan dan hirarkinya. Berkaitan dengan sistem pusat pelayanan dan hirarkinya, maka dalam pengembangan sistem jaringan jalan dimasa yang akan datang.

Jalan Nasional dengan status fungsi jalan sebagai jalan Arteri Primer menghubungkan antara ibukota Provinsi dengan kota-kota diwilayah pesisir Pantai Barat Sumatera yang juga menghubungkan antara ibukota Provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Sumatera Utara (Medan) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui jalur barat yaitu Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Jeuram-Blang Pidie-Tapaktuan-Singkil-Subussalam-Medan. Panjang jalan nasional (arteri primer) yang melalui wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu sekitar 56,65 km.

Jalan Strategis Nasional yang menghubungkan antara Sigli-Bereuneun-Tangse-Mane-Geumpang-Meulaboh dengan panjang jalan sekitar 97,91 km dengan fungsi jalan saat ini sebagai Jalan provinsi (Kolektor Primer). Jalur jalan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan wilayah Pesisir Pantai Timur Sumatera dengan wilayah Pantai Barat Sumatera. Jalan ini sangat efektif melayani pergerakan dari wilayah tersebut.

Jalan provinsi yang berperan secara fungsional sebagai jalan kolektor primer secara singkat menghubungkan wilayah Kabupaten Aceh Barat (Kota Meulaboh) dengan wilayah sekitar (ibukota kabupaten sekitar) dan berdasarkan pengertian dan cakupan fungsi Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat di Kabupaten Aceh Barat dengan pusat-pusat di Kabupaten tetangga. Dalam hal ini peluang pengembangan Jalan Kolektor Primer (jalan Provinsi) yang menghubungkan Takengon (Aceh Tengah) di sebelah timur laut wilayah Aceh Barat dengan pusat pelayanan Meulaboh. Peluang pengembangan di masa yang akan datang dengan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Lhokseumawe-Bireun-Takengon-Blangkejeren dan Meulaboh sebagai pusat pengembangan pelayanan masa depan diarahkan dengan kemampuan pelayanan skala regional dan nasional berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan status kondisi jalan dari kolektor berpeluang untuk dikembangkan menjadi jalan arteri.

Jalan Kabupaten di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dihubungkan dengan pola hirarki pusat-pusat pelayanan, Jalan Lokal Primer pada prinsipnya adalah akses dari Jalan Arteri Primer dan atau Jalan Kolektor Primer ke ibukota kecamatan atau pusat pelayanan tingkat kecamatan, dan antar ibukota/pusat pelayanan tingkat kecamatan yang saling berdekatan atau berpeluang mempunyai hubungan aksesibilitas langsung. Jalan Lokal sekunder pada prinsipnya adalah jalan ke pusat pelayanan di bawah pusat kecamatan atau lokasi-lokasi penting dan strategis lainnya, yang karena karakter dan lokasinya. Berdasarkan karakter dan fungsi pelayanan jaringan eksisting saat ini adalah pelayanan jaringan jalan lokal sekunder yang akan berperan mendukung pengembangan kegiatan pada kawasan budidaya di pesisir, yang juga sekaligus terkait dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa dan tsunami di pesisir, khususnya berkaitan dengan pengembangan jalan pengungsian (escape route/escape road) yang menjadi kebijaksanaan penting dalam upaya mitigasi bencana alam serupa. Jalan lokal sekunder bagian tengah dan bagian utara yang akan berperan mendukung pengembangan kegiatan pada kawasan budidaya di bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka merangsang pengembangan perdesaan di pedalaman tersebut.

Tabel 2.46.
Panjang Jembatan berdasarkan Jenis Jembatan di Kabupaten

No	Kecamatan	Panjang Jembatan (Meter)		
		Rangka Baja	Jembatan Gantung	Jembatan Lainnya
1	Johan Pahlawan	-	-	288,00
2	Samatiga	-	32,00	414,00
3	Bubon	-	-	425,00
4	Arongan Lambalek	-	150,00	62,50
5	Woyla	-	120,00	287,00
6	Woyla Barat	120,00	240,00	18,00
7	Woyla Timur	-	360,00	124,00
8	Kaway XVI	240,00	480,00	275,30
9	Meureubo	-	-	152,00
10	Pante Ceureumen	100,00	460,00	264,00
11	Panton Rheu	-	560,00	45,00
12	Sungai Mas	150,00	320,00	230,00
Jumlah		**610,00**	**2.722,00**	**2.584,80**

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat, 2011.

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 adalah 281 unit dengan panjang 7.019 meter yang terdiri atas jembatan rangka baja, jembatan gantung dan jembatan lainnya. Sebesar 36,81 persen dari jembatan yang ada merupakan jembatan dalam kondisi baik, 23,04 persen dalam kondisi sedang, sisanya sebesar 40,05 persen merupakan jembatan rusak dan rusak berat.

Tabel 2.47.
Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Kondisi (Meter)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Kecamatan Johan Pahlawan	57	108	37	100
2	Kecamatan Samatiga	181	181	77	68
3	Kecamatan Bubon	162	38	110	202
4	Kecamatan Woyla	179	195	195	31
5	Kecamatan Woyla Timur	213	8	8	264
6	Kecamatan Woyla Barat	150	0	0	144
7	Kecamatan Arongan Lambalek	117	72	80	104
8	Kecamatan Meureubo	26	87	0	358
9	Kecamatan Kaway XVI	228	612	106	76
10	Kecamatan Pante Ceureumen	602	112	126	196
11	Kecamatan Panton Reu	370	184	100	59
12	Kecamatan Sungai Mas	299	20	0	370
	Jumlah Total	**2.584**	**1617**	**839**	**1.972**

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat, 2011.

b. Perhubungan Darat

Sistem pergerakan transportasi darat yang ada: Sistem pergerakan transportasi internal wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu pergerakan yang melayani cakupan wilayah secara internal. Pergerakan yang menghubungkan interaksi antara kawasan pedesaan dan perkotaan, serta dari pusat-pusat sentra kegiatan skala desa menuju simpul kegiatan pelayanan skala kecamatan dan antar kecamatan menuju pusat kegiatan skala regional kabupaten; Sistem pergerakan transportasi ekternal (intraregional) wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu pergerakan yang melayani cakupan wilayah secara intra regional wilayah umumnya untuk angkutan umum dilayani oleh kenderaan L-300 (angkutan orang) dan berbagai jenis truk untuk angkutan barang. Pergerakan yang menghubungkan interaksi antara simpul kecamatan dan Kabupaten menuju wilayah diluar Kabupaten Aceh Barat (kabupaten tetangga dan ibukota provinsi) baik ibukota provinsi NAD dan Sumut. Sistem transportasi dipengaruhi oleh aktivitas penduduk dan akan berpengaruh pada penciptaan aktivitas di sepanjang jalur jalan yang memiliki aksesibilitas yang tinggi, sementara berkembangnya permukiman memberikan bangkitan lalu lintas dengan model yang berbeda dan akan menimbulkan permasalahan latu lintas dikemudian hari terutama keberadaan persimpangan. Saat ini karena volume yang ada tidak terlalu besar maka kegiatan pengaturan hanya dilakukan oleh petugas.

Ada beberapa faktor yang menjadi karakteristik dasar pergerakan lalu lintas kota-kota di wilayah Aceh Barat: Faktor peruntukkan lahan dan perkembangan Tata Guna Lahan yang akan datang dan perkembangan perkotaan; Karakteristik Sosial Ekonomi dari penduduk yang melakukan perjalanan; Sistem dan Jumlah angkutan lokal yang melayani. Sistem transportasi jalan raya dengan jenis angkutan yang digunakan adalah angkutan pribadi dan umum. Untuk pergerakan angkutan umum skala regional yaitu dilakukan dengan menggunakan Bus 3/4 dan Angkutan L-300. Sedangkan angkutan barang yang melintasi wilayah ini baik dari tujuan Banda Aceh-Calang-Melaboh-Jeuram-terus menuju Aceh Singkil, umumnya berupa truk besar dan sedang dan kendaraan bak terbuka, angkutan ini melakukan perlintasan maupun sebagai angkutan pemasok kebutuhan pasar lokal. Angkutan barang yang biasa melalui wilayah ini merupakan angkutan sembako dan material bangunan.

Pola pergerakan transportasi eksternal (Aceh Barat) lebih dikenal dengan pergerakan regional dilayani oleh beberapa moda angkutan yang digunakan untuk melayani kegiatan masyarakat berupa Bus besar, Bus sedang dan L-300. Pergerakan yang melintasi dalam Kota Meulaboh didominasi oleh angkutan penumpang. Bila meninjau dari kegiatan masyarakat dikaitkan dengan kepadatan volume jalan maka hanya pads waktu-waktu tertentu beberapa ruas jalan mengalami kepadatan. Kepadatan yang dihasilkan dari besarnya volume tidak dalam waktu yang cukup lama dan tidak menyebabkan kendaraan berhenti total.

Karena kota Meulaboh merupakan wilayah dengan pelayanan kabupaten maka ada beberapa kegiatan pelayanan yang akan berkembang di Kota Meulaboh dan dapat memicu pergerakan, diantaranya : Kantor-kantor pelayanan seperti Kantor Bupati, Kantor pelayanan Telkom, PDAM, Polres, Kantor Kodim dan kantor-kantor dinas pemerintahan; Sekolah : Perguruan tinggi, SMU/SMK/MA Negeri dan Swasta, SLTPN/MTsN dan Swasta, SD / MI Negeri dan Swasta, TK dan Madrasah; Pelayanan Jasa : Perdagangan regional (pertokoan dan pasar), kantor pos, bank dan pelayanan jasa lainnya.

Pergerakan regional dilayani oleh Jalan dari Arteri Primer dihubungkan ke Kolektor Primer yang menghubungkan antar kecamatan atau kecamatan ke kabupaten/kota misalnya kegiatan yang ada dikota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Diharapkan pergerakan ini membentuk suatu konstelasi pergerakan. Pelayanan Internal atau pergerakan Lokal melayani pergerakan dari Pusat Kota ke tiap Desa dengan kepadatan latu tintas yang rendah, ini dipengaruhi oleh penggunaan lahan di wilayah pedesaan.

c. Perhubungan Laut

Prasarana perhubungan laut berupa pelabuhan umum, pelabuhan Jeti dan pelabuhan penyeberangan serta pelabuhan khusus yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Pelabuhan umum dan pelabuhan jeti digunakan sebagai sarana transportasi barang dari dan/atau ke Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk melayani penumpang dan barang Meulaboh – Sinabang (Siemeulu) digunakan pelabuhan penyeberangan.

d. Perhubungan Udara

Fasilitas bandar udara yang terdekat dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu Bandar udara, yaitu Bandar Cut Nyak Dien yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Prasarana perhubungan udara ini yang melayani penerbangan umum/sipil yang melayani rute penerbangan Banda Aceh-Nagan Raya-Simeulue-Medan-Jakarta.

e. Prasarana Listrik dan Telekomunikasi

Pelayanan jaringan energi listrik telah menjangkau 96,58 persen gampong. Berdasarkan data yang ada pada 2010 tercatat 298 gampong telah dijangkau jaringan listrik dari total 322 gampong yang ada. Sementara jumlah gampong yang belum dilayani atau menggunakan listrik PLN adalah 24 gampong. Pelayanan jaringan listrik ini mengalami peningkatan di tahun 2011. Dari 322 gampong yang ada, terdapat 311 gampong yang sudah mendapatkan pelayanan listrik. Hanya 11 gampong yang belum mendapatkan pelayanan listrik.

Untuk pelayanan prasarana energi listrik tersebut ke depan sifatnya adalah lebih kepada peningkatan dan perluasan jaringan dan pelayanan.

Tabel 2.48.
Kondisi Pelayanan Energi Listrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Berlistrik	Desa Belum Berlistrik	persen Desa Berlistrik
1. Johan Pahlawan	21	21	-	100,00
2. Samatiga	32	32	-	100,00
3. B u b o n	17	17	-	100,00
4. Arongan Lambalek	27	25	2	92,59
5. Woyla	43	43	-	100,00
6. Woyla Barat	24	23	1	95,83
7. Woyla Timur	26	18	8	69,23
8. Kaway XVI	44	44	-	100,00
9. Meureubo	26	26	-	100,00
10. Pante Ceureumen	25	25	-	100,00
11. Panton Reu*)	19	19	-	100,00
12. Sungai Mas	18	18	-	100,00
Jumlah/ *Total*	**322**	**298**	**11**	**96,58**

Sumber: BPS dan PT. PLN Persero Wilayah – 1 Cab. Meulaboh, 2011.

Secara khusus di kawasan perkotaan, kebutuhan listrik cukup besar dan telah terpenuhi dengan sistem jaringan yang telah menyebar ditiap wilayah kota, gardu-gardu induk telah tersedia untuk melayani kompleks permukiman baru. Jaringan listrik terbagi atas jaringan distribusi primer, sekunder dan tersier, kesemua itu dihubungkan pada gardu induk. Kebutuhan akan daya listrik di wilayah Kabupaten Aceh Barat beragam antara 450 - 3000 KWh kebutuhan ini diklasifikasi berdasarkan kegiatan masyarakat seperti untuk kebutuhan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran/ pemerintahan, publik, industri dan lainnya. Kebutuhan energi listrik untuk permukiman daya yang dibutuhkan antara 450 - 1300 KWh sedangkan selebihnya adalah kegiatan-kegiatan usaha pengolahan yang ada. Tahun 2011 melalui wilayah NAD cabang Meulaboh sudah terlayani listrik oleh PT. PLN dengan jumlah pelanggan sebanyak 121.146 dengan jumlah KWH terjual sebesar 74.573.236 KWh. Saat ini telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x110 MW yang berlokasi di desa Suak Puntung Kabupaten Nagan Raya (Perbatasan Aceh Barat-Nagan Raya) yang akan melayani kebutuhan listrik untuk Aceh.

Dari segi sarana dan prasarana telekomunikasi, hampir seluruh daerah di Aceh Barat telah memiliki jaringan seluler, hal ini ditandai dengan telah tersedianya tower BTS *(Base Transceiver Station)* hampir disetiap ibukota kecamatan. Di samping itu, perusahaan-perusahaan operator selular telah banyak yang melakukan ekspansi. Berdasarkan sumber dari Dishubkomintel Aceh Tahun 2009, untuk wilayah Aceh Barat PT. Telkomsel memiliki 23 tower, PT. Indosat 5 tower, PT. Excelcomindo 6 tower dan PT. Telkom 1 tower, yang

semua instalasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya wilayah-wilayah kecamatan yang terletak di sekitar sumbu jalan utama regional (Jalan Nasional Banda Aceh-Tapaktuan) telah dilayani oleh jaringan telepon kabel, dan pelayanan hanya di sekitar ibukota atau pusat kecamatan.

f. Prasarana Irigasi

Pelayanan irigasi di Wilayah Aceh Barat khususnya pada Daerah Irigasi (DI), yang terdiri atas 72 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat yang menjadi kewenangan kabupaten. Sedangkan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa DI Lhok Guci seluas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) hektar berada di Kecamatan Pante Ceureumen, Panton Reu, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, Kaway XVI dan Samatiga.. Pelayanan daerah irigasi untuk mendukung kegiatan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan lahan basah (area persawahan) yang banyak tersebar di 12 kecamatan. Daerah cakupan pelayanan irigasi ini bersumber dari aliran air sungai serta anak-anak sungai dan geunang yang ada di wilayah Aceh Barat.

Tabel 2.49.
Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
Kewenangan Nasional			
1	D.I. Lhok Guci	13.000,00	1. Kecamatan Pante Ceureumen; 2. Kecamatan Panton Reu; 3. Kecamatan Woyla; 4. Kecamatan Woyla Timur; 5. Kecamatan Woyla Barat; 6. Kecamatan Kaway XVI; dan 7. Kecamatan Samatiga.
Kewenangan Kabupaten			
1	D.I. Alue Diam	200,00	Gampong Pasie janeng Kecamatan Woyla Timur
2	D.I. Alue Lhok	700,00	Gampong Alue Lhok Kecamatan Kaway XVI
3	D.I. Alue Reusak	150,00	Gampong Reusak Kecamatan Samatiga;
4	D.I. Balee	100,00	Gampong Balee Kecamatan Meureubo
5	D.I. Blang Geunang	100,00	Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI
6	D.I. Blang Teungoh	200,00	Gampong Blang Teungoh Kecamatan Panton Reu
7	D.I. Canggai	100,00	Gampong Canggai Kecamatan Pante Ceureumen
Kewenangan Kabupaten			
8	D.I. Drien Caleu	150,00	Gampong Drien Calue Kecamatan Kaway XVI
9	D.I. Gaseu	150,00	Gampong Gaseu Kecamatan Sungai Mas
10	D.I. Geunang Geudong	250,00	Gampong Putim Kecamatan Kaway XVI
11	D.I. Geunang Pulong	75,00	Gampong Pante Ceureumen Kec. Pante Ceureumen
12	D.I. Jambak	80,00	Gampong Jambak Kecamatan Pante Ceureumen
13	D.I. Kinco	180,00	Gampong Alue Keumang Kec. Pante Ceureumen
14	D.I. Krueng Tinggai	200,00	Gampong Krueng Tinggai Kecamatan Samatiga
15	D.I. Krueng Tujoh	120,00	Gampong Ranub Dong Kecamatan Meureubo
16	D.I. Keutambang Tunong	70,00	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
17	D.I. Lawet	104,00	Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
18	D.I. Lhok Seuredam	150,00	Gampong Leklek Kecamatan Panton Reu
19	D.I. Meunuang	100,00	Gampong Meunuang Kecamatan Pante Ceureumen
20	D.I. Meunasah Rayeuk	200,00	Gampong Meunasah Rayeuk Kec. Kaway XVI
21	D.I. Mon Pasong	200,00	Gampong Mon Pasung Kecamatan Woyla Barat
22	D.I. Pasi Teungoh	170,00	Gampong Pasie Tengoh Kecamatan Meureubo
23	D.I. Paya Baro	150,00	Gampong Paya Baro Kecamatan Woyla Timur
24	D.I. Paya Lhok	300,00	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu
25	D.I. Paya Peunaga	150,00	Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo
26	D.I. Peunaga Cut	175,00	Gampong Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo
27	D.I. Peunia	150,00	Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI
28	D.I. Pucok Laot	200,00	Gampong Alue Penyareng Kecamatan Meureubo
29	D.I. Pucok Pancu	200,00	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
30	D.I. Pungki	150,00	Gampong Pungki Kecamatan Woyla Timur
31	D.I. Reudeup	100,00	Gampong Reudeup Kecamatan Meureubo
32	D.I. Sangkaden	175,00	Gampong Pulo Tengoh Kec. Pante Ceureumen
33	D.I. Seklemen	150,00	Gampong Paya Baro RP Kecamatan Meureubo
34	D.I. Simpang	125,00	Gampong Simpang Kecamatan Kaway XVI
35	D.I. Suak Lango	100,00	Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen
36	D.I. Tamping	150,00	Gampong Tamping Kecamatan Panton Reu
37	D.I. Tanjong Seumantok	400,00	Gampong Seumantok Kec. Pante Ceureumen
38	D.I. Tumpok Ladang	150,00	Gampong Tumpok Ladang Kec. Kaway XVI
39	D.I. Gunong Unyat	150,00	Gampong Meutulang Kecamatan Panton Reu
40	D.I Geunang Meugo Cut	50,00	Gampong Meugo Cut Kecamatan Panton Reu
41	D.I Geunang Kuala Manyeu	115,00	Gampong Kuala Manyeu Kecamatan Panton Reu
42	D.I Cot Manggi	250,00	Gampong Cot Manggi Kecamatan Panton Reu
43	D.I Baro Paya	200,00	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu
44	D.I Geunang Lhok Seureudam	48,00	Gampong Leklek Kecamatan Panton Reu
45	D.I Alue Tambo	100,00	Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI
46	D.I Alue Lhee	100,00	Gampong Alue Lhee Kecamatan Kaway XVI
47	D.I Teupin Panah	100,00	Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI
48	D.I Alue Peudeung	200,00	Gampong Alue Peudeung Kecamatan Kaway XVI
49	D.I Meunasah Ara	130,00	Gampong Meunasah Ara Kecamatan Kaway XVI
50	D.I Alue Tampak	65,00	Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI
51	D.I Geunang Pasie Jambu	45,00	Gampong Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI
52	D.I Geunang Pucok Pungki	200,00	Gampong Pucok Pungki Kecamatan Kaway XVI
53	D.I Anoe Puteh	75,00	Gampong Masjid Kecamatan Kaway XVI
54	D.I Geunang Paya Lhok	275,00	Gampong Tanjong Meulaboh Kec. Kaway XVI
55	D.I Keutambang	110,00	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
56	D.I Keuleumbah	100,00	Gampong Keuleumbah Kecamatan Woyla
57	D.I Ie Sayang	100,00	Gampong Ie Sayang Kecamatan Woyla Barat
58	D.I Karak	250,00	Gampong Karak Kecamatan Woyla Barat
59	D.I Geunang Meurapet	250,00	Gampong Karang Hampa Kec. Arongan Lambalek
Kewenangan Kabupaten			
60	D.I Rambong	50,00	Gampong Rambong Kecamatan Woyla Barat
61	D.I Tangkeh	150,00	Gampong Tangkeh Kecamatan Woyla Timur
62	D.I Tuwie Eumpeuk	200,00	Gampong Tuwie Eumpeuk Kec. Woyla Timur
63	D.I Leuhan	50,00	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
64	D.I Lueng Kanto	165,00	Gampong Suak Pante Breuh Kecamatan Samatiga

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
65	D.I Paya Lumpat	50,00	Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga
66	D.I Pinem	50,00	Pinem Kecamatan Samatiga
67	D.I Cot Lampise	35,00	Gampong Cot Seulamat Kecamatan Samatiga
68	D.I Tanoh Mirah	75,00	Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Sungai Mas
69	D.I Ramitie	100,00	Gampong Ramiti Kecamatan Sungai Mas
70	D.I Tuwi Saya	200,00	Gampong Tuwi Saya Kecamatan Sungai Mas
71	D.I Sakuy	50,00	Gampong Sakuy Kecamatan Sungai Mas
72	D.I Alue Raya	100,00	Gampong Alue Raya Kecamatan Samatiga

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan jaringan irigasi Aceh Barat belum maksimal dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 35,62 persen, untuk mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 64,38 persen lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi.

Ketersediaan air merupakan hal yang penting untuk meningkatkan intensitas taman mencapai 100 persen. Namun hal ini belum dapat dicapai karena belum berfungsinya jaringan irigasi teknis dan semi teknis secara maksimal. Disamping itu, pada daerah yang memiliki lahan potensial menjadi sawah berigasi belum didukung oleh jaringan irigasi yang memadai sehingga perlu ditingkatkan melalui penambahan saluran dan bangunan. Untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru. Pembangunan jaringan irigasi ini sangat penting dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan daerah.

g. Prasarana Air Bersih

Sumber air bersih bagi penduduk terdiri atas air bersih dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan. Air bersih perpipaan dikelola oleh PDAM, sementara sumber air bersih non-perpipaan adalah dengan memanfaatkan air sumur (air tanah), sungai, dan air hujan. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sumber air bersih yang terbesar bagi penduduk gampong adalah non-perpipaan yang sebagian besarnya berupa sumur. Sementara pelayanan air

bersih dengan perpipaan (PDAM) baru mampu melayani sebagian besar kawasan perkotaan.

h. Tempat pemakaman umum

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 sebesar 506,95 artinya di tahun 2012 terdapat 92.449 penduduk yang telah bisa mendapatkan jasa pemakaman umum. Dalam 5 tahun periode RPJM, terjadi peningkatan rasio sebesar 0,05 menjadi 507 di tahun 2017 yang berarti sebesar 105.505 orang penduduk Kabupaten Aceh Barat sudah bisa mendapatkan pelayanan pemakaman umum di akhir periode RPJM ini.

i. Perumahan

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Beberapa komponen yang dapat diperhitungkan untuk mencapai suatu lingkungan perumahan yang baik adalah bahwasanya suatu rumah tersebut hendaknya memiliki jaringan air bersih, listrik, dan sanitasi. Selain itu dapat dilihat juga berapa besar proporsi lingkungan kumuh di perkotaan (ibukota kabupaten) dan juga seberapa besar penanganan pemerintah daerah maupun pihak lainnya dalam menangani rumah tidak layak huni. Berikut di bawah ini dijelaskan gambaran umum kondisi perumahan yang terkait dengan komponen tersebut di Kabupaten Aceh Barat sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan di sektor perumahan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat 2012-2017.

- **Lingkungan Permukiman kumuh ibukota Kabupaten**

  Luas Kota Meulaboh dilihat dari permukiman perkotaan yang tumbuh di Kecamatan Johan Pahlawan dan sebagian Kecamatan Meureubo. Perkiraan luas Kota Meulaboh kurang lebih sebesar 4.370 hektar (2.570 hektar di Kecamatan Johan Pahlawan dan 1.800 hektar di Kecamatan Meureubo). Pada tahun 2012, cakupan lingkungan permukiman kumuh di Meulaboh selaku ibukota Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 15,35 persen dari luas total luas Kota Meulaboh. Artinya bahwa pada tahun 2012 terdapat 671 hektar lingkungan kumuh di Kota Meulaboh.

- **Penanganan terhadap rumah tidak layak huni**

  Rasio rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 adalah 0,24 yang berarti dari total rumah yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun

2012, terdapat 43.767 unit rumah yang sudah layak huni. Sesuai dengan program unggulan Gubernur terpilih Aceh, pembangunan rumah layak huni ini akan terus ditingkatkan terutama yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa melalui dana otsus. Diharapkan pada akhir periode Bupati terpilih Kabupaten Aceh Barat, rasio rumah layak huni ini akan meningkat menjadi 0,25 dengan kata lain terdapat 52.024 unit rumah yang sudah layak huni di akhir tahun 2017.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional

Investasi yang ada di Aceh Barat terdiri dari PMA dan PMDN. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Barat masih sangat sedikit jumlahnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2011

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2008		4	4
2009	17	9	26
2010	-	3	3
2011	2	12	14

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, 2011 dan Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2012

Jumlah investor yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 berjumlah 4 investor yang terdiri atas 4 investor Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah investasi di Aceh Barat tahun 2011 berjumlah 14 investor yang terdiri atas 2 PMDN dan 12 PMA. Menambah jumlah investasi asing maupun dalam negeri penting untuk pengembangan ekonomi, dan menjadi salah satu tugas berat Aceh Barat kedepan mengingat ketersediaan SDA yang melimpah, namun memiliki keterbatasan dana untuk mengolahnya.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Nilai investasi PMA tahun 2008 berjumlah 1 milyar rupiah sedangkan nilai realisasinya tidak tercatat. Jumlah investasi PMDN yang disetujui tahun 2011 bernilai 983,14 milyar Rupiah, sementara jumlah investasi PMA yang disetujui US$140 juta. Investor di Aceh Barat jarang melaporkan perkembangan usahanya kepada pemda setelah proses pengurusan izin, sehingga perkembangan jumlah realisasi investasinya tidak terdata dengan akurat.

Tabel 2.51.
Jumlah Investasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

Tahun	Nilai Investasi		Realisasi	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2008		Rp. 1 milyar		
2009	US$ 1.212.627.813	US$ 1.067	US$ 36.712	US$ 347
2010	US$ 63,43 milyar		Rp. 154,57 milyar	
2011	US$ 983,14 milyar	Rp. 140 juta		

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat, 2011 dan Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2012

Terbatasnya investasi di Kabupaten Aceh Barat disebabkan karena belum adanya Peraturan Daerah (PERDA)/Qanun tentang Penanaman Modal, terbatasnya kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor, belum adanya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan dan belum optimalnya peran KADIN.

2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Persentase koperasi aktif

Jumlah koperasi yang ada di kabupaten Aceh Barat tahun 2011 berjumlah 336 unit. Dari semua koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat hanya 50 persen diantaranya yang aktif. Koperasi terbanyak berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebesar 145 unit dan jumlah koperasi terkecil berada di Kecamatan Woyla Timur dan Panton Rheu yang masing-masingnya berjumlah 5 unit. Koperasi hutan rakyat dan Koperasi serba usaha tersebar diseluruh kecamatan, sedangkan jenis koperasi lainnya hanya terdapat di beberapa kecamatan saja, tergantung kebutuhan. Untuk melihat sebaran koperasi menurut jenisnya per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.52.
Jumlah Koperasi menurut Jenisnya per Kecamatan di kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Jenis Koperasi	Johan Pahlawan	Samatiga	Bubon	Arongan Lambalek	Woyla	Woyla Barat	Woyla Timur	Kaway XVI	Meureubo	Pante ceureumen	Panton Reu	Sungai Mas
1	Koperasi Angkatan Darat	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2	Koperasi Hutan Rakyat	2	1	2	1	3	1	3	6	1	3	2	3
3	Koperasi Karyawan	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
4	Koperasi Kepolisian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koperasi Kerajinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Koperasi Perdagangan Pasar	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koperasi Pegawai Negeri	41	3	1	-	-	-	-	3	2	-	-	1
8	Koperasi Pemuda	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Koperasi perikanan	10	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
10	Koperasi Pertanian	2	5	3	1	10	3	-	10	6	3	-	-
11	Koperasi peternakan	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
12	Koperasi Pondok Pesantren	4	1	3	2	2	-	-	4	1	-	-	-
13	Koperasi Sekunder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Koperasi Serba Usaha	37	5	7	6	3	1	1	10	5	3	3	3
15	Koperasi Simpan Pinjam	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Koperasi Unit Desa	1	1	1	3	2	1	1	1	4	-	-	1
17	Koperasi Veteran	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Koperasi Wanita	7	4	-	2	-	-	-	1	8	-	-	-
19	Lainnya	12	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Jumlah	145	30	17	15	20	6	5	37	36	10	5	10

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat, 2012.

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR atau LKM UKM tahun 2012 berjumlah 30 unit. Tahun 2017 diharapkan jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR atau LKM UKM ini dapat meningkat menjadi 55 unit.

c. Jumlah BPR/LKM

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 berjumlah 5 unit. Tahun 2017 diharapkan BPR ini dapat tumbuh menjadi 9 unit.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap membuka peluang terhadap persaingan dengan daerah atau kabupaten terdekat, maupun dengan daerah-daerah lainnya. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek ini diklasifikasikan dalam beberapa fokus, antara lain adalah: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Potensi ekonomi daerah

Potensi utama suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sudut pandang keuntungan komperatif *(comparative advantages)* dari sektor, subsektor dan komoditi tertentu secara relatif terhadap daerah lain (Sjafrizal, 2009). Untuk dapat mengetahui keuntungan komperatif ini, perlu diidentifikasikan sektor yang menjadi basis dalam perekonomian suatu wilayah.

Pada prinsipnya, sektor ekonomi yang terdiri atas 9 lapangan usaha pada PDRB dapat disimplifikasikan menjadi 3 sektor utama dalam perekonomian yakni sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan sektor dimana proses produksinya merupakan proses tingkat dasar yaitu lapangan usaha: (1) pertanian dan (2) pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder yaitu sektor yang sebagian atau seluruh dari proses produksinya memanfaatkan sektor primer. Sektor ini biasa disebut dengan sektor industri/pengolahan. Sektor sekunder ini terdiri dari 3 lapangan usaha yakni: (1) industri pengolahan, (2) listrik, gas dan air bersih, serta (3) bangunan/ konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah sektor yang berkaitan dengan pelayanan/jasa yang terdiri dari 4 lapangan usaha yakni: (1) perdagangan, hotel dan restoran, (2) pengangkutan dan komunikasi, (3) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta (4) jasa-jasa sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2.45.

Tabel 2.53.
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor Utama Tahun 2011

No	Lapangan Usaha	Sektor Utama	Persentase (persen)	
1	Pertanian	Primer	37,32	37,87
2	Pertambangan & Penggalian		0,55	
3	Industri Pengolahan	Sekunder	1,47	14,45
4	Listrik, Gas dan Air Bersih		0,46	
5	Bangunan/Kontruksi		12,52	
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	Tersier	19,09	47,68
7	Pengangkutan dan Komunikasi		8,81	
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan		1,83	
9	Jasa-jasa		17,95	
Jumlah			**100**	**100**

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Aceh Barat ADHB Tahun 2010

Jika dilihat distribusi persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat ADHB berdasarkan sektor utama dalam perekonomian, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat adalah sektor tersier sebesar 47,68 persen, diikuti oleh sektor primer sebesar 37,87 persen. Dari Tabel 2.45. di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum perekonomian Kabupaten Aceh Barat lebih terspesialisasi pada sektor tersier (jasa) yang didukung kuat oleh sektor primer (agraris). Dengan demikian, Kota Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat lebih terfokus pada sektor jasa dimana interaksi dan interelasi ekonomi dan perniagaan lebih menonjol yang didukung oleh hinterlandnya sebagai produsen pertanian. Kondisi ini juga merupakan potensi bagi Kota Meulaboh sebagai pusat pelayanan/jasa bagi wilayah belakangnya *(hinterland services).*

Untuk dapat melihat basis perekonomian dan konsentrasi kegiatan ekonomi secara sektoral dilakukan analisis *Location Quotient* atau *Index of Concentration (IC).* Hasil perhitungan indeks konsentrasi ini memberikan informasi yang bermanfaat tentang tingkatan ke arah mana aktivitas dan karakteristik ekonomi didistribusikan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dengan tetap mempertimbangkan nilai inflasi yang terjadi, analisis ini dilakukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Aceh Berlaku untuk periode waktu 2007-2011. Adapun hasil analisis indeks konsentrasi ekonomi secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.54.
Hasil Perhitungan Nilai *Location Quotient* dalam Penentuan Basis Perekonomian Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No.	Sektor	2007	2008	2009r	2010*	2011**	Rata-rata	Keterangan
1.	Pertanian	1,26	1,12	1,15	1,27	1,34	1,23	**Sektor Basis**
2.	Pertambangan & Penggalian	0,10	0,10	0,11	0,14	0,17	0,12	Sektor Non Basis
3.	Industri Pengolahan	0,10	0,10	0,11	0,14	0,17	0,12	Sektor Non Basis
4.	Listrik dan Air Bersih	1,35	1,32	1,23	1,03	0,98	1,18	**Sektor Basis**
5.	Bangunan/Konstruksi	1,76	1,83	1,47	1,30	1,24	1,52	**Sektor Basis**
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,82	1,69	1,44	1,30	1,19	1,49	**Sektor Basis**
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,10	1,14	0,94	0,88	0,80	0,97	Sektor Non Basis
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,89	0,82	0,68	0,65	0,69	0,75	Sektor Non Basis
9.	Jasa-jasa	1,80	1,72	1,55	1,46	1,56	1,62	**Sektor Basis**

Sumber: Diolah dari PDRB Kab. Aceh Barat dan Propinsi Aceh ADHB Tahun 2007- 2011

Dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir (2007-2011), dari 9 sektor yang terdapat dalam PDRB, terdapat 5 sektor yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Kelima sektor tersebut antara lain; (1) pertanian, (2) listrik dan air bersih, (3) bangunan/konstruksi (4) perdagangan, hotel dan restoran, dan (5) jasa-jasa. Tahun 2003 hingga tahun 2008 sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor basis di Kabupaten Aceh Barat. Namun mulai tahun 2009 hingga 2011, sektor pengangkutan dan komunikasi mulai kurang potensial perkembangannya yang menjadikan sektor ini tidak lagi manjadi sektor basis. Demikian juga halnya dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Tahun 2003 hingga 2006 sektor ini menjadi basis perekonomian. Namun mulai tahun 2007, sektor ini kurang potensial perkembangannya yang menyebabkan sektor ini tidak lagi menjadi basis perekonomian. Terdapatnya 5 basis perekonomian di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya dalam 5 sektor perekonomian yang menjadi basis perekonomian tersebut, bahkan telah dapat mengekspor kelebihan produk dari sektor ini ke luar daerah.

Tabel 2.55.
Subsektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No.	Sektor	2007	2008	2009r	2010*	2011**	Rata-rata	Keterangan
1.	**Pertanian**	1,26	1,22	1,30	1,47	1,66	1,38	Sektor Basis
a.	Tanaman Bahan Makanan	1,22	1,03	0,99	0,98	0,95	1,03	Sangat Berpotensi
b.	Tanaman Perkebunan	1,50	1,21	1,66	2,20	2,40	1,79	Sangat Berpotensi
c.	Perternakan dan Hasil-hasilnya	1,41	1,22	1,11	1,04	1,00	1,16	Sangat Berpotensi
d.	Kehutanan	1,74	1,86	1,51	1,46	1,45	1,61	Sangat Berpotensi
e.	Perikanan	0,67	0,70	0,75	0,93	1,16	0,84	Berpotensi
2.	**Pertambangan & Penggalian**							Sektor Non Basis
a.	Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
b.	Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
c.	Penggalian	0,56	0,59	0,55	0,51	0,47	0,53	Berpotensi*
3.	**Listrik,Gas & Air Minum**	1,35	1,32	1,23	1,03	0,98	1,18	Sektor Basis
a.	Listrik & Air Minum	1,39	1,35	1,25	1,02	0,94	1,19	Sangat Berpotensi
b.	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
c.	Air Bersih	0,49	0,47	0,76	1,24	2,24	1,04	Sangat Berpotensi
4.	**Bangunan/Konstruksi**	1,76	1,83	1,47	1,30	1,24	1,52	Sektor Basis
5.	**Perdagangan, Hotel & Restoran**	1,82	1,69	1,44	1,30	1,19	1,49	Sektor Basis
a.	Perdangan Besar & Eceran	1,83	1,71	1,45	1,31	1,20	1,50	Sangat Berpotensi
b.	Hotel	2,61	2,31	1,82	1,64	1,53	1,98	Sangat Berpotensi
c.	Restoran	1,43	1,28	1,07	0,99	0,92	1,14	Sangat Berpotensi
6.	**Pengangkutan & Komunikasi**	1,10	1,14	0,94	0,88	0,80	0,97	Sektor Non Basis
a.	**Pengangkutan**	1,05	1,10	0,90	0,83	0,74	0,93	Berpotensi
	1.Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
	2.Angkutan Jalan Raya	1,19	1,25	1,01	0,92	0,82	1,04	Sangat Berpotensi
	3.Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
	4.Angk.Sungai,Danau & Penyebr	29,07	22,83	10,88	6,50	3,98	14,65	Sangat Berpotensi
	5.Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
	6.Jasa Penunjang Angkutan	0,55	0,54	0,47	0,46	0,47	0,50	Tidak Berpotensi
b.	**Komunikasi**	1,66	1,54	1,43	1,53	1,63	1,56	Sangat Berpotensi
	1.Pos dan Telekomunikasi	1,69	1,57	1,46	1,56	1,66	1,59	Sangat Berpotensi
	2.Jasa Penunjang Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
7.	**Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan**	0,89	0,82	0,68	0,65	0,69	0,75	Sektor Non Basis
a.	Bank	0,78	0,66	0,51	0,51	0,58	0,61	Tidak Berpotensi
b.	Lembaga Keungan Bukan Bank	2,71	2,52	2,27	2,34	2,42	2,45	Sangat Berpotensi
c.	Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Berpotensi
d.	Sewa Bangunan	0,89	0,90	0,87	0,83	0,82	0,8]6	Tidak Berpotensi
e.	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29	Tidak Berpotensi
8.	**Jasa-jasa**	1,80	1,72	1,55	1,46	1,56	1,62	Sektor Basis
a.	Pemerintah Umum	1,99	1,90	1,72	1,62	1,74	1,79	Sangat Berpotensi
b.	Swasta	1,99	1,90	1,72	1,62	1,74	1,79	Sangat Berpotensi

Sumber: Diolah dari PDRB Kab. Aceh Barat dan Propinsi Aceh ADHB Tahun 2007-2011
*Catatan: *= berpotensi karena memiliki potensi SDA*

Jika ditinjau dari rata-rata kondisi perekonomian di Aceh Barat dalam 5 tahun terakhir, banyak sub sektor yang berpotensi untuk dikembangkan mengingat subsektor tersebut yang menggerakkan sektor-sektor basis di

Kabupaten Aceh Barat. Pada Tabel 2.47 terlihat bahwa terdapat 4 sub sektor potensial untuk dikembangkan pada sektor pertanian dimana outputnya selain telah mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Aceh Barat, sebagiannya juga dijual ke luar daerah. Sub sektor tersebut adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan kehutanan. Sedangkan sub sektor perikanan, dalam hal ini masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Berbeda halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri. Kedua sektor ini tidak pernah menjadi basis perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. Namun dalam hal ketersedian sumberdaya alam, subsektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat. Hanya saja diperlukan adanya investor untuk dapat melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya yang ada.

Pada sektor listrik dan air bersih, kedua subsektor ini berpotensi untuk dikembangkan. Sub sektor air bersih yang saat ini dikelola oleh PDAM Tirta Meulaboh harus terus dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat karena sektor air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang pada saat ini belum semua wilayah di Kabupaten Aceh Barat (termasuk kawasan kota) dapat menikmati layanan air bersih ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki kewajiban dalam hal pengembangan subsektor air bersih baik dari sisi cakupan wilayah layanan maupun dari sisi kualitas pelayanan. Dalam 5 tahun terakhir, yakni dari masa rehabilitasi dan rekonstruksi hingga saat ini sektor bangunan/konstruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masih merupakan sektor basis di Kabupaten Aceh Barat. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, ketiga sub sektornya sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat, terutama di Kota Meulaboh. Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, hanya sub sektor komunikasi yang potensial untuk dikembangkan (pos dan telekomunikasi).

Untuk sub sektor pengangkutan, meskipun belum potensial, namun angkutan penyeberangan sangat kuat dalam mendukung perekonomian Aceh Barat dan sangat potensial untuk dikembangkan. Di samping itu, subsektor angkutan jalan raya juga berpotensi untuk dikembangkan. Dalam sektor keuangan, hanya subsektor lembaga keuangan bukan bank yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan pada sektor jasa-jasa, hanya subsektor jasa pemerintahan umum yang berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam percepatan pengembangan ekonomi, Kabupaten Aceh Barat telah menyusun suatu Masterplan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, dimana wilayah kabupaten Aceh Barat dikelompokkan atas 3 zonasi pengembangan ekonomi yakni:

1) Wilayah Pengembangan Ekonomi I, dengan kegiatan ekonomi utama berupa subsektor perikanan, industri dan jasa;

2) Wilayah Pengembangan Ekonomi II, dengan kegiatan ekonomi utama berupa pengembangan tanaman bahan makanan, pertambangan dan penggalian, perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan pengembangan kawasan industri Beureugang, Kawasan Agropolitan Sawang Teubei, kawasan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM);
3) Wilayah Pengembangan Ekonomi III, dengan kegiatan ekonomi utama berupa perikanan, holtikultura, dan perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, nilam, peternakan dan Kawasan Cepat Tumbuh (KCT).

a. Sektor Pertanian

Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat cukup dominan dan terus meningkat setiap tahunnya yaitu dari sebesar 29,66 persen pada tahun 2008 hingga mencapai 37,32 persen pada tahun 2011. Hal ini memberikan dampak positif untuk perekonomian daeah ini.

Bila dilihat dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap pembentukan PDRB tahun 2011, subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 14,06 persen. Hal ini dikarenakan tingginya harga komoditi karet dan kelapa sawit sejak tahun 2009. Harga yang mahal menggiurkan produsen perkebunan karet dan kelapa sawit untuk lebih meningkatkan produksinya. Perkebunan sawit dan karet dalam kabupaten ini sebagian besarnya dikuasai oleh pihak swasta. Program pembagian bibit dan lahan tanaman karet serta kelapa sawit oleh pemerintah kepada warga membuat perkebunan karet dan sawit rakyat mulai menggeliat.

Selama kurun waktu 2008-2011 laju pertumbuhan sektor pertanian termasuk tinggi, tingginya pertumbuhan subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan sebagai subsektor yang memiliki peranan pertama dan kedua merupakan salah satu faktornya. Pada tabel 2.47 terlihat bahwa pertumbuhsn sektor pertanian ini tumbuh paling tinggi di tahun 2009 yang didongkrak oleh subsektor perkebunan. Pesatnya pertumbuhan subsektor perkebunan dikala itu disebabkan oleh naiknya harga karet dan sawit sehingga produksinya pun ikut digenjot. Pada tahun-tahun setelahnya, pertumbuhan subsektor ini tetap masih tinggi yaitu mencapai belasan persen. Selama tahun 2011 subsektor ini tumbuh 14 persen dibanding tahun 2010.

Tanaman Bahan Makanan

Luas tanam, luas panen, produksi, dan produktifitas padi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dimana pada tahun 2007 produktifitas mencapai 4,23 ton/ha turun di tahun 2011 mencapai 4,28 ton/ha. Disamping itu, luas tanam juga mengalami penurunan rasio rata-rata per tahun 2,34 persen demikian juga produktivitasnya mengalami

penurunan sebanyak 6,24 persen. Untuk komoditi lainnya seperti jagung mengalami penurunan produksi dari 1.649,00 ton pertahun di 2007 trun menjadi 473,00 ton di tahun 2011.

Tabel 2.56.
Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 sampai dengan 2011

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	2007	16.872,00	16.872,00	71.370,00	4,23
2	2008	10.499,00	10.499,00	44.199,28	4,23
3	2009	13.440,00	10.010,00	42.368,00	4,23
4	2010	13.687,00	14.568,00	62.123,00	4,26
5	2011	15.346,00	12.884,00	55.165,72	4,28
	r (persen)	(2,34)	(6,52)	(6,24)	0,29

Sumber : Diolah dari Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2008-2012

Gambar 2.17.
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 - 2011

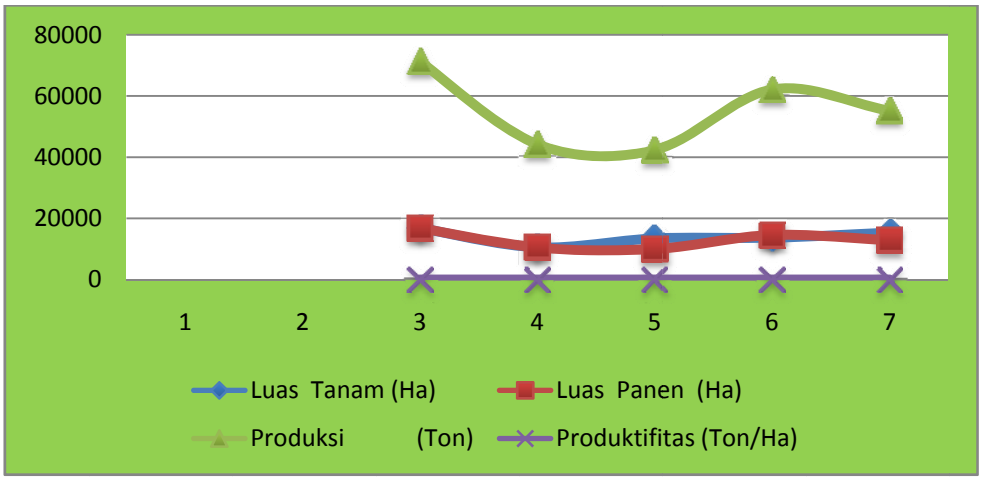

Tabel 2.57.
Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Jagung di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 sampai dengan 2011

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	2007	652,00	652,00	1.649,00	2,53
2	2008	419,00	419,00	855,00	2,04
3	2009	327,00	326,00	628,32	1,93
4	2010	280,00	250,00	511,14	2,04
5	2011	224,00	232,00	473,00	2,04
	(persen)	**(23,44)**	**(22,77)**	**(26,82)**	**(5,24)**

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, 2012

Berdasarkan data tahun 2007 hingga tahun 2011, pertumbuhan luas tanam, luas panen, produksi dan produkfitas beberapa komoditi pertanian sebagai sumber pangan di Kabupaten Aceh Barat, untuk komuditas padi terjadi penurunan pertumbuhan luas tanam, luas panen dan produksi, masing-masing sebesar 2,34 persen; 6,52 persen dan 6,24 persen, sedangkan produktifitasnya meningkat sebesar 0,29 persen. Jagung, terjadi penurunan luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas, masing-masing sebesar 23,44 persen, 22,77 persen, 26,82 persen dan 5,24 persen. Kacang Tanah, walaupun terjadi penurunan luas tanam sebesar 3,19 persen, tetapi terjadi peningkatan luas panen, produksi dan produktifitas, yaitu masing-masing 4,08 persen, 4,53 persen dan 0,46 persen. Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Pertumbuhan luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitasnya bernilai negatif, yakni mengalami penurunan masing-masing sebesar 24,59 persen, 1,48 persen 1,49 persen dan 0,02 persen untuk ubi kayu, dan 31,34 persen, 32,07 persen dan 32,07 persen untuk luas tanam, luas panen dan produktifitas ubi jalar.

Peternakan

Di bidang pertenakan terjadi penurunan jumlah produksi kerbau dari 22.553 ekor pada tahun 2007 turun menjadi 20.278 ekor di tahun 2011. Demikian juga dengan sapi dan kambing, juga terjadi penurunan walaupun tidak begitu banyak sebagaimana tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Rekapitulasi Pertenakan Kerbau, Sapi, Kambing dan Domba di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 sampai dengan 2011

No	Tahun	Kerbau (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)
1	2007	22.553	4.591	20.321	1.439
2	2008	22.665	4.657	22.776	1.655
3	2009	20.595	4.583	22.653	12.479
4	2010	22.428	5.803	20.518	1.155
5	2011	20.278	4.281	22.160	1.247
	r (persen)	(2,62)	(1,73)	2,19	(3,52)

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, 2012

Sub sektor peternakan, meliputi jumlah populasi kerbau, sapi, kambing dan domba, selama kurun waktu 2007-2011 juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,62 persen untuk kerbau, 1,73 persen untuk sapi, dan 3,52 persen untuk domba. Sedangkan untuk jumlah populasi kambing selama

kurun waktu yang sama, pertumbuhan jumlah populasinya bertambah 2,19 persen.

Perikanan

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Untuk alat penangkap ikan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat sebagaimana tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Produksi Perikanan Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2011

No	Jenis Budidaya	Produksi (Ton)			
		2008	2009	2010	2011
1	Tambak	8,80	10,80	19,58	42,26
2	Kolam	27,70	88,54	79,49	92,03
3	Perairan Umum	59,96	89,91	102,49	113,49
4	Laut	16.864,03	17.108,25	11.202,63	na
Jumlah		**19.960,49**	**17.297,5**	**11.404,19**	**247,78**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, 2012

Hingga saat ini, produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di Aceh Barat terutama ikan dan udang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sehingga masih sering didatangkan dari luar daerah terutama kabupaten di sekitar Aceh Barat, seperti Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya. Jumlah dan nilai produksi perikanan tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Untuk lebih jelas gambaran produksi perikanan di Kabupaten Aceh Barat menurut jenisnya pada tahun 2010-2011 dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2011

No	Jenis Produksi	2010		2011	
		Produksi (ton)	Nilai (Rp.000)	Produksi (ton)	Nilai (Rp.000)
1	Ikan	11.403,19	256.576.050	11.234,44	252.790.668
2	Kepiting	11,20	336.000	44,60	1.338.000
3	Udang	1.644,31	73.993.950	1.432,29	57.291.600
4	Cumi-Cumi	16,80	252.000	12,40	310.000
Jumlah		**13.075,50**	**331.158.000**	**11.723,73**	**255.011.584**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, 2012

Pengembangan subsektor ini harus ditingkatkan untuk melindungi petani ikan dari kerugian dengan merosotnya jumlah dan nilai produksinya.

Tabel 2.61.
Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis Alat dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Pukat Kantong		Jaring Insang			Jaring Angkat		Lain-lain	Rawai	Pancing Tenda
		Pukat Payung	Pukat Pantai	Jaring Hanyut	Jaring Klitik	Tramel Net	Bagan Perahu	Bagan Tancap			
1.	Johan Pahlawan	12	8	16		17			40	110	44
2.	Samatiga			105		26			56	17	
3.	Bubon										
4.	Arongan Lambalek				13	51			21		
5.	Woyla										
6.	Woyla Barat										
7.	Woyla Timur										
8.	Kaway XVI										
9.	Meureubo			271	42				38	32	9
10.	Pante Ceureumen										
11.	Panton Reu										
12.	Sungai Mas										
	2011	12	8	392	55	94			155	159	53
	2010	15	7	45	55	104				137	114
	2009	15	5	172	60	151			252	210	170

Sumber: Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Aceh Barat, 2012

Peternakan

Untuk subsektor peternakan populasi terbesar adalah ayam buras, ayam ras dan itik. Namun dilihat dari trend selama 3 tahun terakhir tercatat tahun 2009 sampai dengan 2011 untuk ayam buras tercatat penurunan dari 34,69% dari tahun 2009 menjadi 31,40% pada tahun 2010 dan kembali naik menjadi sebesar 33,91% namun masih dibawah angka populasi tahun 2009. Fluktuasi ini mungkin disebabkan karena ketergantungan Kabupaten Aceh Barat terhadap bibit dan makanan ternak dari daerah lain. Dan kemungkinan juga karena ada pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktifitas unggas dan industri ayam buras adalah industri untuk kalangan tertentu dan ketergantungan pada daerah lain baik bibit maupun makanan sangatlah besar. Ini berbeda jauh dengan populasi ayam ras dimana pada tahun 2009 yang hanya 12,42% dari seluruh populasi selama 3 tahun (2009-2011) meningkat pada tahun 2011 menjadi 43,93% hal ini disebabkan karena industri peternakan ayam ras bersifat kerakyatan (banyak masyarakat yang terlibat didalamnya) sedangkan untuk itik pertumbuhannya juga mengalami penurunan dari 33,44 pada tahun 2009 menjadi 32,98 pada tahun 2011 dari populasi selama 3 tahun. Hal ini disebabkan karena itik belum menjadi makanan utama (sehari-hari) untuk bidang unggas.

Tabel 2.62.
Jumlah Populasi Ternak Unggas menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
1.	Johan Pahlawan	38.253	3.176	15.201
2.	Samatiga	46.281	16.974	4.253
3.	Bubon	13.659	106	3.226
4.	Arongan Lambalek	8.892	168	1.995
5.	Woyla	194.375	275	2.893
6.	Woyla Barat	25.183		3.798
7.	Woyla Timur	9.557	85	4.841
8.	Kaway XVI	13.655	1.904	5.861
9.	Meureubo	7.927	1.458	6.552
10.	Pante Ceureumen	12.894	356	3.542
11.	Panton Reu	13.648	264	4.971
12.	Sungai Mas	3.854	62	2.524
Jumlah	2011	388.178	24.828	59.657
	2010	359.424	24.667	60.748
	2009	397.061	7.020	60.504

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Barat, 2012

Gambar 2.18.
Persentase Populasi Ternak Unggas menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

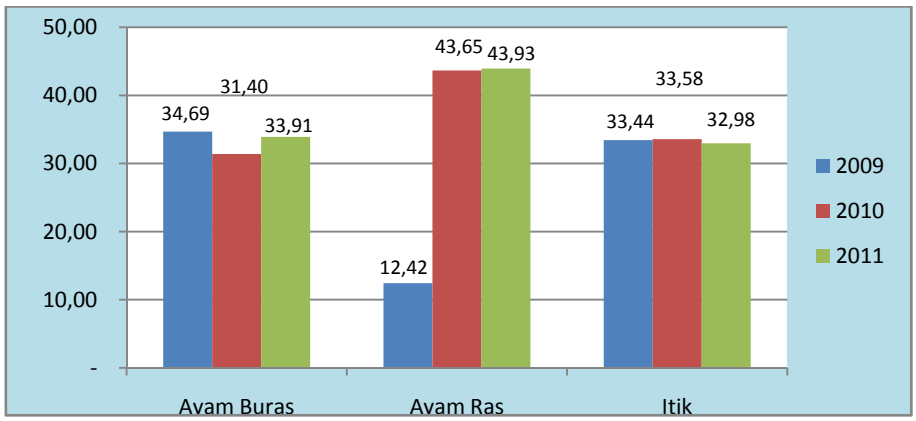

b. Sektor Industri

Untuk industri ada beberapa kegiatan diantaranya pandai besi yang mengalami kenaikan yang berarti, sedangkan untuk sisa kegiatan lainnya tidak mengalami pertumbuhan yang berarti sebagaimana terlihat pada gambar 2.19 di bawah ini

Gambar 2.19.
Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

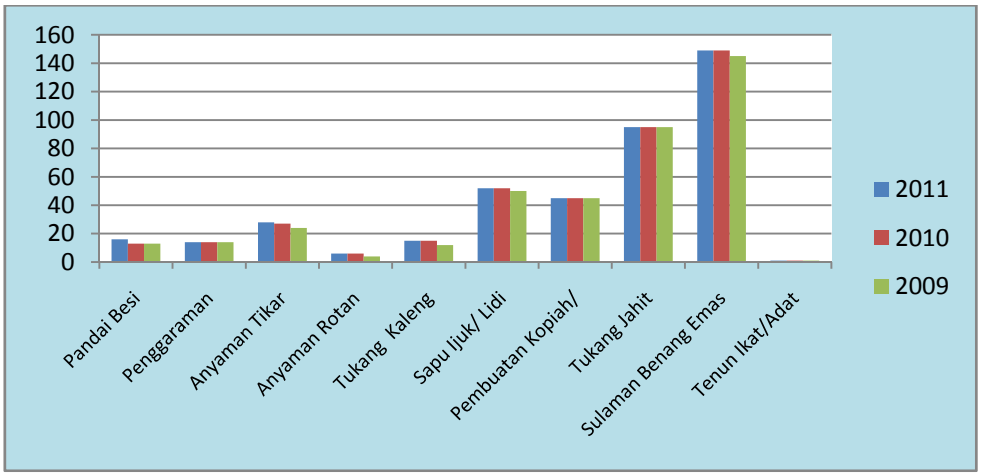

Tabel 2.63.
Jumlah Industri Tradisional menurut Jenis Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Pandai Besi	Penggaraman	Anyaman Tikar	Anyaman Rotan	Tukang Kaleng	Sapu Ijuk/ Lidi	Pembuatan Kopiah/ Tudung Layah	Tukang Jahit Bordir	Sulaman Benang Emas	Tenun Ikat/Adat	Tukang Jahit	Jumlah
1.	Johan Pahlawan	3			3	12			40	14	1		73
2.	Samatiga	2		20	1			2	17	108			150
3.	Bubon	2						2		3			7
4.	Arongan Lambalek	1			1				26				28
5.	Woyla	1		3			1		1	1			7
6.	Woyla Barat												-
7.	Woyla Timur												-
8.	Kaway XVI	2		1		2	1		2	19			27
9.	Meureubo	2	14	3		1	50	41	9	2			122
10.	Pante Ceureumen	1		1	1								3
11.	Panton Reu	1								1			2
12.	Sungai Mas	1								1			2
Jumlah	2011	16	14	28	6	15	52	45	95	149	1		421
	2010	13	14	27	6	15	52	45	95	149	1		417
	2009	13	14	24	4	12	50	45	95	145	1		403

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Barat, 2012

c. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari tiga subsektor yaitu subsektor pertambangan minyak dan gas, subsektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, serta subsektor penggalian. Di Aceh Barat yang berkembangan adalah subsektor penggalian dimana peranan yang diberikan subsektor ini pada perekonomian Aceh Barat masih sangat kecil, yaitu 0,44 persen pada tahun 2011 yang semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan subsektor kontruksi seiring berakhirnya masa rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh Barat.

Potensi sumber daya mineral berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan eksplorasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di Aceh Barat cukup beragam dan masih tersedia dalam jumlah besar. Sumber daya mineral yang tersedia terdiri dari bahan galian golongan A, B dan C. Selain bahan tambang batubara yang diminati para investor, juga terdapat bahan galian golongan C, seperti; sirtu, tanah liat, kerikil, batu gunung dan lain sebagainya yang dieksploitasi untuk kontruksi bangunan.

Bahan galian golongan A yang terkandung terutama batu bara diperkirakan memiliki cadangan mencapai 486-500 juta ton dengan luas areal 10.000 Ha pada kedalam 80-100 m. Emas plaser merupakan bahan mineral galian golongan B banyak terdapat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Sungai

Mas dan Pante Ceureumen yang diindikasikan memiliki cadangan sebesar 5,30 juta ton. Pada saat ini sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut melakukan penambangan emas secara tradisional.

Bahan galian golongan C seperti Pasir dan Batu (sirtu), lempung, pasir kuarsa dan lain sebagainya banyak terdapat di keempat kecamatan di WPE II. Sirtu terdapat hampir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan perkiraan cadangan mencapai 26 Juta Ton dengan luas areal mencapai 1.184 Ha, sedangkan lempung diperkirakan terdapat di Kecamatan Kaway XVI dengan kandungan sekitar 11 juta ton. Batu gamping juga diindikasikan terdapat di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen dengan deposit mencapai 35 juta ton. Untuk lebih jelas tentang sebaran dan potensi sumber daya mineral yang terdapat di WPE II dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut ini.

Tabel 2.64.
Potensi Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Jenis Bahan Galian	Perkiraan cadangan	Luas Daerah Potensial	Lokasi Tebaran	Keterangan
1	**Golongan A**				
	- Batubara	700.000 ton	27.251 Ha	Kec. Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Woyla Timur dan Sungai Mas	Tahap eksplorasi dan persiapan Eksploitasi
2	Golongan B				
	- Kromium	-	-	Tutut (Krueng Woyla)	Indikasi
	- Tembaga	-	-	Tutut (Krueng Woyla)	Indikasi
	- Emas	31,63 ton pleser	26.827 Ha	Kec. Sungai Mas, Pante Ceureumen, Woyla Barat dan Panton Reu	Indikasi
	- Platina	-	-	Tutut (Krueng Woyla)	Indikasi
	- Perak		-	Tutut (Krueng Woyla)	Indikasi
	- Air Raksa		-	Tutut (Krueng Woyla)	Indikasi
3	Golongan C				
	- Bentonit	-	-	Tutut	Indikasi
	- Pasir dan Batu	26 juta ton	11,7 Ha	tersebar di seluruh DAS di Kaway XVI, Sungai Mas, Woyla Barat, Woyla Timur	Ditambang
	- Lempung/ Tanah Liat	11 Juta Ton	-	Kec. Kaway XVI	Indikasi
	-Gamping	35 Juta Ton		Kec. Sungai Mas dan P Ceureumen	Indikasi
	- Serpentinit	-	-	Kec. Kaway XVI	Indikasi
	- Pasir Kuasa	-	-	Kec. Kaway XVI	Indikasi

Sumber : Dinas Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat, 2012

Tabel 2.65.
Lokasi dan Jenis Bahan Tambang di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	Jenis Bahan Tambang/Galian/Jumlah Lokasi		
		Golongan A	Golongan B	Golongan C
1	Kaway XVI	BatuBara/ 4 Lokasi	3 Lokasi	Sirtu/10 lokasi, Tanah Liat(Urug)/2 lokasi
2	Pante Ceureumen	2 Lokasi	1 Lokasi	Koral/2 lokasi
3	Sungai Mas	2 lokasi	Emas/ 1 Lokasi	Koral dan Kerikil/2 lokasi
4	Panton Reu	-	3 lokasi	-

Sumber : Dinas Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Aceh Barat, 2012

Dari kedua tabel di atas menunjukkan bahwa Aceh Barat merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang. Pada tahun 2010 telah ada beberapa perusahaan asing dan dalam negeri yang mengeksplorasi emas dan batu bara, sehingga kontribusi subsektor ini diharapkan akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Saat ini sumber-sumber bahan tambang galian golongan A, B dan C yang ini belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang besar ini tentunya sangat diharapkan dapat dieksploitasi dengan baik dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh Barat yang adil, makmur dan bermartabat. Diharapkan pada masa mendatang peranan subsektor ini mampu mendorong peningkatan pendapatan regional Aceh Barat. Kemudahan dan kelancaran prosedur perizinan pertambangan akan membuka peluang kerja sama dengan para investor baik dari dalam maupun luar negeri.

d. Sektor Pariwisata

Kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Barat selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, dan bisa dikatakan pariwisata di Aceh Barat umumnya belum berkembang. Struktur PDRB yang ada saat ini tidak mengukur sumbangan pariwisata secara langsung. Sumbangan pariwisata tersebar di sektor-sektor ekonomi yang lain seperti sumbangan hotel dan restoran dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan jasa pariwisata masuk dalam sektor jasa-jasa lainnya.

Kabupaten Aceh Barat memiliki objek wisata, baik berupa wisata alam, benda bersejarah dan cagar budaya maupun islami. Obyek wisata tersebut tersebar di ketiga kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.66.
Objek Wisata Beserta Lokasinya di WPE I (Kota Meulaboh)

No	Objek Wisata	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
I	**Wisata Alam**		
1	Pantai Batee Puteh	Ujong Kalak	Johan Pahlawan
2	Pantai Ujong Kareung	Suak Indrapuri	Johan Pahlawan
3	Pantai Pasar Aceh	Pasar Aceh	Johan Pahlawan
4	Pantai Suak Ribee	Suak Ribee	Johan Pahlawan
5	Pantai Lanaga	Langung	Meureubo
6	Pantai Lhok Bubon	Lhok Bubon	Samatiga
7	Pantai Suak Geudeubang	Suak Geudeubang	Samatiga
II	**Wisata Budaya dan Agama**		
8	Mesjid Agung Baitul Makmur	Drien Rampak	Johan Pahlawan
9	Mesjid Tuha Gunong Kleng	Gunong Kleng	Meureubo
10	Quran Ju	Ranub Dong	Meureubo
III	**Wisata Sejarah**		
11	Kuburan Massal Tsunami	Suak Indrapuri	Johan Pahlawan
12	Tugu Tewasnya T.Umar	Ujong Kalak	Johan Pahlawan

Sumber: Bappeda Aceh Barat, 2012

Disamping itu, pariwisata di kabupaten Aceh Barat belum didukung oleh fasilitas pariwisata yang memadai, seperti: akomodasi, rumah makan, *money changer*, pusat-pusat perbelanjaan, biro perjalanan wisata, serta fasilitas infrastruktur lainnya. Kondisi objek wisatapun baik alam maupun buatan belum dikelola dengan optimal, sehingga objek wisata yang ada kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional, dan promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah masih sangat kurang. Objek wisata ini potensial untuk dikembangkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kota Meulaboh. Upaya Pemerintah Aceh Barat dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dilakukan melalui peningkatan sarana prasana kepariwisataan, kemudahan perijinan dalam usaha pariwisata, dan penambahan obyek wisata, serta pemasaran pariwisata.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan subsektor perdagangan, hotel dan restoran, antara lain adalah belum tertatanya lokasi usaha yang strategis dengan baik, belum tersedianya informasi pasar yang bersifat cepat dan akurat, baik mengenai lokasi maupun produk yang dipasarkan.

2.4.1.2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Total pengeluaran rumah tangga perkapita Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2007-2010. Tahun 2007 total pengeluaran rumah tangga perkapita sebesar Rp. 388.601,00. Tahun 2010 konsumsi rumah tangga perkapita mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 61,47 persen dari tahun 2009 menjadi Rp. 627.497,00. Tahun 2009 konsumsi ini kembali turun dan meningkat kembali di tahun 2010 menjadi Rp. 633.462,00.

Rasio pengeluaran rumah tangga dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat berkisar antara 10,94 hingga 15,20. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2008 dan rasio terendah di tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Total Pengeluaran RT	388.601	627.497	521.012	633.462
2.	Jumlah RT	35.536	41.283	42.477	43.594
3.	Rasio (1./2.)	10,94	15,20	12,27	14,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2011

2.4.1.3. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita merupakan salah satu indikator un tuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga. Berdasarkan data statistik daerah tahun 2007-2010 diketahui bahwa pengeluaran rumah tangga non pangan di Kabupaten Aceh Barat berkisar antara 35,87 persen - 44,07 persen. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat (sekitar 55,93 persen - 64,13 persen) masih untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok yakni konsumsi pangan. Sisanya sebesar 35,87 persen - 44,07 persen barulah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, perumahan serta kebutuhan lainnya. Meningkatnya persentase pengeluaran rumah tangga non pangan berarti semakin membaiknya perekonomian dalam rumah tangga.

Tabel 2.68.
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2010

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Total pengeluaran RT non pangan (persen)	35,87	43,45	42,32	44,07
2.	Total pengeluaran	388,601	627,497	521,012	633,462

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2011.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat baru saja diqanunkan pada awal minggu keempat bulan Juli 2013. Dengan demikian realisasi ketaatan terhadap RTRW belum bisa diukur.

2.4.2.2. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif (asumsi wilayah produktif ini adalah lahan yang digunakan untuk sawah, permukiman, ladang dan kebun) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 adalah seluas 134.038,90 ha atau sebesar 48,49 persen dari total wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.69.
Luas Wilayah Produktif Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Uraian	2011	persen Luas terhadap Wilayah Kabupaten
1.	Luas wilayah produktif	134.038,90 ha	48,49
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya	167.925,41 ha	60,75
3.	Rasio (1/2)	0,798	

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2012.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011 berkisar antara 0,0006 – 0,0014. Jumlah kriminalitas tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 243 kasus yang terjadi di tahun 2009 dengan kasus terbanyak adalah pencurian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus narkoba	11	12	34	35	42
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	1	1	0	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	3	6	10	16	11
4.	Jumlah kasus penganiayaan	13	20	43	45	41
5.	Jumlah kasus pencurian	66	78	116	106	145
6.	Jumlah kasus penipuan	4	12	38	23	25
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	1	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	98	130	243	225	265
9.	Jumlah penduduk	153.294	164.360	169.111	173.558	177.532
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,0006	0,0008	0,0014	0,0013	0,0009

Sumber: Polres Aceh Barat, 2012.

Meskipun angka kriminalitas menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya, namun ditinjau dari jumlah kasus menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah tindak kriminal hampir di setiap tahunnya. Untuk jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71.
Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009-2010

No	Kecamatan	2009		2010	
		Terjadi	Diselesaikan	Terjadi	Diselesaikan
1.	Johan Pahlawan	34	16	6	6
2.	Samatiga				
3.	Bubon				
4.	Arongan Lambalek	5		1	1
5.	Woyla				
6.	Woyla Barat				
7.	Woyla Timur				
8.	Kaway XVI	23	9	3	1
9.	Meureubo	31	16	5	3
10.	Pante Ceureumen	2	1		
11.	Panton Reu	2	2		
12.	Sungai Mas	1	1		
	Jumlah	98	45	15	11

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat, 2011

Perkembangan KDRT di Kabupaten Aceh Barat tahun 2009-2010 menunjukkan adanya perbaikan dimana terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 83 kasus dari 98 kasus di tahun 2009 menjadi 15 kasus di 2010. Angka kriminalitas ini

harus ditekan untuk tahun mendatang karena tingginya tingkat kriminalitas akan berpengaruh pada iklim investasi daerah.

2.4.2.2. Jumlah Demontrasi

Periode tahun 2007 hingga 2011 terjadi beberapa kali demontrasi di Kabupaten Aceh Barat. Demonstrasi yang terjadi baik di bidang politik, pendidikan maupun bidang ekonomi masih bersifat kooperatif dan tidak bersifat anarkis (demonstrasi damai) sehingga tidak menimbulkan kerusuhan dan kerusakan terhadap objek dan lingkungan sekitarnya.

2.4.2.3. Kemudahan perizinan

Rata-rata lama proses pengurusan perizinan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 tidaklah lama yakni selama 3 hari. Untuk 5 tahun ke depan, direncanakan tidak ada penambahan waktu dalam penguursan perizinan. Tahun 2012 di Kabupaten Aceh Barat belum terdapat adanya suatu sistem informasi pelayanan perizinan. Untuk kemudahan perizinan, mulai tahun 2013 telah dibangun suatu sistem informasi pelayanan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi daerah.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM Kabupaten Aceh Barat menjadi makin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kabupaten Aceh Barat dari 70,32 di tahun 2009 menjadi 70,79 di tahun 2010. Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir (69,97 tahun), angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (95,13persen), rata-rata lama bersekolah (8,48 tahun), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp.618.690. IPM Kabupaten Aceh Barat berada pada peringkat ke-14 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Jika dibandingkan dengan lingkup provinsi dan nasional yakni IPM Provinsi Aceh tahun 2010 sebesar 71,70 dan IPM nasional tahun 2010 sebesar 72,27 terlihat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan nasional.

2.4.4.1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Terhadap Jumlah PNS)

Kualitas sumber daya aparatur (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh rasio tingkat pendidikan PNS terhadap jumlah PNS secara keseluruhan. Pada tahun 2011 rasio PNS lulusan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah 0,34 yang berarti terdapat 34 orang PNS yang berpendidikan

S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010 yang mempunyai rasio sebesar 0,37 atau terdapat 37 orang PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS.

Penyebab dari kecilnya porsi PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Aceh Barat adalah kecilnya perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pemberian kesempatan belajar (beasiswa) kepada PNS dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur selama beberapa tahun terakhir. Selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hanya menyediakan beasiswa bagi para PNS dengan jumlah sangat terbatas sehingga personil PNS yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi jumlahnya sangat sedikit. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya PNS yang sudah berpendidikan lebih tinggi terutama jenjang S2 yang mengajukan pindah tugas ke luar Kabupaten Aceh Barat. Pada umumnya PNS yang mengajukan pindah tugas ini adalah orang-orang yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Barat sehingga setelah lulus PNS mereka lebih memilih untuk mengabdi di daerah asalnya masing-masing. Untuk mengetahui rasio PNS lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.72 .

Tabel 2.72.
Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011

No	Uraian	2010	2011
1.	Jumlah lulusan S1	2.057	2.009
2.	Jumlah lulusan S2	90	75
3.	Jumlah lulusan S3	1	1
4.	Jumlah lulusan (S1+S2+S3)	2.148	2.085
5.	Jumlah PNS	5.831	6.130
6.	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Terhadap Jumlah PNS	0,37	0,34

Sumber: Bagian Kepegawaian Setdakab Aceh Barat, 2012

Selain pendidikan formal dengan berbagai bidang keahlian, pendidikan struktural bagi para PNS yang menduduki jabatan struktural juga belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yaitu hanya 2 kali selama periode tahun 2007-2012 (1 kali pada tahun 2007 dan 1 kali pada tahun 2012). Akibat dari sedikitnya pelaksanaan diklat struktural ini adalah banyaknya pejabat struktural di Kabupaten Aceh Barat yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur.

Tabel 2.73.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Barat Terhadap Capaian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	11,95 %	5,46 %	5,50 %	5,51 %	5,59 %	-	>
1.1.1.2	Laju inflasi	8,49 %	11,79 %	10,72 %	9,70 %	8,18 %	-	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	12,10 juta/tahun	13,82 juta/tahun	15,60 juta/tahun	17,60 juta/tahun	-	-	-
1.2.	Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (%)	-	-	-		63 %	70 %	<
1.2.2	Partisipasi perempuan di lembaga legislative (%)	-	-	3.33	3.33	3.33	3.33	=
1.2.3	Rasio KDRT	5	5	5	10	10	20	<
1.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan(%)	-	-	38,86 %	35,69 %	40,25 %	40,30 %	<
1.2.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	-	-	54,2 %	55,8 %	58,6 %	50 %	>
1.2.6	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) (Unit)	-	-	1	1	1	1	=
1.2.7	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%) keluarga berencana dan keluarga sejahtera	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	3 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	=
1.2.9	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	-	-	-	-	38	38	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
1.2.10	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (Orang)	12	12	12	12	12	12	=
1.2.11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera I (%)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	3,602	>
1.2.12	Cakupan PUS dengan Istri Usia dubawah 20 Tahun (%)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	40.245	>
1.2.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	4,9 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	4,0 %	-	-
1.2.14	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	1,02 %	0,60 %	0,74 %	5,13 %	3,21 %	-	-
1.2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,9 %	5,1 %	4,6 %	4,4 %	4,6 %	-	-
1.2.16	Keselamatan dan perlindungan (%)	-	-	80 %	87 %	53 %	-	-
1.2.17	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	-	-	-	-	100 %	-	-
1.2.18	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) (%)	-	-	80 %	87 %	53 %	-	-
1.2.19	Rasio UMK terhadap KHL (%)	71 %	84 %	85 %	87 %	91 %		<
1.2.20	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	-	50	-	50	45	-	-
1.2.21	Jumlah calon transmigran (KK)	-	100	-	100	100	-	-
1.2.22	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	60 %	40 %	100 %	80 %	20 %	80 %	<
1.2.23	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh penanganan/ bantuan sosial	5 %	5 %	10 %	19 %	14 %	50 %	<
1.2.24	Anak Terlantar, (%)	-	-	-	8 %	-	20 %	<
1.2.25	Lansia Terlantar, (%)	-	-	40 %	-	-	30 %	<
1.2.26	Keluarga Fakir miskin dan KAT, (%)	35 %	40 %	50 %	55 %	60 %	20 %	>
1.2.27	Korban Bencana , (%)	-	-	95 %	95 %	95 %	90 %	>
1.2.28	Orang Terlantar dan Orang Gila	-	-	70 %	80 %	-	90 %	<
1.2.29	Jumlah Kelembagaan masyarakat/organisasi	30	37	40	65	229	598	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
	masyarakat pedesaan yang dibina (Unit)							
1.2.30	Persentase PKK Aktif (%)	15	15	15	15	15	100	<
1.2.31	Jumlah LSM aktif (unit)	3	1	2	1	1	20	<
1.2.32	PKK aktif (%)	10	15	15	20	20	100	<
1.2.33	Persentase Posyandu Aktif (%)	2	3	3	3	3	75	<
1.2.34	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	5	5	5	5	5	50	<
1.2.35	Jumlah peserta pendi-dikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang)	210	220	230	345	290	2500	<
1.2.36	Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)	200	205	212	215	213	642	<
1.2.37	Angka melek huruf	94,07 %	94,21 %	94,30 %	94,85 %	95,00 %	-	-
1.2.38	Angka rata-rata lama sekolah	8,20 tahun	8,20 tahun	8,20 tahun	8,23 tahun	8,48 tahun	-	-
1.2.39	Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA	-	-	-	-	 0,09 0,17 0,59	-	-
1.2.40	Jumlah kematian Bayi	-	-	34	26	37	-	-
1.2.41	Angka Kematian Ibu Melahirkan	-	-	6	5	5	-	-
1.2.42	Usia Harapan Hidup			67,87	69,97	69,97	-	-
2.	PELAYANAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Pelayanan Urusan Wajib	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
2.1.1.1	Pendidikan dasar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI SMP/MTs	-	-	98,68 95,70	98,57 95,90	97,34 92,46	-	-
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTs	-	-	-	94,3 56,3	92,96 59,12	-	-
2.1.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/murid SD/MI SMP/MTs	-	-	-	-	256 243	-	-
2.1.1.1.4	Angka Partisipasi Kasar APK SD/MI APK SMP/MTs	-	-	-	-	112,07 103,17	-	-
2.1.1.1.5	Angka Partisipasi Murni APM SD/MI APM SMP/MTs	-	-	93,83 79,36	95,90 74,70	93,31 73,52	-	-
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah APS SMA/SMK/MA	-	-	80,33	82,89	81,85	-	-
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	-	-	-	38,3	38,62	-	-
2.1.1.2.3	Rasio ketersediaan sekolah/murid SMA/MA	-	-	-	-	252	-	-
2.1.1.3	APK SMA/SMK/MA	-	-	-	-	97,74	-	-
2.1.1.4	APM SMA/SMK/MA	-	-	65,52	69,77	70,39	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
2.1.2	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	-	-	-	-	-	1 Posyandu/100 balita	>
2.1.2.2	Rasio Puskesmas, per satuan penduduk	1/12713	1/11.800	1/12192	1/13350	1/13656	1/30000	
2.1.2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4	Cukupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kebidanan (%)	-	70,9	100	66,44	75,93	90	<
2.1.2.5	Cukupan komplikasi kebidanan yang ditandatangani (%)	-	12,1%	11,97%	6,23%	12,89%	80%	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan universal child immunization (UCI) (%)	-	-	-	-	-	80%	
2.1.2.7	Cukupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.8	Cukupanpenemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	22,6%	30,6%	27%	34,6%	39,1%	70%	-
2.1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	-	-	-	100	100	100	-
2.1.2.10	Cakupan kunjungan bayi (%)	-	-	-	-	68,94%	85%	-
2.1.2.11	Cakupan kunjungan puskesmas (%)	-	-	-	105	111,0	100%	-
2.1.2.12	AKI per 5.000 KLH	0	0	0	0		-	-
2.1.2.13	AKB per 1.000 KLH	0	0	0	0	10/1000	-	-
2.1.2.14	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	-	63,1%	63,92%	76,11%	84,29%	95%	<
2.1.2.15	Cakupan pelayanan nifas (%)	-	70,9%	83,69	70,22	79,95	90	<
2.1.2.16	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BMG (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.17	Cakupan desa siaga aktif (%)	0	0	0	0	0	38%	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
2.1.2.18	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat(%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.19	Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar dipuskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.20	Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 JAM (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.21	Angka CDR –TB (%)	79,37 %	82,7 %	82,3 %	79,2 %	78,1 %	85%	<
2.1.2.22	Cakupan penemuan HIV/AIDS tertangani (%)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.23	CFR DBD (Per 10000 penduduk)	0	0	0	0	3,4	0	
2.1.2.24	Angka kesembuhan DBD (%)	-	-	-	100	100	100	=
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Pertanian	-	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	=
2.2.1.1.	Regulasi ketahanan pangan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2	Ketersedian energy dan protein per Kapita a.energi (%) b.protein (%)	-	-	-	-	-	 80 76	-
2.2.1.3.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	-	-	-	-	-	75	-
2.2.1.4	Penguatan cadangan pangan (%)	-	-	-	-	-	30	-
2.2.1.5.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (fluktuasi harga) (%)	-	-	-	-	-	10-15	-
2.2.1.6.	Konsumsi energy (k.kal/hr)	-	-	-	-	-	1,9	-
2.2.1.7.	Konsumsi protein (gr/hr)	-	-	-	-	-	50	-
2.2.1.8.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK)	32,45	30,44	36,81	41,51	46,27	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
3.	DAYA SAING DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Kemampuan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.3	Produktivitas total daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.4	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	27,5	29,0	30,1	30,7	31,6	-	-
3.1.1.5	Nilai Ekspor perdagangan (ribu US$)	-	-	-	-	53,951,9093	-	-
3.1.1.6	Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	-	-
3.1.1.8	Pertumbuhan Industri (%)	8,64	49,50	7,88	27,85	10,17	-	-
3.1.1.9	Pertumbuhan Industri (%) Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	10,22	9,78	1,60	5,80	1,28	-	-
3.1.1.10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.11	Persentase koperasi aktif (%)	244	271	277	340	336	-	-
3.1.1.12	Persentase koperasi sehat	22	15	3	15	6	-	-
3.1.1.13	Kategori Sehat (%)	15	20	21	20	20	-	-
3.1.1.14	Kategori Cukup Sehat (%)	15	17	19	-	21	-	-
3.1.1.15	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terha-dap jumlah UKM (%)	31	145	15	32	32	-	-
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	43,200	51,000	52,200	64,850	76,914	-	-
3.2.2.2	Jumlah uji kir angkutan umum	1892	2142	1672	1781	1903	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
3.2.2.3	Jumlah terminal bis tipe A	1	1	1	1	1	-	-
3.2.2.4	Jumlah tetrminal tipe C (unit)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	26.663	29.329	97.667	97.667	102.808	-	-
3.2.2.6	Komunikasi dan Infromatika	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.7	Jumlah jaringan komunikasi	30	45	45	57	57	-	-
3.2.2.8	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	5	5	7	28	28	-	-
3.2.2.9	Jumlah Penyiaran Radio/TV local (10)	2	4	4	5	5	-	-

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2007-2011

Kinerja pelaksanaan APBK Aceh Barat meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh pasal 25,29 dan 21) Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari ProvinsiPemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan .

Kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan selama pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2012 secara umum menunjukkan peningkatan. Peningkatan pendapatan sebesar Rp.132.953.174.730,72 dalam rentang waktu 5 tahun sebagian besar masih bergantung pada dana perimbangan. Rata-rata besarnya peranan dana perimbangan selama 5 tahun terakhir dalam pembentukan APBK Aceh Barat adalah sebesar 86,60 persen dengan rata-rata kontribusi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 8,55 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 69,14 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8,91 persen. Sementara itu rata-rata peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir sangat kecil yakni sebesar 4,90 persen per tahun, dengan rincian pajak daerah 0,98 persen, retribusi daerah 1,31 persen dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 0,45 persen. Kecilnya peranan PAD dalam pembentukan penerimaan daerah dan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan menunjukkan kecilnya tingkat kemandirian fiskal di Aceh Barat. Untuk dapat melihat perkembangan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat Gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

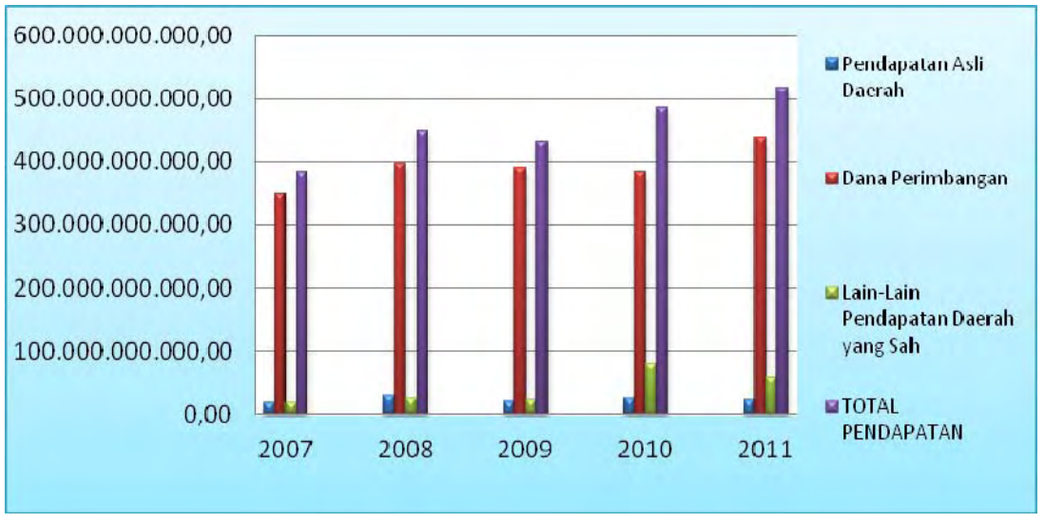

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012

Jika ditinjau pertumbuhan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 2007-2012, terlihat bahwa pertumbuhan tertinggi berasal dari hibah sebesar 300,49 persen yang diikuti oleh dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 186,78 persen. Sedangkan sektor pendapatan yang mengalami perlambatan adalah dana darurat dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya masing-masing sebesar 25 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2011

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**433.137.461.644,68**	**459.414.249.491,06**	**430.911.546.231,79**	**485.995.769.797,21**	**516.630.593.402,40**	**4,74**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**71.710.256.551,68**	**40.423.434.271,06**	**18.944.498.253,79**	**24.267.417.854,21**	**21.042.866.954,40**	**-20,49**
1.1.1	Pajak daerah	3.267.762.844	4.187.599.822,78	4.276.502.262,90	4.870.897.008,01	5.850.183.148,00	16,07
1.1.2	Retribusi daerah	5.828.349.170,00	6.286.372.001	5.990.145.924,00	5.977.950.136,00	5.364.089.688,00	-1,83
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.560.293.789,18	1.606.020.789,18	1.658.387.037,18	2.993.230.076,20	2.216.828.812,04	15,19
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11.053.850.798,50	28.343.501.658,10	11.584.981.880,50	5.040.878.010,33	2186838368	-3,95
1.2.	**Dana Perimbangan**	**345.327.772.063**	**394.921.224.489**	**390.599.655.810,00**	**382.840.786.710,00**	**437.438.662.825,00**	**6,39**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	28.900.929.566	44.237.572.263	29.469.406.810,00	37.814.821.710,00	32.043.558.825,00	8,18
1.2.2	Dana alokasi umum	267.201.000.000,00	303.463.871.000,00	315.643.644.000,00	311.356.765.000,00	367.144.104.000,00	8,54
1.2.3	Dana alokasi khusus	33.889.200.000,00	48.573.822.000,00	45.486.605.000,00	33.669.200.000,00	38.251.000.000,00	6,15
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.099.433.030**	**24.069.590.731,00**	**21.367.392.168,00**	**78.887.565.233,00**	**58.149.063.623,00**	**70,30**

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.1	Hibah	0	0	0	370.000.000,00	4.817.298.256,00	300,49
1.3.2	Dana darurat	0	0	3.500.000.000,00	0	0	-25,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	4.728.268.145	9.975.519.331,00	9.838.567.168,00	7.290.995.301,00	10.606.376.847,00	32,30
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	11.296.164.885					

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.1. Analisis Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

3.1.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Anggaran

Tidak semua pendapatan daerah yang ada, dapat direalisasikan 100 persen dalam bentuk belanja daerah. Data 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi belanja langsung berkisar antara 94,88 hingga 99,88 persen. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung hanya berkisar antara 90,08 hingga 94,41 persen. Tahun 2009 terdapat 2 aspek yang mengalami realisasi di atas target yakni belanja tidak terduga sebesar 241,16 persen dan belanja pegawai sebesar 100,15 persen. Sementara itu tahun 2011, belanja pegawai memiliki realisasi sebesar 102,66 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Aceh Barat

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	99,88	94,88	98,71
1	Belanja Pegawai	100,15	95,47	102,66
2	Belanja Bunga	-	87,20	100,00
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	97,42	96,75	57,12
5	Belanja Bantuan Sosial	94,01	97,65	97,56
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	89,26	74,74
8	Belanja Tidak Terduga	241,16	-	-
B	**Belanja Langsung**	94,41	91,42	90,08
1	Belanja Pegawai	93,36	96,58	89,87
2	Belanja Barang dan Jasa	93,31	95,56	91,96
3	Belanja Modal	95,68	87,60	88,70

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.1.2. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2009 belanja kebutuhan aparatur berjumlah Rp. 378.798.507.800,00. Tahun 2010 belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp. 917.451.638,00 dari tahun sebelumnya sedangkan di tahun 2011, belanja aparatur ini meningkat signifikan sebesar Rp. 5.786.468.348,44 dari belanja tahun 2010 sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Barat

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**295.232.605.300,00**	**316.694.423.233,50**	**312.797.367.474,44**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	188.047.070.584,00	203.626.333.228,00	237.141.162.936,44
2	Belanja Tambahan Penghasilan	58.921.506.309,00	52.576.957.149,00	49.492.007.214,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.980.000.000,00	2.002.700.000,00	2.013.600.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	620.927.752,00	652.777.328,00	552.664.332,00
B	**Belanja Langsung**	**182.915.342.691,00**	**168.089.429.999,00**	**147.469.917.092,00**
1	Belanja Honorarium PNS	14.877.796.794,00	10.799.390.448,00	6.507.085.710,00
2	Belanja Uang Lembur	47.118.000,00	68.463.500,00	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	781.000.000,00	363.000.000,00	787.000.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	903.630.000,00	131.295.000,00	42.400.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	127.703.909,00	490.794.760,00	89.234.038,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	10.920.162.645,00	8.164.341.745,00	5.045.024.100,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.330.048.444,00	263.700.225,00	290.719.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.115.653.667,00	248.653.850,00	271.648.850,00
9	Belanja perjalanan dinas	13.764.762.125,00	11.672.009.044,00	9.921.236.355,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	35.000.000,00	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	85.326.127.571,00	86.820.639.885,00	71.513.741.975,00
	TOTAL	**378.798.507.800,00**	**377.881.056.162,00**	**383.667.524.510,44**

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

Jika ditinjau besarnya proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah selama tahun 2009 hingga tahun 2011 terlihat bahwa persentase belanja aparatur tahun 2009 sebesar 79,22 dan turun mencapai 73,83 persen di tahun 2011. Dengan kata lain dalam rentang waktu 3 tahun belanja kebutuhan aparatur ini telah dilakukan efisiensi sebesar 5,39 persen.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Aceh Barat

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2009	378.798.507.800,00	478.147.947.991,00	79,22
2	Tahun anggaran 2010	377.881.056.162,00	485.813.764.980,50	77,78
3	Tahun anggaran 2011	383.667.524.510,44	519.684.321.859,06	73,83

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.1.3. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayarkan dalam suatu tahun anggaran. Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat ini di tahun 2009 berjumlah Rp.478.147.947.991,00. Angka ini mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,60 persen di tahun 2010 dan 3,17 persen di tahun 2011 menjadi Rp.501.202.821.859,06.

Jika ditinjau rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, pertumbuhan terbesar berasal dari belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar 31,64 persen per tahun yang diikuti oleh belanja gaji dan tunjangan sebesar 12,37 persen. Belanja Tidak langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,48 persen sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,19 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Aceh Barat

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**295.232.605.300,00**	**316.694.423.233,50**	**353.714.404.767,06**	**9,48**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	188.047.070.584,00	203.626.333.228,00	237.141.162.936,44	12,37
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.980.000.000,00	2.002.700.000,00	2.013.600.000,00	0,85
3	Belanja Bunga	-	2.419.683.170,50	1.544.123.328,62	-18,09
4	Belanja bagi hasil	-	-	-	0,00
B	**Belanja Langsung**	**182.915.342.691,00**	**168.089.429.999,00**	**147.469.917.092,00**	**-10,19**
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.				
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	781.000.000,00	363.000.000,00	787.000.000,00	31,64
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	9.415.389.621,00	10.685.706.708,00	10.827.575.976,00	7,41
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	833.184.250,00	888.031.960,00	181.363.800,00	-36,50
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	222.932.000,00	171.591.500,00	113.733.100,00	-28,37
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**-**	**1.029.911.748,00**	**18.500.000,00**	**-49,10**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2	Pembayaran pokok utang	-	1.029.911.748,00	18.500.000,00	-49,10
	TOTAL (A+B+C)	**478.147.947.991,00**	**485.813.764.980,50**	**501.202.821.859,06**	**2,39**

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

3.1.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Defisit riil tidak terjadi dalam setiap tahun di Kabupaten Aceh Barat. Tahun 2009 defisit riil berjumlah Rp.47.236.401.759,21 dan di tahun 2011 berjumlah Rp.3.053.728.456,66, sedangkan tahun 2010 tidak terjadi defisit anggaran di Kabupaten Aceh Barat.

Defisit riil Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 ditutup oleh realisasi penerimaaan pembiayaaan sebesar Rp.55.938.542.805,32 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2008 sebesar Rp.37.438.542.805,32 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar

Rp.18.500.000.000,00. Sedangkan tahun 2011, defisit riil yang terjadi ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.8.884.145.862,82 yang semuanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2010.

Tabel 3.6.
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	430.911.546.231,79	485.995.769.797,21	516.630.593.402,40
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	478.147.947.991,00	484.783.853.232,50	501.184.321.859,06
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.029.911.748,00	18.500.000.000,00
A	**Defisit riil**	**(47.236.401.759,21)**	**182.004.816,71**	**(3.053.728.456,66)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:	55.938.542.805,32	8.702.141.046,11	8.884.145.862,82
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	37.438.542.805,32	8.702.141.046,11	8.884.145.862,82
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.500.000.000,00	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah		-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**55.938.542.805,32**	**8.702.141.046,11**	**8.884.145.862,82**
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	8.702.141.046,11	7.672.229.298,11	5.830.417.406,16

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

Berdasarkan tabel analisis di atas, gambaran komposisi penutup defisit riil dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	57,92	49,48	60,38
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	28,62	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	13,46	50,52	39,62

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa di tahun 2009 sebesar Rp.9.676.354.440,00 atau 111,20 persen dari SILPA berasal dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan sebesar Rp.12.724.709.866,00 digunakan untuk kegiatan lanjutan. Tahun 2010 dan 2011, SILPA hanya digunakan untuk kegiatan lanjutan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.914.096.470,00 atau sebesar 21,55 persen dan Rp.8.217.190.820,00 atau sebesar 140,94. Untuk dapat melihat gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2009		2010		2011	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	8.702.141.046,11	100,00	8.884.145.862,82	100,00	5.830.417.406,16	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-		-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-		-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	9.676.354.440,00	111,20	-		-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-		-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-		-	-
7.	Kegiatan lanjutan	12.724.709.866,00	146,23	1.914.096.470,00	21,55	8.217.190.825,00	140,94

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

3.1.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kab. Aceh Barat

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	3.226.986.566,89	4.594.461.220,60	1.939.755.560,94
	Dikurangi:	-	-	-
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-
3.	Kegiatan lanjutan	12.724.709.866,00	1.914.096.470,00	8.217.190.825,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	(9.497.723.299,11)	2.680.364.750,60	(6.277.435.264,06)

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari saldo kas neraca daerah tahun 2009 hingga 2011 digunakan semuanya untuk kegiatan lanjutan. Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran mengalami surplus di tahun 2010 sebesar Rp.2.680.364.750,60, sedangkan di tahun 2009 dan 2011 sisa lebih (riil) pembiayaan adalah minus masing-masing sebesar Rp.9.497.723.299,11 dan Rp.6.277.435.264,06.

3.1.2.4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 tahun ke depan sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Data tahun dasar 2012 (Rp)	Tingkat pertum buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	1.939.755.560,94	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi:	Dikurangi	-	-	-	-	-	-
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kegiatan lanjutan	8.217.190.825,00	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**(6.277.435.264,06)**						

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

Dari data di atas, penerimaan pembiayaan daerah untuk tahun 2013 hingga 2017 diprediksikan nihil mengingat kebijakan kepala daerah yang mengarahkan agar tidak terjadi defisit anggaran dalam kurun 5 tahun mendatang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007-2012

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi dan misi Bupati untuk pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah perlunya dukungan keuangan daerah yang sehat. Dengan pengelolaan Keuangan Daerah yang memenuhi unsur transparansi, efisien dan efektif dibutuhkan suatu kebijakan keuangan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pengelolaan belanja daerah;

5. Pengelolaan pembiayaan daerah yang meliputi aspek kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah diikuti dengan pemberian sumber pendanaan yang pengelolaannya diarahkan secara tertib, taat asas, proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berpijak dari kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2012, dan dengan telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, mulai tahun 2014 Dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten Aceh Barat dialokasikan dalam bentuk dana transfer. Dengan demikian, pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat mulai tahun 2014 bertambah sebesar dana tranfer otonomi khusus disamping APBD yang telah ada. Dengan demikian, dapat diprediksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2012-2017 mendatang sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2012	Proyeksi				
			Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.	**Pendapatan**	**591.654.620.478**	**692.727.454.288**	**854.635.930.102**	**940.099.523.113**	**983.656.410.811**	**1.031.783.455.458**
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)			-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran			-	-	-	-
	Total penerimaan			-	-	-	-
	Dikurangi:			-	-	-	-
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	38.441.015.373	42.242.874.036,70	46.467.161.440,37	51.113.877.584,41	56.225.265.342,85	61.847.791.877,13
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**553.213.605.105**	**650.484.580.251**	**808.168.768.662**	**888.985.645.529**	**927.431.145.468**	**969.935.663.581**

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 2012.

Tabel 3.12.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**650.484.580.251**	**808.168.768.662**	**888.985.645.529**	**927.431.145.468**	**969.935.663.581**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	271.620.747.911	298.782.822.702	319.697.620.291	342.076.453.712	366.021.805.471
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	16.404.450.375	18.044.895.412	19.849.384.953	21.834.323.449	24.017.755.794
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama					
II	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**255.216.297.536**	**280.737.927.290**	**299.848.235.338**	**320.242.130.263**	**342.004.049.677**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Langsung	8.567.816	141.104.777.256	159.686.002.084	190.934.496.279	241.390.714.201
	Dikurangi:					
III.b	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**8.567.816**	**141.104.777.256**	**159.686.002.084**	**190.934.496.279**	**241.390.714.201**
IV	**Total rencana pengeluaran Prioritas III**	**395.259.714.899**	**386.326.064.116**	**429.451.408.107**	**416.254.518.926**	**386.540.899.703**
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	0	0	0	0	0

Dari tabel 3.12. diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat digunakan untuk rencana anggaran berimbang dengan surplus anggaran riil sebesar Rp.0,00. Kapasitas riil kemampuan keuangan tahun 2013 hingga 2017 berkisar antara Rp. 650.484.580.251,00 hingga Rp. 969.935.663.581,00.

Kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Kabupaten Aceh Barat tersebut dapat dijabarkan kembali pengeluarannya menurut prioritas pendanaan. Prioritas I diperuntukkan bagi program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan *(dedicated)* yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan berkisar antara Rp. 255.216.297.536,00 di tahun 2013 hingga mencapai Rp. 342.004.049.677,00 di tahun 2017.

Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Alokasi untuk prioritas II ini jauh lebih kecil dari prioritas I disebabkan program unggulan SKPD sebagian besar telah tercover dalam prioritas I karena mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Adapun alokasi dana untuk prioritas II ini sebesar Rp.8.567.816,00 di tahun 2013 dan meningkat mencapai Rp.241.390.714.201,00 di tahun 2017.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Adapun pagu anggaran bagi prioritas III di tahun 2013 sebesar Rp. 395.259.714.899,00 dan meningkat menjadi Rp. 386.540.899.703,00 di tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13. berikut.

Tabel 3.13.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Aceh Barat

No	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	39,23	255.216.297.536	34,74	280.737.927.290	33,73	299.848.235.338	34,53	320.242.130.263	35,26	342.004.049.677
2.	Prioritas II	0,00	8.567.816	17,46	141.104.777.256	17,96	159.686.002.084	20,59	190.934.496.279	24,89	241.390.714.201
3.	Prioritas III	60,76	395.259.714.899	47,80	386.326.064.116	48,31	429.451.408.106,59	44,88	416.254.518.926	39,85	386.540.899.703
	Total	**100,00**	**650.484.580.251**	**100,00**	**808.168.768.662**	**100,00**	**888.985.645.529**	**100,00**	**927.431.145.468**	**100,00**	**969.935.663.581**

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berangkat dari kondisi pasca Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Aceh Barat Tahap I Tahun 2007-2012, meskipun dalam laporan realisasi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2012 termasuk dalam predikat kinerja tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,22 persen, namun masih banyak permasalahan yang belum tuntas. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat yang menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Secara garis besar, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah:

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Cenderung Stagnan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2011 ADHK berkisar antara 11,95 - 5,59 persen dengan peningkatan angka pertumbuhan per tahunnya hanya berkisar -0,46 - 0,14 persen. Peningkatan pertumbuhan yang sangat kecil ini merupakan permasalahan dalam percepatan pembangunan daerah.

4.1.2 Tingginya angka inflasi

Inflasi tertinggi di Kabupaten Aceh Barat terjadi di tahun 2007 sebesar 8,49 persen. Hal ini terjadi akibat dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Mulai tahun 2009 hingga 2011 angka inflasi Aceh Barat mengalami penurunan hingga mencapai 8,18 persen di tahun 2011, namun angka ini masih berada di atas inflasi Provinsi Aceh tahun 2011 sebesar 3,43 persen dan inflasi nasional tahun 2011 sebesar 3,79 persen.

4.1.3 Tingginya jumlah penduduk miskin

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 sebesar 23,81 persen dari total jumlah penduduk. Angka kemiskinan ini telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana jumlah penduduk miskin tahun 2008 berjumlah 49.242 orang atau sebesar 29,96 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin ini masih tergolong sangat tinggi, terutama jika mengingat target RPJPD dimana persentase penduduk miskin yang hendak dicapai tidak melebihi 5 persen. Di samping tingginya jumlah penduduk miskin, dari sisi garis kemiskinan, garis kemiskinan Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 yakni sebesar Rp.371.762,00 per kapita per bulan berada di atas garis kemiskinan provinsi Aceh yakni Rp. 278.389,00 per kapita per bulan. Hal ini disebabkan oleh inflasi di Aceh Barat yang lebih tinggi dari inflasi Provinsi Aceh.

4.1.4 Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 4,63 persen menjadi 6,39 persen di tahun 2011. Peningkatan jumlah pengangguran, hal ini disebabkan perluasan kesempatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, kualitas dan daya

saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan atau Bursa Tenaga Kerja On Line (BKOL) dan terbatasnya Pegawai Teknis Ketenagakerjaan seperti, Instruktur Pelatihan ketrampilan, Pegawai Pengantar Kerja, Pegawai Mediator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

4.1.5 Lemahnya investasi dan Penanaman Modal

Bidang Investasi yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya masih belum begitu banyak diminati mengingat kondisi dan letak geografis serta belum tergalinya potensi investasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Secara umum kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas (Kondisi infrastruktur yang memadai merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah). Disamping itu terdapat beberapa permasalahan lain, antara lain belum adanya Peraturan Daerah (PERDA)/Qanun tentang Penanaman Modal, terbatasnya kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor, belum adanya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan dan belum optimalnya peran KADIN.

4.1.6. Belum mantapnya ketahanan pangan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah

a. Pertanian

Permasalahan dalam Sub-Bidang Pertanian Tanaman Pangan adalah :

1) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan;
2) Budidaya/pengembangan tanaman pangan alternatif (spesifik lokal) belum maksimal;
3) Rendahnya produktivitas lahan sawah dan lahan kering lainnya
4) Masih rendahnya SDM petani dan petugas pendamping;
5) Masih Rendahnya fungsi kelembagaan tani ;
6) Meningkatnya konversi lahan/alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; dan
7) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi.

b. Holtikultura

Permasalahan dalam Sub-Bidang Pertanian Hortikultura antara lain :

1) Rendahnya pengelolaan kebun/tanaman hortikultura; dan
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi tanaman hortikultura

c. Peternakan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang peternakan adalah:

1) Rendahnya produksi daging, telur dan susu;
2) Usaha peternakan masih usaha sampingan dan skala kecil;
3) Belum intensifnya pengelolaan usaha peternakan;
4) Sangat terbatasnya Industri Pakan dan hasil peternakan; dan
5) Rendahnya prasarana dan sarana peternakan.

d. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dalam Sub-bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

1) Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar maupun perikanan tangkap;
2) Terbatasnya investasi dalam pengembangan komoditas perikanan dan kelautan;
3) Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana penangkapan ikan;
4) Belum adanya Qanun tentang Perencanaan Tata Ruang (Zonasi) Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut;
5) Belum adanya Dewan Kelautan Indonesia di tingkat Kabupaten Aceh Barat;
6) Belum tersedianya Industri pengolahan hasil-hasil perikanan;
7) Belum optimalnya tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai
8) Masih rendahnya penerapan Teknologi Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan;
9) Masih rendahnya SDM, baik budidaya maupun Perikanan Tangkap;
10) Peran pengawasan oleh kelompok Masyarakat Pengawas (Posmaswas) masih lemah (tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai);
11) Masih adanya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan nelayan luar Provinsi Aceh (Ilegal Fishing);
12) Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah.

e. Kehutanan

Permasalahan dalam Sub-Bidang Kehutanan yaitu :

1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
2) Penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan belum terkendali sepenuhnya;
3) Belum adanya Qanun khusus tentang pengelolaan hutan; dan
4) Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan yang ada.

f. Perkebunan

Permasalahan dalam Sub-Bidang perkebunan yaitu :

1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan;
2) Rendahnya tingkat kepemilikan kebun rakyat;
3) Lemahnya posisi tawar petani dalam penentuan harga jual;
4) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi perkebunan.

4.1.7. Belum optimalnya pengelolaan potensi pertambangan

Permasalahan yang dihadapai dalam bidang pertambangan adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi tambang dan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian eksploitasi pertambangan.

4.1.8. Permasalahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Industri Kecil dan Menengah

Kabupaten Aceh Barat masih mempunyai permasalahan dalam pengembangan Bidang Perdagangan, Koperasi, Industri Kecil dan Menengahantara lain :

1) Masih lemahnya tata niaga perdagangan antar daerah dan ekspor
2) Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar) yang ada.
3) Rendahnya manajemen usaha koperasi dan UMKM;
4) Sulitnya akses permodalan dan pasar; dan
5) Belum optimalnya pengembangan produk unggulan Aceh Barat.

4.1.9. Permasalahan Bidang Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang transmigrasi adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada lokasi transmigrasi yang sudah dibangun;
2) Kurangnya penerimaan masyarakat;
3) Keterbatasan dana;
4) Lokasi eks. transmigrasi yang mempunyai potensi pertambangan saat ini berpeluang menimbulkan konflik sosial;
5) Akibat konflik sosial masa lalu, lahan masyarakat yang ditinggalkan menjadi areal terlantar/lahan tidur;
6) Masih adanya sisa HPL transmigrasi yang saat ini sebagian besar diserobot oleh pihak lain;
7) Masih terbatasnya dana untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada di lokasi Transmigrasi dan eks Transmigrasi;
8) Masih adanya sengketa lahan di lokasi transmigrasi yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan;
9) Masih banyaknya warga transmigran lokal yang sudah ditempatkan tidak menempati rumah sehingga lahan usaha yang sudah dibagikan belum diolah.

4.1.10. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah

Belum optimalnya pemanfaatan terhadap semua sumber pendapatan daerah menyebabkan pendapatan asli daerah yang diterima setiap tahunnya juga belum optimal. Terbatasnya pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan menyebabkan semakin sulitnya daerah berkembang menuju daerah yang memilliki kemandirian fiskal.

4.1.11. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat;

a. Masih terbatasnya prasarana perhubungan darat

Kondisi ini disebabkan karena masih terbatasnya ketersediaan jalan dan jembatan. Dari total panjang jalan kabupaten yang ada, hanya 19,85 persen dalam kondisi mantap dan 12,37 persen dalam kondisi sedang, sisanya sebanyak 67,77 persen dalam keadaan rusak dan rusak berat. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat terutama masyarakat di daerah

pedalaman dalam hal mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan serta dalam akses pemasaran hasil pertanian. Sedangkan untuk jembatan, panjang jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 adalah 5.916 meter yang terdiri atas jembatan rangka baja, jembatan gantung dan jembatan lainnya. Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 adalah 281 unit dengan panjang 7.019 meter yang terdiri atas jembatan rangka baja, jembatan gantung dan jembatan lainnya. Sebesar 36,81 persen dari jembatan yang ada merupakan jembatan dalam kondisi baik, 23,04 persen dalam kondisi sedang, sisanya sebesar 40,05 persen merupakan jembatan rusak dan rusak berat.

b. Belum tersedianya sarana/moda perhubungan darat yang memadai

Saat ini belum tersedia moda transportasi darat berupa angkutan umum yang memadai di Kabupaten Aceh Barat. Jasa pengangkutan yang ada masih berupa angkutan antar kabupaten dan antar propinsi yang keberadaannya dikelola oleh swasta yang sebagian besarnya masih berstatus kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan dalam kota yang ada, hanya berupa becak motor dengan kepemilikan pribadi dengan trayek bebas. Dengan demikian belum ada suatu moda angkutan umum yang keberadaannya dan trayeknya diatur oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan semakin besarnya jumlah kendaraan pribadi yang ada di Kabupaten Aceh Barat terutama untuk kawasan Kota Meulaboh yang kurang mencerminkan adanya pembangunan yang *pro-poor.*

c. Masih terdapatnya perumahan yang tidak layak huni

Perumahan yang tidak layak huni sebagian besarnya berada di kawasan pedesaan dengan tingkat perekonomian masyarakatnya yang masih rendah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peran serta pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni bagi kaum dhuafa.

d. Masih kurangnya pelayanan listrik

Dalam hal pelayanan listrik, berdasarkan data BPS dan PT. PLN Persero Wilayah -1 Cabang Meulaboh tahun 2010 dari 322 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat terdapat 11 gampong yang belum mendapatkan pelayanan listrik. 11 gampong tersebut antara lain adalah 8 gampong di Kecamatan Woyla Timur, 2 gampong di Kecamatan Arongan Lambalek dan 1 gampong di Kecamatan Woyla Barat;

e. Masih kurangnya pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih perpipaan yang ada saat ini dikelola oleh PDAM. Pelayanan yang ada saat ini masih belum mampu untuk melayani kawasan perkotaan Meulaboh secara menyeluruh, apalagi untuk Kabupaten Aceh Barat. Di samping itu, kualitas dan kuantitas pelayanan yang telah ada juga masih rendah.

f. Belum maksimalnya pembangunan drainase, talud dan bronjong

Pembangunan drainase, talud dan bronjong masih belum maksimal dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berakibat sering terjadinya genangan dan banjir saat terjadinya hujan.

g. Ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan dan olahraga

Dalam aspek sosial dan budaya, kegiatan seni budaya yang ada saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini belum tersedia sebuah gedung kesenian sebagai tempat atraksi budaya atau tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian di Kabupaten Aceh Barat. Selama ini hampir tidak ada event maupun atraksi budaya di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, pagelaran budaya baru bisa disaksikan apabila ada pesta perkawinan atau prosesi acara adat lainnya. Kondisi ini merupakan kendala daerah sebagai pusat kegiatan wilayah. Untuk fasilitas olahraga, terdapat gedung dan lapangan olahraga. Namun fasilitas yang ada belum memadai dalam mendukung fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa skala provinsi.

h. Belum terpenuhinya SPM dan Sarana dan prasarana daerah yang belum memenuhi kriteria PKW

Dalam menunjang fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), ketersediaan sarana dan prasarana daerah yang ada belumlah maksimal untuk mendukung fungsi tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah antara lain:

1) **Ketersediaan terminal angkutan darat Tipe A,** dimana saat ini sedang dilaksanakan tahapan pembangunannya,
2) **Ketersediaan pelabuhan laut,** baik pelabuhan barang maupun penumpang. Pelabuhan barang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dalam mendukung fungsinya sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. Sedangkan pelabuhan penumpang diperlukan dalam mendukung fungsi kota sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten. Untuk itu diperlukan peningkatan pelabuhan yang ada baik dari segi fasilitas maupun kuantitasnya.
3) **Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit minimal dengan Kelas B.**

   Di bidang kesehatan, saat ini di Kabupaten Aceh Barat sudah tersedia 3 unit rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (tipe-C), Rumah Sakit Montela (swasta) dan Rumah Sakit TNI-AD yang ketiganya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Untuk mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, keberadaan ketiga rumah sakit ini belum memadai, apalagi mengingat RSUD Cut Nyak Dhien masih dalam proses peningkatan status menuju rumah sakit Kelas B.

4) **Ketersediaan fasilitas pendidikan berupa Perguruan Tinggi** berskala Provinsi/melayani beberapa kabupaten. Saat ini belum ada satupun Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Universitas Teuku Umar yang merupakan Pergutuan Tinggi terbesar juga masih berstatus Perguruan Tinggi Swasta. Dalam mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai pusat pendidikan, sudah seyogianyalah Aceh Barat memiliki Perguruan Tinggi Negeri.
5) **Ketersediaan pusat perdagangan dan pasar induk regional** yang mampu menampung hasil bumi dari beberapa kabupaten. Kondisi yang ada saat ini justru pasar yang ada masih terbatas, baik dari segi ukuran maupun dari segi kebersihannya.

4.1.12. Terbatasnya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur sosial, pangan dan gizi

a. IPM masih dibawah rata-rata provinsi dan nasional

Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan sosial dasar dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Aceh Barat tahun 2010 adalah 70,79. Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir (69,97 tahun), angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (85,9 %), angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (65 %), dan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity)* sebesar US $ 2.621. Jika dibandingkan dengan lingkup provinsi dan nasional yakni IPM Provinsi Aceh tahun 2010 sebesar 71,70 dan IPM nasional tahun 2010 sebesar 72,27 terlihat bahwa kualitas pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pangan dan gizi di Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan nasional.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan belum maksimal

Pada bidang kesehatan, saat ini di Kabupaten Aceh Barat sudah tersedia tiga unit rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (tipe-C), Rumah Sakit Montela (swasta) dan Rumah Sakit TNI-AD yang ketiganya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Untuk mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, keberadaan ketiga rumah sakit ini belum memadai, apalagi mengingat RSUD Cut Nyak Dhien masih dalam proses peningkatan status menuju rumah sakit Kelas B. Selain 3 unit rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat juga terdapat 13 unit UPTD Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Pelayanan di Puskesmas masih terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasana penunjang kesehatan seperti kurangnya peralatan medis sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak maksimal.

Rendahnya pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di Puskesmas selain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan juga rendahnya kualitas SDM aparatur bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan Puskesmas karena lambatnya pelayanan, administrasi yang berbelit-belit dan lamanya waktu tunggu karena banyaknya pasien terutama di rumah sakit.

c. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) di Kabupaten Aceh Barat masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, yaitu 1 orang dokter melayani 7.546 jiwa penduduk. Disamping itu jumlah dan jenis tenaga kesehatan tertentu juga masih terbatas, dimana keberadaan mereka juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien sebagai rumah sakit rujukan kawasan pantai barat selatan Aceh juga masih sangat kekurangan dokter spesialis. Terbatasnya jumlah dokter menyebabkan penempatan tenaga dokter terpusat pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, sedangkan pada Puskesmas belum semuanya memiliki dokter sehingga pelayanan kesehatan masyarakat tidak maksimal.

d. Rendahnya perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan

Pelayanan kesehatan pada bidang obat dan makanan di Kabupaten Aceh Barat masih sangat rendah yang ditandai oleh lemahnya perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan. Saat ini sangat banyak dijumpai makanan dengan bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan seperti formalin dan boraks yang sering dipakai oleh pedagang untuk mengawetkan ikan, daging, bakso, mie, bahkan minuman dan jajanan anak sekolah.

e. Masih adanya status gizi buruk di beberapa kecamatan

Terdapatnya kasus balita gizi buruk di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua balita terhadap pentingnya gizi balita di masa pertumbuhan juga menjadi pemicu terjadinya status gizi buruk. Selain itu penyebab lainnya adalah terbatasnya jumlah tenaga penyuluh kesehatan di Puskesmas dan Pustu yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

f. Mutu pendidikan yang masih rendah

Mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat masih rendah yang diindikasikan oleh sedikitnya siswa(i) lulusan SMA/MA di Kabupaten Aceh Barat yang berhasil lulus pada perguruan tinggi negeri melalui seleksi

nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). Disamping itu juga masih ada siswa(i) yang tidak lulus ujian akhir nasional (UAN) di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kompetensi guru mata pelajaran pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

g. Terbatasnya guru bidang studi tertentu

Dalam hal ketersediaan guru, jumlah guru yang ada di Kabupaten Aceh Barat sudah lebih dari cukup. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Aceh Barat adalah 8,93 artinya 1 orang guru mengajar 9 orang murid. Permasalahan kekurangan guru di Kabupaten Aceh Barat disebabkan karena penyebarannya yang tidak merata. Sebagian besar guru terkonsentrasi di Kota Meulaboh yang berdampak pada minimnya jumlah guru pada daerah-daerah terpencil.

Di samping hal tersebut, masalah lain yang timbul adalah terbatasnya jumlah guru pada spesifikasi ilmu tertentu/guru bidang studi tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya sistem rekrutmen tenaga pengajar (guru) yang proporsional dalam seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Aceh Barat yang berakibatpadaberlebihnya jumlah guru untuk bidang studi tertentu, sementara untuk bidang studi lainnya masih sangat sedikit jumlah gurunya.

h. Belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2006-2010 berkisar antara 8,20 - 8,48 tahun. Dengan demikian, target wajib belajar 9 tahun belum terpenuhi. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak.

4.1.13. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat belum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif. Indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggung jawaban pemeritah daerah. Selama lima tahun terakhir opini BPK terhadap laporan pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hanya mendapat predikat *Qualified Opinion* atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat walaupun secara umum telah dapat dipertanggungjawabkan namun masih ada hal-hal tertentu yang masih bermasalah.

4.1.14. Terbatasnya data dan informasi pembangunan serta kurang tertatanya sistem administrasi kearsipan

Masih kurang tersedianya/terbatasnya data dan informasi pembangunan menyebabkan sulitnya analisis pembangunan yang berdampak pada mutu perencanaan yang dibuat. Selain itu sistem

pengelolaan kearsipan pada berbagai SKPD di Kabupaten Aceh Barat belum dikelola dengan baik sehingga sangat menyulitkan jika dibutuhkan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

4.1.15. Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan Dinul Islam

Dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat yang luas serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam tentunya memiliki potensi ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini dihadapkan pada masih banyaknya produk hukum yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Banyaknya produk hukum yang tumpang tindih antara pusat dan daerah menjadi faktor penghambat banyak hal dalam berbagai sendi kehidupan seperti pada iklim usaha, kreativitas masyarakat, dan sebagainya yang pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik terhadap anak maupun perempuan, disamping budaya masyarakat yang belum berpihak kepada gender. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KDRT belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Barat karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum dan HAM.

4.1.16. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan

Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi keagamaan di Kabupaten Aceh Barat belum dilakukan secara optimal sehingga peran dari organisasi-organisasi tersebut sebagai *social control* terhadap pemerintah kurang berfungsi. Saat ini aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan di Kabupaten Aceh Barat lebih banyak vakum atau kurang bergeliat dalam mengawasi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakan pembangunan daerah.

4.1.17. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah

Kurangnya peran pemuda dalam pembangunan daerah juga berkaitan dengan kurangnya pembinaan kegiatan olah raga di Kabupaten Aceh Barat. Sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini belum mampu untuk menampung bakat dan keterampilan pemuda pada berbagai cabang olah raga. Saat ini di Kabupaten Aceh Barat belum memiliki stadion olah raga yang multi fungsi dalam arti dapat dipakai untuk berbagai event cabang olah raga.

Keberadaan organisasi perempuan dan lembaga adat di Kabupaten Aceh Barat belum mendapat perhatian yang optimal dalam prioritas pembangunan daerah. Selama ini organisasi perempuan dan lembaga adat

terkesan kurang berperan. Kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum mengoptimalkan peran organisasi perempuan dan lembaga adat sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan adat istiadat tidak mencapai sasaran yang diinginkan.

Di Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa organisasi perempuan dan lembaga adat, diantaranya BKOW, MAA dan Panglima Laot. Akan tetapi semua organisasi-organisasi tersebut belum dioptimalkan perannya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam proses pembangunan daerah.

4.1.18. Masih kurangnya pembinaan seni budaya lokal

Dalam aspek sosial dan budaya, Kabupaten Aceh Barat memiliki sejumlah seni dan budaya yang mempunyai nilai jual baik kepada masyarakat lokal, luar daerah bahkan manca negara. Pertunjukan seni dan budaya tersebut selain ditampilkan pada berbagai event kesenian di luar daerah juga sering ditampilkan pada acara penyambutan tamu-tamu daerah, pesta perkawinan dan hajatan-hajatan masyarakat lainnya.

Namun demikian, pertunjukan seni dan budaya tersebut umumnya dikelola oleh masyarakat secara swadaya karena kurangnya dukungan dana pembinaan dari pemerintah sehingga perkembangan kelompok kesenian di Kabupaten Aceh Barat belum begitu menggembirakan. Selain itu kegiatan seni budaya yang ada belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini belum tersedia sebuah gedung kesenian sebagai tempat atraksi budaya atau tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan (event) kesenian di Kabupaten Aceh Barat.

Permasalahan di atas dapat dijabarkan kembali menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Islam	Watak dan perilaku masyarakat kabupaten Aceh Barat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Allah ,SWT, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek	1. Terbatasnya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pangan dan gizi 2. Kualitas pelayanan aparatur pemerintah belum maksimal 3. Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam 4. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah	1. Terpenuhinya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pangan dan gizi 2. Maksimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah 3. Optimalnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam 4. 4. Optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah
2	Terwujudnya masyarakat yang mempunyai daya saing	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga setara dengan daerah-daerah berpenghasilan menegah, Tingkat Pengangguran Terbuka yang tidak lebih dari 5 dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembangunan Gender (IPG) serta pertumbuhan	1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan dan tingginya jumlah penduduk miskin 2. Garis kemiskinan Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Aceh. 3. Tingginya inflasi 4. Memiliki tingkat ketimpangan pendapatan *(gini rasio)* tertinggi di Provinsi Aceh. 5. Mutu SDM Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Propinsi Aceh dan nasional	1. Terciptanya peluang investasi untuk mendukung penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		penduduk yang seimbang. 3. Meningkat dan menguatnya kualitas sumberdaya manusia di semua bidang, khususnya pertanian dalam arti luas, perdagangan dan sebagainya sesuai dengan perkembangan iptek.	6. Belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun 7. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja. 8. Terdapatnya sektor potensial yang belum dikembangkan yakni pertambangan dan pariwisata 9. Sektor keuangan terutama bank yang masih kecil peranannya dalam pengembangan ekonomi daerah 10. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan; 11. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 12. Kurangnya kesempatan dan pelatihan tenaga kerja; 13. Kurangnya lapangan kerja; dan 14. Minimnya perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan	
3.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan	1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak azazi manusia.		

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Menciptakan landasan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. 4. Menatausahakan lembaga-lembaga dan memantapkan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi tanpa dikriminasi dan kemitraan. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik .		
4.	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah	1. Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan masyarakat. 2. Mewujudkan sarana dan prasarana serta SDM aparatur penegak qanun untuk menjamin rasa aman, keadilan dan kesamaan hak di depan hukum bagi masyarakat. 3. Mewujudkan penguatan lembaga penegakan qanun untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan dan penerapan hukum bagi masyarakat.	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum	1. Sosialisasi peraturan 2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Aceh Barat. 5. Kemandirian bahan pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrument jaminan pangan untuk rumahtangga		
5.	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	1. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem lingkungan yang sehat dan mewujudkan kota bersih dan rapi tanpa pemukiman kumuh. 2. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang layak serta berkelanjutan dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.	1. Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah kota dengan kawasan pedesaan. 2. Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memenuhi SPM .	1. Tersedianya sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai 2. Tersedianya regulasi

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana penghubung semua daerah dan wilayah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan daerah lain. 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan terselenggaranya pelayanan telematika.	3. Masih terdapat gampong yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik. 4. Pelayanan air bersih oleh PDAM belum mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Meulaboh. 5. Belum maksimalnya pembangunan drainase dan talud/bronjong. 6. Terbatasnya ketersediaan sarana kesehatan terutama rumah sakit; 7. Minimnya ketersediaan tenaga medis 8. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat; 9. Rendahnya kualifikasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan; 10. Masih adanya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan gizi buruk; 11. Masih rendahnya penanganan pasien dengan komplikasi yang tertangani; 12. Terbatasnya akses terhadap ketersediaan air bersih dan air baku;	3. Dapat mendorong kemudahan dalam penyediaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			13. Merupakan kabupaten bermasalah kesehatan 14. Masih minimnya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. 15. Meningkatnya angka putus sekolah 16. Belum tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 17. Masih rendahnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 18. Rendahnya Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 19. Rendahnya tingkat kemilikan buku pelajaran bagi siswa; 20. Menurunnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; 21. Kurang tersedianya pendidikan non-formal yang memadai; 22. Rendahnya jumlah siswa yang lulus dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional; 23. Rendahnya kualitas manajemen sekolah.	

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
6.	Terwujudnya Kabupaten Aceh Barat yang asri dan lestari	1. Pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik yang dicerminkan dengan tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari. 3. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan ke khasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat serta modal pembangunan daerah. 4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 5. Mampu mengkonservasi sumber daya air dan menjaga keberlan-jutan fungsi sumber daya air. 6. Menanggulangi dan mengurangi dampak bencana alam. 7. Mengupayakan dan meminimalisir pencemaran lingkungan laut, darat dan udara pada semua tingkatannya.	1. Belum adanya pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam 2. Belum optimalnya tanggap darurat jalan dan jembatan 3. Belum optimalnya pengendalian banjir. 4. Terjadinya penebangan liar *(ilegal logging).* 5. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 6. Belum optimalnya pengelolaan persampahan. 7. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.	

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
7	Terwujudnya Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah mandiri, maju, kuat di daerah pesisir Barat dan selatan yang berbasiskan kepentingan daerah	1. Menetapkan daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai pusat asset nasional dan terus berkembang dalam hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan. 2. Membangun ekonomi pertanian secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan yg berkelanjutan. 3. Terbangunnya struktur pembangunan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompotitif, komperatif dan koperatif di setiap wilayah Kabupaten Aceh Barat.	1. Sektor pariwisata yang kurang berkembang. 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pemungut, dan belum optimalnya pemanfaatan terhadap semua sumber pendapatan 3. Kurangnya pemahaman terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBK 4. Belum optimalnya faktor pendukung pemanfaatan potensi daerah	1. Mengoptimalkan potensi daerah dengan ketersediaan lahan, teknologi serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha diberbagai sektor, seperti agribisnis, industri, perdagangan dan pemukiman. 2. Sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakat 3. Regulisasi dan Komitmen 4. Sarana dan prasarana serta kemampuan SDM
8	Terwujudnya peranan Kabupaten Aceh Barat yang meningkat dalam pergaulan antar daerah	1. Memperkuat dan mempromosikan identitas daerah sebagai daerah demokratis dalam tatanan masyarakat antar daerah. 2. Memulihkan posisi penting kabupaten Aceh Barat sebagai daerah utama di daerah pesisir barat dan selatan yang ditandai oleh keberhasilan memberi pelayanan bagi kebutuhan daerah lain.	1. Masih rendahnya iklim usaha dan investasi. 2. Masih kurangnya Kerjasama antar daerah.	

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Aceh Barat dalam berbagai kerjasama antar kabupaten dalam rangka mewujudkan tatanan hubungan antar daerah yang produktif, dinamis dan maju bersama. 4. Mewujudkan kemandirian daerah dalam konstelasi lokal dan regional 5. Meningkatkan investasi dan mendatangkan para investor swasta luar dan dalam negeri		
9	Terwujudnya sistem pengelolaan pemerintah yang sesuai dengan peraturan dan aparatur yang profesional	1. Tertatanya organisasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan kepentingan daerah serta masyarakat 2. Terciptanya pemerintahan yang efisien dan menghindari terjadina ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak dinamika produksi dan produktivitas masyarakat. 3. Peningkatan peran dan daya guna pengawasan internal yang persuasif, korektif dan resolutif sehingga akan dapat meningkatkan manajerial, sistem kerja dan birokrasi pemerintahan yang sederhana, transparan, akuntabel dan islami.	1. Masih kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH 2. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Terbatasnya Sarana dan prasarana aparatur 4. Kurang tertatanya sistem administrasi kearsipan 5. Kurang tersedianya/terbatasnya data dan informasi pembangunan 6. Ketidaksamaan persepsi antar SKPD tentang pemahanan peraturan perundangan	1. Tersedianya perangkat aparatur Pemerintah Daerah yang memadai untuk menjalankan roda Pemerintahan dan mengimplementasikan 2. Program-program pembangunan; 3. Adanya koordinasi dan Singkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan 4. Tersedianya Regulasi dan pendanaan 5. Adanya Keinginan bersama untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil dan merata 6. Disiplin

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Terdorongnya fungsi kerja institusi-institusi baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk sungguh-sungguh melakukan perbaikan-perbaikan pada kinerjanya agar mampu merespon, merencanakan serta melaksanakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. 5. Melakukan kerjasama dengan para ahli dalam upaya memperbaiki manajemen dan organisasi pemerintahan 6. Tereformasinya sistem pembinaan PNS yang sistemik, metodologis dan berkelanjutan dengan sebaik-baiknya. 7. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta professional yang mampu mendukung pembangunan daerah yang Islami	7. Dokumen perencanaan belum menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah 8. Inkonsistensi terhadap regulasi 9. Belum optimalnya penerapan SPM dan SOP 10. Rendahnya manajemen pengelolaan pegawai 11. Masih rendahnya tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
10	Terbukanya peluang dan peran publik dalam mengontrol kinerja pemerintah	1. Melaksanakan sistem komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan pengembangan kemampuan kontrol masyarakat untuk berperan sebagai pengamat, pemerhati dan pengawas terhadap kinerja aparatur pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat mengeliminir kesalahpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan 2. Terciptanya suatu regulasi yang memberi peluang kepada publik untuk mengawasi kinerja pemerintahan 3. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap isu-isu yang berkembang dalam upaya pelaksanaan pembangunan.	1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; 2. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan 3. Belum adanya qanun yang mengatur tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan 4. Belum adanya *reward* dari pemerintah atas peran serta masyarakat dalam pembangunan	1. Adanya harapan dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat kepada Pemerintahan Daerah untuk bekerja secara amanah. 2. Komitmen dan konsisten

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan ,menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian , kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Untuk dapat menentukan isu strategis, perlu dirumuskan kekuatan *(strength),* kelemahan *(weakness),* peluang *(opportunity)* dan ancaman *(theats)* sebagai berikut:

4.2.1. Kekuatan *(Strength)*

Adapun kekuatan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan potensi dalam pembangunan antara lain:

1. Kondisi keamanan yang kondusif;
2. Letak geografis yang strategis;
3. Memiliki potensi basis dalam perekonomian;
4. Memiliki potensi sumber daya air;
5. Memiliki faktor produksi unggulan (tenaga kerja, lahan dan SDA);
6. Tersedianya lahan budidaya;
7. Dominasi penduduk usia produktif;
8. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding daerah tetangga;
9. Tersedianya sarana dan prasarana publik;
10. Tersedianya kelengkapan jenjang pendidikan hingga Perguruan Tinggi;
11. Tersedianya fasilitas kesehatan;
12. Tersedianya perangkat aparatur pemerintah daerah;
13. Adanya lembaga-lembaga adat dan budaya;
14. Tersedianya dokumen perencanaan, dan
15. Masyarakat yang religius.

4.2.2. Kelemahan *(Weakness)*

Adapun kelemahan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kendala dalam pembangunan antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan;
2. Tingginya jumlah penduduk miskin;
3. Tingginya angka inflasi;
4. Rendahnya iklim usaha dan investasi;
5. Masih rendahnya pengelolaan potensi ekonomi daerah;
6. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah;

7. Masih terdapatnya pengangguran;
8. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia usaha;
9. Masih sulitnya mendapatkan akses modal usaha bagi masyarakat lemah;
10. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar;
11. Tingginya ketimpangan pembangunan antar kawasan kota dengan wilayah pedesaan;
12. Belum tersedianya sarana/moda transportasi yang memadai;
13. Masih terdapatnya perumahan yang tidak layak huni;
14. Belum terpenuhinya SPM dan sarana dan prasarana daerah yang belum memenuhi kriteria PKW;
15. Belum maksimalnya pembangunan drainase, talud dan bronjong;
16. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan menurunnya kualitas lingkungan hidup;
17. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas pelayanan publik;
18. Aceh Barat termasuk dalam Kabupaten yang bermasalah dalam kesehatan;
19. Belum tuntasnya pelaksanaan program nasional; wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan MDG's 2010;
20. Belum tuntasnya proses akreditasi pendidikan formal dan non formal;
21. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
22. Belum tuntasnya penerapan prinsip-prinsip *good* dan *clean governance* dalam menjalankan roda pemerintahan;
23. Penerapan peraturan perundang-undangan yang belum aplikatif; dan
24. Masih besarnya keinginan masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4.2.3. Peluang *(Opportunity)*

Secara eksternal, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, antara lain:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Tingginya perhatian dari berbagai pihak dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh;
3. Penetapan Kota Meulaboh dalam RTRWN sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk wilayah pantai barat selatan Aceh
4. Potensi ekonomi daerah hinterland yang dapat mendukung perekonomian daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI;

7. Kerjasama regional strategis (IMT-GT);
8. Adanya perbaikan ekonomi nasional;
9. Adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar domestik dan internasional hasil produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku ekonomi;
10. Adanya alokasi dana pendidikan sebesar 20 % dari APBA;
11. Adanya Beasiswa;
12. Adanya dana kesejahteraan guru;
13. Jaminan kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat Aceh (universal coverage);
14. Undang-undang RI no. 40 tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
15. Undang-undang RI no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; dan
17. Tersedianya lembaga dan aparatur yang dapat menjaga keberlangsungan stabilitas keamanan.

4.2.4. Ancaman *(Threath)*

Ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah:

1. Masuk dalam kategori daerah rawan bencana;
2. Kerusakan lingkungan hidup dan degradasi sumber daya alam;
3. Kurangnya minat investor untuk berkiprah dalam pembangunan ekonomi;
4. Kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA);
5. Beredarnya produk luar (impor) dan masuknya tenaga kerja dengan harga bersaing;
6. Penerapan Standarisasi mutu (ISO);
7. Persaingan sumber daya manusia global;
8. Pengakuan terhadap kesetaraan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No 8 Tahun 2012);
9. Kompetensi lulusan pendidikan tidak memenuhi kebutuhan tuntutan dunia kerja;
10. Perubahan iklim global (*climate change*);
11. Infiltrasi budaya asing yang negatif.

4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil analisis SWOT, didapatkan isu-isu strategis Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Pemantapan Ketahanan Pangan daerah.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang professional berbasiskan *good governance* dan *clean governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Penggunaan ruang sesuai ketentuan RTRW.
6. Pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas.
7. Penguatan potensi perempuan dan pemuda dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.
8. Peningkatan kehidupan dan kerukunan hidup, moral, etika dan akhlak mulia masyarakat yang berdasarkan Syariat Islam.
9. Pengelolaan destinasi pariwisata secara baik dan profesional.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang ada dengan memperhitungkan potensi dan peluang pembangunan, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 adalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH BARAT YANG MAKMUR, SEHAT DAN BERWAWASAN”

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-2 tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 terdapat tiga kata kunci yakni ***makmur, sehat dan berwawasan.*** Kata ***makmur*** mengandung makna bahwa terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata ***sehat*** mengandung makna bahwa terciptanya harmonisasi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang berkualitas baik secara fisik maupun mental; dan kata ***berwawasan*** mengandung makna bahwa masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan Dinul Islam dan budaya Aceh. Untuk dapat melihat pokok-pokok visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Aceh Barat yang Makmur, Sehat dan Berwawasan	Makmur	Terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
	Sehat	Terciptanya harmonisasi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang berkualitas baik secara fisik maupun mental
	Berwawasan	Masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan Dinul Islam dan budaya Aceh

5.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi 5 tahun ke depan, maka misi yang akan ditempuh antara lain adalah:

5.2.1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel.

5.2.2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah pada sektor/subsektor potensial yang memiliki daya saing selain mampu memenuhi kebutuhan sendiri (masyarakat Kabupaten Aceh Barat) juga mampu melayani kebutuhan daerah lain. Dengan kata lain sektor/subsektor yang produksinya telah dapat diekspor dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian optimalisasi potensi basis harus benar-benar diperhatikan karena dapat mendongkrak perekonomian daerah dari pada pengembangan sektor non basis. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat berpenggaruh pada peningkatan perekonomian daerah karena dapat menekan angka pengangguran dan laju pertumbuhan kemiskinan daerah.

5.2.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Aceh Barat terutama kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar. Selain itu peningkatan kualitas juga sangat diperlukan untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

5.2.4. Menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menekan angka pengangguran sebagai manifestasi efek domino untuk mengurangi angka kemiskinan.

5.2.5. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, gizi dan pangan). Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih layak.

5.2.6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menjaga perdamaian dan melaksanakan Dinul Islam serta peningkatan peran ulama. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menguatkan dan menjaga kelangsungan perdamaian dalam kehidupan bernegara serta menanamkan nilai-nilai Dinul Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat.

5.2.7. Meningkatkan peran pemuda, perempuan, kelembagaan adat dan seni budaya dalam pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemuda, perempuan dan pemangku adat turut menjadi *stakeholder* dalam

pembangunan tanpa indikasi diskriminasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam Tabel 5.2. berikut.

Tabel 5.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Barat

Visi: Terwujudnya Masyarakat Aceh Barat Yang Makmur, Sehat dan Berwawasan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.	a. Meningkatnya efektivitas birokrasi yang akuntabel; b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pemerintahan; c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan pemanfaatan E-Government; d. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah; b. Meningkatnya Kerjasama antar daerah.
Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat;
Misi 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana	1. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat	a. Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana publik; b. Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai; c. Meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni; dan d. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
	2. Menjaga kelestarian lingkungan.	a. Meningkatnya mitigasi bencana; dan b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam
Misi 4. Menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih	Mengurangi angka pengangguran	a. Tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan;

Visi: Terwujudnya Masyarakat Aceh Barat Yang Makmur, Sehat dan Berwawasan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		b. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; c. Meningkatnya kesempatan dan pelatihan tenaga kerja; d. Meningkatnya lapangan kerja; dan e. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan.
Misi 5. *Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, gizi dan pangan)*	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan; b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya penanganan pasien dengan komplikasi yang tertangani; d. Meningkatnya usia harapan hidup; e. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan gizi buruk; f. Meningkatnya kualifikasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan g. Meningkatnya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.	a. Meningkatnya APK siswa (PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA); b. Meningkatnya APM siswa (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA); c. Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS); d. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (wajib belajar); e. Meningkatnya Partisipasi Anak Bersekolah (PAB); f. Tersedianya sarana prasarana dan teknologi informasi pendidikan; g. Tersedianya kelengkapan pemilikan buku pelajaran bagi siswa; h. Terpenuhinya rasio guru dan siswa sesuai bidang studi; i. Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; j. Meningkatnya Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional; k. Meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; l. Tersedianya pendidikan non-formal yang memadai; m. Meningkatnya jumlah siswa yang lulus dengan nilai

Visi: Terwujudnya Masyarakat Aceh Barat Yang Makmur, Sehat dan Berwawasan		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
		memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional; dan n. Meningkatnya kualitas manajemen sekolah.
Misi 6. *Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menjaga perdamaian dan melaksanakan Dinul Islam serta peningkatan peran ulama*	1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai amanat MoU Helsinki
	2. Melaksanakan Dinul Islam secara kaffah.	a. Meningkatnya peran serta ulama dalam pembangunan; b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan agama, tempat ibadah; dayah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA); c. Meningkatnya mutu pendidikan pesantren / dayah; d. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kemakmuran tempat ibadah; dan e. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan Islami dalam bermasyarakat .
Misi 7. *Meningkatkan peran pemuda, perempuan dan kelembagaan adat, seni budaya dalam pembangunan daerah.*	Meningkatkan partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan	a. Meningkatnya peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan; b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan gender; c. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; d. Meningkatnya prestasi di bidang olah raga pada tingkat provinsi maupun nasional; e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolah raga; f. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga, lembaga adat dan seni.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Perumusan Strategi

Dalam menentukan alternatif strategi pembangunan Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats).* Melalui analisis data dan proses tahapan sebelumnya, dipetakan kebutuhan informasi untuk analisis SWOT sebagai berikut.

6.1.1. Kekuatan-Peluang *(Strategi S-O)*

Alternatif strategi dengan memadukan kekuatan dan peluang yang dimiliki antara lain:

1. Menjaga perdamaian abadi di seluruh aspek kehidupan secara berkelanjutan;
2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
3. Memanfaatkan posisi strategis untuk menjadikan Kota Meulaboh sebagai simpul transportasi untuk wilayah barat selatan Provinsi Aceh;
4. Memanfaatkan posisi strategis untuk menjadikan Kota Meulaboh sebagai pusat pelayanan jasa regional;
5. Memanfaatkan potensi basis di bidang pertanian untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
6. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan;
7. Mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah dalam mendukung MP3EI dan percepatan pembangunan daerah;
8. Melakukan kerjasama dengan TKPPA dalam rangka mengembangkan fungsi Kota Meulaboh sebagai pusat pendidikan regional;
9. Pemanfaatan dana alokasi pendidikan bagi peningkatan mutu pendidikan;
10. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan sistem asuransi sosial yang sejalan dengan program jaminan kesehatan nasional;
11. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai salah satu potensi wisata daerah;
12. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan secara maksimal;
14. Peningkatan peran lembaga-lembaga adat dan budaya dalam proses pelaksanaan pembangunan;
15. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel, aspiratif dan partisipatif;
16. Penegakan Dinul Islam melalui peningkatan pendidikan agama dan peran ulama.

6.1.2. Kekuatan- Ancaman *(Strategi S-T)*

Alternatif strategi dengan memadukan kekuatan dan ancaman yaitu:

1. Peningkatan kompetensi lulusan pendidikan sesuai tuntutan dunia kerja;
2. Peningkatan daya saing komoditas unggulan dan optimalisasi pasar domestik;
3. Pemantapan pemahaman dan pelaksanaan Dinul Islam dan sosial budaya;
4. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

6.1.3. Kelemahan-Peluang *(Strategi W-O)*

Alternatif strategi dengan memadukan kelemahan dan peluang adalah:

1. Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan mengurangi disparitas pendapatan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan investasi berbasis agroindustri;
2. Peningkatan pelayanan dan perizinan terpadu terutama yang mendukung perdagangan, jasa dan investasi;
3. Peningkatan nilai tambah produk pertanian secara luas melalui pengembangan agroindustri;
4. Meningkatkan peran kelembagaan keuangan dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan tingkat pelayanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
9. Pemenuhan sumber daya manusia dan sarana pendukung lembaga pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
10. Mengoptimalkan pengelolaan SDA yang tersedia dengan peningkatan produksi, produktivitas, kontinyuitas dan nilai tambah komoditas unggulan sesuai dengan permintaan pasar;
11. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai MDG's 2015 termasuk mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat internasional;
12. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung fungsi kota sebagai PKW;
13. Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri;
14. Pembangunan berbasis tata ruang wilayah;
15. Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan regulasi;
16. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru;
17. Meningkatkan dan memperbaiki sistem administrasi pemerintahan;
18. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktek demokrasi dan politik yang baik.

6.1.4. Kelemahan-Ancaman *(Strategi W-T)*

Alternatif strategi dengan memadukan kelemahan dan ancaman yang dihadapi antara lain adalah:

1. Pengembangan dan peningkatan mutu produk serta keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif;
2. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penerapan regulasi yang maksimal;
3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan pembentukan pusat studi bencana;
5. Mempermudah birokrasi dalam perizinan investasi;
6. Menghindari pembangunan infrastruktur publik stategis pada zona bencana.
7. Percepatan pembangunan di segala aspek kesehatan untuk keluar dari status kabupaten bermasalah kesehatan.

6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017

Adapun rumusan Strategi pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 diperoleh dari analisa SWOT yang diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

6.2.1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pemerintahan melalui pemberian basiswa dan diklat tertentu;
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan secara optimal dengan penempatan aparatur secara proporsional dan profesional;
4. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan;
5. Mewujudkan lembaga pengendali mutu sebagai upaya pengawasan terhadap pembangunan di segala sektor;
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana media informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui *e-government* dan *e-procurement;*
8. Mewujudkan pemerintahan gampong yang mandiri;
9. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktek demokrasi dan politik yang baik;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak *(stakeholder)* dalam perencanaan dan kebijakan daerah;

11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak *(stakeholder)* dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan;
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak *(stakeholder)* dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
13. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan semua pihak terkait dalam dan luar Negeri.

6.2.2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan perekonomian yang berbasis perdesaan melalui peningkatan daya saing komuditas unggulan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan pertanian dan perkebunan;
3. Pengembangan agroindustri dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian yang merupakan Potensi basis daerah;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra-sentra produksi;
5. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan daerah;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri;
7. Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan;
8. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja;
9. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs;
10. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
11. Mewujudkan Kota Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan kelembagaan ekonomi;
12. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai simpul transportasi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh;
13. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai Pusat Pelayanan Jasa Regional; dan
14. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

6.2.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan regulasi;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis tata ruang wilayah;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai MDGs 2015;
4. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
5. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan Kota Meulaboh dengan wilayah pedesaan/daerah tertinggal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui pemanfatan sumber-sumber energi baru.
8. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana;
9. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;
10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana;
11. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
12. Penyiapan gampong siaga bencana; dan
13. Mewujudkan Kota Meulaboh yang bersih dan nyaman.

6.2.4. Menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan memperluas kesempatan berusaha; dan
2. Menciptakan tenaga kerja yang handal sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

6.2.5. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, gizi dan pangan)

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan seluruh unit pelayanan kesehatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas dalam rangka mengurangi jumlah pasien rujukan ke Rumah Sakit;
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh menjadi RS Kelas B;
3. Meningkatkan status Bangzal Zaitun menjadi Rumah Sakit Jiwa yang representatif;
4. Mewujudkan Akademi Kesehatan Pemda (AKKESPEMKAB);
5. Mengadakan Laboratorium Kesehatan Daerah;

6. Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan;
7. Mengupayakan tersedianya balai laboratorium kesehatan (BLK) dibawah pengawasan Dinas Kesehatan sebagai sarana pemeriksaan obat dan makanan di Kabupaten Aceh Barat;
8. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit dalam pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs);
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang adil dan merata melalui pelayanan yang responsif, ramah dan biaya terjangkau tanpa membedakan status sosial masyarakat;
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penyediaan sumber daya kesehatan yang memadai;
11. Meningkatkan status gizi balita dan anak sekolah melaui pemberian makanan tambahan bagi balita dan anak sekolah;
12. Mengupayakan tersedianya asuransi kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat;
13. Mengembangkan dan meningkatan kerjasama antar organisasi profesi kesehatan;
14. Mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang professional;
15. Peningkatan akses dan tingkat pelayanan pendidikan yang berkualitas baik dalam pendidikan formal maupun non formal di semua jenjang pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
16. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar mutu nasional untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan intelektual dan berakhlakul karimah;
17. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas secara proporsional;
18. Mengupayakan tersedianya kebutuhan akan guru bidang studi terutama bagi SLTA dan SMK;
19. Melakukan pemerataan distribusi guru ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat sesuai kebutuhan;
20. Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
21. Memanfaatkan beasiswa khusus pemerintah Aceh dalam mengembangkan mutu tenaga pengajar di Perguruan Tinggi yang ada;
22. Menerapkan kurikulum berbasis lokal dan Islami;
23. Melakukan kerjasama dengan TKPPA dalam rangka mengembangkan fungsi Kota Meulaboh sebagai pusat pendidikan regional;
24. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas;
25. Peningkatan kualitas perguruan tinggi yang berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja;
26. Melakukan percepatan penegerian Universitas Teuku Umar dan STAI Teuku Dirundeng;
27. Mengembangkan kelengkapan sarana dan prasarana UTU dan STAI;

28. Mengembangkan Komplek Pendidikan Modern Terpadu (penggabungan kurikulum pesantren modern dan umum);
29. Mengembangkan teknologi pendidikan yang berbasiskan teknologi informasi;
30. Penataan sistem pengelolaan pendidikan yang efesien, efektif dan produktif dalam suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel;
31. Menyediakan sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Aceh Barat;
32. Membangun kawasan wisata Islami; dan
33. Mengupayakan tersedianya rumah layak huni bagi warga miskin dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan di lingkungan kumuh.

6.2.6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menjaga perdamaian dan melaksanakan Dinul Islam serta peningkatan peran ulama

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga perdamaian abadi di seluruh aspek kehidupan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan berpihak kepada rakyat kecil,
3. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi;
4. Meningkatkan peran ulama dan organisasi keagamaan sebagai lembaga pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
5. Mengembangkan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) pada tiap-tiap gampong;
6. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan khusus;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga pendidikan keagamaan;
8. Meningkatkan pemahaman, pelaksanaan dan pengamalan Dinul Islam dalam berbagai kehidupan masyarakat; dan
9. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap dinul Islam.

6.2.7. Meningkatkan peran pemuda, perempuan dan kelembagaan adat dalam pembangunan daerah.

Untuk dapat tercapainya sasaran dari misi tersebut maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peranserta pemuda dan perempuan dalam semua sektor pemerintahan dan pembangunan;
2. Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dan perempuan;

4. Meningkatkan peran kelompok sosial masyarakat, organisasi pemuda, perempuan, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa sebagai *mobile* pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan pengarus-utamaan gender (PUG) melalui pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan dalam setiap aspek pembangunan;
6. Memberdayakan kelompok seni dan budaya lokal yang ada di Aceh Barat yang mempunyai daya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
7. Mengupayakan tersedianya sebuah stadion olah raga di Kabupaten Aceh Barat yang dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai event turnamen cabang olah raga;
8. Mengupayakan tersedianya sebuah gedung kesenian bertaraf nasional di Kabupaten Aceh Barat yang dapat dijadikan sebagai pusat pertunjukan seni dan budaya;
9. Meningkatkan peran serta pemuda, perempuan dan tokoh adat dalam rangka melakukan promosi seni dan budaya Aceh Barat baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
10. Melakukan penguatan lembaga adat sebagai lembaga pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan bidang budaya dan adat istiadat di daerah.

6.3. Arah Kebijakan

6.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat ditujukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh periode 2012-2017 dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Reformasi pemerintahan;
2. Peningkatan Perekonomian daerah;
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian kebudayaan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Sarana dan prasarana;
6. Pelaksanaan Dinul Islam;
7. Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan peran perempuan, pemuda dan olahraga.

6.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah kebijakan pada periode tahun pertama memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema pembangunan tahap-tahap berikutnya. Tahap I menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahap I. Tema pembangunan pada periode I adalah:

“Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan”

Konsolidasi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

dan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan sehingga terwujudnya pelayanan prima.

Pembangunan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pembangunan infrastruktur serta upaya untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan penguatan ketahanan pangan. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta penerapan Dinul Islam.

6.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pada periode tahun kedua di Kabupaten Aceh Barat memiliki makna strategis yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tahap-tahap berikutnya. Tahap II menjadi tahap lanjutan dari kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat. Pada periode II ini, tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah:

“Penguatan Sarana dan Prasarana Publik dan Pembangunan”

Arah penguatan infrastruktur pemerintahan dan pembangunan tahun 2014 diarahkan untuk penguatan sarana dan prasarana publik, terutama jalan dan jembatan, peningkatan prasarana dan mutu kesehatan; pengendalian dan pengamanan lalu lintas, meningkatkan prasarana dan mutu pendidikan.

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 untuk penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti pembangunan infrastruktur serta upaya untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan penguatan ketahanan pangan. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Tahun kedua ini juga mulai diperingatinya hari jadi Kota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dengan fokus pengembangan seni dan budaya daerah.

6.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pada periode tahun ketiga di Kabupaten Aceh Barat memiliki arti strategis yang ingin dicapai dan menjadi faktor penentu keberhasilan bagi tahap-tahap berikutnya. Tahap III menjadi tahap perantara antara langkah awal dan sasaran akhir dari kebijakan pembangunan jangka menengah RPJM Kabupaten Aceh Barat. Pada periode III ini, tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah:

“Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pelayanan Dasar”

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun ini diharapkan program nasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan target bidang pendidikan dan kesehatan lainnya telah dapat dituntaskan sebagaimana target pembangunan milenium (MDG's). Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, permukiman layak huni, pangan, pengangguran, infrastruktur dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah harus menunjukan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah tersebut.

6.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pada periode tahun keempat di Kabupaten Aceh Barat memiliki arti strategis yang ingin dicapai dan menjadi faktor penentu keberhasilan sebelum memasuki tahap terakhir. Tahap IV menjadi tahap lanjutan dari kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat. Pada periode IV ini, tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah:

"Peningkatan Manajemen Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik serta Pengembangan Wilayah Strategis"

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi yang melibatkan para pemangku kepentingan termasuk dukungan terhadap kemudahan investasi yang terkait dengan pengembangan agroindustri. Pada tahap ini, angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Aceh Barat diharapkan telah mengalami penurunan yang signifikan dan daerah-daerah yang mengalami rawan pangan sudah teratasi. Nilai tambah produk komoditas unggulan sudah menunjukkan hasil yang nyata. Akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir sudah dapat diselesaikan secara baik.

Selain itu, pencapaian target tujuan pembangunan milenium khususnya pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap konsisten, melainkan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

6.3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Arah kebijakan pada periode tahun kelima di Kabupaten Aceh Barat memiliki arti strategis yang ingin dicapai dan menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian pembangunan dalam RPJMD. Tahap V menjadi tahap terakhir dari kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh Barat. Pada periode V ini, semua proses dalam arah kebijakan pembangunan akan dievaluasi untuk melihat capaian pembangunan yang dihasilkan. Adapun tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah:

"Optimalisasi Peran Semua Pihak dalam Pembangunan"

Arah kebijakan pada tahun 2017 ini merupakan tahap terakhir dari periode RPJM 2012-2017, pada tahap ini juga melaksanakan pencapaian-pencapaian pada

tahap-tahap berikutnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati melalui penjabaran visi dan misi yang ada didalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang makmur, sehat dan berwawasan.

Pada tahun kelima pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode ketiga pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Tabel 6.1.
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Aceh Barat

Visi : Terwujudnya Masyarakat Aceh Barat Yang Makmur, Sehat dan Berwawasan			
Misi 1 : **Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme	a. Meningkatnya efektivitas birokrasi yang akuntabel; b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pemerintahan; c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan pemanfaatan E-Government; dan d. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.	a. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif; b. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan; c. Mewujudkan lembaga pengendali mutu sebagai upaya pengawasan terhadap pembangunan di segala sektor; d. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui beasiswa dan diklat tertentu; f. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan secara optimal dengan penempatan aparatur secara proporsional dan professional; g. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana media informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui *e-government* dan *e-procurement*	Melaksanakan upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan Melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan sehingga terwujudnya pelayanan prima. Melaksanakan peningkatan profesionalisme sesuai keahlian dan pengalaman, kualitas dan kualifikasi tenaga perencanaan, memberikan kesempatan belajar (beasiswa) bagi aparatur untuk melanjutkan pendidikan, menambah jumlah pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural bagi para pejabat struktural, memberikan tunjangan aparatur, Melaksanakan penyusunan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan secara transparan, partisipatif dan tehnokratis sehinga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dapat dipenuhi, mendukung pengembangan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan perkembangan teknologi, Meningkatkan manajemen pengelolaan pegawai, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam

			pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah; b. Meningkatnya Kerjasama antar daerah.	a. Mewujudkan pemerintahan gampong yang mandiri; b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktek demokrasi dan politik yang baik; c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak (stakeholder) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; serta d. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan semua pihak terkait dalam dan luar Negeri	Melakukan sinergitas dalam suatu koordinasi yang lebih riil dengan setiap stakeholder pembangunan, menyediakan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan peran kelembagaan adat (MAA).

Misi 2. **Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan perekonomian daerah	a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat; b. Menurunnya angka kemiskinan;	a. Meningkatkan pembangunan perekonomian yang berbasis perdesaan melalui peningkatan daya saing komuditas unggulan yang berkelanjutan; b. Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan pertanian dan perkebunan; c. Pengembangan agroindustri dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian yang merupakan Potensi basis daerah; d. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra-sentra produksi;	Meningkatkan produksi, produktifitas dan distribusi pangan, mengembangkan berbagai sektor basis dan sektor potensial lainnya, melaksanakan Program Padang Gembala dengan penyediaan lahan khusus untuk penggembalaan ternak disaat musim tanam, peningkatan supplay daging ternak, penguatan Kapasitas Komisi Penyuluhan Pertanian, mengfasilitasi Pengembangan penangangan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah, mengembangkan sistem produksi pembudidayaan ikan, pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap,

		e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); f. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan daerah; g. Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri; h. Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan; i. Mewujudkan Kota Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan kelembagaan ekonomi; k. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai simpul transportasi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh; l. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai Pusat Pelayanan Jasa Regional; m. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja; n. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs; o. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan p. Membangun kawasan wisata Islami.	melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan perekonomian keluarga dan perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan perlindungan dan kualitas tenaga kerja, fasilitas perdagangan dan perlindungan konsumen, Pengembangan berbagai sektor basis dan sektor potensial lainnya, Melakukan pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya saing dan diterima pasar untuk mendukung kegiatan parawisata.

Misi 3. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat	a. Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana publik; b. Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai; c. Meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni; dan d. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.	a. Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan regulasi; b. Melaksanakan pembangunan berbasis tata ruang wilayah c. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai MDG's 2015; d. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); e. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan Kota Meulaboh dengan wilayah pedesaan/daerah tertinggal; f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan; g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui pemanfatan sumber-sumber energi baru.	Memberikan ruang dialog yang memadai dalam sistem perencanaan dan melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan tata ruang Meningkatkan akses jalan dan jembatan antar gampong, kecamatan dan kabupaten, membangun dan memlihara pengairan dan sistem irigasi yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian, mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian Irigasi Lhok Guci, merevitalisasi sarana dan prasarana perumahan yang berada pada kawasan relokasi, meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi / *water and sanitation (watsan), m*ewujudkan kawasan agropolitan dan minapolitan, membangunan pasar di daerah tertinggal,
2. Menjaga kelestarian lingkungan.	a. Meningkatnya mitigasi bencana, b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam.	a. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana; b. Meningkatkan upaya mitigasi bencana; c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bencana;	Menerapkan sistem peringatan dini / early warning system di lingkungan warga, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang kebencanaan, menyediakan logistik untuk wilayah yang terkena bencana, merehabilitasi dan

		d. Penyiapan gampong siaga bencana; e. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan; f. Mewujudkan Kota Meulaboh yang bersih dan nyaman.	merekonstruksi wilayah pasca bencana; dan Meningkatkan peralatan dan perangkat kebencanaan. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan, megembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana.

Misi 4. **Menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih**.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mengurangi angka pengangguran	a. Tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan; b. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; c. Meningkatnya kesempatan dan pelatihan tenaga kerja; d. Meningkatnya lapangan kerja; dan e. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan.	a. Menciptakan dan memperluas kesempatan berusaha; dan b. Menciptakan tenaga kerja yang handal sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.	Melakukan peningkatan mutu sekolah kejuruan, melatih ketenagakerjaan; dan meningkatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam penyediaan tenaga kerja yang handal dan professional.

Misi 5. **Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, gizi dan pangan).**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan; b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya penanganan pasien dengan komplikasi yang tertangani	a. Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan;	Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan kesehatan pada Puskesmas sebagai sarana penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus dirujuk ke Rumah Sakit, menambah jumlah ruang rawat inap pada

	d. Meningkatnya usia harapan hidup; e. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan gizi buruk; f. Meningkatnya kualifikasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan; g. Meningkatnya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.	b. Mengupayakan tersedianya balai laboratorium kesehatan (BLK) dibawah pengawasan Dinas Kesehatan sebagai sarana pemeriksaan obat dan makanan di Kabupaten Aceh Barat; c. Memberdayakan seluruh unit pelayanan kesehatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas dalam rangka mengurangi jumlah pasien rujukan ke Rumah Sakit; d. Meningkatkan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh menjadi RS Tipe B; e. Meningkatkan status Bangzal Zaitun menjadi Rumah Sakit Jiwa yang representatif; f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang adil dan merata melalui pelayanan yang responsif, ramah dan biaya terjangkau tanpa membedakan status sosial masyarakat; g. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit dalam pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDG's); h. Meningkatkan status gizi balita dan anak sekolah melaui pemberian makanan tambahan bagi balita dan anak sekolah; i. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penyediaan sumber daya kesehatan yang memadai; j. Mengembangkan dan meningkatan kerjasama antar organisasi profesi	Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk mengantisipasi kelebihan daya tampung ruang rawat inap, mengembangkan kelengkapan fasilitas RSUD Cut Nyak Dhien menuju standar tipe B, membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak; Melaksanakan penambahan jumlah dokter terutama dokter spesialis dalam mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat pelayanan kesehatan, menyediakan Penyediaan Pegawai Kontrak /Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pada Puskesmas baik tenaga medis, para medis, maupun non medis yang setara dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, para medis dan non medis yang bertugas di Puskesmas daerah terpencil melalui pemberian insentif khusus (jasa medis) serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan universitas terkemuka dan rumahsakit luar regional dan internasional; Meningkatkan pemahaman masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan dan penyediaan tenaga penyuluh kesehatan yang memadai dan berkualitas.

		kesehatan; k. Mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang professional;	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	a. Menurunnya APK siswa (PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA); b. Meningkatnya APM siswa (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA); c. Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS); d. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (wajib belajar); e. Meningkatnya Partisipasi Anak Bersekolah (PAB); f. Tersedianya sarana prasarana dan teknologi informasi pendidikan; g. Tersedianya kelengkapan pemilikan buku pelajaran bagi siswa; h. Terpenuhinya rasio guru dan siswa sesuai bidang studi i. Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; j. Meningkatnya Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional; k. Meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; l. Tersedianya pendidikan non-formal yang memadai; m. Meningkatnya jumlah siswa yang lulus dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional; dan n. Meningkatnya kualitas manajemen sekolah.	a. Peningkatan akses dan tingkat pelayanan pendidikan yang berkualitas baik dalam pendidikan formal maupun non formal di semua jenjang pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; b. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar mutu nasional untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan intelektual dan berakhlakul karimah; c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas secara proporsional; d. Mengupayakan tersedianya kebutuhan akan guru bidang studi terutama bagi SLTA dan SMK; e. Melakukan pemerataan distribusi guru ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat sesuai kebutuhan; f. Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan; g. Memanfaatkan beasiswa khusus pemerintah Aceh dalam mengembangkan mutu tenaga pengajar di Perguruan Tinggi yang ada; h. Menerapkan kurikulum berbasis lokal dan Islami; i. Melakukan kerjasama dengan TKPPA dalam rangka mengembangkan fungsi Kota Meulaboh sebagai pusat pendidikan regional;	Melaksanakan Wajib belajar 12 tahun, menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun, peningkatan gedung SMK perikanan dan SMK Teknologi Hasil Pertanian, memberikan beasiswa kepada pelajar, Menyediakan kelengkapan buku pelajaran /buku paket; Memberikan beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, guru dan dosen berprestasi dan yang kurang mampu, mengupayakan tersedianya sekolah luar biasa (SLB) yang representatif bagi siswa(i) berkebutuhan khusus, membangun asrama putri untuk mahasiswi Aceh Barat di Banda Aceh, meningkatkan kelengkapan ruang kelas, laboratorium dan workshop sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan;

		j. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas; k. Peningkatan kualitas perguruan tinggi yang berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja; l. Melakukan percepatan penegerian Universitas Teuku Umar dan STAI Teuku Dirundeng; m. Mengembangkan kelengkapan sarana dan prasarana UTU dan STAI; n. Mengembangkan Komplek Pendidikan Modern Terpadu (penggabungan kurikulum pesantren modern dan umum); o. Mengembangkan teknologi pendidikan yang berbasiskan teknologi informasi; p. Penataan sistem pengelolaan pendidikan yang efesien, efektif dan produktif dalam suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel;	Memberikan beasiswa kepada guru dan tenaga kependidikan dalam peningkatan mutu SDM untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus, melakukan alih fungsi guru bidang studi tertentu yang berlebih menjadi guru bidang studi lain yang belum mencukupi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;

Misi 6. **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan menjaga perdamaian dan melaksanakan Dinul Islam serta peningkatan peran ulama**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai amanat MoU Helsinki	a. Menjaga perdamaian abadi di seluruh aspek kehidupan secara berkelanjutan; b. Meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan berpihak kepada rakyat kecil, c. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi	Melaksanakan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing dan memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi,

2. Melaksanakan Dinul Islam secara kaffah	a. Meningkatnya peran serta ulama dalam pembangunan; b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan agama, dayah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA); c. Meningkatnya mutu pendidikan pesantren / dayah; d. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kemakmuran tempat ibadah; dan e. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan Islami dalam bermasyarakat .	a. Meningkatkan peran ulama dan organisasi keagamaan sebagai lembaga pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah; b. Mengembangkan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) pada tiap-tiap gampong; c. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan khusus; d. Meningkatkan sarana dan prasarana ibadah serta lembaga pendidikan keagamaan; e. Meningkatkan pemahaman, pelaksanaan dan pengamalan Dinul Islam dalam berbagai kehidupan masyarakat; dan f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap dinul Islam.	Melibatkan para ulama dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agama, dayah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA), memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus pada tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren, meningkatkan jumlah tenaga penyuluh agama di seluruh gampong dengan memberdayakan para lulusan pesantren dan perguruan tinggi agama Islam, meningkatkan bantuan operasional untuk dayah dan pondok pesantren, memberikan beasiswa bagi santri-santri yang berprestasi, mengusulkan penyediaan beasiswa bg hafiz dan hafizah Aceh Barat, memaksimalkan fungsi mesjid sebagai tempat ibadah shalat berjamaah, pendidikan agama, dakwah dan sosial kemasyarakatan;, menyediakan anggaran bagi teungku TPA, teungku meunasah, imam mesjid dalam penyelenggaraan peribadatan, memberikan Honor untuk petugas penyelenggara Fardhu Kifayah gampong, meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren melalui pemberian honorarium dan insentif, meningkatkan kapasitas sumberdaya kelembagaan MPU, membentuk dan peningkatan majelis ta'lim bagi generasi muda dan dewasa, menyempurnakan fasilitas tempat wudhu' dan MCK Mesjid,

			mendorong kegiatan pengajian bagi masyarakat di seluruh gampong, mencanangkan kegiatan magrib mengaji bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Barat;

Misi 7. **Meningkatkan peran pemuda, perempuan dan kelembagaan adat, Seni Budaya dalam pembangunan daerah**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan	a. Meningkatnya peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan; b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan gender; c. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; d. Meningkatnya prestasi di bidang olah raga pada tingkat provinsi maupun nasional; e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolah raga; f. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga, lembaga adat dan seni g. Meningkatnya dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya; dan h. Meningkatnya peran serta lembaga adat dan sosial kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan.	a. Mendorong peranserta pemuda dan perempuan dalam semua sektor pemerintahan dan pembangunan; b. Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah; c. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dan perempuan; d. meningkatkan peran kelompok sosial masyarakat, organisasi pemuda, perempuan, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa sebagai mobile pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan; e. Meningkatkan pengarus-utamaan gender (PUG) melalui pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan dalam setiap aspek pembangunan; f. Memperbaiki peringkat Aceh Barat dalam event olahraga daerah maupun nasional; g. Tersedianya sebuah stadion olah raga di Kabupaten Aceh Barat yang dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai event turnamen cabang olah raga;	Melakukan pembinaan dan penghargaan pada cabang olahraga berprestasi, mendorong kemitraan dengan semua pihak untuk pembinaan olahraga daerah, menyelenggrakan kompetensi olahraga di tingkat daerah, membangun komplek olahraga dan seni sebagai pusat kegiatan seni, budaya dan olahraga yang berstandar nasional di Aceh Barat.

		h. Pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal yang ada di Aceh Barat yang mempunyai daya saing tinggi baik nasional maupun internasional; i. Tersedianya sebuah gedung kesenian bertaraf nasional di Kabupaten Aceh Barat yang dapat dijadikan sebagai pusat pertunjukan seni dan budaya; j. Penguatan lembaga adat sebagai lembaga pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan bidang budaya dan adat istiadat di daerah.	Melaksanakan pengembangan seni dan budaya Aceh melalui kegiatan pekan kebudayaan, membangun komplek olahraga dan seni sebagai pusat kegiatan seni,budaya (Meseum) dan olahraga yang berstandar nasional di Kabupaten Aceh Barat, Meningkatkan akses terhadap industri rumah tangga, pembentukan kembali Kelompok Pemberantasan Hama Babi; dan pengalokasian anggaran untuk pembentukan Program Desa Mandiri yang akan melahirkan rumusan reusam di tingkat gampong melalui lembaga adat.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Visi dan misi Kabupaten Aceh Barat perlu dijabarkan dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan analisis strategi dan kebijakan pembangunan, Kabupaten Aceh barat merumuskan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut; 1) Reformasi pemerintahan; 2) Peningkatan Perekonomian daerah; 3) Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian kebudayaan; 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 5) Sarana dan prasarana; 6) Pelaksanaan Dinul Islam; 7) Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; 8) Peningkatan peran perempuan, pemuda dan olahraga.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan acuan untuk menyusun program unggulan dan target indikator kinerja menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang dipaparkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
1	Reformasi Pemerintahan							
	1	Melaksanakan pelayanan prima;	Bantuan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Tersedianya penunjang kegiatan pembangunan desa dan politik		2 keg	Wajib	DPKKD
	2	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan pengalaman;	Belanja Bantuan Sosial	Tersedianya penunjang pembiayaan sosial		1 keg	Wajib	DPKKD
	3	Meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga perencanaan untuk dapat mengembangkan kapasitas pelayanan perencanaan;	Belanja Hibah	Tersedianya penunjang program		1 keg	Wajib	DPKKD
	4	Memberikan kesempatan belajar (beasiswa) bagi aparatur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik S2 maupun S3;	Dana Tak Terduga	Tersedianya dana cadangan		1 keg	Wajib	DPKKD
	5	Meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural bagi para pejabat struktural di Kabupaten Aceh Barat;	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa			Wajib	Inspektorat
	6	Pengadaan dana tunjangan aparatur sesuai dengan kemampuan daerah;	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terciptanya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Wajib	Inspektorat
	7	Melaksanakan penyusunan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan secara transparan, partisipatif dan tehnokratis sehinga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dapat dipenuhi;	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		5 keg	Wajib	Semua SKPD
	8	Mendukung pengembangan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan perkembangan teknologi;	Program peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat	Adanya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat		1 keg	Wajib	Kantor PPKS

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
	9 Penyediaan data dan informasi pembangunan;	Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya kerjasama pembangunan		1 keg	Wajib	Bappeda
	10 Meningkatkan manajemen pengelolaan pegawai;	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		1 tahun	Wajib	Sekretariat DPRK
	11 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.	Program Pelaksanaan Pemilu	Terselenggaranya Koordinasi Pemilu	-		Wajib	Kantor Kesbangpol
	12 Peningkatan peran kelembagaan adat (MAA); dan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya Pelayanan Administrasi Perkantoran		9 keg	Wajib	Semua SKPD
	13 Melakukan sinergitas dalam suatu koordinasi yang lebih riil dengan setiap stakeholder pembangunan.	Program Pemantapan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Rancangan Qanun dan Produk Hukum		1 keg	Wajib	Setdakab
		Program Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya SDDM aparatur		8 keg	Wajib	BKPP
		Program Penataan Administrasi kependudukan	Terwujudnya penataan administrasi kependudukan dalam Kabupaten Aceh Barat		2 keg	Wajib	Disdukcapil
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terselenggaranya penataan Daerah Otonomi Baru		1 keg	Wajib	Setdakab
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya ketertiban terhadap asset daerah		1 keg	Wajib	DPKKD
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan		7 keg	Wajib	Bappeda
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarna			Wajib	Semua SKPD
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan		1 keg	Wajib	12 Sekretariat Kecamatan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		23 keg	Wajib	DPKKD

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Adanya peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong		1 keg	Wajib	BPM
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tersedianya dana bantuan untuk pembangunan desa		1 keg	Wajib	12 Sekretariat Kecamatan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegawai			Wajib	Semua SKPD
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Penyusunan Anjab	Terciptanya SDM Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan SDM Aparatur yang dapat Menyusun Uraian Jabatan, Supervisi dan Pembinaan		2 keg	Wajib	Setdakab
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		1 tahun	Wajib	Sekretariat DPRK
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber kesehatan dan non kesehatan		2 Keg	Wajib	Semua SKPD
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Wajib	BPM
		Program Peningkatan Kerjasama Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terbangunnya Kerjasama Masyarakat Dalam Membangun Desa		1 keg	Wajib	BPM
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik		1 keg	Wajib	KPPT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD		1 keg	Wajib	Semua SKPD
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tersedianya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		9 keg	Wajib	Setdakab dan Inspektorat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarna		4 keg	Wajib	Semua SKPD

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		1 keg	Wajib	Kantor Arpusda
		Program Perayaan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar		2 keg	Wajib	Setdakab
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan yang Baik			Wajib	Kantor Arpusda, Dishutbun
		Program Perencanaan dan Pengawasan	Tersedia perencaan pembangunan sarana kesehatan		1 Keg	Wajib	RSU Cut Nyak Dhien, Kantor Lingkungan Hidup, Dinsosnakertran Dishutbun dan DKP
		Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Stategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan untuk Wilayah Stategis dan Cepat Tumbuh		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tersedianya Masterplan perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Tersedianya masterplan bidang Pembangunan Sosial dan Budaya		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya masterplan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		1 keg	Wajib	Bappeda

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya pengawasan tata ruang		1 keg	Wajib	Bappeda
		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media masa			Wajib	Setdakab
		Program Kebijakan Politik Pemerintah	Terlaksananya Kebijakan Politik Pemerintah	-	1 Keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program Pembinaan dan pengawasan bidang migas	Tersedia pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral		1 keg	Wajib	Distamben
		Program Pembinaan dan Pengembangan bidang geologi dan SDM	Tertibnya perizinan usaha bidang geologi dan SM		3 Keg	Wajib	Distamben
		Program Pembinaan Hukum Masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan Hukum Terhadap Masyarakat dan Terpenuhinya Pendampingan dan Kuasa Hukum Bagi PEMDA		2 keg	Wajib	Setdakab dan distannak
		Program Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Terlaksananya Pencegahan Dini didalam Masyarakat	-	2 keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program Pembinaan Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Direktur Badan Usaha Milik Daerah		1 keg	Wajib	Setdakab
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Melakukan Upaya-Upaya Pencegahan Sejak Dini	-	1 keg	Wajib	Kantor Kesbangpol dan Kantor Satpol PP dan WH
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatanya asset dan pemanfaatan tanah pemda		1 keg	Wajib	Setdakab
		Program Pendidikan Politik Masyarakatan	Terlaksananya Pemahaman Masyarakat Tentang Politik	-	3 keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program peningkatan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			3 keg	Wajib	Setdakab

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Meningkatnya Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut		3 keg	Wajib	DKP
			Program Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	Tersedianya dana sharing untuk PNPM			Wajib	Dinas CKP
			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			1 keg	Wajib	Setdakab
2	Peningkatan Perekonomian Daerah							
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan perekonomian keluarga dan perwujudan kesejahteraan sosial;	Program Distribusi Pangan Masyarakat Miskin			1 keg	Wajib	Setdakab
	2	Meningkatkan perlindungan dan kualitas tenaga kerja;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Adanya Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		2 Keg	Wajib	Distannak
	3	Meningkatkan fasilitas perdagangan dan perlindungan konsumen;	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya database investasi			Wajib	Setdakab
	4	Meningkatkan produksi, produktifitas dan distribusi pangan;	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja		1 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
	5	Pengembangan berbagai sektor basis dan sektor potensial lainnya;	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tersedia tenaga kerja terampil		6 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
	6	Pelaksanaan Program Padang Gembala dengan penyediaan lahan khusus untuk penggembalaan ternak disaat musim tanam;	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terpenuhinya Pembinaan/Pengembangan Budidaya Perikanan		4 keg	Pilihan	DKP
	7	Peningkatan supplay daging ternak di Kabupaten Aceh Barat;	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	Tersedia sarana yang menampung sarana data digital			Wajib	Setdakab
	8	Penguatan Kapasitas Komisi Penyuluhan Pertanian;	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terpenuhinya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		4 keg	Pilihan	DKP

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
	9	Fasilitasi Pengembangan penangangan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah;	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlaksananya penanggulangan bencana alam		1 Keg	Wajib	Dinsosna-kertran
	10	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan;	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Pesisir		2 keg	Pilihan	DKP
	11	Mengembangkan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan dengan memanfatkan investasi usaha perikanan dalam upaya membuka lapangan kerja dan nilai tambah masyarakat;	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya fungsi sosial dan taraf kesejahteraan sosial		1 Keg	wajib	Dinsosnakertran dan Setdakab
	12	Melakukan pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya saing dan diterima pasar;	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kinerja Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		2 keg	Pilihan	BP4K
	13	Peningkatan mutu sekolah kejuruan;	Program Pembinaan Anak terlantar	Terlaksananya pembinaan anak terlantar		1 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
	14	Pelatihan ketenagakerjaan; dan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tersedianya ternak yang berkualitas		1 Keg	Pilihan	Distannak
	15	Meningkatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam penyediaan tenaga kerja yang handal dan professional.	Program pengambangan sentra-sentra industri potensial	Program pengambangan sentra-sentra industri potensial			Pilihan	Distamperindagkop
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		1 keg	Wajib	Distamperindagkop
			Program Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Kelautan	Me ningkatnya Pengembangan Sumber Daya Kelautan			Pilihan	DKP
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Adanya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		1 keg	Pilihan	Distamperindagkop

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	tersosialisasi Perda dan rasional mengenai industri hasil hutan		-	Pilihan	Dishutbun
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Terbangunnya Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau (Hatchery Air Payau)		2 keg	Pilihan	DKP
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			Pilihan	Distamperindagkop
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Pembinaan/Pengembangan Perikanan Tangkap		4 keg	Pilihan	DKP
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		2 keg	Pilihan	DKP
		Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya Kapasitas Pengolah Hasil Perikanan			Pilihan	DKP
		Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Adanya efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		3 keg	Pilihan	Distamperindagkop
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Adanya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			Pilihan	Distamperindagkop
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM Kesejahteraan Petani		3 keg	Pilihan	BP4K
		Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		4 keg	Wajib	BP4K
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		2 keg	Pilihan	Distamperindagkop
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tertampungnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		1 keg	Pilihan	BP4K dan dishutbun

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Pelayanan Kepada masyarakat		1 Keg	Pilihan	Distannak
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/peternakan/perikanan	Tersososialisasinya petani tentang Teknologi Pertanian/Perkebunan		1 keg	Pilihan	BP4K
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		6 Keg	Pilihan	Distannak, BP4K dan Dishutbun
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan		1 Keg	Pilihan	Distannak
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi			Pilihan	Setdakab
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketanaga Kerjaan	Tersedianya lembaga ketenaga kerjaaan LKS Tripartit		1 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Adanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		1 keg	Wajib	Distamperindagkop
3	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan						
	1 Melaksanakan Wajib belajar 12 tahun;	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tercapainya Pelayanan Pendidikan yang maksimal		2 Keg	Wajib	Disdik
	2 Menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun;	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Adanya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		2 keg	Wajib	KPPT
	3 Peningkatan gedung SMK perikanan dan SMK Teknologi Hasil Pertanian;	Program Pendidikan Menengah	Tercapainya Kelulusan Siswa yang baik		9 keg	Wajib	Disdik
	4 Memberikan beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, guru dan dosen berprestasi dan yang kurang mampu;	Program Pendidikan Non Formal	Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal		4 Keg	Wajib	Disdik
	5 Menyediakan kelengkapan buku pelajaran /buku paket;	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Perayaan Hari Besar Nasional		3 keg	Wajib	Disbudparpora

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
	6	Mengupayakan tersedianya sekolah luar biasa (SLB) yang representatif bagi siswa(i) berkebutuhan khusus;	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca		5 keg	Wajib	Kantor Arpusda
	7	Membuka program studi kedokteran dan teknik industri dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter dan ternisi di bidang perindustrian yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan daerah;	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Terwujudnya Pengembangan Destinasi Wisata Yang Lebih Baik		1 keg	Wajib	Disbudparpora
	8	Memberikan beasiswa kepada guru dan tenaga kependidikan dalam peningkatan mutu SDM untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus;	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Terwujudnya pemasyarakatan olahraga		1 keg	Pilihan	Disbudparpora
	9	Membangun asrama putri untuk mahasiswi Aceh Barat di Banda Aceh;	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya penigkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		2 Keg	Wajib	Disdik
	10	Meningkatkan kelengkapan ruang kelas, laboratorium dan workshop sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan;	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal		2 keg	Wajib	Disdik
	11	Menggunakan standar kelulusan siswa tingkat SD/MI yang wajib bisa baca Al-Quran;	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terwujudnya rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun		9 keg	Wajib	Disdik
	12	Melakukan alih fungsi guru bidang studi tertentu yang berlebih menjadi guru bidang studi lain yang belum mencukupi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terkendalinya menara telekomunikasi dan tertibnya penertiban warnet		1 Keg	Wajib	Dishubpartel
	13	Membangun pusat jajanan masyarakat (kuliner) dan wisata Islami di Kawasan Krung Meureubo,	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan SDM Masyarakat Gampong		1 Keg	Wajib	Dishubpartel
	14	Mengembangkan seni dan budaya Aceh;	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatknya aparatur yang mampu mengelola sistem aplikasi IT dan PR		-	Wajib	Setdakab

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
	15	Membangun komplek olahraga dan seni sebagai pusat kegiatan seni, budaya dan olahraga yang berstandar nasional di Kabupaten Aceh Barat;	Program Pembinaan ex penyandang penyakit sosial (Ex Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Berkurangnya ex penyandang penyakit sosial		1 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Berhasilnya program pendidikan PAUD		2 keg	Wajib	Disdik
			Program pendidikan luar biasa	Terlaksananya pendidikan luar biasa		1 keg	Wajib	Disdik
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Adanya jaringan komunikasi dan informasi bagi masyarakat		1 Keg	wajib	Dishubpartel dan Setdakab
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi tentang Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku		1 keg	Wajib	Kantor Arpusda
			Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh			4 keg	Wajib	MAA dan MPD
4		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat						
	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan kesehatan pada Puskesmas sebagai sarana penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus dirujuk ke Rumah Sakit;	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit		5 Keg	Wajib	RSU Cut Nyak Dhien
	2	Menambah jumlah ruang rawat inap pada Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk mengantisipasi kelebihan daya tampung ruang rawat inap;	Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	Naiknya peringkat kesehatan masyarakat Aceh Barat		1 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan
	3	Mengembangkan kelengkapan fasilitas RSUD Cut Nyak Dhien menuju standar kelas B;	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tercegahnya dan tertanggulanginya penyakit menular di tengah masyarakat		5 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
	4 Membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak;	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit		8 Keg	Wajib	RSU Cut Nyak Dhien
	5 Menambah jumlah dokter terutama dokter spesialis dalam mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat pelayanan kesehatan;	Program Penggadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasana Puskesmas, Pustu dan jaringannya		4 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan
	6 Penyediaan Pegawai Kontrak /Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;	Program peningkatan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah				Wajib	Setdakab
	7 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pada Puskesmas baik tenaga medis, para medis, maupun non medis yang setara dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya akan kematian ibu dan anal		4 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan
	8 Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, para medis dan non medis yang bertugas di Puskesmas daerah terpencil melalui pemberian insentif khusus (jasa medis);	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terpebuhinya kebutuhan gizi anak-anak		1 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan
	9 Meningkatkan pemahaman masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan dan penyediaan tenaga penyuluh kesehatan yang memadai dan berkualitas;	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		1 Keg	Wajib	RSU Cut Nyak Dhien
	10 Meningkatkan hubungan kerjasama dengan universitas terkemuka dan rumahsakit luar regional dan internasional;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlayaninya kesehatan masyarakat		4 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya peserta keluarga berencana		6 keg	Wajib	Kantor PPKS
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Tersosialisasinya Kesehatan Reproduksi Remaja		1 keg	Wajib	Kantor PPKS
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terselenggaranya lingkungan rumah yang sehat		6 keg	Wajib	Dinas CKP
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin		2 Keg	Wajib	RSU Cut Nyak Dhien
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terawasainya higenitas makanan di tengah masyaralat		2 keg	Wajib	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok BKB		1 keg	Wajib	Kantor PPKS
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisasinya pemahaman kesehatan pada masyarakat		3 Keg	Wajib	Dinas Kesehatan
5	Sarana dan Prasarana						
	1 Meningkatkan akses jalan dan jembatan antar gampong, kecamatan dan kabupaten;	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedia desain dan pengawasan sertanya terbangunnya sarana jalan dan jembatan		6 keg	Wajib	Dinas Bina Marga
	2 Pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan sistem irigasi yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi;	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengoperasian Angkutam Umum Jalan Raya		2 keg	Wajib	Kantor Lingkungan Hidup
	3 Mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian Irigasi Lhok Guci;	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya Pengoperasian Angkutam Umum Jalan Raya		4 Keg	Wajib	Dishubpartel
	4 Merevitalisasi sarana dan prasarana perumahan yang berada pada kawasan relokasi;	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharannya jalan dan jembatan		8 keg	Wajib	Dinas Bina Marga dan Dinas CKP
	5 Meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi / *water and sanitation (watsan);*	Pengembangan Perumahan	Tersedianya Perumahan Bagi Masyarakat		1 keg	Wajib	Setdakab

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
	6 Mewujudkan kawasan agropolitan dan minapolitan;	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Terdatanya dan termonitornya kondisi jalan dan jembatan			Wajib	Dinas Bina Marga
	7 Pembangunan pasar di daerah tertinggal;	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong		8 keg	Wajib	Dinas CKP
	8 Mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data digital jalan dan jembatan		1 keg	Wajib	Dinas Bina Marga
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong		1 keg	Wajib	Dinas CKP
		Program Pengawasan bidang ketenagalistrikan	Terlaksana pengawasan bidang kelistrikan		1 keg	Wajib	Distamben
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi		1 keg	Wajib	Dinas CKP
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya Kenyamanan Berlalu-lintas		1 Keg	Wajib	Dishubpartel
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya dana pembangunan kebina-margaan		1 keg	Wajib	Dinas Bina Marga
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku yang memadai		1 keg	Wajib	Dinas CKP
		Program Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/bronjong	Terpeliharanya talud/bronjong			Wajib	Dinas Bina Marga
		Program Sumber Daya Energi Baru terbarukan	Tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan		1 keg	Wajib	Distamben
		Program Transmigrasi Lokal	Pertumbuhan Transmigrasi Lokal		1 Keg	Wajib	Dinsosnakertran
6	Pelaksanaan Dinul Islam						
	1 Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kehidupan agama yang baik		1 keg	Wajib	Dinas Syariat Islam

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
		masing-masing;						
	2	Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi,	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Terbinanya lembaga sosial keagamaan		10 Keg	Wajib	Dinas Syariat Islam
	3	Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Terlaksananya Syariat dan Syiar Islam dengan merata dan memadai		10 Keg	Wajib	Dinas Syariat Islam
	4	Melibatkan para ulama dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut	Tersedia sarana dan prasarana bagi kegiatan keagamaan		4 Keg	Wajib	Dinas Syariat Islam
	5	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agama, dayah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA);	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Dinul Islam	Meningkatnya pemahaman terhadap dinul Islam			Wajib	Dinas Syariat Islam
	6	Memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus pada tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren;	Program Peningkatan Sumberda Daya dan Peran Ulama	Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan			Wajib	
	7	Meningkatkan jumlah tenaga penyuluh agama di seluruh gampong dengan memberdayakan para lulusan pesantren dan perguruan tinggi agama Islam;	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan		1 Keg	Wajib	Kantor Satpol PP dan WH
	8	Meningkatkan bantuan operasional untuk dayah dan pondok pesantren;	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Syariat	Meningkatnya sarana dan prasana dan kemakmuran tempat ibadah serta kesejahteraan tenaga keagamaan			Wajib	Dinas Syariat Islam
	9	Memberikan beasiswa bagi santri-santri yang berprestasi;						
	10	Mengusulkan penyediaan beasiswa bg hafiz dan hafizah aceh barat;						
	11	Memaksimalkan fungsi mesjid sebagai tempat ibadah shalat berjamaah, pendidikan agama, dakwah dan sosial kemasyarakatan;						

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
					Awal	Akhir		
	12	Menyediakan anggaran bagi teungku TPA, teungku meunasah, imam mesjid dalam penyelenggaraan peribadatan;						
	13	Memberikan Honor untuk petugas penyelenggara Fardhu Kifayah gampong;						
	14	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar (Guree Seumeubeut) pada pesantren melalui pemberian honorarium dan insentif;						
	15	Meningkatkan kapasitas sumberdaya kelembagaan MPU;						
	16	Pembentukan dan peningkatan majelis ta'lim bagi generasi muda dan dewasa;						
	17	Penyempurnaan fasilitas tempat wudhu' dan MCK Mesjid;						
	18	Meningkatkan kegiatan pengajian bagi masyarakat di seluruh gampong;						
	19	Mencanangkan kegiatan magrib mengaji bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Barat;						
7		Pengurangan Resiko Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	1	Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan;	Program pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya sostem peringatan dini dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam		2 keg	Wajib	BPBD
	2	Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana;	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Adanya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2 keg	Wajib	Kantor Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
	3 Menerapkan sistem peringatan dini / *early warning* system di lingkungan warga;	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terciptanya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		2 keg	Wajib	BPBD
	4 Peningkatan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang kebencanaan;	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	Terselenggaranya Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam			Wajib	Kantor Lingkungan Hidup
	5 Menyediakan logistik untuk wilayah yang terkena bencana;	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Adanya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan		1 keg	Wajib	Dishutbun
	6 Merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah pasca bencana; dan	Program Rehabilitas Hutan dan Lahan	Adanya Hutan dan Lahan yang terehabilitasi		5 keg	Wajib	Dishutbun
	7 Meningkatkan peralatan dan perangkat kebencanaan.	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terpenuhinya standar pelayanan dalam penataan hasil hutan kayu		-	Wajib	Dishutbun
		Program Pencegahan Dini Masyarakat	Terlaksananya Pencegahan Dini didalam Masyarakat	-	1 Keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		4 keg	Wajib	Kantor Lingkungan Hidup dan Dishutbun
		Program Peningkatan dan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan		-	Wajib	Dishutbun
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	-	1 keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	-	1 Keg	Wajib	Kantor Kesbangpol
		Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup				Wajib	KLH
		Program Rehablitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Terbentuknya Kelembagaan Rehablitasi Hutan dan Lahan		-	Wajib	Dishutbun
		rogram Survey Geologi Umum, Geologi Tata Lingkungan, Mitigasi	Tersedia data geologi		1 Keg	Wajib	Distamben

No	Prioritas Pembangunan/Kebijakan Umum	Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD
				Awal	Akhir		
		Bencana Alam Geologi dan Inventarisasi Sumber Daya Minieral					
8	Peningkatan Peran Perempuan, Pemuda dan Olahraga						
	1 Melakukan pembinaan dan penghargaan pada cabang-cabang olahraga berprestasi;	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Mengolah-ragakan masyarakat dan memasyarkatkan olah raga		4 keg	Wajib	Disbudparpora
	2 Mendorong kemitraan dengan semua pihak untuk pembinaan olahraga daerah;	Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Meningkatnya peran pemuda			Wajib	Disbudparpora
	3 Menyelenggrakan kompetensi olahraga di tingkat daerah;	Program Perlindungan Anak	Adanya Perlindungan Anak		1 keg	Wajib	Kantor PPKS
	4 Meningkatkan akses terhadap industri rumahtangga / *home industry;*	Program PengembanganBahan Iformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak		1 keg	Wajib	Kantor PPKS
	5 Pembentukan kembali Kelompok Pemberantasan Hama Babi; dan 6 Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Program Desa Mandiri yang akan melahirkan rumusan reusam di tingkat gampong melalui lembaga-lembaga adat.	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak		1 keg	Wajib	Kantor PPKS

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 dituangkan dalam program-program pembangunan daerah. Program tersebut akan diikuti dengan pagu indikatif sesuai dengan rencana/proyeksi penerimaan daerah setiap tahunnya. Besarnya pagu indikatif ditentukan oleh besarnya proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

Proyeksi penerimaan dan indikasi total kebutuhan pendanaan untuk mendukung program tersebut disajikan dalam Tabel 8.1. Sedangkan uraian rinci plafon anggraan belanja Pemerintah kabupaten Aceh Barat berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel 8.2. serta distribusi kebutuhan pendanaan berdasarkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat akan disajikan dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.1.
Proyeksi dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan untuk Mendukung Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015(Rp)	Tahun 2016(Rp)	Tahun 2017
1.	**Proyeksi Pendapatan**	**692.727.454.288**	**854.635.930.102**	**940.099.523.113**	**983.656.410.811**	**1.031.783.455.458**
2.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	357.301.968.985	372.847.092.120	406.112.052.843	392.591.824.668	378.294.908.983
3.	Belanja Lainnya	63.796.169.576	41.901.238.024	54.603.847.895	58.053.636.152	46.076.026.803
4.	**Total Belanja Langsung**	**271.629.315.727**	**439.887.599.958**	**479.383.622.375**	**533.010.949.991**	**607.412.519.672**

8.2. Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Urusan Pemerintah

Tabel 8.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	**Urusan Wajib**			**245.257.256.388**		**283.997.594.294**		**312.928.144.614**		**344.800.587.138**		**400.513.491.735**		**1.596.407.993.178**	
1.01	**PENDIDIKAN**			**38.574.643.840**		**42.450.283.277**		**46.142.920.409**		**50.176.251.696**		**54.584.570.573**		**231.928.669.795**	
1.01.1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**			**28.172.435.890**		**31.009.679.479**		**34.110.647.427**		**37.521.712.170**		**41.273.883.387**		**172.088.358.353**	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	1.967.800.000	10 keg	2.164.580.000	10 keg	2.381.038.000	10 keg	2.619.141.800	10 keg	2.881.055.980		12.013.615.780	Disdik
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	16.985.000	2 keg	18.683.500	2 keg	20.551.850	2 keg	22.607.035	2 keg	24.867.739		103.695.124	Disdik
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 keg	1 keg	29.500.000	1 keg	32.450.000	1 keg	35.695.000	1 keg	39.264.500	1 keg	43.190.950		180.100.450	Disdik
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 keg	3 keg	138.074.000	3 keg	151.881.400	3 keg	167.069.540	3 keg	183.776.494	3 keg	202.154.143		842.955.577	Disdik
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2 keg	2 keg	907.755.000	2 keg	998.530.500	2 keg	1.098.383.550	2 keg	1.208.221.905	2 keg	1.329.044.096		5.541.935.051	Disdik
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9 keg	9 keg	10.060.766.750	10 keg	11.066.843.425	10 keg	12.173.527.768	10 keg	13.390.880.544	10 keg	14.729.968.599		61.421.987.085	Disdik
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	9 keg	9 keg	9.188.723.200	10 keg	10.107.595.520	10 keg	11.118.355.072	10 keg	12.230.190.579	10 keg	13.453.209.637		56.098.074.008	Disdik
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	4 Keg	4 Keg	135.497.000	4 Keg	149.046.700	4 Keg	163.951.370	4 Keg	180.346.507	4 Keg	198.381.158		827.222.735	Disdik

1.01 . 1.01.01 . 19	Program pendidikan luar biasa	1 keg	1 keg	0	1 keg	20.000.000	1 keg	22.000.000	1 keg	24.200.000	1 keg	26.620.000		92.820.000	Disdik
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Keg	2 Keg	64.802.000	2 Keg	71.282.200	2 Keg	78.410.420	2 Keg	86.251.462	2 Keg	94.876.608		395.622.690	Disdik
1.01.1.01.01.27	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	2 keg	2 keg	5.574.506.740	2 keg	6.131.957.414	2 keg	6.745.153.155	2 keg	7.419.668.471	2 keg	8.161.635.318		34.032.921.098	Disdik
1.01.1.01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2 Keg	2 Keg	46.089.000	2 Keg	50.697.900	2 Keg	55.767.690	2 Keg	61.344.459	2 Keg	67.478.905		281.377.954	Disdik
1.01.1.01.01.30	Program Perayaan Hari Besar Nasional	2 Keg	2 Keg	41.937.200	2 Keg	46.130.920	2 Keg	50.744.012	2 Keg	55.818.413	2 Keg	61.400.255		256.030.800	Disdik
1.17.1.17	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**			**41.889.000**		**46.077.900**		**50.685.690**		**55.754.259**		**61.329.685**		**255.736.534**	
1.17.1.17.01.	Program Perayaan Hari Besar Nasional		2 keg	41.889.000	2 keg	46.077.900	2 keg	50.685.690	2 keg	55.754.259	2 keg	61.329.685		255.736.534	Disbudpar pora
1.01.1.01.02	**DINAS SYARIAT ISLAM**			**10.031.498.950**		**11.032.823.898**		**11.583.715.092**		**12.161.125.847**		**12.767.932.139**		**57.577.095.926**	
1.01.1.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	152.003.350	10 Kegt	159.603.518	10 Kegt	167.583.693	10 Kegt	175.962.878	10 Kegt	184.761.022		839.914.461	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.02	Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	19.496.600	2 Keg	20.471.430	2 Keg	21.495.002	2 Keg	22.569.752	2 Keg	23.698.239		107.731.022	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.500.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.500.000	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.24	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut	4 Keg	4 Keg	2.444.776.000	4 Keg	2.567.014.800	4 Keg	2.695.365.540	4 Keg	2.830.133.817	4 Keg	2.971.640.508		13.508.930.665	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.25	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	10 Keg	10 Keg	6.486.423.000	10 Keg	6.810.744.150	10 Keg	7.151.281.358	10 Keg	7.508.845.425	10 Keg	7.884.287.697		35.841.581.630	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.26	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	10 Keg	10 Keg	923.800.000	10 Keg	969.990.000	10 Keg	1.018.489.500	10 Keg	1.069.413.975	10 Keg	1.122.884.674		5.104.578.149	Dinas Syariat Islam

1.01.1.01.02.	Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Syariat				20 Keg	30.000.000	20 Keg	31.500.000	20 Keg	33.075.000	20 Keg	34.728.750		129.303.750	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.	Program Peningkatan Sumberda Daya dan Peran Ulama				8 Keg	50.000.000	8 Keg	52.500.000	8 Keg	55.125.000	8 Keg	57.881.250		215.506.250	Dinas Syariat Islam
1.01.1.01.02.	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam				13 Keg	400.000.000	13 Keg	420.000.000	13 Keg	441.000.000	13 Keg	463.050.000		1.724.050.000	Dinas Syariat Islam
1.19.1.19.02	**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**			**328.820.000**		**361.702.000**		**397.872.200**		**437.659.420**		**481.425.362**		**2.007.478.982**	
1.01.1.19.02.25	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan		1 Keg	328.820.000	1 Keg	361.702.000	1 Keg	397.872.200	1 Keg	437.659.420	1 Keg	481.425.362		2.007.478.982	Satpol PP dan WH
1.02	**KESEHATAN**			**31.624.141.345**		**38.975.774.137**		**48.915.617.202**		**62.766.715.831**		**82.403.356.859**		**264.685.605.374**	
1.02.1.02.01	**DINAS KESEHATAN**			**9.401.416.700**		**10.337.908.370**		**11.369.181.607**		**12.503.599.768**		**13.751.459.744**		**57.363.566.189**	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 Keg	11 Keg	1.440.535.000	11 Keg	1.654.870.500	11 Keg	1.820.339.950	11 Keg	2.002.373.945	11 Keg	2.202.611.340		9.120.730.735	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02	Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur	3 keg	2 keg	19.200.000	2 keg	21.120.000	2 keg	23.232.000	2 keg	25.555.200	2 keg	28.110.720		117.217.920	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Keg	1 Keg	11.500.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000		71.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 Keg	3 Keg	2.169.629.000	3 Keg	2.386.591.900	3 Keg	2.625.251.090	3 Keg	2.887.776.199	3 Keg	3.176.553.819		13.245.802.008	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3 Keg	4 Keg	723.300.000	4 Keg	709.348.000	4 Keg	780.282.800	4 Keg	858.311.080	4 Keg	944.142.188		4.015.384.068	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy	2 keg	3 Keg	99.510.900	3 Keg	109.461.990	3 Keg	120.408.189	3 Keg	132.449.008	3 Keg	145.693.909		607.523.996	Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1 Keg	1 Keg	85.514.000	1 Keg	94.065.400	1 Keg	103.471.940	1 Keg	113.819.134	1 Keg	125.201.047		522.071.521	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 Keg	5 Keg	210.349.700	5 Keg	231.384.670	5 Keg	254.523.137	5 Keg	279.975.451	5 Keg	307.972.996		1.284.205.953	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1 keg	2 keg	36.883.400	2 keg	40.571.740	2 keg	44.628.914	2 keg	49.091.805	2 keg	54.000.986		225.176.845	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1 keg	1 keg	1.564.610.000	1 keg	1.721.071.000	1 keg	1.893.178.100	1 keg	2.082.495.910	1 keg	2.290.745.501		9.552.100.511	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program Penggadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	4 keg	4 Keg	2.834.115.700	4 Keg	3.117.527.270	4 Keg	3.429.279.997	4 Keg	3.772.207.997	4 Keg	4.149.428.796		17.302.559.760	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3 keg	4 Keg	163.949.000	4 Keg	180.343.900	4 Keg	198.378.290	4 Keg	218.216.119	4 Keg	240.037.731		1.000.925.040	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.35	Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	1 Keg	1 Keg	42.320.000	1 Keg	46.552.000	1 Keg	51.207.200	1 Keg	56.327.920	1 Keg	61.960.712		258.367.832	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN**			**20.838.683.945**		**27.115.420.997**		**35.871.746.348**		**48.420.957.892**		**66.625.523.126**		**198.872.332.307**	
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Keg	12 Keg	7.035.231.611	12 Keg	7.738.754.772	12 Keg	8.512.630.249	12 Keg	9.363.010.250	12 Keg	10.299.311.275		42.948.938.157	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 keg	1 keg	20.532.000	1 keg	688.000.000	1 keg	184.800.000	1 keg	203.280.000	1 keg	223.608.000		1.320.220.000	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 keg	1 keg	2.400.000	1 keg	40.000.000	1 keg	46.800.000	1 keg	48.400.000	1 keg	56.460.000		194.060.000	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	RSU Cut Nyak Dhien

1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Keg	1 Keg	523.736.834	1 Keg	576.100.000	1 Keg	633.710.000	1 Keg	697.081.000	1 Keg	766.789.100		3.197.416.934	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2 Keg	2 Keg	9.700.800.000	2 Keg	15.259.548.725	2 Keg	23.249.171.093	2 Keg	34.386.638.885	2 Keg	51.007.710.580		133.603.869.282	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	8 Keg	8 Keg	3.221.511.000	5 Keg	2.350.517.500	5 Keg	2.703.095.125	5 Keg	3.108.559.394	5 Keg	3.574.843.303		14.958.526.322	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	5 Keg	5 Keg	314.472.500	5 Keg	346.000.000	5 Keg	415.889.881	5 Keg	478.273.363	5 Keg	550.014.368		2.104.650.112	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.36	Program Perencanaan dan Pengawasan	1 Keg	1 Keg	15.000.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	18.150.000	1 Tahun	19.965.000	1 Tahun	21.961.500		91.576.500	RSU Cut Nyak Dhien
1.02.1.02.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy				2 Keg	75.000.000	2 Keg	82.500.000	2 Keg	90.750.000	2 Keg	99.825.000		348.075.000	RSU Cut Nyak Dhien
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**1.384.040.700**		**1.522.444.770**		**1.674.689.247**		**1.842.158.172**		**2.026.373.989**		**8.449.706.878**	
1.20.1.20.03.16	Program peningkatan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3 keg	3 keg	1.384.040.700	3 keg	1.522.444.770	3 keg	1.674.689.247	3 keg	1.842.158.172	3 keg	2.026.373.989		8.449.706.878	Setdakab
1.03	**PEKERJAAN UMUM**			**67.480.190.032**		**75.056.272.035**		**82.330.205.719**		**90.420.984.867**		**98.954.168.124**		**414.241.820.777**	
1.03.1.03.01	**DINAS BINA MARGA**			**34.321.944.300**		**38.562.701.730**		**42.189.778.383**		**46.269.014.797**		**50.389.501.048**		**211.732.940.259**	
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 keg	11 keg	359.354.000	11 keg	431.224.800	11 keg	517.469.760	11 keg	620.963.712	11 keg	745.156.454		2.674.168.726	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	5 keg	5 keg	64.884.000	5 keg	237.000.000	5 keg	124.884.000	5 keg	64.884.000	5 keg	77.860.800		569.512.800	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		120.000.000	Dinas Bina Marga

1.03.1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	6 keg	6 keg	9.381.900.000	6 keg	10.520.090.000	6 keg	11.822.099.000	6 keg	12.704.308.900	6 keg	13.674.739.790		58.103.137.690	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8 keg	8 keg	24.235.806.300	8 keg	26.659.386.930	8 keg	29.325.325.623	8 keg	32.257.858.185	8 keg	35.483.644.004		147.962.021.042	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	1 keg	1 keg	250.000.000					1 keg	250.000.000				500.000.000	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/bronjong				1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000		400.000.000	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan				1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000		464.100.000	Dinas Bina Marga
1.03.1.03.01.23	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1 keg	1 keg	25.000.000	1 keg	350.000.000	1 keg	25.000.000	1 keg	25.000.000	1 keg	50.000.000		475.000.000	Dinas Bina Marga
	Program Pembangunan turap/talud/brojong				1 keg	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
1.03.1.03.02	**DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN**			**33.158.245.732**		**36.493.570.305**		**40.140.427.336**		**44.151.970.069**		**48.564.667.076**		**202.508.880.518**	
1.03.1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	527.453.270	10 Keg	580.198.597	10 Keg	638.218.457	10 Keg	702.040.302	10 Keg	772.244.333		3.220.154.959	Dinas CKP
1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 keg	6 keg	4.484.200.000	6 keg	4.932.620.000	6 keg	5.425.882.000	6 keg	5.968.470.200	6 keg	6.565.317.220		27.376.489.420	Dinas CKP
1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Dinas CKP
1.03.1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	Dinas CKP
1.03.1.03.02.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-	1 keg	8 keg	2.829.665.462	1 keg	3.112.632.008	1 keg	3.423.895.209	1 keg	3.766.284.730	1 keg	4.142.913.203		17.275.390.612	Dinas CKP

	Gorong														
1.03.1.03.02.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1 keg	1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000	1 keg	146.410.000		610.510.000	Dinas CKP
1.03.1.03.02.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 keg	1 keg	1.613.207.000	1 keg	1.774.527.700	1 keg	1.951.980.470	1 keg	2.147.178.517	1 keg	2.361.896.369		9.848.790.056	Dinas CKP
1.22.1.03.02.20	Program Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	1 keg	1 keg	132.000.000	1 keg	145.200.000	1 keg	159.720.000	1 keg	175.692.000	1 keg	193.261.200		805.873.200	Dinas CKP
1.03.1.03.02.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1 keg	1 keg	13.172.844.000	1 keg	14.490.128.400	1 keg	15.939.141.240	1 keg	17.533.055.364	1 keg	19.286.360.900		80.421.529.904	Dinas CKP
1.03.1.03.02.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2 keg	2 keg	2.226.792.000	2 keg	2.449.471.200	2 keg	2.694.418.320	2 keg	2.963.860.152	2 keg	3.260.246.167		13.594.787.839	Dinas CKP
1.03.1.03.02.34	Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat	6 keg	6 keg	4.060.000.000	6 keg	4.466.000.000	6 keg	4.912.600.000	6 keg	5.403.860.000	6 keg	5.944.246.000		24.786.706.000	Dinas CKP
1.03.1.03.02.35	Program Perencanaan dan Pengawasan	1 Keg	1 Keg	4.007.084.000	1 Keg	4.407.792.400	1 Keg	4.848.571.640	1 Keg	5.333.428.804	1 Keg	5.866.771.684		24.463.648.528	Dinas CKP
1.04	**PERUMAHAN**			**4.351.995.050**		**4.867.161.030**		**10.376.485.372**		**6.109.972.317**		**6.859.151.618**		**27.638.116.918**	
1.03.1.03.02	**DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN**			**3.269.450.000**		**3.596.395.000**		**8.882.682.969**		**4.351.637.950**		**4.786.801.745**		**19.960.319.195**	
1.04.1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2 Keg	2 Keg	3.249.450.000	2 Keg	3.574.395.000	2 Keg	3.931.834.500	2 Keg	4.325.017.950	2 Keg	4.757.519.745		19.838.217.195	Dinas CKP
1.03.1.03.02.31	Program Pengembangan Perumahan	1 keg	1 keg	20.000.000	1 keg	22.000.000	1 keg	24.200.000	1 keg	26.620.000	1 keg	29.282.000		122.102.000	Dinas CKP
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**140.680.300**		**154.748.330**		**170.223.163**		**187.245.479**		**205.970.027**		**858.867.300**	
1.04.1.20.03.15	Pengembangan Perumahan	1 keg	1 keg	140.680.300	1 keg	154.748.330	1 keg	170.223.163	1 keg	187.245.479	1 keg	205.970.027		858.867.300	Setdakab
1.20.1.20.10	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			**941.864.750**		**1.116.017.700**		**1.323.579.240**		**1.571.088.888**		**1.866.379.846**		**6.818.930.424**	
1.04.1.20.10.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 keg	2 keg	142.200.000	2 keg	156.420.000	2 keg	172.062.000	2 keg	189.268.200	2 keg	208.195.020		868.145.220	BPBD

1.04.1.20.10.21	Program pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2 keg	2 keg	799.664.750	2 keg	959.597.700	2 keg	1.151.517.240	2 keg	1.381.820.688	2 keg	1.658.184.826		5.950.785.204	BPBD
1.05	**PENATAAN RUANG**			**100.000.000**		**550.000.000**		**302.500.000**		**525.062.500**		**307.689.063**		**1.785.251.563**	
1.06.1.06.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**100.000.000**		**550.000.000**		**302.500.000**		**525.062.500**		**307.689.063**		**1.785.251.563**	
1.05.1.06.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang		1 Keg	100.000.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	200.000.000	2 Keg	420.000.000	1 Keg	200.000.000		1.370.000.000	Bappeda
1.06.1.06.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			0	1 Keg	100.000.000	1 Keg	102.500.000	1 Keg	105.062.500	1 Keg	107.689.063		415.251.563	
1.06	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**			**3.861.764.820**		**4.641.850.307**		**4.734.595.642**		**5.007.218.092**		**5.097.105.579**		**23.342.534.440**	
1.06.1.06.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**3.695.591.650**		**4.416.270.186**		**4.441.341.485**		**4.625.987.687**		**4.601.506.053**		**21.780.697.062**	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Keg	699.718.450	12 Keg	645.253.911	12 Keg	659.885.259	12 Keg	674.882.391	12 Keg	690.254.450		3.369.994.461	Bappeda
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6 Keg	322.348.200	6 Keg	295.746.275	6 Keg	342.692.413	6 Keg	371.142.223	6 Keg	402.291.529		1.734.220.641	Bappeda
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000		120.000.000	Bappeda
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Keg	5.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.375.000	1 Keg	15.759.375	1 Keg	16.153.359		67.287.734	Bappeda
1.06.1.06.01.08	Program Pengembangan Data/Informasi		5 Keg	513.000.000	6 Keg	587.750.000	5 Keg	551.193.750	5 Keg	564.973.594	6 Keg	639.097.934		2.856.015.277	Bappeda
1.06.1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan		1 keg	100.000.000	1 keg	175.000.000	1 keg	179.375.000	1 keg	183.859.375	1 keg	188.455.859		826.690.234	Bappeda
1.06.1.06.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		2 keg	130.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		130.000.000	Bappeda

1.06.1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		2 keg	323.400.000	2 keg	331.485.000	2 keg	339.772.125	2 keg	348.266.428	2 keg	356.973.089		1.699.896.642	Bappeda
1.06.1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		8 Keg	1.047.125.000	8 keg	1.226.285.000	8 Keg	1.441.804.188	9 Keg	1.533.829.458	9 Keg	1.352.423.118		6.601.466.763	Bappeda
1.06.1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		3 Keg	390.000.000	3 Keg	399.750.000	3 keg	409.743.750	3 keg	419.987.344	3 keg	430.487.027		2.049.968.121	Bappeda
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya		1 Keg	165.000.000	3 keg	410.000.000	2 keg	164.000.000	2 keg	168.100.000	2 keg	172.302.500		1.079.402.500	Bappeda
1.06.1.06.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		-	0	1 Keg	300.000.000	1 Keg	307.500.000	1 Keg	315.187.500	1 Keg	323.067.188		1.245.754.688	Bappeda
1.20.1.20.11	**KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN**			**11.025.000**		**23.887.500**		**31.053.750**		**40.369.875**		**52.480.838**		**158.816.963**	
1.20.1.20.11.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	11.025.000	1 keg	23.887.500	1 keg	31.053.750	1 keg	40.369.875	1 keg	52.480.838		158.816.963	JP
1.20.1.20.12	**KECAMATAN KAWAY XVI**			**20.898.170**		**27.167.621**		**35.317.907**		**45.913.279**		**59.687.263**		**188.984.241**	
1.06.1.20.12.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	20.898.170	1 keg	27.167.621	1 keg	35.317.907	1 keg	45.913.279	1 keg	59.687.263		188.984.241	Kaway XVI
1.20.1.20.13	**KECAMATAN SAMATIGA**			**16.800.000**		**21.840.000**		**28.392.000**		**36.909.600**		**47.982.480**		**151.924.080**	
1.06.1.20.13.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	16.800.000	1 keg	21.840.000	1 keg	28.392.000	1 keg	36.909.600	1 keg	47.982.480		151.924.080	Samatiga
1.20.1.20.14	**KECAMATAN WOYLA**			**22.575.000**		**29.347.500**		**38.151.750**		**49.597.275**		**64.476.458**		**204.147.983**	
1.20.1.20.14.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	22.575.000	1 keg	29.347.500	1 keg	38.151.750	1 keg	49.597.275	1 keg	64.476.458		204.147.983	Woyla
1.20.1.20.15	**KECAMATAN SUNGAI MAS**			**9.450.000**		**12.285.000**		**15.970.500**		**20.761.650**		**26.990.145**		**85.457.295**	
1.20.1.20.15.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	9.450.000	2 keg	12.285.000	2 keg	15.970.500	2 keg	20.761.650	2 keg	26.990.145		85.457.295	Sungai Mas
1.20.1.20.16	**KECAMATAN MEUREUBO**			**13.650.000**		**17.745.000**		**23.068.500**		**29.989.050**		**38.985.765**		**123.438.315**	

1.06.1.20.16.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	13.650.000	1 keg	17.745.000	1 keg	23.068.500	1 keg	29.989.050	1 keg	38.985.765		123.438.315	Meureubo
1.20.1.20.17	**KECAMATAN PANTEE CEUREUMEN**			**13.125.000**		**17.062.500**		**22.181.250**		**28.835.625**		**37.486.313**		**118.690.688**	
1.06.1.20.17.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 leg	1 leg	13.125.000	1 leg	17.062.500	1 leg	22.181.250	1 leg	28.835.625	1 leg	37.486.313		118.690.688	Pante Cermen
1.20.1.20.18	**KECAMATAN BUBON**			**8.925.000**		**11.602.500**		**15.083.250**		**19.608.225**		**25.490.693**		**80.709.668**	
1.06.1.20.18.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	8.925.000	1 keg	11.602.500	1 keg	15.083.250	1 keg	19.608.225	1 keg	25.490.693		80.709.668	Bubon
1.20.1.20.19	**KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK**			**13.500.000**		**17.550.000**		**22.815.000**		**29.659.500**		**38.557.350**		**122.081.850**	
1.06.1.20.19.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	13.500.000	1 keg	17.550.000	1 keg	22.815.000	1 keg	29.659.500	1 keg	38.557.350		122.081.850	Arongan Lambalek
1.20.1.20.20	**KECAMATAN WOYLA TIMUR**			**13.650.000**		**17.745.000**		**23.068.500**		**29.989.050**		**38.985.765**		**123.438.315**	
1.06.1.20.20.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	13.650.000	1 keg	17.745.000	1 keg	23.068.500	1 keg	29.989.050	1 keg	38.985.765		123.438.315	Woyla Timur
1.20.1.20.21	**KECAMATAN WOYLA BARAT**			**12.600.000**		**16.380.000**		**21.294.000**		**27.682.200**		**35.986.860**		**113.943.060**	
1.06.1.20.21.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	12.600.000	1 keg	16.380.000	1 keg	21.294.000	1 keg	27.682.200	1 keg	35.986.860		113.943.060	Woyla Barat
1.20.1.20.22	**KECAMATAN PANTON REU**			**9.975.000**		**12.967.500**		**16.857.750**		**21.915.075**		**28.489.598**		**90.204.923**	
1.06.1.20.22.27	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 keg	1 keg	9.975.000	1 keg	12.967.500	1 keg	16.857.750	1 keg	21.915.075	1 keg	28.489.598		90.204.923	Panton Reu
1.07	**PERHUBUNGAN**			**5.153.311.597**		**6.022.830.660**		**6.115.834.336**		**6.724.917.770**		**7.394.909.547**		**31.411.803.909**	
1.07.1.07.01	**DINAS PERHUBUNGAN, DAN TELEKOMUNIKASI**			**5.153.311.597**		**6.022.830.660**		**6.115.834.336**		**6.724.917.770**		**7.394.909.547**		**31.411.803.909**	
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	545.515.600	10 Keg	600.067.160	10 Keg	660.073.876	10 Keg	726.081.264	10 Keg	798.689.390		3.330.427.290	Dishubtel
1.07.1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Keg	5 Keg	453.010.997	7 Keg	453.000.000	6 Keg	498.300.000	6 Keg	548.130.000	6 Keg	602.943.000		2.555.383.997	Dishubtel

1.07.1.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	1.07.1.07.01.05
1.07.1.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Dishubtel
1.07.1.07.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4 Keg	4 Keg	3.727.026.000	4 Keg	4.099.728.600	4 Keg	4.509.701.460	4 Keg	4.960.671.606	4 Keg	5.456.738.767		22.753.866.433	Dishubtel
1.07.1.07.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Keg	1 Keg	422.759.000	1 Keg	845.034.900	1 Keg	422.759.000	1 Keg	465.034.900	1 Keg	511.538.390		2.667.126.190	Dishubtel
1.08	**LINGKUNGAN HIDUP**			**4.893.278.296**		**6.915.183.626**		**7.549.701.988**		**8.290.172.187**		**9.104.689.406**		**36.753.025.502**	
1.08.1.08.01	**KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**			**4.481.920.796**		**6.342.690.376**		**6.931.959.413**		**7.622.655.354**		**8.382.420.890**		**33.761.646.829**	
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	267.678.996	10 keg	294.446.896	10 keg	323.891.585	10 keg	356.280.744	10 keg	391.908.818		1.634.207.038	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	34.611.000	2 keg	38.072.100	2 keg	41.879.310	2 keg	46.067.241	2 keg	50.673.965		211.303.616	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	54.975.000	2 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		114.975.000	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2 keg	2 keg	2.764.790.700	2 keg	3.041.269.770	2 keg	3.345.396.747	2 keg	3.679.936.422	2 keg	4.047.930.064		16.879.323.703	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2 keg	2 keg	806.055.100	2 keg	886.660.610	2 keg	975.326.671	2 keg	1.072.859.338	2 keg	1.180.145.272		4.921.046.991	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam				1 keg	1.300.000.000	1 keg	1.430.000.000	1 keg	1.573.000.000	1 keg	1.730.300.000		6.033.300.000	Kantor Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.19	Program Penuingkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup				1 keg	75.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	44.000.000	1 keg	48.400.000		207.400.000	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 keg	2 keg	529.310.000	2 keg	582.241.000	2 keg	640.465.100	2 keg	704.511.610	2 keg	774.962.771		3.231.490.481	Kantor Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.26	Program Perencanaan dan Pengawasan	1 keg	1 keg	24.500.000	1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000		488.600.000	Kantor Lingkungan Hidup
2.02.2.02.01	**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**			**411.357.500**		**572.493.250**		**617.742.575**		**667.516.833**		**722.268.516**		**2.991.378.673**	
1.02.2.02.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 keg	2 keg	411.357.500	2 keg	452.493.250	2 keg	497.742.575	2 keg	547.516.833	2 keg	602.268.516		2.511.378.673	Dishutbun
2.01.2.02.1.17	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000		120.000.000	Dishutbun
2.01.2.02.1.18	Program pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000		120.000.000	Dishutbun
2.01.2.02.1.19	Program Rehablitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam				1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000		120.000.000	Dishutbun
2.01.2.02.1.19	Program Peningkatan dan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000		120.000.000	Dishutbun
1.09	**PERTANAHAN**			**6.644.928.944**		**7.309.421.838**		**8.040.364.022**		**8.844.400.424**		**9.728.840.467**		**40.567.955.696**	
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**5.675.478.544**		**6.243.026.398**		**6.867.329.038**		**7.554.061.942**		**8.309.468.136**		**34.649.364.059**	
1.09.1.20.03.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 keg	1 keg	5.647.128.764	1 keg	6.211.841.640	1 keg	6.833.025.804	1 keg	7.516.328.385	1 keg	8.267.961.223		34.476.285.817	Setdakab
1.09.1.20.03.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1 keg	1 keg	28.349.780	1 keg	31.184.758	1 keg	34.303.234	1 keg	37.733.557	1 keg	41.506.913		173.078.242	Setdakab
1.20.1.20.05	**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**			**969.450.400**		**1.066.395.440**		**1.173.034.984**		**1.290.338.482**		**1.419.372.331**		**5.918.591.637**	

1.09.1.20.05.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 keg	1 keg	969.450.400	1 keg	1.066.395.440	1 keg	1.173.034.984	1 keg	1.290.338.482	1 keg	1.419.372.331		5.918.591.637	DPKKD
1.10	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**			**562.531.000**		**1.092.839.200**		**1.199.623.120**		**1.317.085.432**		**1.446.293.975**		**5.618.372.727**	
1.10.1.10.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**			**562.531.000**		**1.092.839.200**		**1.199.623.120**		**1.317.085.432**		**1.446.293.975**		**5.618.372.727**	
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	176.448.000	10 keg	194.092.800	10 keg	213.502.080	10 keg	234.852.288	10 keg	258.337.517		1.077.232.685	Disdukcapil
1.10.1.10.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 keg	2 keg	32.566.000	2 keg	35.822.600	2 keg	39.404.860	2 keg	43.345.346	2 keg	47.679.881		198.818.687	Disdukcapil
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Disdukcapil
1.10.1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	Disdukcapil
1.10.1.10.01.15	Program penataan Administrasi kependudukan	2 keg	2 keg	348.517.000	2 keg	837.923.800	4 keg	921.716.180	4 keg	1.013.887.798	4 keg	1.115.276.578		4.237.321.356	Disdukcapil
1.11	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**227.544.000**		**305.414.400**		**324.795.490**		**354.775.039**		**387.752.543**		**1.600.281.472**	
1.11.1.11.01	**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**			**227.544.000**		**305.414.400**		**324.795.490**		**354.775.039**		**387.752.543**		**1.600.281.472**	
1.11.1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	106.215.000	10 keg	136.736.400	10 keg	144.960.150	10 keg	159.456.165	10 keg	175.401.782		722.769.497	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 keg	2 keg	20.380.000	2 keg	22.418.000	2 keg	24.659.800	2 keg	27.125.780	2 keg	29.838.358		124.421.938	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Kantor PPKS

1.11.1.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.21	Program Perlindungan Anak	1 keg	1 keg	15.000.000	1 keg	19.500.000	1 keg	22.500.000	1 keg	24.750.000	1 keg	27.225.000		108.975.000	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.22	Program PengembanganBahan Iformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1 keg	1 keg	37.224.000	1 keg	57.143.900	1 keg	62.858.290	1 keg	69.144.119	1 keg	76.058.531		302.428.840	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	1 keg	1 keg	15.000.000	1 keg		1 keg		1 keg	0	1 keg	0		15.000.000	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.19	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	1 keg	1 keg	14.725.000	1 keg	13.197.500	1 keg	14.817.250	1 keg	16.298.975	1 keg	17.928.873		76.967.598	Kantor PPKS
1.11.1.11.01.22	Program peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat	1 keg	1 keg	14.000.000	1 keg	31.418.600	1 keg	30.000.000	1 keg	33.000.000	1 keg	36.300.000		144.718.600	Kantor PPKS
1.12	**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**			**1.111.029.000**		**1.222.131.900**		**1.330.267.840**		**1.463.294.624**		**1.609.624.086**		**6.736.347.450**	
1.11.1.11.01	**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA**			**1.111.029.000**		**1.222.131.900**		**1.330.267.840**		**1.463.294.624**		**1.609.624.086**		**6.736.347.450**	
1.12.1.11.01.15	Program Keluarga Berencana	6 keg	6 keg	1.096.040.000	6 keg	1.205.644.000	6 keg	1.313.631.150	6 keg	1.444.994.265	6 keg	1.589.493.692		6.649.803.107	Kantor PPKS
1.12.1.11.01.16	program Kesehatan Reproduksi Remaja	1 keg	1 keg	14.989.000	1 keg	16.487.900	1 keg	16.636.690	1 keg	18.300.359	1 keg	20.130.395		86.544.344	Kantor PPKS
1.13	**SOSIAL**			**9.255.870.197**		**9.668.872.546**		**10.184.704.501**		**10.802.482.491**		**11.465.998.638**		**60.292.430.920**	
1.01.1.01.02	**DINAS SYARIAT ISLAM**			**6.850.000.000**		**6.850.000.000**		**7.192.500.000**		**7.552.125.000**		**7.929.731.250**		**36.374.356.250**	
1.13.1.01.02.22	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	1 keg	1 keg	6.850.000.000	1 keg	6.850.000.000	1 keg	7.192.500.000	1 keg	7.552.125.000	1 keg	7.929.731.250		36.374.356.250	Dinas Syariat Islam
1.13.1.13.01	**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**			**1.692.383.337**		**2.034.037.000**		**2.128.885.400**		**2.300.706.480**		**2.491.651.276**		**19.562.166.041**	

1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	406.024.337	10 keg	391.630.000	10 keg	430.790.000	10 keg	473.871.000	10 keg	521.257.000		2.173.574.000	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3 Keg	3 Keg	24.050.000	3 Keg	98.265.000	3 Keg	41.845.000	3 Keg	46.029.000	3 Keg	50.632.000		2.173.574.001	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		2.173.574.002	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		2.173.574.003	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Keg	1 Keg	12.729.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	180.000.000	1 Keg	216.000.000	1 Keg	259.200.000		2.173.574.004	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1 Keg	1 Keg	54.285.000	1 Keg	65.142.000	1 Keg	78.170.400	1 Keg	93.804.480	1 Keg	112.565.376		2.173.574.005	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.17	Program Pembinaan Anak terlantar	1 Keg	1 Keg	1.168.000.000	1 Keg	1.226.400.000	1 Keg	1.287.720.000	1 Keg	1.352.106.000	1 Keg	1.419.711.300		2.173.574.007	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.20	Program Pembinaan ex penyandang penyakit sosial (Ex Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	1 Keg	1 Keg	6.295.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	66.000.000	1 Keg	72.600.000	1 Keg	79.860.000		2.173.574.009	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.01.24	Program perencanaan dan pengawasan	1 kEG	1 kEG	16.000.000	1 kEG	17.600.000	1 kEG	19.360.000	1 kEG	21.296.000	1 kEG	23.425.600		2.173.574.010	Dinsosnak ertrans
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**713.486.860**		**784.835.546**		**863.319.101**		**949.651.011**		**1.044.616.112**		**4.355.908.629**	

1.13.1.20.03.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 keg	1 keg	105.000.000	1 keg	115.500.000	1 keg	127.050.000	1 keg	139.755.000	1 keg	153.730.500		641.035.500	Setdakab
1.13.1.20.03.23	Program Distribusi Pangan Masyarakat Miskin	1 keg	1 keg	608.486.860	1 keg	669.335.546	1 keg	736.269.101	1 keg	809.896.011	1 keg	890.885.612		3.714.873.129	Setdakab
1.14	**KETENAGAKERJAAN**			**21.000.000**		**273.100.000**		**340.410.000**		**426.451.000**		**536.696.100**		**6.520.722.031**	
1.13.1.13.01	**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**			**21.000.000**		**273.100.000**		**340.410.000**		**426.451.000**		**536.696.100**		**6.520.722.031**	
1.14.1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketanaga Kerjaan	1 Keg	1 Keg	21.000.000	1 Keg	23.100.000	1 Keg	25.410.000	1 Keg	27.951.000	1 Keg	30.746.100		2.173.574.008	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.14.16	Program Peningkkatan Kesempatan Kerja				1 Keg	50.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	60.500.000	1 Keg	66.550.000		2.173.574.011	Dinsosnak ertrans
1.13.1.13.14.16	Program Peningkkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja				6 Keg	200.000.000	6 Keg	260.000.000	6 Keg	338.000.000	6 Keg	439.400.000		2.173.574.012	Dinsosnak ertrans
1.15	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**			**831.723.564**		**934.395.920**		**1.025.335.512**		**1.125.369.064**		**1.235.405.970**		**5.152.230.031**	
1.15.1.15.01	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			**831.723.564**		**934.395.920**		**1.025.335.512**		**1.125.369.064**		**1.235.405.970**		**5.152.230.031**	
1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 keg	11 keg	729.439.670	10 keg	802.383.637	10 keg	882.622.001	10 keg	970.884.201	10 keg	1.067.972.621		4.453.302.129	Disperinda gkop
1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3 keg	3 keg	22.283.894	3 keg	24.512.283	3 keg	26.963.512	3 keg	29.659.863	3 keg	32.625.849		136.045.401	Disperinda gkop
1.15.1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Disperinda gkop
1.15.1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	Disperinda gkop

1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2 keg	2 keg	75.000.000	2 keg	82.500.000	2 keg	90.750.000	2 keg	99.825.000	2 keg	109.807.500		457.882.500	Disperindagkop
1.17	**KEBUDAYAAN**			**2.077.557.000**		**2.820.256.845**		**3.099.782.529**		**3.407.260.782**		**3.745.486.860**		**15.150.344.016**	
1.17.1.17	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**			**2.077.557.000**		**2.820.256.845**		**3.099.782.529**		**3.407.260.782**		**3.745.486.860**		**15.150.344.016**	
1.17.1.17.01.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				9 keg	353.219.414	9 keg	388.541.355	9 keg	427.395.491	9 keg	470.135.040		1.639.291.299	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4 keg	156.724.731	4 keg	172.397.204	4 keg	189.636.924	4 keg	208.600.617		727.359.476	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		60.000.000	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		3 Keg	1.900.000.000	3 Keg	2.090.000.000	3 Keg	2.299.000.000	3 Keg	2.528.900.000	3 Keg	2.781.790.000		11.599.690.000	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		3 keg	177.557.000	3 keg	195.312.700	3 keg	214.843.970	3 keg	236.328.367	3 keg	259.961.204		1.084.003.241	Disbudpar pora
1.18	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			**376.011.000**		**2.300.000.000**		**700.000.000**		**760.000.000**		**826.000.000**		**4.962.011.000**	
1.17.1.17	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**			**376.011.000**		**2.300.000.000**		**700.000.000**		**760.000.000**		**826.000.000**		**4.962.011.000**	
1.17.1.17.01.	Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan				3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000	3 Keg	100.000.000		400.000.000	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga		4 keg	376.011.000	7 keg	2.200.000.000	7 keg	600.000.000	7 keg	660.000.000	7 keg	726.000.000		4.562.011.000	Disbudpar pora
1.19	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**			**3.837.505.330**		**7.348.408.863**		**4.691.281.449**		**5.154.409.594**		**11.242.003.554**		**32.273.608.790**	
1.19.1.19.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**610.354.730**		**3.190.890.203**		**757.479.223**		**830.727.146**		**5.911.299.860**		**11.300.751.162**	

1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	156.433.900	10 keg	172.077.290	10 keg	189.285.019	10 keg	208.213.521	10 keg	229.034.873		955.044.603	Kesbangpol
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	3 keg	3 keg	44.534.000	3 keg	48.987.400	3 keg	53.886.140	3 keg	59.274.754	3 keg	65.202.229		271.884.523	Kesbangpol
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Kesbangpol
1.19.1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 Keg	15.000.000	2 Keg	15.000.000	2 Keg	15.000.000	2 Keg	15.000.000		65.000.000	Kesbangpol
1.19.1.19.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 keg	1 keg	50.665.500	2 Keg	55.732.050	2 Keg	61.305.255	2 Keg	67.435.781	2 Keg	74.179.359		309.317.944	Kesbangpol
1.19.1.19.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1 keg	1 keg	73.050.100	4 Keg	80.355.110	4 Keg	88.390.621	4 Keg	97.229.683	4 Keg	106.952.651		445.978.166	Kesbangpol
1.19.1.19.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1 Keg	1 Keg	33.282.100	1 Keg	36.610.310	1 Keg	40.271.341	1 Keg	44.298.475	1 Keg	48.728.323		203.190.549	Kesbangpol
1.19.1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakatan	3 keg	3 keg	89.862.610	5 Keg	98.848.871	5 Keg	108.733.758	5 Keg	119.607.134	5 Keg	131.567.847		548.620.220	Kesbangpol
1.19.1.19.01.26	Program Pembinaan Ideologi Kebangsaan	2 keg	2 keg	88.768.120	2 Keg	97.644.932	2 Keg	107.409.425	2 Keg	118.150.368	2 Keg	129.965.404		541.938.249	Kesbangpol
1.19.1.19.01.27	Program Pencegahan Dini Masyarakat	1 Keg	1 Keg	34.991.800	2 Keg	38.490.980	2 Keg	42.340.078	2 Keg	46.574.086	2 Keg	51.231.494		213.628.438	Kesbangpol
1.19.1.19.01.28	Program Kebijakan Politik Pemerintah	1 Keg	1 Keg	33.766.600	1 Keg	37.143.260	1 Keg	40.857.586	1 Keg	44.943.345	1 Keg	49.437.679		206.148.470	Kesbangpol
5.2.25	Program Pelaksanaan Pemilu				2 Keg	2.500.000.000					2 Keg	5.000.000.000		7.500.000.000	Kesbangpol
1.19.1.19.02	**KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**			**3.227.150.600**		**4.157.518.660**		**3.933.802.226**		**4.323.682.449**		**5.330.703.693**		**20.972.857.628**	

1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 Keg	2.775.685.800	10 Keg	3.053.254.380	10 Keg	3.358.579.818	10 Keg	3.694.437.800	10 Keg	4.063.881.580		16.945.839.378	Satpol PP dan WH
1.19.1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur		3 keg	93.744.800	3 keg	103.119.280	1 keg	113.431.208	1 keg	124.774.329	1 keg	137.251.762		572.321.378	Satpol PP dan WH
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000		80.000.000	Satpol PP dan WH
1.19.1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Keg	5.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000		65.000.000	Satpol PP dan WH
1.19.1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1 Keg	578.153.000					1 Keg	578.153.000		1.156.306.000	Satpol PP dan WH
1.19.1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		1 Keg	352.720.000	1 Keg	387.992.000	1 Keg	426.791.200	1 Keg	469.470.320	1 Keg	516.417.352		2.153.390.872	Satpol PP dan WH
1.20	**OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN**			**38.907.516.698**		**43.598.168.368**		**47.832.785.205**		**52.573.303.725**		**64.087.811.098**		**246.999.585.093**	
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**11.011.116.121**		**12.545.227.733**		**13.799.750.506**		**15.179.725.557**		**16.697.698.113**		**69.233.518.030**	
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 keg	13 keg	7.476.997.282	14 keg	8.224.697.010	14 keg	9.047.166.711	14 keg	9.951.883.382	14 keg	10.947.071.721		45.647.816.106	Setdakab
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	9 Keg	9 Keg	1.214.215.499	9 Keg	1.335.637.049	9 Keg	1.469.200.754	9 Keg	1.616.120.829	9 Keg	1.777.732.912		7.412.907.043	Setdakab
1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 keg	1 keg	50.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	60.500.000	1 keg	66.550.000	1 keg	73.205.000		305.255.000	Setdakab
1.20.1.20.03.04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4 keg	4 keg	355.933.800	4 keg	391.527.180	4 keg	430.679.898	4 keg	473.747.888	4 keg	521.122.677		2.173.011.442	Setdakab

1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan penyusunan kinerja pemerintah	4 keg	4 keg	266.830.000	4 keg	293.513.000	4 keg	322.864.300	4 keg	355.150.730	4 keg	390.665.803		1.629.023.833	Setdakab
1.20.1.20.03.20	Program Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	2 keg	2 keg	69.876.800	2 keg	76.864.480	2 keg	84.550.928	2 keg	93.006.021	2 keg	102.306.623		426.604.852	Setdakab
1.20.1.20.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1 keg	1 keg	197.321.140	2 keg	217.053.254	1 keg	238.758.579	1 keg	262.634.437	1 keg	288.897.881		1.204.665.292	Setdakab
1.02.1.20.03.33	Program peningkatan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 keg	1 keg	158.703.000	1 keg	174.573.300	1 keg	192.030.630	1 keg	211.233.693	1 keg	232.357.062		968.897.685	Setdakab
1.20.1.20.03.36	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional	5 keg	5 keg	678.642.500	5 keg	746.506.750	5 keg	821.157.425	5 keg	903.273.168	5 keg	993.600.484		4.143.180.327	Setdakab
1.20.1.20.03.44	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Penyusunan Anjab	2 keg	2 keg	100.000.000	2 keg	110.000.000	2 keg	121.000.000	2 keg	133.100.000	2 keg	146.410.000		610.510.000	Setdakab
1.20.1.20.03.45	Program Pembinaan Hukum Masyarakat	2 keg	2 keg	256.517.000	2 keg	282.168.700	2 keg	310.385.570	2 keg	341.424.127	2 keg	375.566.540		1.566.061.937	Setdakab
1.20.1.20.03.46	Program Pemantapan Produk Hukum Daerah	1 keg	1 keg	47.299.900	1 keg	52.029.890	1 keg	57.232.879	1 keg	62.956.167	1 keg	69.251.784		288.770.619	Setdakab
1.20.1.20.03.48	Program Pembinaan Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah	1 keg	1 keg	138.779.200	1 keg	152.657.120	1 keg	167.922.832	1 keg	184.715.115	1 keg	203.186.627		847.260.894	Setdakab
1.20.1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi				1 keg	128.000.000	1 keg	140.800.000	1 keg	154.880.000	1 keg	170.368.000		594.048.000	Setdakab
1.16.1.20.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				3 keg	100.000.000	3 keg	110.000.000	3 keg	121.000.000	3 keg	133.100.000		464.100.000	Setdakab

1.16.1.20.03.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				1 keg	55.000.000	1 keg	60.500.000	1 keg	66.550.000	1 keg	73.205.000		255.255.000	Setdakab
1.16.1.20.03..20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1 Keg	150.000.000	8 keg	165.000.000	8 keg	181.500.000	8 keg	199.650.000		696.150.000	Setdakab
1.20.1.20.04	**SEKRETARIAT DPRK**			**7.600.307.931**		**8.405.838.724**		**9.244.922.597**		**10.167.914.856**		**17.483.206.342**		**52.902.190.450**	
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Keg	12 Keg	3.981.657.931	12 Keg	3.453.348.724	12 Keg	3.798.812.097	12 Keg	4.016.134.856	12 Keg	4.197.998.342		19.447.951.950	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 Keg	6 Keg	1.206.300.000	6 Keg	1.197.590.000	6 Keg	2.136.310.500	6 Keg	2.430.000.000	6 Keg	2.912.500.000		9.882.700.500	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Keg	1 Keg	276.000.000	1 Keg	489.800.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	350.000.000		1.665.800.000	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Keg	1 Keg	1.540.350.000	1 Keg	1.447.100.000	1 Keg	1.525.000.000	1 Keg	1.610.000.000	1 Keg	1.693.750.000		7.816.200.000	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Keg	1 Keg	5.000.000	2 Keg	15.000.000	2 Keg	20.000.000	2 Keg	25.000.000	2 Keg	30.000.000		95.000.000	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Keg	1 Keg	591.000.000	1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	550.000.000	1 Keg	600.000.000		3.241.000.000	Sekretariat DPRK
1.20.120.09	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat				1 Keg	18.000.000	1 Keg	19.800.000	1 Keg	21.780.000	1 Keg	23.958.000		83.538.000	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.15.16	Program Pelaksanaan Fungsi Legeslasi				1 Keg	75.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	95.000.000		340.000.000	Sekretariat DPRK
1.20.1.20.04.09	Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran				1 Keg	360.000.000	1 Keg	465.000.000	1 Keg	525.000.000	1 Keg	580.000.000		1.930.000.000	Sekretariat DPRK
	Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan				1 Keg	350.000.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	7.000.000.000		8.400.000.000	Sekretariat DPRK

	Program Peningkatan Kapsitas Kelembagaan dan sumber daya aparatur					1									
1.20.1.20.05	**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**			**14.042.453.958**		**15.466.199.354**		**17.010.319.289**		**18.708.851.218**		**20.577.236.340**		**85.805.060.159**	
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 keg	13 keg	1.877.668.095	13 keg	2.065.434.905	13 keg	2.271.978.395	13 keg	2.499.176.234	13 keg	2.749.093.858		11.463.351.487	DPKKD
1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 keg	12 keg	7.333.631.322	12 keg	8.066.994.454	12 keg	8.873.693.900	12 keg	9.761.063.290	12 keg	10.737.169.619		44.772.552.584	DPKKD
1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	DPKKD
1.20.1.20.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	DPKKD
1.20.1.20.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	23 keg	23 keg	4.826.154.541	23 keg	5.308.769.995	23 keg	5.839.646.995	23 keg	6.423.611.694	23 keg	7.065.972.863		29.464.156.088	DPKKD
1.20.1.20.06	**INSPEKTORAT**			**1.304.367.200**		**1.644.303.920**		**1.723.734.312**		**1.893.607.743**		**2.080.468.518**		**8.646.481.693**	
1.20.1.20.06.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	10 keg	10 keg	271.099.900	10 keg	298.209.890	10 keg	328.030.879	10 keg	360.833.967	10 keg	396.917.364		1.655.091.999	Inspektorat
1.20.1.20.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 keg	5 keg	67.228.300	5 keg	73.951.130	5 keg	81.346.243	5 keg	89.480.867	5 keg	98.428.954		410.435.494	Inspektorat
1.20.1.20.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Inspektorat
1.20.1.20.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Keg	2 Keg	37.000.000	2 Keg	50.200.000	2 Keg	53.720.000	2 Keg	57.592.000	2 Keg	61.851.200		260.363.200	Inspektorat
1.20.1.20.06.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	7 keg	7 keg	929.039.000	7 keg	1.021.942.900	7 keg	1.124.137.190	7 keg	1.236.550.909	7 keg	1.360.206.000		5.671.875.999	Inspektorat

1.20.1.20.06	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				1 Keg	90.000.000	1 Keg	99.000.000	1 Keg	108.900.000	1 Keg	119.790.000		417.690.000	Inspektorat
1.20.1.20.06	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				1 Keg	100.000.000	1 Keg	27.500.000	1 Keg	30.250.000	1 Keg	33.275.000		191.025.000	Inspektorat
1.20.1.20.08	**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**			**556.369.000**		**450.905.900**		**492.296.490**		**537.766.139**		**587.719.753**		**2.625.057.282**	
1.20.1.20.08.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	10 Keg	10 Keg	161.172.000	10 Keg	177.289.200	10 Keg	195.018.120	10 Keg	214.519.932	10 Keg	235.971.925		983.971.177	KPPT
1.20.1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Keg	3 Keg	107.806.000	3 Keg	118.586.600	3 Keg	130.445.260	3 Keg	143.489.786	3 Keg	157.838.765		658.166.411	KPPT
1.20.1.20.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	KPPT
1.20.1.20.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	KPPT
1.20.1.20.08.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2 keg	2 keg	186.000.000	2 keg	24.000.000	2 keg	25.200.000	2 keg	26.460.000	2 keg	27.783.000		289.443.000	KPPT
1.20.1.20.08.64	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1 keg	1 keg	96.391.000	1 keg	106.030.100	1 keg	116.633.110	1 keg	128.296.421	1 keg	141.126.063		588.476.694	KPPT
1.20.1.20.10	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			**2.408.413.250**		**2.668.754.575**		**2.933.130.033**		**3.223.943.036**		**3.543.837.339**		**14.778.078.233**	
1.20.1.20.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	10 keg	10 keg	2.063.172.000	10 keg	2.269.489.200	10 keg	2.496.438.120	10 keg	2.746.081.932	10 keg	3.020.690.125		12.595.871.377	BPBD
1.20.1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7 keg	7 keg	323.741.250	7 keg	356.115.375	7 keg	391.726.913	7 keg	430.899.604	7 keg	473.989.564		1.976.472.705	BPBD
1.20.1.20.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2 keg	2 keg	16.500.000	2 keg	18.150.000	2 keg	19.965.000	2 keg	21.961.500	2 keg	24.157.650		100.734.150	BPBD
1.20.1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	BPBD

1.20.1.20.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	BPBD
1.20.1.20.11	**KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN**			**176.249.800**		**213.374.780**		**232.212.258**		**252.933.484**		**275.726.832**		**1.150.497.154**	
1.20.1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 keg	148.177.800	10 keg	162.995.580	10 keg	179.295.138	10 keg	197.224.652	10 keg	216.947.117		904.640.287	JP
1.20.1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 keg	3 keg	23.072.000	3 keg	25.379.200	3 keg	27.917.120	3 keg	30.708.832	3 keg	33.779.715		140.856.867	JP
1.20.1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	JP
1.20.1.20.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	JP
1.20.1.20.12	**KECAMATAN KAWAY XVI**			**95.384.130**		**124.422.543**		**134.364.797**		**145.301.277**		**157.331.405**		**656.804.152**	
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	74.424.130	10 keg	81.866.543	10 keg	90.053.197	10 keg	99.058.517	10 keg	108.964.369		454.366.756	Kaway XVI
1.20.1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 keg	3 keg	15.960.000	3 keg	17.556.000	3 keg	19.311.600	3 keg	21.242.760	3 keg	23.367.036		97.437.396	Kaway XVI
1.20.1.20.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	Kaway XVI
1.20.1.20.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Kaway XVI
1.20.1.20.13	**KECAMATAN SAMATIGA**			**89.991.800**		**118.490.980**		**127.840.078**		**138.124.086**		**149.436.494**		**623.883.438**	
1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	70.014.000	10 keg	77.015.400	10 keg	84.716.940	10 keg	93.188.634	10 keg	102.507.497		427.442.471	Samatiga
1.20.1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	14.977.800	2 keg	16.475.580	2 keg	18.123.138	2 keg	19.935.452	2 keg	21.928.997		91.440.967	Samatiga
1.20.1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	Samatiga

1.20.1.20.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Samatiga
1.20.1.20.14	**KECAMATAN WOYLA**			**119.256.000**		**150.681.600**		**163.249.760**		**177.074.736**		**192.282.210**		**802.544.306**	
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	96.406.000	10 keg	106.046.600	10 keg	116.651.260	10 keg	128.316.386	10 keg	141.148.025		588.568.271	Woyla
1.20.1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	17.850.000	2 keg	19.635.000	2 keg	21.598.500	2 keg	23.758.350	2 keg	26.134.185		108.976.035	Woyla
1.20.1.20.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	Woyla
1.20.1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Woyla
1.20.1.20.15	**KECAMATAN SUNGAI MAS**			**82.836.000**		**110.619.600**		**119.181.560**		**128.599.716**		**138.959.688**		**580.196.564**	
1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	54.956.000	10 keg	60.451.600	10 keg	66.496.760	10 keg	73.146.436	10 keg	80.461.080		335.511.876	Sungai Mas
1.20.1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	22.880.000	2 keg	25.168.000	2 keg	27.684.800	2 keg	30.453.280	2 keg	33.498.608		139.684.688	Sungai Mas
1.20.1.20.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	Sungai Mas
1.20.1.20.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Sungai Mas
1.20.1.20.16	**KECAMATAN MEUREUBO**			**102.009.000**		**131.709.900**		**142.380.890**		**154.118.979**		**167.030.877**		**697.249.646**	
1.20.1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	89.709.000	10 keg	98.679.900	10 keg	108.547.890	10 keg	119.402.679	10 keg	131.342.947		547.682.416	Meureubo
1.20.1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	7.300.000	2 keg	8.030.000	2 keg	8.833.000	2 keg	9.716.300	2 keg	10.687.930		44.567.230	Meureubo
1.20.1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000	1 Keg	10.000.000		40.000.000	Meureubo

1.20.1.20.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Meureubo
1.20.1.20.17	**KECAMATAN PANTEE CEUREUMEN**			**117.625.000**		**148.887.500**		**161.276.250**		**174.903.875**		**189.894.263**		**792.586.888**	
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	104.481.000	10 keg	114.929.100	10 keg	126.422.010	10 keg	139.064.211	10 keg	152.970.632		637.866.953	Pante Cermen
1.20.1.20.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	8.144.000	2 Keg	8.958.400	2 Keg	9.854.240	2 Keg	10.839.664	2 Keg	11.923.630		49.719.934	Pante Cermen
1.20.1.20.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Pante Cermen
1.20.1.20.17.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Pante Cermen
1.20.1.20.18	**KECAMATAN BUBON**			**75.388.268**		**102.427.095**		**110.169.804**		**118.686.785**		**128.055.463**		**534.727.415**	
1.20.1.20.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	55.187.000	10 Keg	60.705.700	10 Keg	66.776.270	10 Keg	73.453.897	10 Keg	80.799.287		336.922.154	Bubon
1.20.1.20.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	15.201.268	2 Keg	16.721.395	2 Keg	18.393.534	2 Keg	20.232.888	2 Keg	22.256.176		92.805.261	Bubon
1.20.1.20.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Bubon
1.20.1.20.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 keg	2 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Bubon
1.20.1.20.19	**KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK**			**102.184.050**		**131.902.455**		**142.592.701**		**154.351.971**		**167.287.168**		**698.318.344**	
1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	86.425.450	10 Keg	95.067.995	10 Keg	104.574.795	10 Keg	115.032.274	10 Keg	126.535.501		527.636.015	Arongan Lambalek
1.20.1.20.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	10.758.600	2 Keg	11.834.460	2 Keg	13.017.906	2 Keg	14.319.697	2 Keg	15.751.666		65.682.329	Arongan Lambalek
1.20.1.20.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Arongan Lambalek

1.20.1.20.19.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Arongan Lambalek
1.20.1.20.20	**KECAMATAN WOYLA TIMUR**			**152.728.540**		**187.501.394**		**203.751.533**		**221.626.687**		**241.289.355**		**1.006.897.510**	
1.20.1.20.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Keg	10 Keg	141.302.000	10 Keg	155.432.200	10 Keg	170.975.420	10 Keg	188.072.962	10 Keg	206.880.258		862.662.840	Woyla Timur
1.20.1.20.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 keg	1 keg	6.426.540	2 Keg	7.069.194	2 Keg	7.776.113	2 Keg	8.553.725	2 Keg	9.409.097		39.234.669	Woyla Timur
1.20.1.20.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Woyla Timur
1.20.1.20.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 keg	2 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Woyla Timur
1.20.1.20.21	**KECAMATAN WOYLA BARAT**			**139.361.000**		**172.797.100**		**187.576.810**		**203.834.491**		**221.717.940**		**925.287.341**	
1.20.1.20.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	117.276.000	10 Keg	129.003.600	10 Keg	141.903.960	10 Keg	156.094.356	10 Keg	171.703.792		715.981.708	Woyla Barat
1.20.1.20.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	17.085.000	2 Keg	18.793.500	2 Keg	20.672.850	2 Keg	22.740.135	2 Keg	25.014.149		104.305.634	Woyla Barat
1.20.1.20.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Woyla Barat
1.20.1.20.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Woyla Barat
1.20.1.20.22	**KECAMATAN PANTON REU**			**197.655.650**		**236.921.215**		**258.113.337**		**281.424.670**		**307.067.137**		**1.281.182.009**	
1.20.1.20.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	145.683.650	10 keg	160.252.015	10 keg	176.277.217	10 keg	193.904.938	10 keg	213.295.432		889.413.252	Panton Reu
1.20.1.20.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg	2 Keg	46.972.000	2 Keg	51.669.200	2 Keg	56.836.120	2 Keg	62.519.732	2 Keg	68.771.705		286.768.757	Panton Reu
1.20.1.20.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Panton Reu

1.20.1.20.22.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000	2 keg	15.000.000		65.000.000	Panton Reu
1.01.1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**			**533.820.000**		**587.202.000**		**645.922.200**		**710.514.420**		**781.565.862**		**3.259.024.482**	
1.20.1.01.01.34	Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh	2 Keg	2 Keg	533.820.000	2 Keg	587.202.000	2 Keg	645.922.200	2 Keg	710.514.420	2 Keg	781.565.862		3.259.024.482	Disdik
1.21	**KEPEGAWAIAN**			**3.240.693.400**		**3.740.382.840**		**4.112.921.124**		**4.522.713.236**		**4.973.484.560**		**20.590.195.160**	
1.21.1.21	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**3.240.693.400**		**3.740.382.840**		**4.112.921.124**		**4.522.713.236**		**4.973.484.560**		**20.590.195.160**	
1.21.1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 keg	117.071.400	10 keg	293.778.540	10 keg	323.156.394	10 keg	355.472.033	10 keg	391.019.237		1.480.497.604	BKPP
1.21.1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4 keg	229.844.000	4 keg	252.848.500	4 keg	278.133.350	4 keg	305.946.685	4 keg	336.541.354		1.403.313.889	BKPP
1.21.1.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3 keg	1.619.952.000	3 keg	1.781.947.200	3 keg	1.960.141.920	3 keg	2.156.156.112	3 keg	2.371.771.723		9.889.968.955	BKPP
1.21.1.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	BKPP
1.21.1.21.01.17	Program Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur		8 keg	1.268.826.000	8 keg	1.396.808.600	8 keg	1.536.489.460	8 keg	1.690.138.406	8 keg	1.859.152.247		7.751.414.713	BKPP
1.22	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**			**21.121.511.000**		**22.304.835.200**		**21.820.500.720**		**22.096.982.792**		**22.401.113.071**		**109.744.942.783**	
1.20.1.20.11	**KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN**			**1.301.040.000**		**1.301.040.000**		**1.301.040.000**		**1.301.040.000**		**1.301.040.000**		**6.505.200.000**	
1.22.1.20.11.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.301.040.000	1 keg	1.301.040.000	1 keg	1.301.040.000	1 keg	1.301.040.000	1 keg	1.301.040.000		6.505.200.000	JP
1.20.1.20.12	**KECAMATAN KAWAY XVI**			**2.658.420.000**		**2.658.420.000**		**2.658.420.000**		**2.658.420.000**		**2.658.420.000**		**13.292.100.000**	
1.22.1.20.12.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	2.658.420.000	1 keg	2.658.420.000	1 keg	2.658.420.000	1 keg	2.658.420.000	1 keg	2.658.420.000		13.292.100.000	Kaway XVI
1.20.1.20.13	**KECAMATAN SAMATIGA**			**1.994.160.000**		**1.994.160.000**		**1.994.160.000**		**1.994.160.000**		**1.994.160.000**		**9.970.800.000**	

1.22.1.20.13.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.994.160.000	1 keg	1.994.160.000	1 keg	1.994.160.000	1 keg	1.994.160.000	1 keg	1.994.160.000		9.970.800.000	Samatiga
1.20.1.20.14	**KECAMATAN WOYLA**			**2.458.740.000**		**2.458.740.000**		**2.458.740.000**		**2.458.740.000**		**2.458.740.000**		**12.293.700.000**	
1.22.1.20.14.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	2.458.740.000	1 keg	2.458.740.000	1 keg	2.458.740.000	1 keg	2.458.740.000	1 keg	2.458.740.000		12.293.700.000	Woyla
1.20.1.20.15	**KECAMATAN SUNGAI MAS**			**1.017.840.000**		**1.017.840.000**		**1.017.840.000**		**1.017.840.000**		**1.017.840.000**		**5.089.200.000**	
1.22.1.20.15.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.017.840.000	1 keg	1.017.840.000	1 keg	1.017.840.000	1 keg	1.017.840.000	1 keg	1.017.840.000		5.089.200.000	Sungai Mas
1.20.1.20.16	**KECAMATAN MEUREUBO**			**1.552.800.000**		**1.552.800.000**		**1.552.800.000**		**1.552.800.000**		**1.552.800.000**		**7.764.000.000**	
1.22.1.20.15.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.552.800.000	1 keg	1.552.800.000	1 keg	1.552.800.000	1 keg	1.552.800.000	1 keg	1.552.800.000		7.764.000.000	Meureubo
1.20.1.20.17	**KECAMATAN PANTEE CEUREUMEN**			**1.530.600.000**		**1.530.600.000**		**1.530.600.000**		**1.530.600.000**		**1.530.600.000**		**7.653.000.000**	
1.22.1.20.17.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.530.600.000	1 keg	1.530.600.000	1 keg	1.530.600.000	1 keg	1.530.600.000	1 keg	1.530.600.000		7.653.000.000	Pante Cermen
1.20.1.20.18	**KECAMATAN BUBON**			**1.045.260.000**		**1.045.260.000**		**1.045.260.000**		**1.045.260.000**		**1.045.260.000**		**5.226.300.000**	
1.22.1.20.18.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.045.260.000	1 keg	1.045.260.000	1 keg	1.045.260.000	1 keg	1.045.260.000	1 keg	1.045.260.000		5.226.300.000	Bubon
1.20.1.20.19	**KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK**			**1.560.660.000**		**1.560.660.000**		**1.560.660.000**		**1.560.660.000**		**1.560.660.000**		**7.803.300.000**	
1.22.1.20.19.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.560.660.000	1 keg	1.560.660.000	1 keg	1.560.660.000	1 keg	1.560.660.000	1 keg	1.560.660.000		7.803.300.000	Arongan Lambalek
1.20.1.20.20	**KECAMATAN WOYLA TIMUR**			**1.432.080.000**		**1.432.080.000**		**1.432.080.000**		**1.432.080.000**		**1.432.080.000**		**7.160.400.000**	
1.22.1.20.20.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.432.080.000	1 keg	1.432.080.000	1 keg	1.432.080.000	1 keg	1.432.080.000	1 keg	1.432.080.000		7.160.400.000	Woyla Timur
1.20.1.20.21	**KECAMATAN WOYLA BARAT**			**1.403.820.000**		**1.403.820.000**		**1.403.820.000**		**1.403.820.000**		**1.403.820.000**		**7.019.100.000**	
1.22.1.20.21.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.403.820.000	1 keg	1.403.820.000	1 keg	1.403.820.000	1 keg	1.403.820.000	1 keg	1.403.820.000		7.019.100.000	Woyla Barat
1.20.1.20.22	**KECAMATAN PANTON REU**			**1.075.260.000**		**1.075.260.000**		**1.075.260.000**		**1.075.260.000**		**1.075.260.000**		**5.376.300.000**	

1.22.1.20.22.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 keg	1 keg	1.075.260.000	1 keg	1.075.260.000	1 keg	1.075.260.000	1 keg	1.075.260.000	1 keg	1.075.260.000		5.376.300.000	Panton Reu
1.22.1.22.01	**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			**2.090.831.000**		**3.274.155.200**		**2.789.820.720**		**3.066.302.792**		**3.370.433.071**		**14.591.542.783**	
1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 keg	11 keg	703.902.000	11 keg	774.292.200	11 keg	851.721.420	11 keg	936.893.562	11 keg	1.030.582.918		4.297.392.100	BPM
1.22.1.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 keg	2 keg	60.330.000	2 keg	66.363.000	2 keg	72.999.300	2 keg	80.299.230	2 keg	88.329.153		368.320.683	BPM
1.22.1.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	BPM
1.22.1.22.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	BPM
1.22.1.22.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4 keg	4 keg	1.011.599.000	4 keg	1.917.500.000	4 keg	1.300.000.000	4 keg	1.430.000.000	4 keg	1.573.000.000		7.232.099.000	BPM
1.22.1.22.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	1 keg	1 keg	160.000.000	1 keg	176.000.000	1 keg	193.600.000	1 keg	212.960.000	1 keg	234.256.000		976.816.000	BPM
1.22.1.22.01.21	Program Peningkatan Kerjasama Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 keg	1 keg	150.000.000	1 keg	165.000.000	1 keg	181.500.000	1 keg	199.650.000	1 keg	219.615.000		915.765.000	BPM
1.22.1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				1 keg	150.000.000	1 keg	165.000.000	1 keg	181.500.000	1 keg	199.650.000		696.150.000	BPM
1.24	**KEARSIPAN**			**251.789.000**		**441.217.900**		**482.839.690**		**528.623.659**		**578.986.025**		**2.283.456.274**	
1.24.1.24.01	**KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**			**226.789.000**		**413.717.900**		**452.589.690**		**495.348.659**		**542.383.525**		**2.130.828.774**	
1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	156.679.000	10 keg	172.346.900	10 keg	189.581.590	10 keg	208.539.749	10 keg	229.393.724		956.540.963	Arpusda
1.24.1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 keg	4 keg	37.610.000	4 keg	41.371.000	4 keg	45.508.100	4 keg	50.058.910	4 keg	55.064.801		229.612.811	Arpusda
1.24.1.24.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Arpusda

	Aparatur														
1.24.1.24.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	Arpusda
1.24.1.24.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1 keg	1 keg	15.000.000	1 keg	90.000.000	1 keg	99.000.000	1 keg	108.900.000	1 keg	119.790.000		432.690.000	Arpusda
1.24.1.24.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1 keg	1 keg	12.500.000	1 keg	85.000.000	1 keg	93.500.000	1 keg	102.850.000	1 keg	113.135.000		406.985.000	Arpusda
2.02.2.02.01	**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**			**25.000.000**		**27.500.000**		**30.250.000**		**33.275.000**		**36.602.500**		**152.627.500**	
1.24.2.02.01.15	Program Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan	1 keg	1 keg	25.000.000	1 keg	27.500.000	1 keg	30.250.000	1 keg	33.275.000	1 keg	36.602.500		152.627.500	Dishutbun
1.25	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**441.021.275**		**705.623.403**		**776.185.743**		**853.804.317**		**939.184.749**		**3.715.819.486**	
1.07.1.07.01	**DINAS PERHUBUNGAN, DAN TELEKOMUNIKASI**			**122.105.500**		**134.316.050**		**147.747.655**		**162.522.421**		**178.774.663**		**745.466.288**	
1.25.1.07.01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Keg	1 Keg	38.862.000	1 Keg	42.748.200	1 Keg	47.023.020	1 Keg	51.725.322	1 Keg	56.897.854		237.256.396	Dishubtel
1.25.1.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Keg	1 Keg	52.126.000	1 Keg	57.338.600	1 Keg	63.072.460	1 Keg	69.379.706	1 Keg	76.317.677		318.234.443	Dishubtel
1.25.1.07.01.16	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1 Keg	1 Keg	31.117.500	1 Keg	34.229.250	1 Keg	37.652.175	1 Keg	41.417.393	1 Keg	45.559.132		189.975.449	Dishubtel
1.20.1.20.03	**SEKRETARIAT DAERAH**			**318.915.775**		**571.307.353**		**628.438.088**		**691.281.897**		**760.410.086**		**2.970.353.198**	
1.25.1.20.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3 keg	3 keg	318.915.775	3 keg	350.807.353	3 keg	385.888.088	3 keg	424.476.897	3 keg	466.924.586		1.947.012.698	Setdakab
1.25.120.03.18	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				2 Keg	70.500.000	2 Keg	77.550.000	2 Keg	85.305.000	2 Keg	93.835.500		327.190.500	Setdakab

1.25.1.20.03.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media				1 keg	150.000.000	1 keg	165.000.000	1 keg	181.500.000	1 keg	199.650.000		696.150.000	Setdakab
1.26	**PERPUSTAKAAN**			**309.700.000**		**453.170.000**		**498.487.000**		**548.335.700**		**603.169.270**		**2.412.861.970**	
1.24.1.24.01	**KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**			**309.700.000**		**453.170.000**		**498.487.000**		**548.335.700**		**603.169.270**		**2.412.861.970**	
1.26.1.24.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6 keg	6 keg	309.700.000	5 keg	340.670.000	5 keg	374.737.000	5 keg	412.210.700	5 keg	453.431.770		1.890.749.470	Arpusda
1.26.1.24.01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				1 keg	112.500.000	1 keg	123.750.000	1 keg	136.125.000	1 keg	149.737.500		522.112.500	Arpusda
1 . 20 . 23 . 01	**MPU**			**812.806.000**		**894.086.600**		**983.495.260**		**1.081.844.786**		**1.190.029.265**		**4.962.261.911**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 keg	733.225.000	10 keg	806.547.500	10 keg	887.202.250	10 keg	975.922.475	10 keg	1.073.514.723	10 keg	4.476.411.948	MPU
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6 keg	795.000	6 keg	87.539.100	6 keg	96.293.010	6 keg	105.922.311	6 keg	116.514.542	6 keg	485.849.963	MPU
1 . 20 . 25 . 01	**MPD**			**350.046.490**		**385.051.139**		**423.556.253**		**465.911.878**		**512.503.066**		**2.137.068.826**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 keg	255.218.090	10 keg	280.739.899	10 keg	308.813.889	10 keg	339.695.278	10 keg	373.664.806	10 keg	1.558.131.961	MPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2 keg	34.337.500	2 keg	37.771.250	2 keg	41.548.375	2 keg	45.703.213	2 keg	50.273.534	2 keg	209.633.871	MPD
	Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh		2 keg	60.490.900	2 keg	66.539.990	2 keg	73.193.989	2 keg	80.513.388	2 keg	88.564.727	2 keg	369.302.994	MPD
1 . 20 . 24 . 01	**MAA**			**472.128.350**		**519.341.185**		**571.275.304**		**628.402.834**		**691.243.117**		**2.882.390.790**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		9 keg	388.237.350	9 keg	427.061.085	9 keg	469.767.194	9 keg	516.743.913	9 keg	568.418.304	9 keg	2.370.227.845	MAA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4 keg	23.114.000	4 keg	25.425.400	4 keg	27.967.940	4 keg	30.764.734	4 keg	33.841.207	4 keg	141.113.281	MAA
	Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh		2 keg	60.777.000	2 keg	66.854.700	2 keg	73.540.170	2 keg	80.894.187	2 keg	88.983.606	2 keg	371.049.663	MAA
1 . 20 . 26 . 01	**BMK**			**7.403.822.400**		**8.144.204.640**		**8.958.625.104**		**9.854.487.614**		**10.839.936.376**		**45.201.076.134**	

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10 keg	476.244.500	10 keg	523.868.950	10 keg	576.255.845	10 keg	633.881.430	10 keg	697.269.572	10 keg	2.907.520.297	BMK
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3 keg	50.390.000	3 keg	55.429.000	3 keg	60.971.900	3 keg	67.069.090	3 keg	73.775.999	3 keg	307.635.989	BMK
	Program Pelayanan Kehidupan Beragama		1 keg	6.850.000.000	1 keg	7.535.000.000	1 keg	8.288.500.000	1 keg	9.117.350.000	1 keg	10.029.085.000	1 keg	41.819.935.000	BMK
	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan		1 keg	27.187.900	1 keg	29.906.690	1 keg	32.897.359	1 keg	36.187.095	1 keg	39.805.804	1 keg	165.984.848	BMK
2	**Urusan Pilihan**			**26.372.059.339**		**29.954.357.077**		**32.842.912.784**		**35.840.228.063**		**39.281.879.669**		**166.308.737.337**	
2.01	**PERTANIAN**			**10.120.667.801**		**11.877.184.581**		**12.553.003.039**		**13.797.803.343**		**15.167.083.677**		**63.515.742.442**	
2.01.2.01.01	**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**			**5.548.257.800**		**6.323.083.580**		**6.794.991.938**		**7.465.491.132**		**8.203.040.245**		**34.334.864.695**	
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Keg	13 Keg	457.955.980	12 Keg	503.751.578	12 Keg	554.126.736	12 Keg	609.539.409	12 Keg	670.493.350		2.795.867.053	Distannak
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Keg	1 Keg	40.000.000	3 Keg	174.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	44.000.000	1 Keg	48.400.000		346.400.000	Distannak
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000		120.000.000	Distannak
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Keg	2 Keg	65.000.000	2 Keg	71.500.000	2 Keg	78.650.000	2 Keg	86.515.000	2 Keg	95.166.500		396.831.500	Distannak
2.01.2.01.01.16	Program Penigkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2 Keg	2 Keg	364.240.000	2 Keg	400.664.000	2 Keg	440.730.400	2 Keg	484.803.440	2 Keg	533.283.784		2.223.721.624	Distannak
2.01.2.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4 Keg	4 Keg	4.329.711.820	4 Keg	4.762.683.002	4 Keg	5.238.951.302	4 Keg	5.762.846.432	4 Keg	6.339.131.076		26.433.323.632	Distannak
2.01.2.01.01.24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	1 Keg	1 Keg	40.000.000	1 Keg	44.000.000	1 Keg	48.400.000	1 Keg	53.240.000	1 Keg	58.564.000		244.204.000	Distannak
2.01.2.01.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1 Keg	1 Keg	108.750.000	1 Keg	119.625.000	1 Keg	131.587.500	1 Keg	144.746.250	1 Keg	159.220.875		663.929.625	Distannak
2.01.2.01.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2 Keg	2 Keg	67.600.000	2 Keg	74.360.000	2 Keg	81.796.000	2 Keg	89.975.600	2 Keg	98.973.160		412.704.760	Distannak

2.01.2.01.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1 Keg	1 Keg	75.000.000	1 Keg	82.500.000	1 Keg	90.750.000	1 Keg	99.825.000	1 Keg	109.807.500		457.882.500	Distannak
2.01.2.01.01.	Program Pembinaan Hukum Masyarakat				2 Keg	60.000.000	2 Keg	60.000.000	2 Keg	60.000.000	2 Keg	60.000.000		240.000.000	Distannak
2.01.2.01.02	**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**			**3.806.627.200**		**4.711.739.920**		**4.831.413.912**		**5.313.055.303**		**5.842.860.834**		**24.505.697.169**	
2.01.2.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	297.231.000	10 keg	326.954.100	10 keg	359.649.510	10 keg	395.614.461	10 keg	435.175.907		1.814.624.978	BPPKP
2.01.2.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 keg	5 keg	2.940.734.200	5 keg	3.234.807.620	5 keg	3.558.288.382	5 keg	3.914.117.220	5 keg	4.305.528.942		17.953.476.364	BPPKP
2.01.2.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 keg	1 keg	22.662.000	1 keg	24.928.200	1 keg	27.421.020	1 keg	30.163.122	1 keg	33.179.434		138.353.776	BPPKP
2.01.2.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	BPPKP
2.01.2.01.02.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3 keg	3 keg	195.000.000	3 keg	500.000.000	3 keg	200.000.000	3 keg	220.000.000	3 keg	242.000.000		1.357.000.000	BPPKP
2.01.2.01.02.16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	4 keg	4 keg	225.000.000	4 keg	247.500.000	4 keg	272.250.000	4 keg	299.475.000	4 keg	329.422.500		1.373.647.500	BPPKP
2.01.2.01.02.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1 keg	1 keg	20.500.000	1 keg	22.550.000	1 keg	24.805.000	1 keg	27.285.500	1 keg	30.014.050		125.154.550	BPPKP
2.01.2.01.02.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/peternakan/perikanan				1 keg	200.000.000	1 keg	220.000.000	1 keg	242.000.000	1 keg	266.200.000		928.200.000	BPPKP
2.01.2.01.02.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1 keg	1 keg	22.500.000	1 keg	50.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	60.500.000	1 keg	66.550.000		254.550.000	BPPKP
2.01.2.01.02.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2 keg	2 keg	78.000.000	2 keg	90.000.000	2 keg	99.000.000	2 keg	108.900.000	2 keg	119.790.000		495.690.000	BPPKP
2.02.2.02.01	**DINAS KEHUTANAN**			**765.782.801**		**842.361.081**		**926.597.189**		**1.019.256.908**		**1.121.182.599**		**4.675.180.578**	

	DAN PERKEBUNAN														
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1 keg	1 keg	704.782.801	1 keg	775.261.081	1 keg	852.787.189	1 keg	938.065.908	1 keg	1.031.872.499		4.302.769.478	Dishutbun
2.02.2.02.01.19	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2 keg	2 keg	61.000.000	2 keg	67.100.000	2 keg	73.810.000	2 keg	81.191.000	2 keg	89.310.100		372.411.100	Dishutbun
2.02	**KEHUTANAN**			**1.920.062.446**		**2.131.568.691**		**2.342.225.560**		**2.573.948.116**		**2.828.842.927**		**11.796.647.739**	
2.02.2.02.01	**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**			**1.920.062.446**		**2.131.568.691**		**2.342.225.560**		**2.573.948.116**		**2.828.842.927**		**11.796.647.739**	
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 keg	9 keg	234.735.000	9 keg	258.208.500	9 keg	284.029.350	9 keg	312.432.285	9 keg	343.675.514		1.433.080.649	Dishutbun
2.02.2.02.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 keg	5 keg	579.036.696	5 keg	636.940.366	5 keg	700.634.402	5 keg	770.697.842	5 keg	847.767.627		3.535.076.933	Dishutbun
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Dishutbun
2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	Dishutbun
2.02.2.02.01.16	Program Rehabilitas Hutan dan Lahan	5 keg	5 keg	976.460.000	5 keg	1.074.106.000	5 keg	1.181.516.600	5 keg	1.299.668.260	5 keg	1.429.635.086		5.961.385.946	Dishutbun
2.02.2.02.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	1 keg	1 keg	75.000.000	1 keg	82.500.000	1 keg	90.750.000	1 keg	99.825.000	1 keg	109.807.500		457.882.500	Dishutbun
2.02.2.02.01.23	Program Perencanaan dan Pengawasan	1 keg	1 keg	49.830.750	1 keg	54.813.825	1 keg	60.295.208	1 keg	66.324.728	1 keg	72.957.201		304.221.712	Dishutbun
2.03	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**6.113.212.292**		**5.859.075.325**		**6.852.482.857**		**7.263.231.143**		**7.859.054.257**		**33.947.055.874**	
	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI			**6.113.212.292**		**5.859.075.325**		**6.852.482.857**		**7.263.231.143**		**7.859.054.257**		**33.947.055.874**	
2.03.2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Keg	1 Keg	2.389.628.292	11 keg	2.628.591.121	11 keg	2.891.450.233	11 keg	3.180.595.257	11 keg	3.498.654.782	1 tahun	14.588.919.685	Distamben
2.03.2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				3 keg	515.342.934	3 keg	566.877.227	3 keg	623.564.950	3 keg	685.921.445	1 tahun	2.391.706.555	Distamben

2.03.2.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 tahun	60.000.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan	3 keg	3 keg	3.693.584.000	3 keg	2.000.000.000	3 keg	2.000.000.000	3 keg	2.000.000.000	3 keg	2.000.000.000	1 tahun	11.693.584.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.18	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 keg	1 keg	10.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	720.000.000	1 keg	720.000.000	1 keg	864.000.000	1 tahun	2.414.000.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1 keg	1 keg	20.000.000										20.000.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.19	Program Pengawasan bidang ketenagalistrikan				1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000	1 tahun	464.100.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.20	Program Sumber Daya Energi Baru terbarukan				1 Keg	300.000.000	1 keg	330.000.000		363.000.000		399.300.000	1 tahun	1.392.300.000	Distamben
2.03.2.03.01.01.	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang geologi dan SDM				3 Keg	156.573.010	3 Keg	172.230.311	3 Keg	189.453.342	3 Keg	208.398.676	1 tahun	726.655.339	Distamben
2.03.2.03.01.01.	Program Survey Geologi Umum, Geologi Tata Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam Geologi dan Inventarisasi Sumber Daya Minieral				1 Keg	33.568.260	1 Keg	36.925.086	1 Keg	40.617.595	1 Keg	44.679.354	1 tahun	155.790.295	Distamben
2.04	**PARIWISATA**			**245.976.200**		**270.573.820**		**297.631.202**		**327.394.322**		**360.133.754**		**1.501.709.299**	
1.17.1.17	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**			**245.976.200**		**270.573.820**		**297.631.202**		**327.394.322**		**360.133.754**		**1.501.709.299**	
1.17.1.17.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Wisata		1 keg	30.264.000	1 keg	33.290.400	1 keg	36.619.440	1 keg	40.281.384	1 keg	44.309.522		184.764.746	Disbudpar pora

1.01.1.01.01.28	Program Pengembangan Nilai-nilai Sejarah		1 keg	200.900.000	1 keg	220.990.000	1 keg	243.089.000	1 keg	267.397.900	1 keg	294.137.690		1.226.514.590	Disbudpar pora
1.17.1.17.01.	Program Pengembangan Destinasi Wisata		1 keg	14.812.200	2 keg	16.293.420	2 keg	17.922.762	2 keg	19.715.038	2 keg	21.686.542		90.429.962	Disbudpar pora
2.05	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**4.469.120.600**		**5.210.532.660**		**5.729.085.926**		**6.299.494.519**		**6.926.943.970**		**28.635.177.675**	
2.05.2.05.01	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**4.469.120.600**		**5.210.532.660**		**5.729.085.926**		**6.299.494.519**		**6.926.943.970**		**28.635.177.675**	
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 keg	10 keg	292.322.537	10 keg	321.554.791	10 keg	353.710.270	10 keg	389.081.297	10 keg	427.989.426		1.784.658.321	DKP
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 keg	5 keg	91.265.600	5 keg	100.392.160	5 keg	110.431.376	5 keg	121.474.514	5 keg	133.621.965		557.185.615	DKP
2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	10.000.000		40.000.000	DKP
2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	5.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	15.000.000		65.000.000	DKP
1.24.2.05.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0		0	DKP
2.05.2.05.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2 keg	2 keg	164.800.000	2 keg	181.280.000	2 keg	199.408.000	2 keg	219.348.800	2 keg	241.283.680		1.006.120.480	DKP
2.05.2.05.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	3 keg	3 keg	125.000.000	3 keg	137.500.000	3 keg	151.250.000	3 keg	166.375.000	3 keg	183.012.500		763.137.500	DKP
2.05.2.05.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4 keg	4 keg	1.588.675.000	4 keg	1.747.542.500	4 keg	1.922.296.750	4 keg	2.114.526.425	4 keg	2.325.979.068		9.699.019.743	DKP
2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4 keg	4 keg	935.498.000	4 keg	1.029.047.800	4 keg	1.131.952.580	4 keg	1.245.147.838	4 keg	1.369.662.622		5.711.308.840	DKP
2.05.2.05.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan	4 keg	4 keg	401.410.000	4 keg	441.551.000	4 keg	485.706.100	4 keg	534.276.710	4 keg	587.704.381		2.450.648.191	DKP

	Pemasaran Produksi Perikanan														
2.05.2.05.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	2 keg	2 keg	466.000.000	2 keg	512.600.000	2 keg	563.860.000	2 keg	620.246.000	2 keg	682.270.600		2.844.976.600	DKP
2.05.2.05.01.26	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2 keg	2 keg	145.500.000	2 keg	160.050.000	2 keg	176.055.000	2 keg	193.660.500	2 keg	213.026.550		888.292.050	DKP
2.05.2.05.01.27	Program Perencanaan dan Pengawasan	2 keg	2 keg	253.649.463	2 keg	279.014.409	2 keg	306.915.850	2 keg	337.607.435	2 keg	371.368.179		1.548.555.337	DKP
2.05.2.05.01.28	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan				2 keg	75.000.000	2 keg	82.500.000	2 keg	90.750.000	2 keg	99.825.000		348.075.000	DKP
2.05.2.05.01.29	Program Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Kelautan				3 keg	200.000.000	3 keg	220.000.000	3 keg	242.000.000	3 keg	266.200.000		928.200.000	DKP
2.06	**PERDAGANGAN**			**3.452.020.000**		**4.097.222.000**		**4.506.944.200**		**4.957.638.620**		**5.453.402.482**		**22.467.227.302**	
1.15.1.15.01	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			**3.452.020.000**		**4.097.222.000**		**4.506.944.200**		**4.957.638.620**		**5.453.402.482**		**22.467.227.302**	
2.06.1.15.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				1 keg	300.000.000	1 keg	330.000.000	1 keg	363.000.000	1 keg	399.300.000		1.392.300.000	Disperindagkop
2.06.1.15.01.18	Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3 keg	3 keg	3.327.020.000	3 keg	3.659.722.000	3 keg	4.025.694.200	3 keg	4.428.263.620	3 keg	4.871.089.982		20.311.789.802	Disperindagkop
2.06.1.15.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1 keg	1 keg	125.000.000	1 keg	137.500.000	1 keg	151.250.000	1 keg	166.375.000	1 keg	183.012.500		763.137.500	Disperindagkop
2.07	**INDUSTRI**			**30.000.000**		**483.000.000**		**531.300.000**		**584.430.000**		**642.873.000**		**2.271.603.000**	
1.15.1.15.01	**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			**30.000.000**		**483.000.000**		**531.300.000**		**584.430.000**		**642.873.000**		**2.271.603.000**	
2.07.1.15.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 keg	1 keg	30.000.000	1 keg	33.000.000	1 keg	36.300.000	1 keg	39.930.000	1 keg	43.923.000		183.153.000	Disperindagkop

2.07.1.15.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000		464.100.000	Disperindagkop
2.07.1.15.01.19	Program pengambangan sentra-sentra industri potensial				1 keg	50.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	60.500.000	1 keg	66.550.000		232.050.000	Disperindagkop
2.07.1.15.01.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM				1 keg	300.000.000	1 keg	330.000.000	1 keg	363.000.000	1 keg	399.300.000		1.392.300.000	Disperindagkop
2.08	**KETRANSMIGRASIAN**			**21.000.000**		**25.200.000**		**30.240.000**		**36.288.000**		**43.545.600**		**2.173.574.006**	
1.13.1.13.01	**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**			**21.000.000**		**25.200.000**		**30.240.000**		**36.288.000**		**43.545.600**		**2.173.574.006**	
2.08.1.13.01.16	Program Transmigrasi Lokal	1 Keg	1 Keg	21.000.000	1 Keg	25.200.000	1 Keg	30.240.000	1 Keg	36.288.000	1 Keg	43.545.600		2.173.574.006	Dinsosnakertrans
Jumlah			**271.629.315.727**		**313.851.951.371**		**340.744.408.929**		**380.507.815.201**		**439.659.071.403**		**1.746.331.144.030**		

Tabel 8.2.a
Plafon Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Sumber Dana : Otonomi Khusus (Otsus)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	
	Dinas Pendidikan														
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				6 keg	3.507.310.000	6 keg	3.858.041.000	6 keg	4.243.845.100	6 keg	4.668.229.610	6 keg	16.277.425.710	Disdik
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				5 keg	2.853.108.656	5 keg	3.138.419.522	5 keg	3.452.261.474	5 keg	3.797.487.621	5 keg	13.241.277.272	Disdik
	Program Pendidikan Menengah				9 keg	6.211.531.297	9 keg	6.832.684.427	9 keg	7.515.952.869	9 keg	8.267.548.156	9 keg	28.827.716.749	Disdik
	Program Pendidikan Non Formal / Luar Sekolah				1 keg	3.078.760.000	1 keg	3.386.636.000	1 keg	3.725.299.600	1 keg	4.097.829.560	1 keg	14.288.525.160	Disdik
	Program Peningkatan Mutu				1 keg	1.554.678.784	1 keg	1.710.146.662	1 keg	1.881.161.329	1 keg	2.069.277.462	1 keg	7.215.264.237	Disdik
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				2 keg	2.004.140.980	2 keg	2.204.555.078	2 keg	2.425.010.586	2 keg	2.667.511.644	2 keg	9.301.218.288	Disdik
	Dinas Syariat Islam Dan Pemberdayaan Dayah														
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Masjid/Dayah/Bale Seumebet)				5 keg	4.950.000.000	5 keg	5.445.000.000	5 keg	5.989.500.000	5 keg	6.588.450.000	5 keg	22.972.950.000	DSI
	Program Pengembangan Dayah Dan Balee Seumeubeut				2 keg	1.050.000.000	2 keg	1.155.000.000	2 keg	1.270.500.000	2 keg	1.397.550.000	2 keg	4.873.050.000	DSI
	Dinas Kesehatan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (mobiler puskesmas, pustu, poskesdes)				2 keg	450.000.000	2 keg	495.000.000	2 keg	544.500.000	2 keg	598.950.000	2 keg	2.088.450.000	Dinkes
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				4 keg	2.790.000.000	4 keg	3.069.000.000	4 keg	3.375.900.000	4 keg	3.713.490.000	4 keg	12.948.390.000	Dinkes
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				1 keg	310.000.000	1 keg	341.000.000	1 keg	375.100.000	1 keg	412.610.000	1 keg	1.438.710.000	Dinkes
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000	1 keg	464.100.000	Dinkes
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya				3 keg	5.165.000.000	3 keg	5.681.500.000	3 keg	6.249.650.000	3 keg	6.874.615.000	3 keg	23.970.765.000	Dinkes
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				2 keg	520.864.859	2 keg	572.951.345	2 keg	630.246.479	2 keg	693.271.127	2 keg	2.417.333.811	Dinkes
	Perencanaan dan Pengawasan				4 keg	200.000.000	4 keg	220.000.000	4 keg	242.000.000	4 keg	266.200.000	4 keg	928.200.000	Dinkes
	Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasrana Rumah Sakit				1 keg	3.000.000.000	1 keg	3.300.000.000	1 keg	3.630.000.000	1 keg	3.993.000.000	1 keg	13.923.000.000	RSUD CND
	Dinas Bina Marga														
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				16 keg	46.815.000.604	16 keg	51.496.500.664	16 keg	56.646.150.731	16 keg	62.310.765.804	16 keg	217.268.417.803	Bina Marga
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				2 keg	2.000.000.000	2 keg	2.200.000.000	2 keg	2.420.000.000	2 keg	2.662.000.000	2 keg	9.282.000.000	Bina Marga
	Dinas Cipta Karya Dan Pengairan														
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				2 keg	4.871.253.407	2 keg	5.358.378.748	2 keg	5.894.216.622	2 keg	6.483.638.285	2 keg	22.607.487.062	CKP
	Program Pengembangan Perumahan				3 keg	12.604.000.000	3 keg	13.864.400.000	3 keg	15.250.840.000	3 keg	16.775.924.000	3 keg	58.495.164.000	CKP
	Kantor Lingkungan Hidup														
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				3 keg	1.000.000.000	3 keg	1.100.000.000	3 keg	1.210.000.000	3 keg	1.331.000.000	3 keg	4.641.000.000	KLH
	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Sejahtera														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1 keg	150.000.000	1 keg	165.000.000	1 keg	181.500.000	1 keg	199.650.000	1 keg	696.150.000	PPKS
	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak				1 keg	100.000.000	1 keg	110.000.000	1 keg	121.000.000	1 keg	133.100.000	1 keg	464.100.000	PPKS
	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1 keg	500.000.000	1 keg	550.000.000	1 keg	605.000.000	1 keg	665.500.000	1 keg	2.320.500.000	Dinsosnakertrans
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja (pkptk)				1 keg	1.000.000.000	1 keg	1.100.000.000	1 keg	1.210.000.000	1 keg	1.331.000.000	1 keg	4.641.000.000	Dinsosnakertrans
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
	Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan				3 keg	1.500.000.000	3 keg	1.650.000.000	3 keg	1.815.000.000	3 keg	1.996.500.000	3 keg	6.961.500.000	BPBD
	Badan Pemberdayaan Masyarakat														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1 keg	2.000.000.000	1 keg	2.200.000.000	1 keg	2.420.000.000	1 keg	2.662.000.000	1 keg	9.282.000.000	BPM
	Dinas Pertanian Dan Peternakan														
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				1 keg	2.500.000.000	1 keg	2.750.000.000	1 keg	3.025.000.000	1 keg	3.327.500.000	1 keg	11.602.500.000	Distanak
	BP4K														
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1 keg	180.000.000	1 keg	198.000.000	1 keg	217.800.000	1 keg	239.580.000	1 keg	835.380.000	BP4K
	Program Peningkatan Ketahanan pangan				2 keg	450.000.000	2 keg	495.000.000	2 keg	544.500.000	2 keg	598.950.000	2 keg	2.088.450.000	BP4K
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				1 keg	120.000.000	1 keg	132.000.000	1 keg	145.200.000	1 keg	159.720.000	1 keg	556.920.000	BP4K
	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	Target	Otsus Rp	
	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan				8 keg	8.000.000.000	8 keg	8.800.000.000	8 keg	9.680.000.000	8 keg	10.648.000.000	8 keg	37.128.000.000	Dishutbun
	Dinas Kelautan Dan Perikanan														
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar				2 keg	700.000.000	2 keg	770.000.000	2 keg	847.000.000	2 keg	931.700.000	2 keg	3.248.700.000	DKP
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				1 keg	250.000.000	1 keg	275.000.000	1 keg	302.500.000	1 keg	332.750.000	1 keg	1.160.250.000	DKP
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				2 keg	550.000.000	2 keg	605.000.000	2 keg	665.500.000	2 keg	732.050.000	2 keg	2.552.550.000	DKP
	Dinas Pertambangan Dan Energi														
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi				2 keg	1.500.000.000	2 keg	1.650.000.000	2 keg	1.815.000.000	2 keg	1.996.500.000	2 keg	6.961.500.000	Distamben
	Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga														
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				4 keg	1.500.000.000	4 keg	1.650.000.000	4 keg	1.815.000.000	4 keg	1.996.500.000	4 keg	6.961.500.000	Disbudpora
	Total Otsus					126.035.648.587		138.639.213.446		152.503.134.790		167.753.448.269		584.931.445.092	

8.3. Distribusi Kebutuhan Pendanaan berdasarkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat

Tabel 8.3.
Distribusi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2013-2017

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat	2013		2014		2015		2016		2017	
		Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%
1	**Reformasi Pemerintahan**	**103.000.308.335**	**37,92**	**123.252.909.887**	**28,02**	**127.733.960.622**	**26,65**	**138.425.057.186**	**25,97**	**161.531.811.032**	**26,59**
	APBK (diluar otsus)	103.000.308.335	37,92	120.402.909.887	27,37	124.598.960.622	25,99	134.976.557.186	25,32	157.738.461.032	25,97
	Otsus			2.850.000.000	0,65	3.135.000.000	0,65	3.448.500.000	0,65	3.793.350.000	0,62
2	**Peningkatan Perekonomian Daerah**	**14.477.488.481**	**5,33**	**31.791.613.929**	**7,23**	**34.679.289.522**	**7,23**	**38.222.035.514**	**7,17**	**42.139.819.515**	**6,94**
	APBK (diluar otsus)	14.477.488.481	5,33	18.041.613.929	4,10	19.554.289.522	4,08	21.584.535.514	4,05	23.838.569.515	3,92
	Otsus			13.750.000.000	3,13	15.125.000.000	3,16	16.637.500.000	3,12	18.301.250.000	3,01
3	**Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan**	**29.266.460.790**	**10,77**	**51.422.636.586**	**11,69**	**56.564.900.245**	**11,80**	**62.221.390.268**	**11,67**	**68.443.529.297**	**11,27**
	APBK (diluar otsus)	29.266.460.790	10,77	32.213.106.869	7,32	35.434.417.556	7,39	38.977.859.311	7,31	42.875.645.243	7,06
	Otsus			19.209.529.717	4,37	21.130.482.689	4,41	23.243.530.958	4,36	25.567.884.053	4,21
4	**Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**22.846.731.034**	**8,41**	**40.838.080.854**	**9,28**	**51.525.344.941**	**10,75**	**65.646.379.368**	**12,32**	**85.572.766.750**	**14,09**
	APBK (diluar otsus)	22.846.731.034	8,41	28.502.215.995	6,48	37.955.893.596	7,92	50.719.982.889	9,52	69.153.730.623	11,38
	Otsus			12.335.864.859	2,80	13.569.451.345	2,83	14.926.396.479	2,80	16.419.036.127	2,70
5	**Sarana dan Prasarana**	**69.971.235.337**	**25,76**	**144.260.920.482**	**32,79**	**158.461.553.140**	**33,06**	**173.964.972.454**	**32,64**	**190.663.275.500**	**31,39**
	APBK (diluar otsus)	69.971.235.337	25,76	76.470.666.471	17,38	83.892.273.728	17,50	91.938.765.101	17,25	100.434.447.411	16,53
	Otsus			67.790.254.011	15,41	74.569.279.412	15,56	82.026.207.353	15,39	90.228.828.089	14,85
6	**Pelaksanaan Dinul Islam**	**23.911.006.900**	**8,80**	**31.604.357.640**	**7,18**	**33.880.905.957**	**7,07**	**36.340.914.732**	**6,82**	**39.000.520.295**	**6,42**
	APBK (diluar otsus)	23.911.006.900	8,80	25.604.357.640	5,82	27.280.905.957	5,69	29.080.914.732	5,46	31.014.520.295	5,11
	Otsus			6.000.000.000	1,36	6.600.000.000	1,38	7.260.000.000	1,36	7.986.000.000	1,31

7	**Pengurangan Resiko Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	**6.539.829.850**	**2,41**	**11.428.920.580**	**2,60**	**12.616.272.408**	**2,63**	**13.984.051.374**	**2,62**	**15.511.638.579**	**2,55**
	APBK (diluar otsus)	6.539.829.850	2,41	8.928.920.580	**2,03**	9.866.272.408	**2,06**	10.959.051.374	**2,06**	12.184.138.579	**2,01**
	Otsus			2.500.000.000	**0,57**	2.750.000.000	**0,57**	3.025.000.000	**0,57**	3.327.500.000	**0,55**
8	**Peningkatan Peran Perempuan, Pemuda dan Olahraga**	**1.616.255.000**	**0,60**	**5.288.160.000**	**1,20**	**3.921.395.540**	**0,82**	**4.206.149.094**	**0,79**	**4.549.158.704**	**0,75**
	APBK (diluar otsus)	1.616.255.000	0,60	3.688.160.000	0,84	2.161.395.540	0,45	2.270.149.094	0,43	2.419.558.704	0,40
	Otsus			1.600.000.000	0,36	1.760.000.000	0,37	1.936.000.000	0,36	2.129.600.000	0,35
	Total Pagu	**271.629.315.727**	**100,00**	**439.887.599.958**	**100,00**	**479.383.622.374**	**100,00**	**533.010.949.991**	**100,00**	**607.412.519.672**	**100,00**

BAB IX
INDIKATOR KINERJA
KABUPATEN ACEH BARAT

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	$\frac{PDRB_{(y+1)} - PDRB_{(y)}}{PDRB_{(y)}} \times 100\%$	5,24	5,44	5,64	5,74	5,94	6,10	6,10
1.2.	Laju inflasi (%)	$[(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_3)]^{1/3}] - 1$	6,00	4,83	5,40	4,74	4,22	4,01	4,01
1.3.	PDRB per kapita (Juta)	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	7,53	7,88	8,23	8,58	8,93	9,40	9,40
1.4.	Indeks Gini (%)	$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i (Q_i + Q_{i-1})$	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,26
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia (%)	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,9	0,9
1.6.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	(100 – angka kemiskinan)	23,81	22,43	21,15	19,87	18,50	17,23	17,23
1.7.	IPM		71,81	72,46	73,11	73,76	74,41	75,06	75,06

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.8.	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100{,}000$	10,73	13,81	25,06	22,53	21,76	18,73	18,73
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Angka melek huruf	$LIT^{t}_{tahun} = \frac{P^{t}_{tahun}}{P^{t}_{tahun}} \times 100$	95,91	96,15	96,39	96,63	96,87	97,11	97,11
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	8,50	8,72	8,81	9,00	10,26	11,00	11,00
1.3.	**Angka partisipasi kasar**	$APK^{t}_{n} = \frac{E^{t}_{n}}{P^{t}_{tahun}} \times 100$							
	APK SD/MI/Paket A		109,45	110,38	111,31	112,24	113,17	114,10	114,10
	APK SMP/MTs/Paket B		99,03	99,19	99,35	99,51	99,67	99,83	99,83
	APK SMA/SMK/		92,53	93,78	95,02	96,27	97,51	98,76	98,76
1.4.	**Angka pendidikan yang ditamatkan**	$APT^{t}_{n} = \frac{P^{t}_{n}}{P^{t}} \times 100$							
	Tamat SD dan SLTP		98,85	95,44	97,10	100	100	100	100
	Tamat SLTA keatas		81,44	84,73	88,84	88,95	89,20	90,70	90,70
1.5.	**Angka Kelulusan (%)**								
	SD/MI/Paket A		95.55	96.29	97.03	97.77	98.51	99.25	99.25

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
	SMP/MTs/Paket B		99.14	99.28	99.42	99.56	99.7	99.84	99.84
	SMA/SMK/MA/ Paket C		98.50	99.04	99.23	99.42	99.61	99.80	99.80
1.6.	**Angka Partisipasi Murni (APM)**	$APM_n^p = \frac{P_{n,s}^p}{P_{n,s}^p} \times 100$							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	95.80	96.50	97.20	97.90	98.60	99.30	99.30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	73.52	75.43	77.34	79.25	81.16	83.07	83.07
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	72.75	75.11	77.47	79.83	82.19	84.55	84.55
1.7.	**Angka Melanjutkan Sekolah (%)**								
	SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B		110,58	137,88	113,46	110,10	114,12	115,00	115,00
	SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C		116,18	138,11	126,43	107,00	109,16	117,24	117,24
2.	**KESEHATAN**								
2.1.	Angka Kematian bayi	$AKB = \frac{D_{0-1\,th}}{\Sigma \text{LahirHidup}} \times 1000$	19	18	17	16	15	14	14

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
2.2.	Angka usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,97	70,01	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
2.3.	Persentase balita gizi buruk (yang ditimbang)	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	0,085	0,078	0,071	0,064	0,058	0,051	0,051
3.	**Pertanahan**								
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk	80 %	85%	87%	89%	90%	92%	92%
4.	**Ketenagakerjaan**								
4.1	Rasio penduduk yang bekerja	$\text{Rasio penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1.	Kebudayaan								
1.1.	Jumlah grup kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,3	3,3
1.2.	Jumlah gedung	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
2.	Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	a. Jumlah klub olahraga	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	1,18	1,23	1,44	1,52	1,62	1,71	1,71

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
	b. Jumlah gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,11	0,11	0,17	0,22	0,27	0,27	0,27
ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	**Pendidikan**	**Pendidikan**							
1.1	Pendidikan dasar:	Pendidikan dasar:							
1.1.1	**Angka partisipasi sekolah**								
1.1.2	APM SD/MI/Paket A (%)	$APS_n = \frac{P_{na}}{P_{na}} \times 1.000$	98,55	98,63	98,70	98,78	98,85	98,93	98,93
1.1.3	SMP/MTs/Paket B (%)		93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
1.1.4	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (usia 13 s.d 15) thn}} \times 10.000$	79,26	80,21	81,16	82,11	83,06	84,01	84,01
1.1.5	Rasio guru/murid	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
1.1.6	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1.000$	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1.2	**Pendidikan menengah:**	**:**							
1.2.1	Angka partisipasi sekolah (APS SMA/SMK/MA/Paket C) (%)	$APS_{16-18} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-18 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 thn}} \times 1.000$	81,64	82,53	83,42	84,31	85,1	86,09	86,09

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16 s/d 18)thn}} \times 10.000$	39,61	41,34	43,07	44,80	46,53	48,26	48,26
1.2.3	Rasio guru terhadap murid	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$	1:9	1:9	1:10	1:11	1:13	1:14	1:14
1.2.4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$	1:9	1:9	1:10	1:11	1:13	1:14	1:14
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	94,74	95,28	95,82	96,36	96,90	97,44	97,44
1.3	**Fasilitas Pendidikan:**								
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	45,76	49,80	53,84	57,88	61,92	65,96	65,96
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/ SMK/ MA}} \times 100\%$	53,84	57,88	61,92	65,96	65,96	70,92	70,92
1.4	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):**								
1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Pendidikan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100\%$	43,08	47,56	52,04	56,52	61,00	65,48	65,48
1.5	**Angka Putus Sekolah:**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,11	0,091	0,072	0,053	0,034	0,015	0,015
1.5.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/ MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,07	0,059	0,048	0,037	0,026	0,015	0,015
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,59	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,25
1.6	**Angka Kelulusan:**								
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	95,55	96,29	97,03	97,77	98,51	99,25	99,25
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99,14	99,28	99,42	99,56	99,70	99,84	99,84
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	98,85	99,04	99,23	99,42	99,61	99,80	99,80
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	110.58	100	100	100	100	100	100
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	116.18	117	118	118,23	119	120	120

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru terdapat kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	48,52	49,6	50,68	51,76	52,84	53,92	53,92
2.	**Kesehatan**								
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$	18	18	17	17	16	16	16
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,80	0,78	0,80	0,86	0,91	0,96	0,96
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39
2.5.	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	5,80	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,4
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	60	70	80	90	95	100	100
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	60	70	80	90	90	95	95

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\%$	52,4	85	90	95	100	100	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	23,6	75	75	75	75	75	75
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Rujukan}}{\text{Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	63,8	85	90	90	90	90	90
2.14.	Cakupan puskesmas (%)	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$	108	108	108	108	108	108	108

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas (%)	$\frac{\text{Jumlah pembantu puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	15	15	15	15	15	15	15
3.	**Pekerjaan Umum**								
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	0,51	0,53	0,55	0,56	0,58	0,60	0,60
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi (Ha) dan %	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	6.500 Ha (35,62 %)	8.849 (48,50 %)	11.198 Ha (61,38 %)	13.547 Ha (74,26 %)	15.896 Ha (87,14 %)	18.246 Ha (100 %)	18.246 Ha (100 %)
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100$	50	55	60	65	75	100	100
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$	506,95	506,95	506,95	507	507	507	507
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$	0,211	0,304	0,396	0,485	0,573	0,660	0,660
3.7.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3.8.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan (Km)}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,0050	0,0051	0,0052	0,0053	0,0054	0,0055	0,0055
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang telah dilalui kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	50,99	52,80	54,61	56,42	58,23	60,03	60,03
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \times 100\%$	10%	10,5%	11%	11,5%	12%	12,5%	12,5%
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	$\frac{\text{Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)}} \times 100\%$	15%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Ha)	$\frac{\text{Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$	10%	9,4%	9,1%	8,6%	8,2%	7,8%	7,8%

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	35	45	60	75	85	100	100
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$	10%	10,5%	11%	11,5%	12%	12,5%	12,5%
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	6.500 Ha (35,62 %)	8.849 Ha (48,50 %)	11.198 Ha (61,38 %)	13.547 Ha (74,26 %)	15.896 Ha (87,14 %)	18.246 Ha (100 %)	18.246 Ha (100 %)
3.18.	Lingkungan Pemukiman	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	84,65	86,60	88,80	90,00	90,95	92,00	92,00
4.	**Perumahan**								
4.1.	Persentase Rumah tangga berakses air bersih (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	46,33	47,83	49,33	50,83	52,33	53,83	53,83
4.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	95,23	96,20	96,80	97.12	97,48	98,10	98,10
4.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	50	55	60	65	75	100	100

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh ibukota Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas lingkungan pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	15,35	13,40	11,20	10,00	9,05	8,00	8,00
4.5.	Rumah layak huni (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	50	55	60	65	75	85	85
5.	**Penataan Ruang**								
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$	0,28	0,34	0,49	0,54	0,60	0,66	0,66
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$	10	11	12	13	14	15	15
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Perencanaan Pembangunan**								
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Qanun)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	25	60	70	80	90	95	95
7.	**Perhubungan**								
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	76.764	81.733	85.818	94.398	103.836	114.222	114.222
7.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,00051	0,00055	0,00059	0,00065	0,00068	0,00074	0,00074
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	1.963	2.061	2.164	2.272	2.386	2.505	2.505

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	6	6	6	6	6
7.5.	Angkutan darat (%)	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	0,19	0,19	0,19	0,22	0,25	0,30	0,30
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tlah memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \times 100\%$	0	1,85	3,81	5,32	6,43	8,90	8,90
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum (Hari)	15	15	14	13	13	12	12
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
8.	**Lingkungan Hidup**								
8.1.	Persentase penanganan sampah (%)	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$	30	35	40	50	60	70	70
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	84,49	85,06	85,62	86,18	86,74	86,74	86,74

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area pemukiman tertata}}{\text{Luas area pemukiman keseluruhan}} \times 100$	84,7	86,6	88,8	90,0	91,0	92,0	92,0
8.4.	Pencemaran status mutu air	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau Industri dan sumber data air yang dipantau mutuelinya}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau Industri dan sumber mata air}} \times 100\%$	5	10	20	25	35	45	45
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	$\frac{\text{Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100\%$	10	30	40	50	60	70	70
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (Unit)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL}} \times 100\%$	60,0	63,0	65,5	67,7	71,9	67,6	67,6
8.7.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (Unit)	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	0,021	0,030	0,040	0,049	0,57	0,66	0,66
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pada}}{\text{Jumlah kasus lingk.yang ada}} \times 100\%$	80	82	84	86	88	90	90
9.	**Pertanahan**								
9.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
9.2.	Penyelesaian izin lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100\%$	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
10.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**								
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jml penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	0,80	0,85	0,90	0,95	100	100	100
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Bayi Berakte X 100\%}}{\text{Jumlah Bayi}}$	0,58	0,72	0,77	0,82	0,87	0,92	0,92
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	80	85	90	95	96	97	97
10.4.	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$	80	85	90	95	100	100	100
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumah penduduk}} \times 100\%$	42	47	52	57	62	67	67
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
11.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	10%	12%	14%	15%	16%	20%	20%
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	27%	28%	29%	30%	31%	32%	32%
11.3.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	0,066	0,058	0,054	0,0551	0,043	0,035	0,035
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	40,50	41,14	42,06	43,24	44,00	45,15	45,15
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100\%$	80	80	100	100	100	100	100
12.	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$	3	3	2	2	2	2	2
12.2.	Rasio akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	62,96	63,04	63,12	63,20	63,28	63,37	63,37
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	23,71	30,40	37,09	43,78	50,47	57,18	57,18
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	49,1	48,1	47,0	46,0	45,0	44,0	44,0
13.	**Sosial**								
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah.	5	5	5	5	6	6	6
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	60	65	70	75	80	85	85
14.	**Ketenagakerjaan**								
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	$\frac{\text{Angkatan kerja 18 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas}} \times 100$	65,47	65,48	65,50	65,52	65,54	65,56	65,56

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$	35	30	25	20	15	10	10
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$	64,52	64,60	64,75	64,96	65,23	65,58	65,58
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	69,09	69,59	70,09	70,59	71,09	71,59	71,59
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	6,22	6,05	5,88	5,71	5,54	5,37	5,37
14.6.	Keselamatan dan perlindungan (%)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n}} \times 100\%$	50	75	80	85	90	90	90
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan pemda}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**								
15.1.	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	50	55	60	65	75	80	80
15.2.	Persentase koperasi sehat		20	30	45	60	70	80	80
	Kategori Sehat (%)		20	40	50	60	75	80	80
	Kategori Cukup Sehat (%)		15	25	40	45	50	55	55

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
15.3.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	30	35	40	45	50	55	55
15.4.	Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM aktif	5	5	6	7	8	9	9
15.5.	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	30	35	40	45	50	55	55
16.	**Penanaman Modal**								
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	14	15	16	17	18	19	19
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (M)	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	200	300	320	330	350	400	400
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	14,3	14,5	14,7	14,9	15,0	15,3	15,3
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$	154,57	185,48	222,58	267,10	320,52	384,62	384,62
17.	**Kebudayaan**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	0	1	1	1	1	4
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	0	1	1	1	1	4
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) (jumlah situs=13)	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	23,08	23,08	43,50	60,00	75,50	100	100
18.	**Kepemudaan dan Olahraga**								
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	45	45	48	55	59	63	63
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga	21	24	27	30	35	40	40
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	4	5	6	7	8	8
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	5	5	5	6	7	8	8
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
18.6.	Lapangan olahraga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
19.	**Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1	1	5
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	4	3	4	3	3	4	17
19.3	Jumlah LSM	Jumlah LSM yang aktif	7	7	7	7	7	7	35
20.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	2,81	2,81	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	94	94	94	94	94	94	94
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah pos siskamling}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	Ada tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
20.5.	Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah penegakan PERDA}} \times 100\%$	80	84	86	89	92	95	95

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
20.6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	27,59	29,13	29,95	32	37	40,00	40,00
20.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$	40	45	50	55	60	65	65
20.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah petugas perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	$\frac{\text{Jumlah mobil pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	0,0023	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0032	0,0032
20.10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<14 Jam setelah pendaftaran)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	80	90	90	90	90	90	90
20.11	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$	20,87	20,87	23,99	27,73	31,46	35,20	35,20
20.12	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	3	3	4	4	4	4	4

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
20.13	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.	**Ketahanan Pangan**								
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Ketersediaan pangan utama (%)	$\frac{\text{Rata-2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	27.109	29.045	31.119	35.875	38.436	39.045	39.045
22.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	4,27	4,27
22.3.	LPM Berprestasi (%)	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	0	0,47	0,93	1,40	1,87	2,34	2,34
22.4.	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	76	79	83	86	90	95	95
22.5.	Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100\%$	15	18	20	25	30	40	40

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
22.6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100\%$	25	35	45	55	60	65	65
22.7.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	$\frac{\text{program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	50	55	60	65	70	75	75
23.	**Statistik**								
23.1.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	**Kearsipan**	**Kearsipan**							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	23%	29%	36%	45%	55%	64%	64%
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1	1	5
25.	**Komunikasi dan Informatika**								
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	$\frac{\text{Jumlah jaringan telepon genggam disebarkan}}{}$	50	57	60	64	66	68	68

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	$\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,029	0,031	0,034	0,034	0,035	0,037	0,037
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	8	10	12	15	17	20	20
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah	6	6	8	10	11	12	12
25.5.	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25.6.	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26.	**Perpustakaan**								
26.1.	Jumlah perpustakaan (Kab)	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56	56	56
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg akan dilayani}}$	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di Perpustakaan daerah}}$	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1.	**Pertanian**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)}} \times 100\%$	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,6	5,6
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	27,09	27,59	28,09	28,59	29,09	29,59	29,59
1.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	14,06	15,06	16,04	16,70	17,10	17,30	17,30
1.4	Cakupan bina kelompok petani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pada Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	75,54	79,31	79,50	79,51	79,51	75,54	75,54
2.	**Kahutanan**								
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	11,73	11,78	11,84	11,89	11,95	12,01	12,01
2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	4,51	4,73	4,97	5,22	5,48	5,75	5,75
2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	2,99	2,99
3.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
3.1	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Pertambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area pertambangan yang liar}} \times 100\%$	57,54	62,54	67,54	72,54	77,54	82,54	82,54

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	0,55	0,55	0,64	0,73	0,82	0,91	0,91
4.	**Pariwisata**								
4.1	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	6.094	7.324	8.545	9.765	10.986	12.207	12.207
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Kelautan dan Perikanan**								
5.1	Produksi perikanan (ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	79,42	81,27	83,17	85,12	91,26	97,84	97,84
5.2	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	91,5	93,6	95,8	98,0	99,0	100,0	100,0
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pada Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$	40,58	41,98	41,98	43,31	45,25	47,27	47,27
5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	27,00
6.	**Perdagangan**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	32	33	34	35	35	36	36
6.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	42	52	62	72	82	92	92
7.	**Perindustrian**								
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	1,49	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,55
7.2	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)(**)}}{\text{Jumlah Industri/d Tahun n}} \times 100\%$	10	12	15	18	18	20	20
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$	20	25	30	35	40	45	45
8.	**Ketransmigrasian**								
8.1	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigrasi}} \times 100\%$	3,70	3,26	9,24	8,56	6,82	9,24	9,24
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$	3.433.448	3.883.248	4.333.048	4.782.848	5.232.648	5.682.448	5.682.448
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$	47,57	49,32	51,70	52,82	54,57	56,32	56,32
1.3	Produktivitas total daerah	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Bawi}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$	40.356.751	41.272.610	42.209.253	43.167.153	44.146.791	45.148.661	45.148.661
2.	**Pertanian**								
2.1	Nilai tukar petani (%)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (IT)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (IB)}} \times 100$	105	106	107	108	109	110	110
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur									
1.	**Perhubungan**								
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	113.088	124.397	130.617	137.148	144.005	151.206	151.206
1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	76.764	81.733	85.818	94.398	103.836	114.222	114.222
2.	**Penataan Ruang**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Penataan}} \times 100$	0	30	40	50	60	70	70
2.2	Luas wilayah produktif	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah produktif}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah tediRaya}} \times 100$	81,85	83,86	85,96	88,11	90,31	92,57	92,57
2.3	Luas wilayah industri	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah tediRaya}} \times 100$	0,053	0,053	0,058	0,064	0,070	0,077	0,077
2.4	Luas wilayah kebanjiran	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah kebanjiran}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah tediRaya}} \times 100$	20,44	20,45	19,42	18,45	17,53	16,65	16,65
2.5	Luas wilayah kekeringan	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Kekeringan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah tediRaya}} \times 100$	7,74	7,35	6,98	6,63	6,30	5,98	5,98
2.6	Luas wilayah perkotaan	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah Perkotaan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah tediRaya}} \times 100$	1,63	1,80	1,98	2,18	2,39	2,63	2,63
3.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya	7	7	7	7	7	7	7
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya	4	4	4	4	4	4	4
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas	10	12	13	15	16	17	17
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas	10	10	11	12	13	13	13
4.	**Lingkungan Hidup**								

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
4.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	25,24	25,64	26,55	27,49	28,77	29,95	29,95
5.	**Komunikas dan Informatika**								
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	95,23	96,20	96,80	97.12	97,48	98,10	98,10
5.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	81,13	81,23	81,33	81,43	81,53	81,63	81,63
Fokus Iklim Berinvestasi									
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
1.1	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk sebelumnya}} \times 100.000$	14,9	15,9	14,4	13,0	13,9	14,9	14,9
1.2	Jumlah demo	Jumlah demo dalam 1 tahun	3	4	5	6	6	6	6
1.3	Lama proses perijinan	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	3	3	3	3	3	3	3
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	12	12	13	13	13	13	13

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	2	3	4	5	6	6
1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan berawasa mbada}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 100,000$	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408
Fokus Sumber Daya Manusia									
1.	**Ketenagakerjaan**								
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100,000$	0,37	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
1.2	Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia <15 tahun/>64}}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$	71,52	71,57	71,62	71,67	71,72	71,77	71,77
2.	**Fokus Mitigasi Bencana**								
2.1	Evakuasi Korban Bencana (%)	$\frac{\text{Korban Bencana Yang dapat dievakuasi}}{\text{Korban Bencana yang butuh dievakuasi}} \times 100$	9,69	10,25	10,81	11,37	11,93	12,49	12,49
2.2	Jumlah Relawan Bersertifikasi (orang)	Jumlah Relawan	1.123	1.298	1.473	1.648	1.823	2.000	2.000
2.3	Gedung evakuasi (bencana gempa/tsunami) (%)	$\frac{\text{Gedung yang ada}}{\text{Jumlah Kebutuhan Gedung}} \times 100$	31,43	45,71	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2.4	Rasio Sekolah Siaga Bencana	$\frac{\text{Jumlah SSB yang dilatih}}{\text{Jumlah Sekolah yang butuh pelatihan}} \times 100$	24,28	38,57	52,86	67,14	81,43	95,71	95,71

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3.	**Fokus Dinul Islam**								
3.1	Cakupan pembinaan tenaga keagamaan (%)	Jumlah tenaga keagamaan yang dibina / Jumlah tenaga keagamaan yang tersedia x 100	25	30	35	40	45	50	50
3.2	Cakupan pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Jumlah Sarana Prasarana yang telah dibina / Jumlah Sarana Prasarana yang ada x 100	25	30	35	40	45	50	50
3.3	Cakupan dakwah agama bagi masyarakat (%)	Jumlah dakwah keagamaan/ Jumlah Majelis yg seharusnya ada x 100	10	15	20	25	30	35	35
3.4	Cakupan penegakan Dinul Islam (%)	Jumlah Pelanggaran yang Dieksekusi/ Jumlah Pelanggaran Syariat x 100	13	15	17	19	21	23	23

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati dan wakil Bupati terpilih selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2013 hingga tahun 2017.

10.1. Pedoman Masa Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 ini dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 kemudian menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya dokumen RPJM ini.

Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Kabupaten Aceh Barat dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2013 hingga tahun 2017.
b. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Aceh Barat dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat serta masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2017 sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai.
c. Bupati Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah

selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkewajiban untuk menyusun kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian arah kebijakan yang telah diamanatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017. Rencana Strategis SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Aceh Barat.

BAB XI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRK dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam periode tersebut.

Untuk dapat mewujudkan visi bupati dan wakil bupati terpilih: "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH BARAT YANG MAKMUR, SEHAT DAN BERWAWASAN"** maka perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis, (2) *Good and Clean Governance*, (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (4) keberpihakan kepada rakyat, (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta, serta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat sangat diharapkan untuk dapat mewujudkan masyarakat Aceh Barat yang makmur, sehat dan berwawasan.

BUPATI ACEH BARAT,

H. T. ALAIDINSYAH